

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders*

dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
2. orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
3. penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut:

1. analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
5. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
6. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Untuk penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal tersebut dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipunakan belum masuk ke Bappeda dan untuk penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP, program strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Propinsi baru sebatas tema dan prioritas, hal tersebut disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Penutup.

Rancangan awal dikonsultasi publikasi untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja perangkat daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Laut dan penyesuaian dengan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pemerintah maupun propinsi.

d. Pelaksanaan musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah agar dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

f. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Propinsi Kalimantan Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, propinsi dan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi

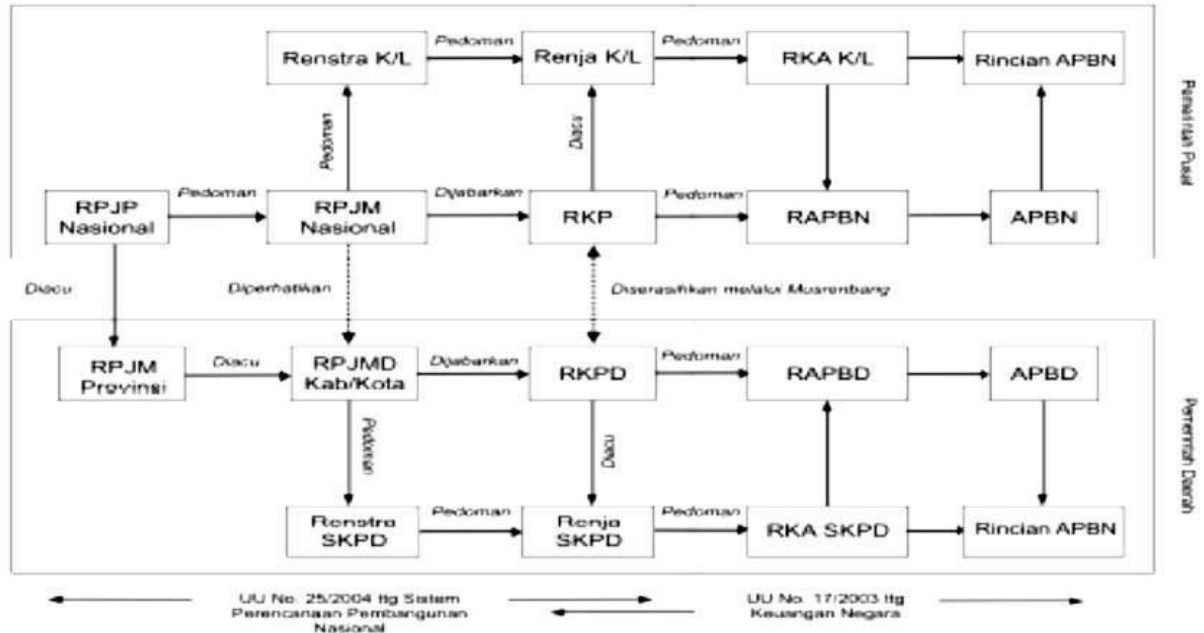
- Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3).
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Tanah Laut akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2020 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

VII. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian Selatan. Kabupaten Tanah Laut tidak berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan harus menempuh jarak kurang lebih 65 km untuk mencapainya. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat 114°30'54,663"-115°22'38,535" Bujur Timur dan 3°30'37,586"-4°10'41,134" Lintang Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 384.852 ha dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

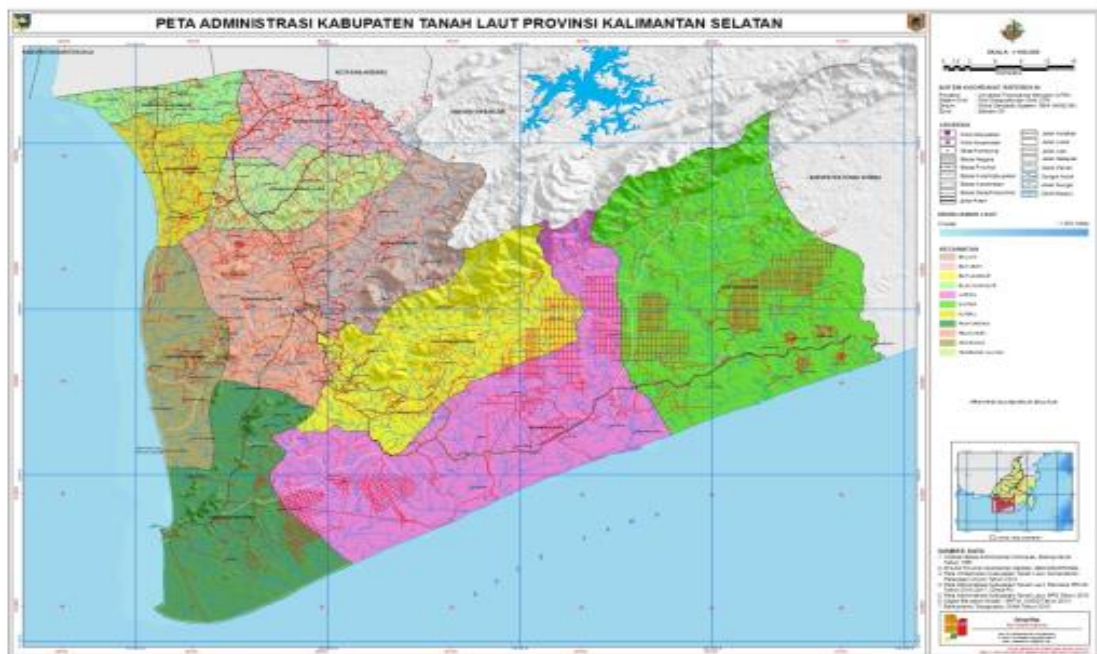
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Jorong	81.639	21,2
2.	Kintap	76.319	19,8
3.	Batu Ampar	45.908	11,9
4.	Panyipatan	40.613	10,6
5.	Pelaihari	31.871	8,3
6.	Bajuin	26.529	6,9
7.	Takisung	21.652	5,6
8.	Bati-bati	20.021	5,2
9.	Tambang Ulang	17.464	4,5
10.	Kurau	13.294	3,5
11.	Bumi Makmur	9.542	2,5
Kabupaten Tanah Laut		384.852	100,0%

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut

Dari 11 kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian

jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
2.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
3.	Kurau	Padang Luas	11	-
4.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
5.	Bati-Bati	Padang	14	-
6.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
7.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
10.	Jorong	Jorong	11	-
11.	Kintap	Kintapura	14	-
Kabupaten Tanah Laut			130	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan karakteristik geografis, kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain.

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu: (1) Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara

sungai dan Pantai Laut Jawa. (2) Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu: Puncak Gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan di atas 1000 meter. Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, dan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2018

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
< 3	Datar	250.460
3 – 8	Bergelombang/agak landau	44.830
8 – 15	Bergelombang/landau	31.600
15 – 25	Berbukit	21.805
25 – 40	Bergunung	10.690
40 – 60	Bergunung curam	13.545
> 60	Bergunung sangat curam	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0 – 3%, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47% dari luas total daratan).
4. 15 – 25%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85% dari luas total daratan).
5. 25 – 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87% dari luas total daratan).
6. 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur dengan luas 13.545 Ha (3,63% dari luas total daratan).

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 77,80% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng Mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun batas-batas tektonik yang paling penting disebalah timur adalah: (1) Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang

berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang, (2) Sesar mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan (3) Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu Satuan Morfologi Dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan Morfologi Dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0–10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati – Pelaihari – Asam-asam; Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung. Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat *urgent* sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif

menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau

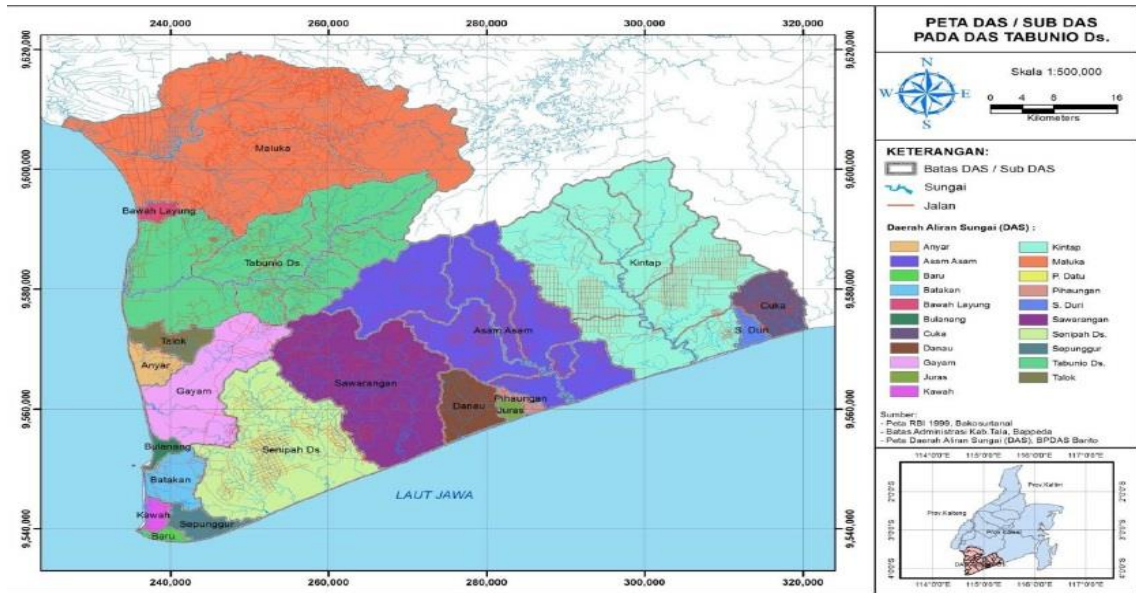
Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabulur (190 Km²), Sungai Sawarangan (580 Km²). Adapun fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periode. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tingg wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak paa ketinggian 0 – 1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena di pengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi factor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Rincian DAS-DAS bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tambang Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangga dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, kurau, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, dan Bumi Makmur	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65
8.	DAS Pihauangan	Sungai Pihauangan	Kecamatan Jorong	1.052,23
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	4.141,28
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2017, suhu udara rerata di Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil yaitu berkisar antara 27-28,4°C. Suhu udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada bulan Oktober dan November yang mencapai 36,2°C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 21°C pada bulan Juli-Agustus 2017.

Tabel 2.5 Suhu Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (°C), 2017

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rerata
Januari	21,8	36,0	26,8
Februari	24,0	35,6	27,4
Maret	24,8	35,4	28,4
April	23,2	35,1	27,0
Mei	25,0	35,6	27,9
Juni	24,8	35,5	27,9
Juli	21,0	36,0	27,1
Agustus	21,0	36,0	27,1
September	21,0	36,0	27,1
Oktober	23,3	36,2	27,3
November	23,0	36,2	27,9
Desember	21,8	36,0	27,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 yang menunjukkan bahwa secara

umum rata-rata kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 83,6-88,2%. Pada tahun 2017, kelembaban udara tertinggi terjadi selama 9 bulan yang mencapai 98%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 52,0%. Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2017 cukup bervariasi yaitu diantara 1,8 hingga 2,4 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2017, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 2,4 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Mei dan Desember yaitu sebesar 1,8 knot.

Tabel 2.6 Kelembaban Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kab. Tanah Laut (%), 2017

Bulan	Kelembaban Minimum	Kelembaban Maksimum	Kelembaban Rerata
Januari	52,0	98,0	83,6
Februari	67,0	98,0	87,3
Maret	70,0	97,0	88,2
April	67,0	95,0	85,7
Mei	76,0	98,0	87,4
Juni	68,0	98,0	86,3
Juli	70,0	97,0	87,1
Agustus	70,0	98,0	87,2
September	72,0	98,0	88,0
Oktober	67,0	98,0	87,1
November	58,0	98,0	84,2
Desember	60,0	98,0	85,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.7 Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (knot), 2017

Bulan	Kecepatan Rata-rata
Januari	2,3
Februari	2,2
Maret	2,0
April	1,9
Mei	1,8
Juni	2,0
Juli	2,1
Agustus	2,1
September	2,1
Oktober	1,9
November	2,4
Desember	1,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan penyinaran matahari, durasi penyinaran matahari dengan presentase terendah berada di bulan Desember, yaitu hanya sekitar 21% per 12 jam. Sementara itu durasi penyinaran matahari yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei

yaitu 37,8% per 12 jam. Rincian mengenai rata-rata penyinaran matahari menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rerata Penyinaran Matahari di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017

Bulan	Kecepatan Rata-rata
Januari	27,9
Februari	26,6
Maret	34,2
April	29,6
Mei	37,8
Juni	23,6
Juli	27,5
Agustus	27,5
September	33,9
Oktober	34,1
November	24,3
Desember	21,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam periode tahun 2017, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2017, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 503,6 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yang hanya sebesar 126,7 mm. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2017 terjadi pada bulan Desember yakni mencapai 20 hari hujan. Secara rinci, jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 tampak pada tabel berikut;

Tabel 2.9 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm), 2017

Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	209	21
Februari	227	22
Maret	352	26
April	589	28
Mei	427	25
Juni	362	12
Juli	189	9
Agustus	28	3
September	183	12
Oktober	220	17
November	151	25
Desember	408	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah

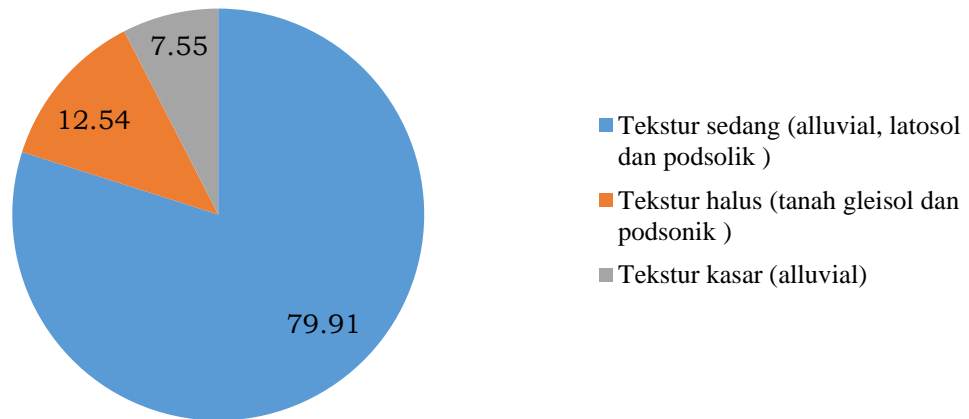
Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Jenis tanah yang mendominasi wilayah

Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

- Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
- Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
- Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur-unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga),

yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2018

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91%), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12,54%) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7,55). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7,55%) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat

dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu.

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6%) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2%) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,7%) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,11%) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Jorong, (2) Pertanian di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap, (4) Pertambangan di Kecamatan Jorong dan Kintap, dan (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Pelaihari.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembagunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan peruntukan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 38, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30%. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 hektar.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

Tabel 2.10 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	
A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten					
1.	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan	Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan	
			Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong	
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati	
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan	Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasn (pasar, dll)	
				Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain	
2.	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati	Peningkatan akses ke arah pusat Peningkatan fasilitas-2 pelayanan	
			Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur, Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan	Pengembangan pelabuhan perikanan Pengembangan kawasan industri Pengembangan permukiman Rencana Pengembangan pelabuhan umum Rencana Pembangunan jalan lingkar utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut
		Hirarki (besaran) perkotaan		Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional
		Sistem dan fungsi perwilayahan		Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan
		Fasilitas	Pengembangan Pusat-	Pengembangan	

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		perkotaan	Pusat Perkotaan Pelaihari, Bati Bati dan Kintap	Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL
			Pengembangan Pusat-Pusat Ibukota Kecamatan	Pengembangan Infrastruktur IKK
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kolektor Primer Gambut-Pulosari
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata)
B. Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan				
1.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong eksporhasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan
		Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	Pengembangan Pasar Hewan Pengembangan Terminal Agrobisnis
2.	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial – Ekonomi	Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyangga Perkembangan Perkotaan Pelaihari-Ibu Kota Kabupaten
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
C. Pengembangan Prasarana Wilayah				
1.	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis,
		Mengantisipasi Permintaan Transportasi Akan Datang dan Mengatasi Permasalahan Transportasi	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai Jalan Bebas Hambatan Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer Pengembangan Terminal Tipe B Ambungan Pengembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap Peningkatan Jalan Ambungan Tajau Pecah, Kab. Tanah Laut Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari
2.	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara	Studi Kelayakan Lokasi

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			udara	Studi Kebutuhan Pasar Pengembangan Kerjasama Bandar Udara
3.	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai	Pengembangan Alur di DAS Tabanio Pengembangan Alur di DAS Kintap Pengembangan Alur di DAS Swarangan Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam
			Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau Datu - Tanjung Dewa Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio
			Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan Tanjung Dewa dan Pelabuhan Curah Kering / Basah Jorong	Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa
4.	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelaihari dan Bati Bati
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Pengembangan pengelolaan DAS Tabanio, Kintap, Jorong Penanaman pohon pencegah longsor Pembangunan dan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				perbaikan pintu air Pengelolaan mata air melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung
6.	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	Penambahan dan perbaikan jaringan Peningkatan infrastruktur pendukung Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU) Pengembangan Gardu Induk Pelaihari (30 MVA)
7.	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan 1. Pewadahan (bin kapasitas 50 l) 2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut) 3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo) Pembangunan TPST Penyediaan Komposter Aerob Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA 1. Metode Sanitary Landfill 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan
D. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten				

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
1.	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air	Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi
			Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat	Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air Mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan
2.	Kawasan budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Memelihara habitat dan keaslian ekosistem

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reboisasi tanaman untuk menahan tanah. ➤ Pengembangan aneka produk olahan ➤ Mengembangkan hutan rakyat
			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari-Batu Ampar-Panyipatan. ➤ Pengembangan Pertanian Lahan Basah di Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. ➤ Pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-bati
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	<p>Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil Bati Bati</p> <p>Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong</p>
			Pengembangan Kawasan Parwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPDA ➤ Pengembangan Potensi Obyek ➤ Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional ➤ Peningkatan Promosi wisata. ➤ Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), dalam rentang tahun 2000–2017 di Kabupaten Tanah Laut terdapat (tujuh) jenis bencana yang telah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi dan tanah longsor. Bencana yang terjadi menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut, 2000-2017

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal dan Hilang	Luka	Menderita dan Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Terendam
1.	Banjir	135	7	-	42.928	1	1	2	3.597
2.	Banjir Bandang	2	2	-	1.384	8	9	-	-
3.	Kekeringan	6	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	517	-	-	-	9	-	-	-
5.	Cuaca Ekstrim	27	-	1	553	105	24	43	-
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	954	23	-	39	-
7.	Tanah Longsor	3	-	-	-	3	-	-	-
Jumlah		691	9	1	45.819	149	34	84	3.597

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data Rekap Bencana BPBD Kab. Tanah Laut 2000-2017

Berdasarkan Tabel 2.11, terlihat bahwa pada rentang waktu 17 tahun yaitu dari tahun 2000 - 2017, secara keseluruhan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut yaitu 691 (enam ratus sembilan puluh satu). Dari 691 kejadian bencana tersebut bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) kali kejadian. Sedangkan bencana yang mempunyai jumlah kejadian paling sedikit yaitu gelombang ekstrim dan abrasi dengan 1 (satu) kali kejadian. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, bencana yang paling menimbulkan dampak terbesar adalah bencana banjir. Namun untuk korban per masing-masing bencana terlihat bahwa bencana banjir yang menimbulkan korban paling banyak

yaitu 42,935 jiwa, selanjutnya bencana banjir bandang sebanyak 1,386 jiwa, gelombang ekstrim dan abrasi sebanyak 954 jiwa, cuaca ekstrim sebanyak 554 jiwa dan untuk bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor tidak menimbulkan korban jiwa.

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Tabel 2.12 menunjukkan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki kelas sedang dan tinggi.

Tabel 2.12 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Luas (ha)	Kelas
1.	Banjir	182.755	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	212.073	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3.326	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	Sedang
7.	Tanah Longsor	26.298	Sedang
Jumlah		970.321	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Melihat potensi penduduk yang terpapar, bencana kekeringan, cuaca ekstrim, dan banjir merupakan hal yang harus diwaspadai mengingat jumlah penduduk yang terpapar bencana-bencana tersebut mencapai ratusan ribu jiwa. Jumlah penduduk yang terpapar bencana kekeringan mencapai 338.291 jiwa, bencana cuaca ekstrim sebanyak 336.286 jiwa, dan banjir sebanyak 242.312 jiwa.

Tabel 2.13 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	242.312	17.739	44.761	569	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.355	176	559	7	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	336.286	23.652	59.333	798	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8.148	764	1.952	26	Tinggi
5.	Kekeringan	338.291	23.809	59.698	802	Sedang
6.	Tanah Longsor	1.713	128	285	15	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kerugian fisik terbesar bencana di Kabupaten Tanah Laut berasal dari bencana cuaca ekstrim yang mencapai Rp 1,88 triliun, sedangkan bencana banjir dapat menimbulkan kerugian fisik sebesar Rp 842,70 miliar. Untuk kerugian ekonomi, dampak kerugian terbesar ditimbulkan oleh bencana cuaca ekstrim yang mencapai Rp 553,35 miliar dan bencana banjir bandang dapat menimbulkan kerugian sebesar Rp 106,72 miliar. Jika dilihat dari potensi kerusakan lingkungan, bencana kekeringan menimbulkan dampak kerugian terbesar dimana luas areal yang terdampak dapat mencapai 66.583 ha, disusul bencana kebakaran lahan dan hutan yang seluas 50.189 ha, dan bencana banjir seluas 42.463 ha.

Tabel 2.14 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)			Kelas	Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		Luas	Kelas
1.	Banjir	182.755	82.135	924.837	Tinggi	42.463	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	106.716	122.774	Tinggi	3.623	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)			Potensi Kerusakan Lingkungan		
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
3.	Cuaca Ekstrem	212.073	553.348	2.432.266	Tinggi	-	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	3.326	10.003	40.532	Tinggi	2.271	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	38.367	38.367	Tinggi	50.189	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	2.120	2.120	Sedang	66.583	Tinggi
7.	Tanah Longsor	26.298	53.149	59.711	Tinggi	12.771	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada tingkat rendah. Dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan kapasitasnya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul apabila terjadi bencana yang sudah berpotensi terjadi.

Tabel 2.15 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
1.	Banjir	Sedang	Rendah	Rendah
2.	Banjir Bandang	Sedang	Rendah	Rendah
3.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Rendah	Rendah
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sedang	Rendah	Rendah
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Rendah
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah
7.	Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.16. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat

risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Laut (KRB Kab. Tanah Laut Tahun 2018 – 2023)

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah dipaparkan berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, telah diatur beberapa hal mengenai bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Hal yang pertama adalah mengenai kawasan rawan bencana yang tercantum pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

1. Kawasan rawan bencana alam meliputi (a) kawasan rawan banjir; (b) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman; (c) kawasan rawan tanah longsor; (d) kawasan rawan angin puting beliung; dan (e) kawasan rawan gelombang pasang(rob) dan abrasi.
2. Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari terdapat di Desa Panjaratan; (b) Hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, Desa Benua Tengah, dan Desa Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatandi Desa Kuringkit, Desa Batu Mulya dan Desa Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Riam Adungan, Desa Muara Kintap, Desa Salaman, Desa Kintap Kecil, dan Desa Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin,

- Desa Kunit, dan Desa Sungai Bakar; dan (k) Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.
3. Kawasan rawan kebakaran terdiri atas: (a) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan (b) kawasan rawan kebakaran permukiman.
 4. Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati; (b) Kecamatan Kintap di Desa Riam Adungan; dan (c) Kecamatan Batu Ampar di Desa Bluru.
 5. Kawasan rawan kebakaran permukiman: tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
 6. Kawasan rawan tanah longsor meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni: Desa Ujung Batu; dan (b) Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Kintap.
 7. Kawasan rawan angin puting beliung meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.
 8. Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi:
 - a. Empat (4) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Desa Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Desa Bawah Layung, dan Desa Kurau.
 - b. Lima (5) lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, dan Desa Telaga Langsat.
 - c. Satu (1) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Simpang Empat Sungai Baru.
 - d. Enam (6) lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Kandangan Lama, Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Batu Mulya.
 - e. Delapan (8) lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Pandan Sari, Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Muara Kintap, Desa Sumber Jaya, Desa Kebun Raya. Desa Mekar Sari dan Desa Sebamban Baru.

- f. Sepuluh (10) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat kerawanan sedang, yakni: Desa Sungai Rasau, Desa Handil Labuan Amas, Desa Handil Maluka, Desa Handil Suruk, Desa Handil Gayam, Desa Handil Birayang Atas, Desa Handil Birayang B

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalur utama dari lokasi bencana banjir di Desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui Jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
- b. Jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
- c. Jalur utama dari lokasi tanah longsor di Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
- d. Jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

Berbagai program dan rencana mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Sementara itu, mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;

- d. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
- e. Diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.
- f. Pemanfaatan ruang dengan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- g. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- h. Penetapan batas dataran banjir;
- i. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- j. Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 334.328 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode 2010-2017 adalah 1,74%, sedangkan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya adalah 1,53%.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 65.248 jiwa (19,52%). Meskipun memiliki jumlah penduduk tertinggi, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pelaihari merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2010-2017 yaitu sebesar 0,30%. Wilayah

yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Kintap yaitu sebanyak 51.328 jiwa (15,33%), disusul Kecamatan Jorong sebanyak 40.198 jiwa (12,03%), dan Kecamatan Bati-Bati sebanyak 39.537 jiwa (11,83%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kurau yaitu 11.831 jiwa. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 172 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 168 jiwa per km², dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 101 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 49 jiwa per km², Kecamatan Jorong sebesar 64 jiwa per km², dan Kecamatan Panyipatan sebesar 67 jiwa per km².

Tabel 2.17 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2010-2017

No.	Kecamatan	2010	2016	2017	Laju Pertumbuhan 2010-2017	Laju Pertumbuhan 2016-2017
1.	Panyipatan	21.151	21.562	22.489	0,88	4,30
2.	Takisung	27.998	28.583	29.064	0,54	1,68
3.	Kurau	11.578	11.713	11.831	0,31	1,01
4.	Bumi Makmur	11.831	13.310	13.786	2,21	3,58
5.	Bati-Bati	38.645	39.496	39.537	0,33	0,10
6.	Tambang Ulang	14.925	16.549	16.703	1,62	0,93
7.	Pelaihari	63.895	64.678	65.248	0,30	0,88
8.	Bajuin	15.957	16.452	17.404	1,25	5,79
9.	Batu Ampar	23.233	25.883	26.740	2,03	3,31
10.	Jorong	29.002	39.880	40.198	4,77	0,80
11.	Kintap	38.118	51.180	51.328	4,34	0,29
Kabupaten Tanah Laut		296.333	329.286	334.328	1,74	1,53

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.18 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Panyipatan	22.489	6,71	67
2.	Takisung	29.064	8,69	85
3.	Kurau	11.831	3,56	94
4.	Bumi Makmur	13.786	4,12	98
5.	Bati-Bati	39.537	11,83	168
6.	Tambang Ulang	16.703	5,00	104
7.	Pelaihari	65.248	19,52	172
8.	Bajuin	17.404	5,21	89
9.	Batu Ampar	26.740	8,00	49
10.	Jorong	40.198	12,03	64
11.	Kintap	51.328	15,33	95
Kabupaten Tanah Laut		334.328	100,00	92

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

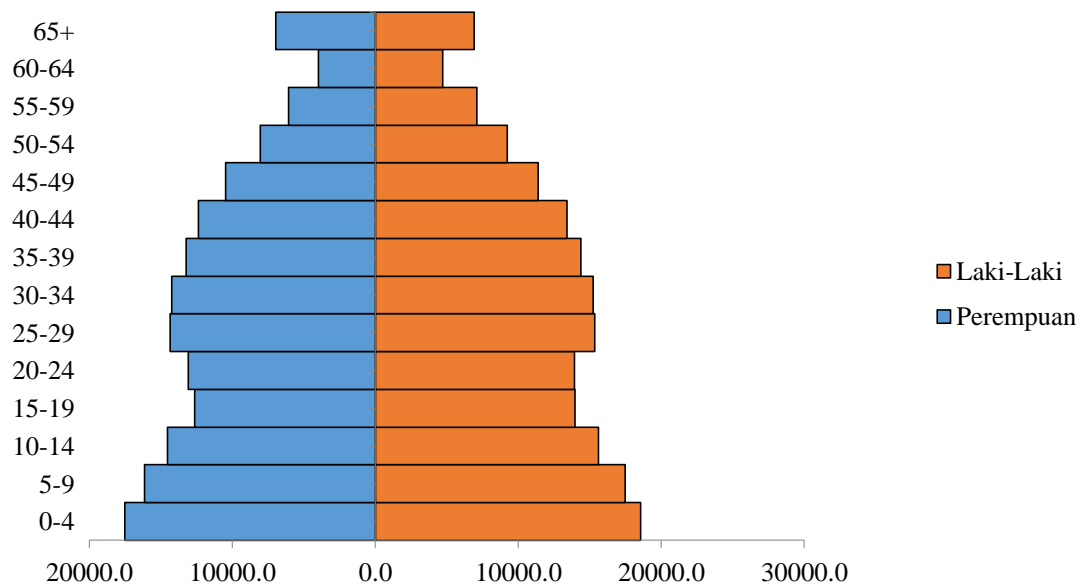
Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 171.480 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 162.848 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 105,30 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Panyipatan	11.246	11.200	100,41
2.	Takisung	14.629	14.437	101,33
3.	Kurau	5.979	5.923	100,95
4.	Bumi Makmur	6.938	6.849	101,30
5.	Bati-Bati	20.131	19.407	103,73
6.	Tambang Ulang	8.519	8.184	104,09
7.	Pelaihari	33.169	32.082	103,39
8.	Bajuin	8.961	8.449	106,06
9.	Batu Ampar	13.812	12.927	106,85
10.	Jorong	21.196	19.037	111,34
11.	Kintap	26.900	24.353	110,46
Kabupaten Tanah Laut		171.480	161.848	105,30

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 34.542 jiwa, diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 33.078 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 29.600 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kabupaten Tanah Laut memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.



Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2017

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

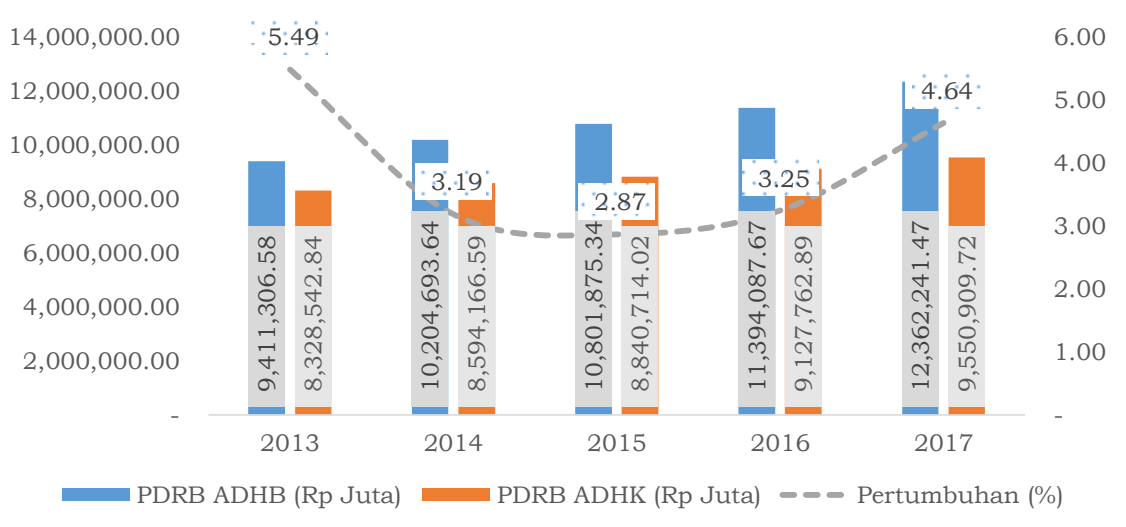
Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.



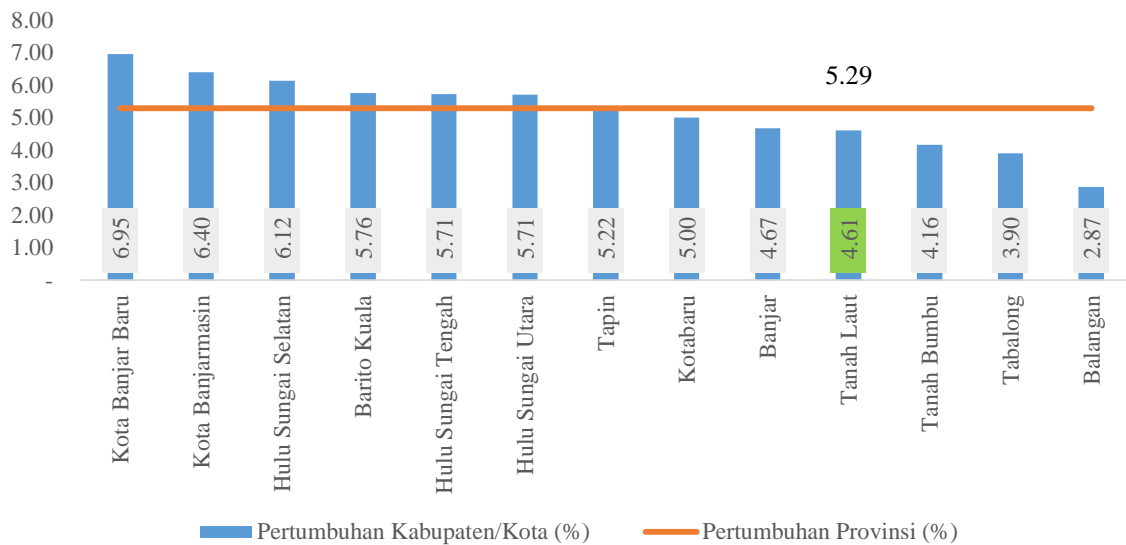
Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.5 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Selama periode 2013-2017, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 9,41 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 12,36 triliun pada tahun 2017. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 8,33 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 9,55 triliun pada tahun 2017. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,89% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,87%. Pada tahun 2015 merupakan titik balik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 3,25% dan pada tahun 2017 tumbuh kembali sebesar 4,64%. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada di peringkat 10 dari 13 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2017 mencapai 5,29%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin (Gambar 2.6).

PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa terdapat 16 sektor yang ada memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut ditunjukkan oleh sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 16,68%, kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,28% per tahun, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,99% per tahun. Selama periode 2013-2017, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami perlambatan, hal ini dikarenakan gejolak perekonomian Kabupaten Tanah Laut masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan, terutama pertambangan batubara. Harga batubara yang terus melemah menyebabkan banyak pengusaha batubara di Kabupaten Tanah Laut memutuskan untuk vakum. Sektor pertambangan dan penggalian

mengalami kontraksi selama periode 2014-2017 dengan kontraksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 4,83%. Tak hanya itu, perlambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi pada sektor pertanian, terutama perkebunan dan kehutanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

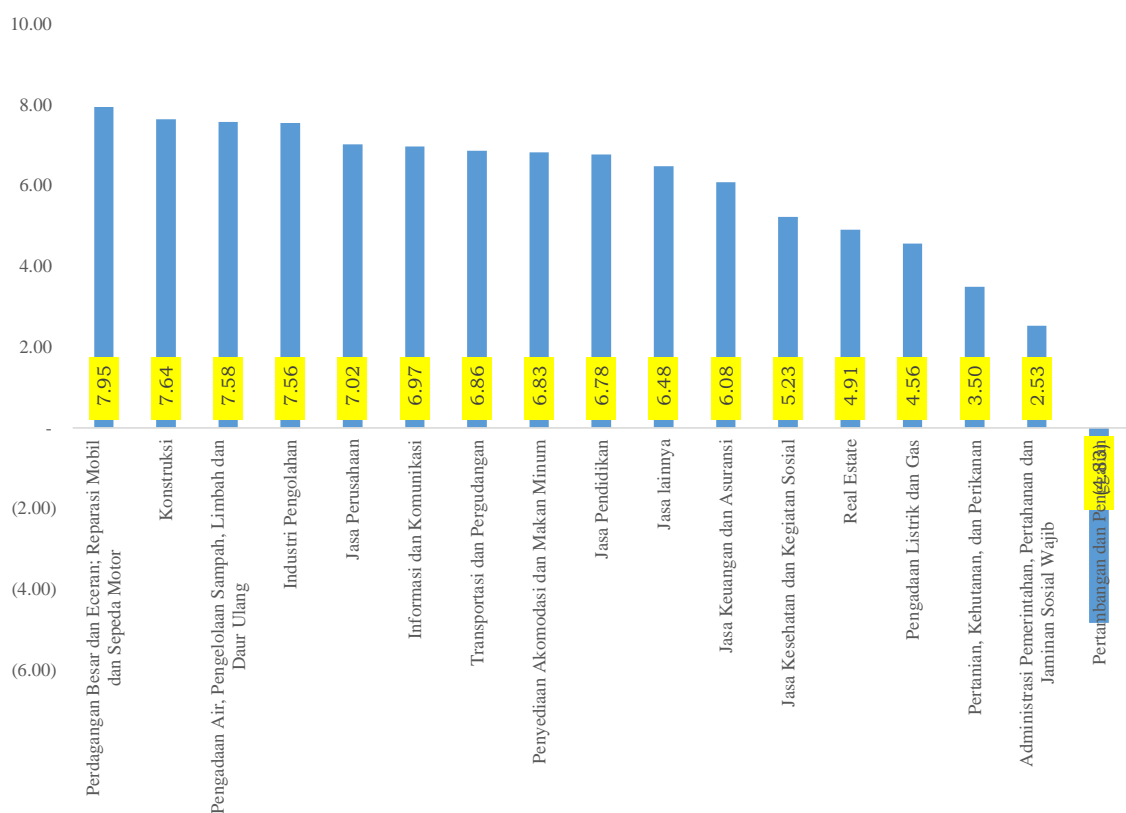
Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

Tabel 2.20 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2013-2017

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,83	2,31	2,22	3,84	3,50	3,14
Pertambangan dan Penggalian	4,94	(0,91)	(2,20)	(2,33)	(4,83)	(1,07)
Industri Pengolahan	4,67	4,64	4,33	7,57	7,56	5,75
Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	36,35	31,67	5,00	4,56	16,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	8,86	5,64	7,43	7,58	6,43
Konstruksi	5,75	6,47	6,34	5,23	7,64	6,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,54	8,81	8,20	7,88	7,95	8,28
Transportasi dan Pergudangan	7,12	6,76	6,97	6,50	6,86	6,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,73	6,20	6,34	6,83	6,66
Informasi dan Komunikasi	6,52	9,36	8,37	8,75	6,97	7,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,02	7,24	4,92	5,71	6,08	7,59
Real Estate	6,73	5,46	5,65	6,47	4,91	5,84
Jasa Perusahaan	7,44	6,89	6,58	8,05	7,02	7,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,81	5,81	8,78	2,03	2,53	4,99
Jasa Pendidikan	7,40	8,14	8,76	7,87	6,78	7,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,44	6,75	7,53	9,05	5,23	7,80
Jasa lainnya	2,60	8,24	6,12	7,68	6,48	6,22
PDRB	5,49	3,19	2,87	3,25	4,64	3,89

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 7,95%, kemudian sektor konstruksi sebesar 7,64% pada posisi kedua, dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 7,58% pada posisi ketiga. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang memiliki posisi terendah memiliki pertumbuhan sektor kurang dari 4% dan salah satunya memiliki pertumbuhan yang negatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,50%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,05%, dan sektor pertambangan dan pengalihan sebesar -4,83 persen.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2017

2.1.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam

kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

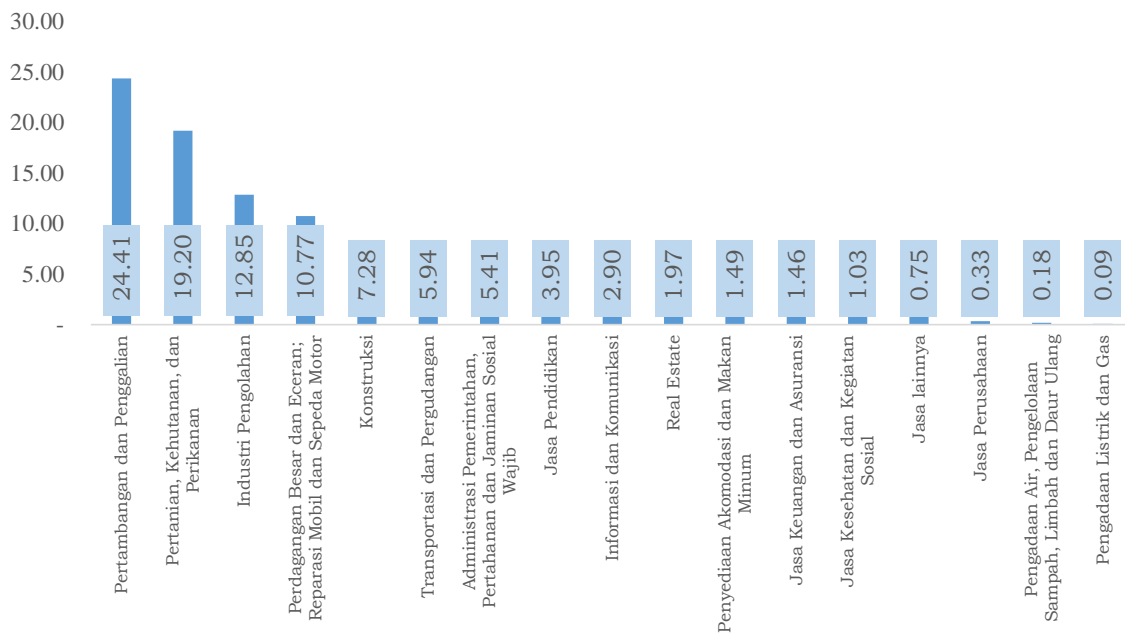
Tabel 2.21 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2013-2017

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,70	18,75	19,35	19,64	19,20	19,13
Pertambangan dan Penggalian	35,15	32,62	28,13	25,05	24,41	29,07
Industri Pengolahan	10,45	10,71	11,37	12,23	12,85	11,52
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,17
Konstruksi	5,83	6,20	6,79	7,01	7,28	6,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,40	9,03	9,73	10,42	10,77	9,67
Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,22	5,64	5,87	5,94	5,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,36	1,42	1,47	1,49	1,40
Informasi dan Komunikasi	2,45	2,60	2,71	2,84	2,90	2,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	1,36	1,42	1,46	1,46	1,40
Real Estate	1,77	1,86	1,94	2,00	1,97	1,91
Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,31	0,32	0,33	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,83	5,02	5,63	5,58	5,41	5,29
Jasa Pendidikan	3,11	3,27	3,67	4,06	3,95	3,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,87	0,97	1,04	1,03	0,94
Jasa lainnya	0,58	0,64	0,70	0,74	0,75	0,68
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2013-2017, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi yang mencapai 29,07% per tahun. Pada sektor ini kontribusi terbesar diberikan oleh produksi batu bara, kemudian produksi bijih besi, mangan, bijih nikel, dan batu kromit. Walaupun kontribusi sektor ini mengalami penurunan selama periode 2013-2017, sektor ini tetap menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2012-2016, tren sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2012 sektor ini sebesar 18,77% dan pada tahun 2016 mencapai

19,65%. Namun pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan menjadi 19,20%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Selama lima tahun terakhir industri ini mengalami peningkatan dari 10,45% pada tahun 2013 menjadi sebesar 12,85% pada tahun 2017, dengan rata-rata kontribusi mencapai 11,52%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.



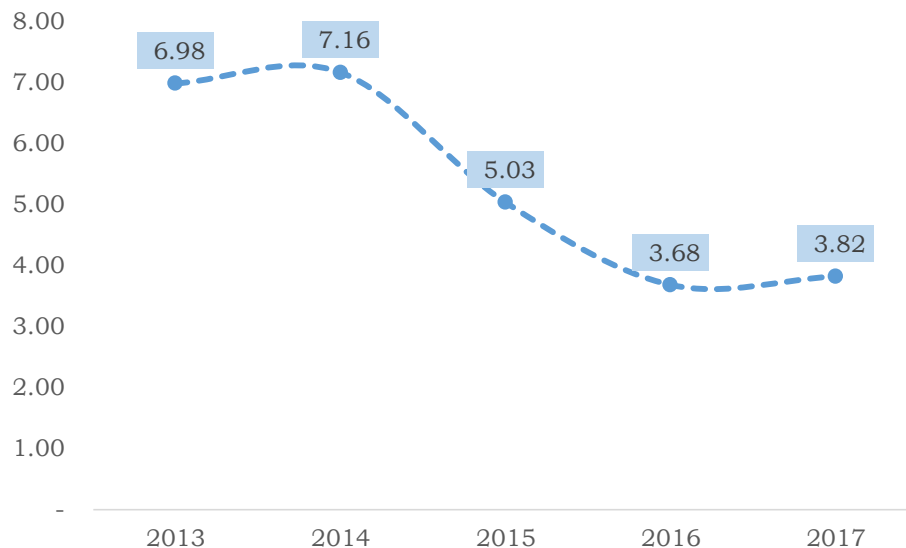
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.8 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut (%), 2017

2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2016), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam

keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Gambar 2.9 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2013-2017

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari 5,96% menjadi 7,16%, kemudian menurun hingga tahun 2016 menjadi

3,68% dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,82%. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 2.22 PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

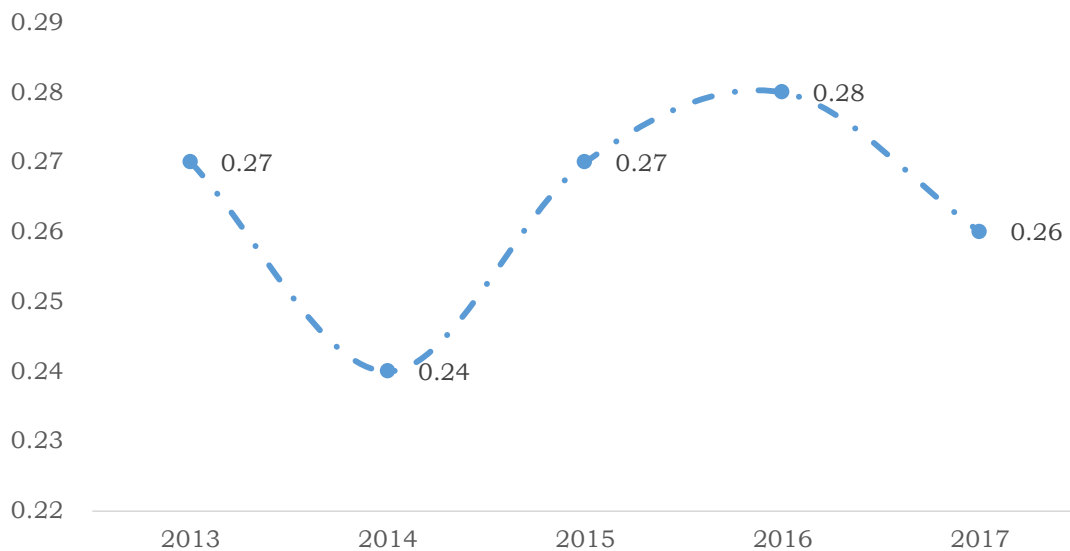
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Rp Ribu)	29.998,59	31.979,81	33.310,03	34.602,41	36.976,39
PDRB ADHK (Rp Ribu)	26.547,27	26.932,69	27.262,34	27.719,86	28.567,48
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,73	1,45	1,22	1,68	3,06

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut pada Tabel 2.22 memiliki tren yang cenderung positif, yang artinya meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2013 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 29,99 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 36,98 juta. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK terus meningkat dari Rp 26,55 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 28,57 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 3,73%. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusipendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* > 0,5 yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* < 0,3 yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.

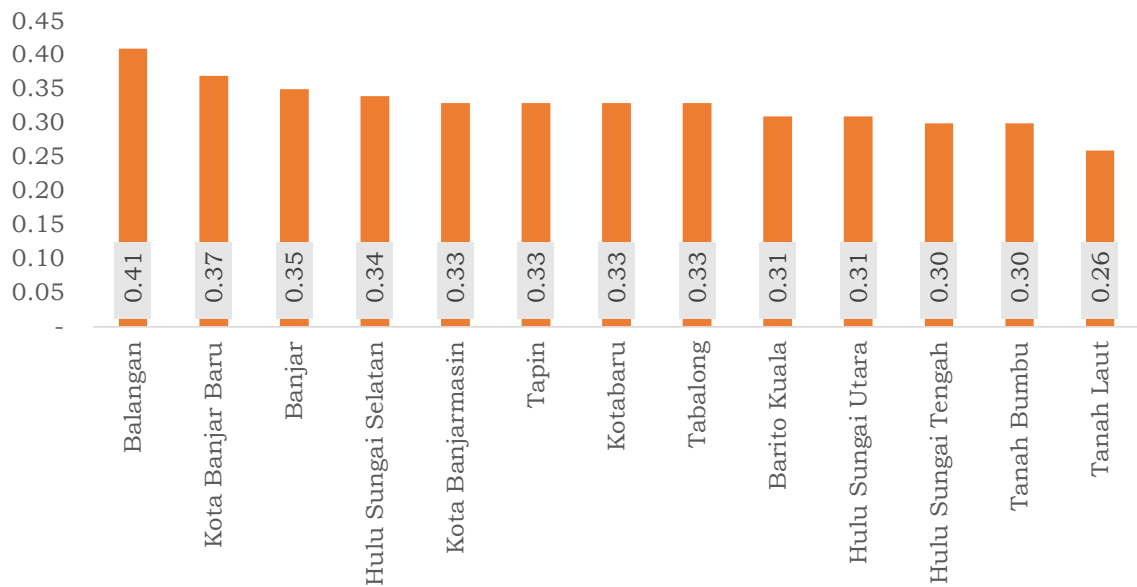


Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Gambar 2.10 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Berdasarkan Gambar 2.10, terlihat bahwa sepanjang periode 2013-2017, nilai rasio gini Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, nilai rasio gini adalah sebesar 0,27, kemudian menurun menjadi 0,24 pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2016, nilai rasio gini meningkat kembali menjadi 0,28, dan pada tahun 2017, nilainya kembali mengalami penurunan menjadi 0,26. Selama periode 2013-2017, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tingkat ketidak merataannya rendah. Apabila dibandingkan

dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidak merataan yang rendah pada tahun 2017. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,41, disusul Kota Banjar Baru sebesar 0,37, dan Kabupaten Banjar sebesar 0,35.

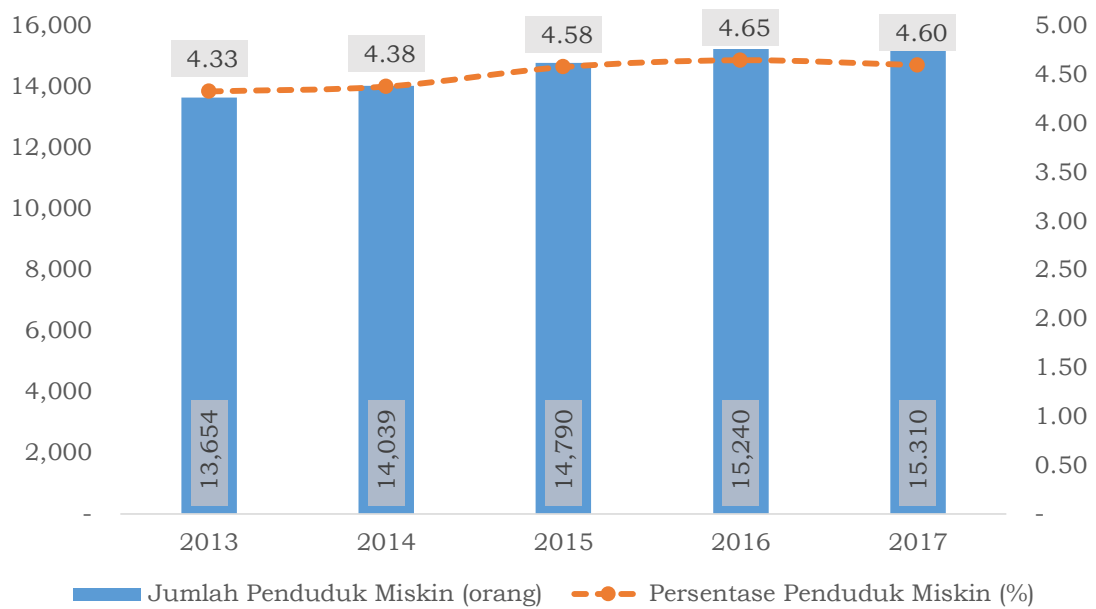


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

Gambar 2.11 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2017

2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

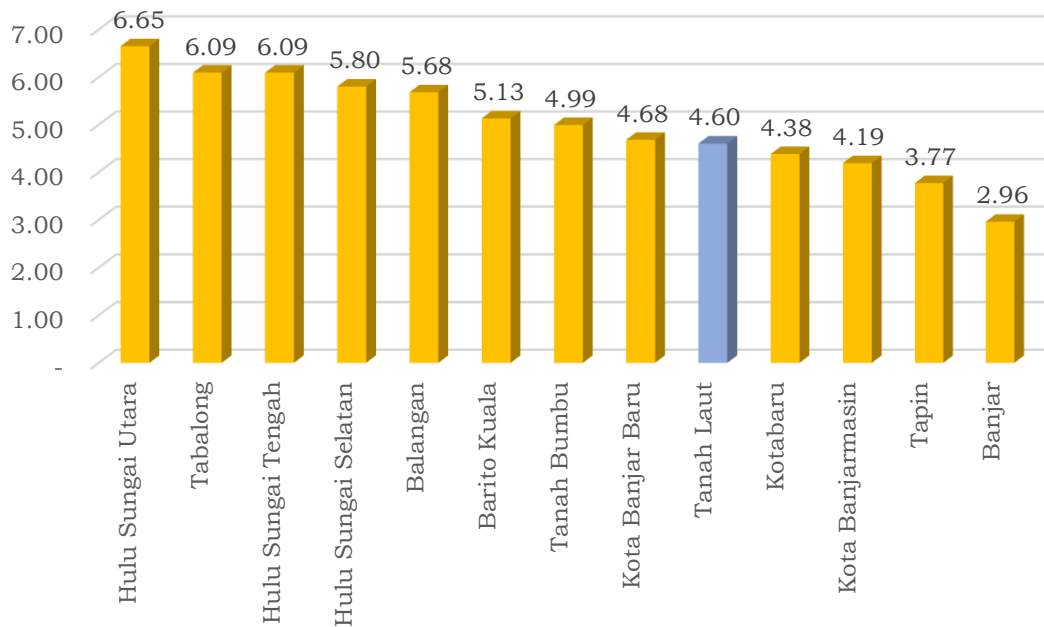
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2012-2017, garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.291.923 dan meningkat hingga tahun 2017 menjadi Rp.425.152.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018 (diolah)

Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2013-2017 cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 13.654 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 15.310 orang. Dilihat dari sisi yang lain yaitu persentasenya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013-2016, persentase penduduk miskin meningkat dari sebesar 4,33% menjadi sebesar 4,65%. Pada tahun 2017, terdapat hasil yang cukup menggembirakan dimana persentase penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 4,60%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut menempati peringkat ke-5 terkecil di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,60%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan persentas penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang mencapai 4,70%. Wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan persentase sebesar 6,65%, disusul Kabupaten Tabalong sebesar 6,09%, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 6,09%. Sementara itu, wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah ditempati oleh Kabupaten Banjar dengan persentase sebesar 2,96%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Gambar 2.13 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2017

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2013-2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,49 menjadi 0,44, kemudian meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2015. Kemudian kembali turun pada tahun 2016 menjadi 0,64 dan meningkat kembali menjadi 0,71 pada tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil

yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2012-2015 terjadi kenaikan indeks dari 0,07 menjadi 0,18. Kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 0,16 dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 0,15, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun.

Tabel 2.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,44	0,47	0,76	0,64	0,71
Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)	0,09	0,11	0,18	0,16	0,15

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

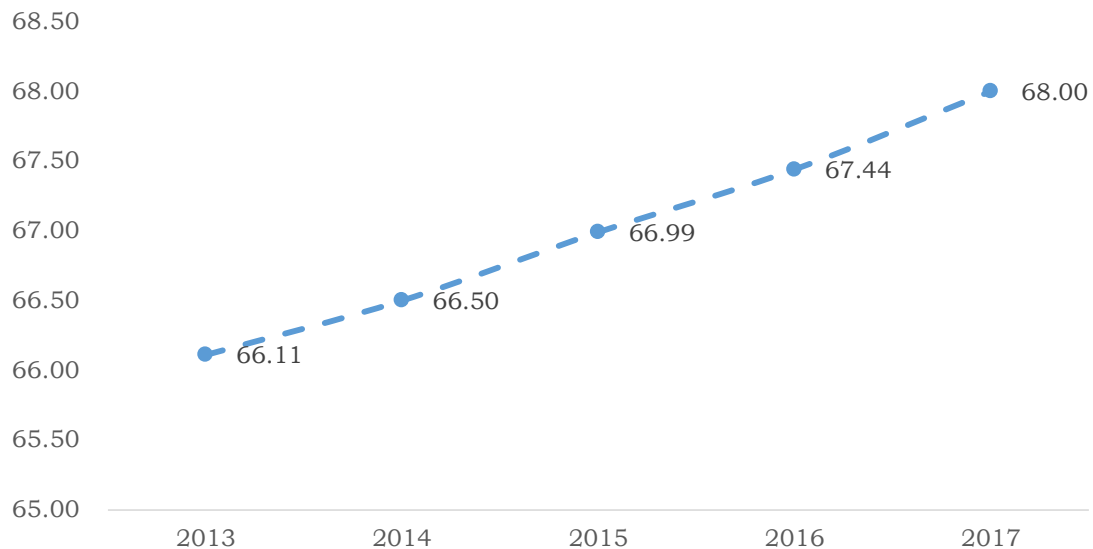
2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang

direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) $IPM \geq 80$ termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 \leq IPM < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 \leq IPM < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $IPM < 60$ termasuk kategori rendah.

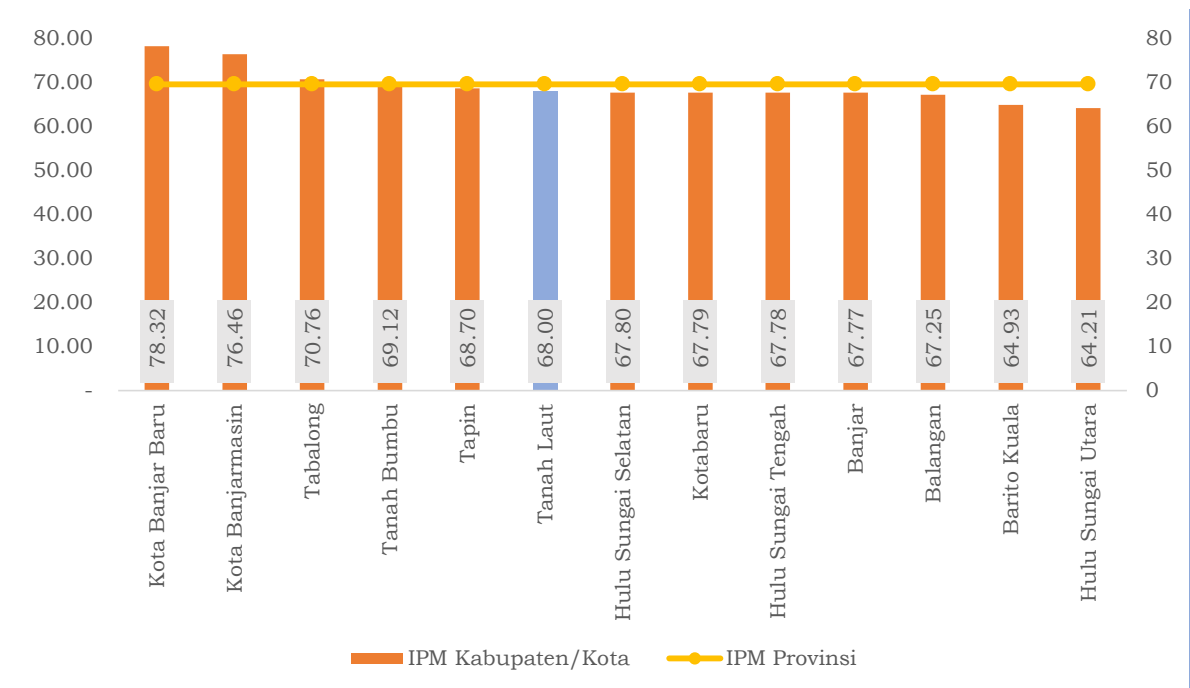


Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.14 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Selama periode 2013-2017, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 66,11, kemudian meningkat menjadi 66,50 pada tahun 2014, meningkat kembali menjadi 66,99 pada tahun 2015, dan kinerja IPM pada tahun 2017 adalah sebesar 68,00. Di tingkat Provinsi Kalimantan

Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 berada pada posisi 6 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, posisi pertama ditempati oleh Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 78,32, diikuti Kota Banjarmasin sebesar 76,46, dan Kabupaten Tabalong sebesar 70,76. Hanya ketiga wilayah tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Kabupaten Tanah Laut sendiri bersama dengan wilayah lainnya termasuk dalam kategori IPM sedang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2017

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan

kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selama periode 2010-2013, perkembangan penduduk yang melek huruf menunjukkan hasil yang menggemberikan dengan adanya persentase peningkatan penduduk yang melek huruf dari 93,89% pada tahun 2010 menjadi 96,77% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat sekitar 3,23% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pada tahun 2017, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 96,07%. Angka melek huruf menurut agregasi jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih melek huruf dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu 97,65% untuk laki-laki dan 94,41% untuk perempuan. Lebih tingginya persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang melek huruf dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa masih terdapat relatif sedikit ketimpangan antara penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

2.1.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk

menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2013-2017, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 adalah sebesar 7,26 tahun, kemudian meningkat menjadi 7,27 tahun pada tahun 2014, dan meningkat kembali menjadi 7,29 pada tahun 2015. Pada tahun 2017, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,37 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 7,99 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
RLS (tahun)	7,26	7,27	7,29	7,30	7,37

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang

bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
HLS (tahun)	10,83	11,09	11,25	11,50	11,82

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2013-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka HLS Kabupaten Tanah Laut hanya sebesar 10,83 tahun, kemudian meningkat menjadi 11,09 tahun pada tahun 2014. Angka HLS tersebut mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 11,822 pada tahun 2017. HLS sebesar 11,82 pada tahun 2017 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 11,21 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 2 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang mencapai 12,46 tahun. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjar Baru yaitu sebesar 14,78 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, AHH di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 68,19 tahun, kemudian meningkat menjadi sebesar 68,22 tahun pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 68,62 tahun, dan pada tahun 2017 kembali

mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,89 tahun. AHH sebesar 68,89 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjaani hidup selama 69 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Tanah Laut tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. Angka AHH Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi dibandingkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 68,02 tahun.

Tabel 2.26 Angka HarapanHidup di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
HLS (tahun)	68,19	68,22	68,62	68,76	68,89

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada dasarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.27 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
TPAK	69,41	72,42	68,72	68,72	67,27

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2013-2017, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, TPAK adalah sebesar 69,41%, kemudian meningkat menjadi sebesar 72,42% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016, nilai masing-masing TPAK adalah sebesar 68,72%, dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 67,27%. Persentase angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 67,26%, sedangkan 32,74% dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2017 sebesar 86,54% persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 46,89%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Tanah Laut adalah kaum laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanah Laut, 2017

Kegiatan Utama	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (%)	86,53	46,90	67,26
Bukan Angkatan Kerja (%)	13,47	53,10	32,74
Jumlah (%)	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	86,54	46,89	67,27

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidakbekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidakmungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulaibekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Jika melihat data TPT pada tahun 2016 yang sebesar 4,53%, maka pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase pengangguran yang cukup baik hingga TPT hanya menjadi sebesar 3,70%.

Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2017

Kegiatan Utama	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (%)	86,53	46,90	67,26
Bukan Angkatan Kerja (%)	13,47	53,10	32,74
Jumlah (%)	100	100	100
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,94	5,19	3,70

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan

menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Dalam buku III RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Makin maju

pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2018

Kelompok Usia	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI [7-12]	98,51	98,70	99,37	99,68	99,40	99,83
SMP/MTs [13-15]	88,57	96,33	96,05	92,16	91,59	91,13
SMA/MA/SMK [16-18]	59,33	68,01	57,89	56,88	62,84	68,47

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Selama periode 2013-2018, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) dapat dikatakan cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, APS kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 98,51%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 menjadi 99,68%. Untuk tahun 2017, APS kelompok umur 7-12 mengalami penurunan menjadi sebesar 99,40%, dan pada tahun 2018 meningkat kembali meningkat hingga mencapai level tertingginya yaitu sebesar 99,83%.

Hal yang sama juga ditemui pada APS kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) yang nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, APS kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 88,57%, kemudian meningkat signifikan menjadi sebesar 96,33% pada tahun 2014, pada tahun 2017, APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 91,13%. Peningkatan nilai APS khususnya pada kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan target program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian capaian APS Kabupaten Tanah Laut masih belum memenuhi target wajib 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2017 adalah sebesar 109,54%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK pada tahun 2017 adalah sebesar 80,16%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 80,16%. APK untuk jenjang pendidikan SMA adalah sebesar 70,71% yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 70,71%.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenjang Pendidikan	APK	APM
SD/MI	109,54	98,56
SMP/MTs	80,16	71,31
SMA/SMK/MA	70,71	52,98

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswadengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan caramembagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 98,56%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2017 adalah sebesar 71,31% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 71 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA pada tahun 2017 adalah sebesar 52,98%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 53 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan

kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Pada jenjang pendidikan TK, jumlah unit TK pada tahun 2017 adalah sebanyak 208 unit dengan jumlah TK terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 48 unit. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan TK adalah sebanyak 11.169 orang dengan guru yang mendampingi sebanyak 1.050 orang. Dari 208 unit TK tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 520 ruang kelas. Dilihat dari rasio antara murid dan guru pada tahun 2017, rasionya adalah sebesar 1 : 11, yang berarti bahwa 1 orang guru TK di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 11 murid. Sementara itu, rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 21, yang berarti bahwa 1 ruang kelas TK di Kabupaten Tanah Laut berisi 21 murid. Secara rinci, jumlah unit, murid, dan guru pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	17	832	67	36	12	23
2.	Takisung	18	913	96	46	10	20
3.	Kurau	9	349	30	14	12	25
4.	Bumi Makmur	12	408	35	19	12	21
5.	Bati-bati	21	1.653	132	65	13	25
6.	Tambang Ulang	11	485	40	14	12	35
7.	Pelaihari	48	2.525	304	136	8	19
8.	Bajuin	15	642	65	34	10	19
9.	Batu Ampar	19	915	92	37	10	25
10.	Jorong	16	1.064	84	47	13	23
11.	Kintap	22	1.383	105	72	13	19
Jumlah		208	11.169	1.050	520	11	21

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah SD/MI di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 254 unit, yang terdiri dari 230 unit SD negeri, 6 unit SD swasta, 5 unit MI negeri, dan 13 unit MI swasta. Kecamatan yang memiliki jumlah SD/MI terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 46 unit, diikuti Kecamatan Kintap dan Bati-bati masing-masing sebanyak 28 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 24 unit. Dari 254 unit SD/MI, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 2.006 unit ruang kelas. Jumlah murid yang menempuh pendidikan SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 40.040 unit, dengan jumlah guru yang mengampu sebanyak 2.625 orang. Dilihat dari rasio antara murid dan guru, rasionya pada tahun 2017 adalah sebesar 1 : 15, yang berarti bahwa 1 guru SD di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 15 murid, sedangkan rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 20, yang berarti bahwa 1 ruang kelas SD di Kabupaten Tanah Laut berisi murid sebanyak 20 orang. Melihat data pada jenjang pendidikan SD/MI, terlihat bahwa fasilitas pendidikan SD/MI di Kabupaten Tanah Laut cukup memadai dimana persebarannya berada di seluruh wilayah kecamatan dan ditunjang dengan ketersediaan guru dan ruang kelas yang cukup memadai.

Tabel 2.33 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	20	2.833	189	145	15	20
2.	Takisung	24	3.566	226	181	16	20
3.	Kurau	15	1.434	138	104	10	14
4.	Bumi Makmur	17	1.779	189	122	9	15
5.	Bati-bati	28	5.180	340	232	15	22
6.	Tambang Ulang	13	1.890	119	86	16	22
7.	Pelaihari	46	8.396	566	398	15	21
8.	Bajuin	19	2.132	175	130	12	16
9.	Batu Ampar	22	3.160	206	167	15	19
10.	Jorong	22	3.940	199	183	20	22
11.	Kintap	28	5.730	278	258	21	22
Jumlah		254	40.040	2.625	2.006	15	20

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, jumlah unit sekolah pada tahun 2017 adalah sebanyak 74 unit, yang terdiri dari 48 unit SMP negeri, 5 unit SMP swasta, 6 unit MTs negeri, dan 15 unit MTs swasta. Dari 74 unit SMP/MTs di Kabupaten Tanah

Laut tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 560 unit ruang kelas. Wilayah dengan jumlah unit SMP/MTs terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 12 unit, diikuti Kecamatan Bati-Bati sebanyak 10 unit, dan Kecamatan Jorong sebanyak 9 unit. Siswa yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 13.988 orang, dengan guru yang mengampu sebanyak 1.122 orang. Rasio murid dan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 1 : 12, yang berarti bahwa 1 guru SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 12 orang murid, sedangkan rasio antara murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 25, yang berarti bahwa 1 unit ruang kelas menampung sebanyak 25 murid.

Tabel 2.34 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	8	1.186	126	30	9	40
2.	Takisung	6	1.030	95	50	11	21
3.	Kurau	4	615	58	29	11	21
4.	Bumi Makmur	3	454	36	22	13	21
5.	Bati-bati	10	2.087	163	76	13	27
6.	Tambang Ulang	4	493	38	18	13	27
7.	Pelaihari	12	3.159	230	123	14	26
8.	Bajuin	4	679	54	33	13	21
9.	Batu Ampar	7	1.355	116	64	12	21
10.	Jorong	9	1.222	94	52	13	24
11.	Kintap	7	1.708	112	63	15	27
Jumlah		74	13.988	1.122	560	12	25

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat

pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut:

Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/ Balai Kesehatan	Polindes
1.	Panyipatan	-	-	2	25	-	2
2.	Takisung	-	-	1	26	-	-
3.	Kurau	-	-	2	25	-	2
4.	Bumi Makmur	-	-	1	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	2	25	-	3
6.	Tambang Ulang	-	-	1	19	-	-
7.	Pelaihari	1	3	3	52	9	8
8.	Bajuin	-	-	2	22	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	1	23	-	-
10.	Jorong	-	-	2	27	-	1
11.	Kintap	-	-	2	29	-	1
Jumlah		1	3	19	273	9	17

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 dapat dikatakan telah memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan Polindes. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pelaihari memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap yaitu 1 unit rumah sakit, 3 unit rumah bersalin, 3 unit Puskesmas, 52 unit Posyandu, 9 unit klinik balai kesehatan, dan 8 unit Polindes. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah keseluruhan Puskesmas sebanyak 19 unit. Sementara itu, terdapat 10 kecamatan yang memiliki Posyandu, dan 1 kecamatan tidak memiliki Posyandu yaitu Kecamatan Bumi Makmur.

Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya. Secara rinci, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Lainnya
1.	Panyipatan	4	13	14	2	2
2.	Takisung	3	14	14	1	3
3.	Kurau	2	12	12	1	3
4.	Bumi Makmur	3	8	8	1	1
5.	Bati-bati	6	25	25	3	4
6.	Tambang Ulang	3	6	12	1	1
7.	Pelaihari	39	205	106	45	18
8.	Bajuin	6	18	19	2	4
9.	Batu Ampar	4	18	17	2	3
10.	Jorong	4	19	18	2	5
11.	Kintap	8	29	30	3	4
Jumlah		82	367	275	63	48

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Terkait dengan jumlah tenaga medis pada tahun 2017, tenaga medis di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Jumlah dokter spesialis pada tahun 2017 adalah sebanyak 10 orang yang berada di

Kecamatan Pelaihari dan sebagian besar ditempatkan di RSUD H. Boejasin Pelaihari. Untuk dokter umum, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 58 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan jumlah dokter gigi adalah sebanyak 14 orang yang tersebar di 8 kecamatan.

Tabel 2.37 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1.	Panyipatan	-	2	2
2.	Takisung	-	2	1
3.	Kurau	-	2	-
4.	Bumi Makmur	-	3	-
5.	Bati-bati	-	5	1
6.	Tambang Ulang	-	2	1
7.	Pelaihari	10	25	4
8.	Bajuin	-	4	2
9.	Batu Ampar	-	3	1
10.	Jorong	-	4	-
11.	Kintap	-	6	2
Jumlah		10	58	14

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah dokter, pada tahun 2016 Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan memiliki 74 dokter yang terbagi menjadi dokter spesialis sebanyak 17 orang, dokter umum sebanyak 41 orang, dan dokter gigi sebanyak 16 orang. Dilihat menurut kecamatan, secara keseluruhan Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah dokter terbanyak yakni 17 dokter spesialis, 15 dokter umum, dan 6 orang dokter gigi.

Penolong Kelahiran

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain di antaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait

dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, baik desa yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan, seluruh proses persalinannya menggunakan jasa tenaga kesehatan. Wilayah perdesaan, kelahiran yang dibantu oleh dokter adalah sebesar 21,01%, sedang yang dibantu bidan sebesar 78,99%. Untuk wilayah perkotaan, penolong kelahiran yang dibantu dokter sebesar 49,83% dan yang dibantu bidang sebesar 50,17%.

Tabel 2.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahiran di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Klasifikasi Desa	Dokter	Bidan	Jumlah
1.	Perdesaan	21,01	78,99	100,00
2.	Perkotaan	49,83	50,17	100,00

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2016, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,4% balita telah mendapat imunisasi BCG, 79,2% balita telah mendapatkan imunisasi campak, 89,8% balita telah mendapat imunisasi DPT 1, 96,7% balita telah mendapat imunisasi polio 1, dan 85% balita telah mendapat imunisasi hepatitis B 3. Secara keseluruhan, imunisasi BCG merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi Hepatitis B 3 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase balita yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang signifikan dimana dari 12 jenis imunisasi yang diberikan, terdapat 11 jenis imunisasi yang persentasenya lebih dari 90%, sedangkan imunisasi campak merupakan jenis imunisasi dengan persentase terendah yaitu sebesar 76,92%.

Tabel 2.39 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

No.	Jenis Imunisasi	2014	2015	2016	2017
1.	BCG	95,37	96,45	95,40	95,23
2.	Campak	79,33	87,58	79,20	76,92
3.	DPT 1	91,29	88,03	89,80	93,18
4.	DPT 2	87,79	81,02	88,20	93,18
5.	DPT 3	85,86	52,16	81,20	93,18
6.	Polio 1	91,02	97,80	96,70	95,86
7.	Polio 2	79,77	92,44	89,40	95,86
8.	Polio 3	77,12	65,76	84,00	95,86
9.	Polio 4	-	-	78,40	95,86
10.	Hepatitis B1	88,42	83,98	85,00	93,55
11.	Hepatitis B2	67,82	73,10	81,70	93,55
12.	Hepatitis B3	63,56	52,48	71,10	93,55

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jumlah Kasus Penyakit

Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Terdapat 10 kasus penyakit terbanyak yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016, yaitu hipertensi primer, ISPA, Dyspepsia, Nasopharingitis Akut, Demam, Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal, Gastritis, Cepalgia, Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental, dan Myalgia. Pada tahun 2017, jenis penyakit yang paling banyak diderita adalah hipertensi primer yaitu sebanyak 34.876 kasus, disusul ISPA sebanyak 17.958 kasus, dan dyspepsia sebanyak 15.611 kasus.

Tabel 2.40 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1.	Hipertensi Primer	43.876
2.	ISPA	17.958
3.	Dyspepsia	15.611
4.	Nasopharingitis Akut	12.883
5.	Demam	9.249
6.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	8.321
7.	Gastritis	7.120
8.	Cepalgia	5.721
9.	Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental	3.866
10.	Myalgia	3.452

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain itu, penyakit lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria. Pada tahun 2016, kasus penyakit diare tercatat mencapai 5.572 kasus, disusul penyakit DBD dengan 397 kasus, TB 333 kasus, malaria 75 kasus, HIV 5 kasus dan AIDS 3 kasus, serta tidak terdapat kasus IMS di Kabupaten Tanah Laut. Untuk tahun 2017, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 29 kasus dan kasus DBD sebanyak 43 kasus. Untuk tahun 2017 sendiri, tidak terdapat kasus IMS, diare, TB, dan malaria.

Tabel 2.41 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	HIV/AIDS	DBD
1.	Panyipatan	-	7
2.	Takisung	3	3
3.	Kurau	2	-
4.	Bumi Makmur	1	-
5.	Bati-bati	1	-
6.	Tambang Ulang	2	-
7.	Pelaihari	3	13
8.	Bajuin	2	11
9.	Batu Ampar	2	-
10.	Jorong	9	8
11.	Kintap	4	1
Jumlah		29	43

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Bayi Gizi Buruk

Jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2014-2017 berada di kisaran 6.000an bayi lahir. Pada tahun 2014, jumlah bayi lahir adalah sebanyak 6.094 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 289 bayi dan bayi gizi buruk sebanyak 2 bayi. Untuk tahun 2017, jumlah bayi lahir sebanyak 6.367 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 390 bayi dan yang dirujuk sebanyak 49 kasus. Sementara itu, bayi dengan gizi buruk di tahun 2017 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.42 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

Tahun	Bayi Lahir	BBLR	BBLR Dirujuk	Gizi Buruk
2014	6.094	289	-	2
2015	6.248	289	-	2
2016	6.094	357	158	2
2017	6.367	390	49	1

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kunjungan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2014-2017 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.609 ibu hamil menjadi sebanyak 7.728. Pada tahun 2017, dari 7.728 ibu hamil, yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 7.045 ibu hamil dan yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 5.966 ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis (KEK) sebanyak 1.175 ibu hamil dan yang mendapatkan zat besi sebanyak 5.612 ibu hamil.

Tabel 2.43 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tabler Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1	Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi
2014	6.609	6.899	5.561	-	5.625
2015	6.425	6.833	5.668	1.033	5.611
2016	6.608	6.742	5.431	1.204	5.561
2017	7.728	7.045	5.966	1.175	5.612

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kematian Ibu dan Bayi

Kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 1 kasus yaitu di Kecamatan Panyipatan. Sementara itu, jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 6.367 bayi lahir hidup dan bayi lahir mati sebanyak 56 kasus. Jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 10 kasus, disusul Kecamatan Bati-bati sebanyak 9 kasus, dan Kecamatan Kintap sebanyak 7 kasus. Pada bayi berumur 0-6 hari, kematian yang disebabkan oleh asfiksia sebanyak 12 kasus, BBLR dan premature sebanyak 34 kasus, dan penyebab lainnya sebanyak 19 kasus. Untuk bayi berumur 7-28 hari, terdapat kematian yang disebabkan oleh BBLR dan premature sebanyak 4 kasus penyebab lainnya sebanyak 9 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi berumur 29 hari – 1 tahun sebanyak 11 kasus.

Tabel 2.44 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tabler Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Persalinan	Jumlah Kematian Ibu	Bayi Lahir Mati
1.	Panyipatan	429	1	5
2.	Takisung	533	-	4
3.	Kurau	232	-	2
4.	Bumi Makmur	230	-	2
5.	Bati-bati	858	-	9

No.	Kecamatan	Jumlah Persalinan	Jumlah Kematian Ibu	Bayi Lahir Mati
6.	Tambang Ulang	344	-	6
7.	Pelaihari	1.386	-	10
8.	Bajuin	330	-	2
9.	Batu Ampar	455	-	5
10.	Jorong	666	-	4
11.	Kintap	914	-	7
Jumlah		6.377	1	56

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Dalam bidang kesehatan pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa program jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan baik dari segi biaya maupun pelayanan. Oleh karena itu kepemilikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat bermanfaat sekali terutama untuk memproteksi kesehatan masyarakat. Penduduk kabupaten Tanah Laut tahun 2017 yang memiliki jaminan kesehatan daerah salah satunya menggunakan KTP ketika berobat meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,23% sedangkan tahun 2016 hanya sebesar 11,53%. Namun sangat disayangkan, masih terdapat 57,86% penduduk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Hanya 13,95% penduduk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan Non PBI dan sebesar 6,74% memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.45 Persentase Penduduk Menurut Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017

Jenis Jeminan Kesehatan	2016	2017
BPJS Kesehatan Non PBI	19,73	13,95
BPJS Kesehatan PBI	8,02	6,74
Jamkesda	11,53	18,23
Lainnya	0,22	3,22
Tidak punya jaminan kesehatan	61,48	57,86

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Perilaku Merokok

Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 21,48% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang merokok, sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, 41,10% penduduk laki-laki yang berusia 5 tahun ke atas merokok. Rata-rata penduduk tersebut merokok dengan jumlah batang per minggu sekitar 113 batang. Persentase merokok pada penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan indikator proksi (Indikator 3.A.1) untuk memantau SDGs Target 3.A yaitu memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Kriteria indikator merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang digunakan adalah merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dan rokok yang dihisap meliputi tembakau maupun cerutu. Jika dilihat pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, ada sebanyak 27,83% penduduk Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017 yang merokok, dan rata-rata mereka merokok sebanyak 113 batang. Uniknya, jika dilihat dari kuintil pengeluaran, ternyata semakin besar pengeluaran suatu rumah tangga, maka penduduk dalam rumah tangga tersebut cenderung merokok. Selanjutnya jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD merupakan kelompok penduduk dengan proporsi perokok terbesar, yaitu sebanyak 30,57%.

Tabel 2.46 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Aktivitas Merokok di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Pendidikan Terakhir	Persentase Perokok	Rata-rata Dihisap per Pekan
Tidak pernah sekolah	28,69	109
SD	30,57	122
SMP	25,39	112
SMA	25,78	105

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2017, panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut yang berada pada kondisi baik yakni sepanjang 680,17 km, dalam kondisi sedang yakni sepanjang 303,80 km, dalam kondisi rusak yakni sepanjang 715,28 km, dan dalam kondisi rusak berat yakni sepanjang 127,39 km. secara keseluruhan, Panjang jalan yang dikelola oleh Kabupaten Tanah Laut adalah sepanjang 1.826,63 km.

Tabel 2.47 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017

Kondisi Jalan			
Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
680,17	303,80	715,28	127,39

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Pelaihari merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan baik terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 yakni sepanjang 268,86 km. Kecamatan Kintap memiliki kondisi jalan rusak terpanjang di Kabupaten Tanah Laut yakni sepanjang 111,91 km. Untuk kondisi jalan rusak berat, Kecamatan Takisung merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan rusak berat terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 yakni sebesar 23,47 km.

Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1.	Panyipatan	43,89	42,11	74,20	11,81
2.	Takisung	68,26	23,24	39,95	23,47
3.	Kurau	8,72	10,81	21,99	3,98
4.	Bumi Makmur	14,68	6,18	25,06	7,07
5.	Bati-Bati	45,34	21,81	62,83	8,21
6.	Tambang Ulang	26,07	22,52	62,39	6,53
7.	Pelaihari	268,86	38,94	95,60	21,15
8.	Bajuin	23,08	17,45	70,61	7,86
9.	Batu Ampar	75,37	33,85	68,35	7,95
10.	Jorong	50,70	26,50	82,39	17,07
11.	Kintap	55,19	60,39	111,91	12,30
Jumlah		680,17	303,80	715,28	127,39

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dilihat berdasarkan jenis permukaan, sepanjang 816,57 km jalan di Kabupaten Tanah Laut memiliki permukaan aspal, sepanjang 917,12 km jalan memiliki permukaan kerikil, dan sepanjang 92,95 km memiliki permukaan tanah. Apabila dirinci per

kecamatan pada tahun 2017, Kecamatan Pelaihari memiliki jalan dengan permukaan aspal terpanjang yakni sepanjang 269,60 km dan Kecamatan Kurau memiliki jalan dengan permukaan aspal terpendek yakni sebesar 15,36 km. Kemudian, Kecamatan Kintap memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpanjang yakni sepanjang 149,45 km dan Kecamatan Bumi Makmur memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpendek yakni sepanjang 21,30 km. Kecamatan Kintap juga menjadi kecamatan yang memiliki jalan dengan permukaan tanah terpanjang yakni sepanjang 18,81 km dan Kecamatan Bajuin serta Kecamatan Jorong tidak memiliki jalan dengan permukaan tanah.

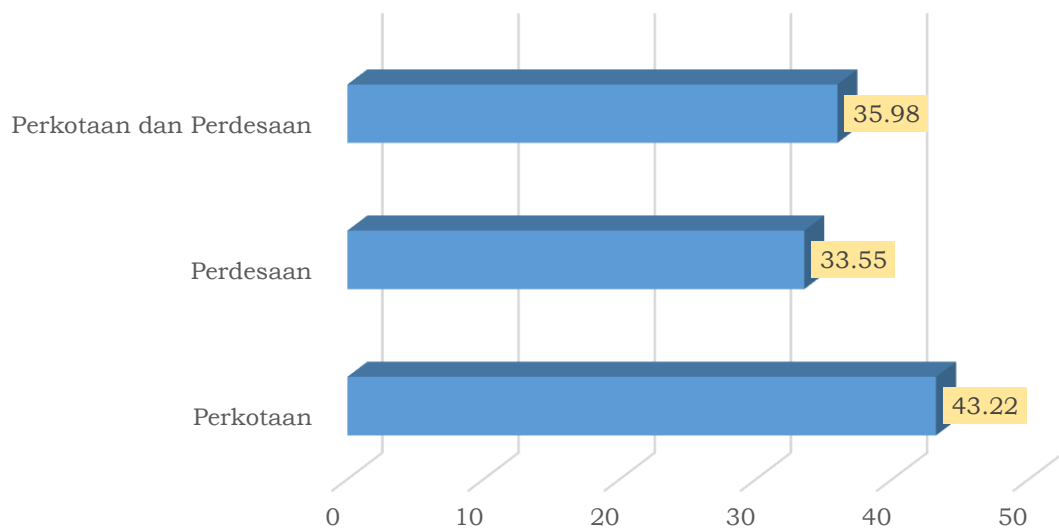
Tabel 2.49 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan		
		Aspal	Kerikil	Tanah
1.	Panyipatan	53,03	113,83	5,15
2.	Takisung	93,93	48,91	12,08
3.	Kurau	15,36	23,89	6,25
4.	Bumi Makmur	21,97	21,30	9,71
5.	Bati-Bati	54,84	79,68	3,67
6.	Tambang Ulang	28,09	76,74	12,68
7.	Pelaihari	269,60	141,22	13,72
8.	Bajuin	31,73	87,27	-
9.	Batu Ampar	81,47	93,19	10,86
10.	Jorong	95,02	81,64	-
11.	Kintap	71,53	149,45	18,81
Jumlah		816,57	917,12	92,94

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Sanitasi Layak

Sanitasi menjadi isu yang penting untuk dibahas karena menjadi ukuran kesejahteraan rumah tangga yang berdampak langsung terhadap kesehatan. Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, diare masih merupakan penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun. Hal tersebut terjadi karena peran penting kebersihan sering diabaikan, padahal kematian dan penyakit akibat sanitasi yang buruk dapat dicegah salah satunya melalui sanitasi yang layak. Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang memengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, menggunakan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, dan tempat pembuangan akhir tinja tangki septik atau SPAL (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.16 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2017

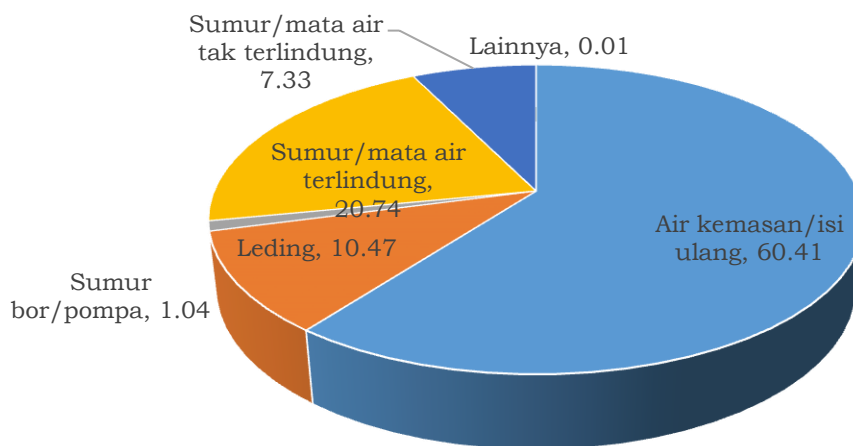
Gambar 2.16 menunjukkan bahwa sudah ada 35,98% rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki akses ke sanitasi layak. Persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak di daerah perkotaan jauh lebih tinggi yakni 43,22% dibandingkan dengan rumah tangga di daerah perdesaan yang hanya sebesar 33,55%. Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih dari pihak terkait untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di daerah perdesaan. Tingginya angka sanitasi yang tidak layak di Kabupaten Tanah Laut, bahkan di daerah perdesaan mencapai 66,45 persen diduga karena kurangnya persentase rumah tangga pada salah satu indikator yang menjadi penilaian sanitasi layak yaitu tempat pembuangan akhir tinja. Banyak ditemukan rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang masih menggunakan pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah. Persentase rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang masih menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja pada tahun 2017 ada sebanyak 57,29%. Selain itu, masih ada 10,61% rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan jenis kloset berupa cemplung atau cubluk.

Sumber Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup utama bagi makhluk hidup. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air

minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut menggunakan air kemasan atau air isi ulang sebagai sumber air minum utama, yaitu sebanyak 60,41%. Selanjutnya adalah air sumur atau mata air terlindung sebanyak 20,74%, menurun dari tahun 2016. Penurunan angka persentase penggunaan sumur pada rumah tangga ini kemungkinan karena rumah tangga mulai beralih ke sumber air minum air kemasan bermerek atau air isi ulang dan sumber air minum lainnya seperti mata air. Kondisi ini sangat terlihat dari fenomena yang cukup menarik, dimana tahun 2016 pengguna air sumur atau mata air terlindung di Kabupaten Tanah Laut ada sebanyak 68,87% sedangkan pengguna air kemasan atau air isi ulang ada sebanyak 20,64%. Kondisi tersebut berkebalikan dengan kondisi di tahun 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2017

Selanjutnya berdasarkan jenisnya sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air minum bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak lebih dari sama 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat. Pada tahun 2017, sebanyak 1 dari 2 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan sumber air minum berupa air bersih. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55% rumah tangga. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ada sebanyak 28,58% untuk kuintil 1, berbeda jauh dengan kuintil teratas yaitu sebanyak 61,51%. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan akan papan yang ditunjukkan melalui perumahan diperlukan dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kualitas dari perumahan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. Semakin baik kualitas dari perumahan masyarakat maka semakin baik pula tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kualitas dari perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, yaitu:

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Pada tahun 2015 sebagian besar rumah di Kabupaten Tanah Laut merupakan milik sendiri dengan persentase sebesar 88,79%. Namun, pada tahun 2016, terjadi sedikit penurunan menjadi 87,35%. Pada posisi kedua yaitu status bebas sewa dengan persentase sebesar 5,06% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 7,03%. Status rumah lainnya yakni kontrak/sewa sebesar 1,85% pada tahun

2015 dan 4,48% pada tahun 2016, rumah dinas sebesar 4,22% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 0,92% pada 2016, serta status lainnya.

Tabel 2.50 Persentase Rumah Tangga menurut Status Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Status Tempat Tinggal	2015	2016	2017
Milik Sendiri	88,79	87,35	82,69
Kontrak/Sewa	1,85	4,48	5,28
Bebas Sewa	5,06	7,03	8,67
Dinas	4,22	0,92	-
Lainnya	0,17	0,21	3,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Secara umum sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 memiliki rumah sendiri yaitu sebanyak 82,69%. Sisanya hanya 11,31% rumah tangga yang menempati rumah berstatus bukan milik rumah sendiri. Pada tahun 2017 rumah tangga yang bukan menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 8,67% menempati rumah bebas sewa, 5,28% menempati rumah kontrak atau sewa, dan sisanya sebanyak 3,36% menempati rumah berstatus lainnya seperti rumah dinas. Rumah tangga yang sudah memiliki rumah dengan status kepemilikan milik sendiri dapat dikatakan relatif tinggi yaitu sebanyak 8 dari 10 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017, dan sisanya menempati rumah bukan milik sendiri. Beberapa alasan yang memungkinkan rumah tangga tidak menempati rumah sendiri diantaranya adalah karena belum memiliki atau belum mampu, faktor jarak atau agar dekat dengan keluarga, dekat dengan tempat kerja, sarana transportasi atau sarana lain yang lebih baik, dan alasan lainnya.

Luas Lantai

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10m^2 . Artinya satu rumah tangga yang terdiri dari 4 orang, idealnya memiliki luas lantai minimal 40m^2 . Menurut ketentuan rumah sederhana sehat (RS Sehat) keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9m^2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut kementerian Kesehatan, rumah dapat

dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Luas Lantai Per Kapita	2015	2016	2017
Kurang dari 10 m ²	13,82	10,88	4,17
10 atau lebih m ²	86,18	89,12	95,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2015 hingga 2016 persentase rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki luas lantai kurang dari 10 m² mengalami penurunan, dari 13,82% menjadi 10,88%. Sedangkan pada rumah tangga yang memiliki luas lantai lebih dari 10 m² mengalami peningkatan dari 86,18% menjadi 89,12%. Menurut penjelasan yang tertera pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut (2016) bahwa mengacu pada kementerian kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi syarat sehat apabila memiliki luas lantai perkapita minimal 8 m². Pada tahun 2017 tercatat masih ada 4,17 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai tempat tinggalnya kurang dari 7,2 m² per anggota rumah tangga. Hal ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan. Berdasarkan hal itu, maka sebagian besar rumah di Kabupaten Tanah Laut sudah memenuhi persyaratan rumah sehat dilihat dari luas lantainya.

Jenis Lantai Tempat Tinggal

Lantai adalah bagian bawah atau dasar yang menjadi alas suatu ruangan baik terbuat dari papan, semen, maupun ubin. Selain luas lantai per kapita indikator lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas rumah juga dapat dilihat dari jenis lantai. Lantai harus kuat untuk menahan beban di atasnya, tidak licin, stabil ketika dipijak, permukaan lantai mudah dibersihkan. Secara umum, rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang menggunakan jenis lantai dari semen, ubin, atau tanah.

Jika dilihat berdasarkan jenis lantai tempat tinggal, pada tahun 2015 hingga 2016 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki lantai yang berjenis bambu, kayu, dan papan kualitas rendah dengan persentase sebesar 30,50% pada tahun 2015 dan menjadi 35,55% pada tahun 2016. Selain itu, jenis lantai lain yang banyak dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni dengan jenis semen dan bata merah dengan persentase 25,74% pada tahun 2015 dan mengalami

peningkatan pada tahun 2016 menjadi 29,85%. Jenis marmer, granit, dan keramik juga dimiliki oleh rumah tangga dengan persentase sebesar 22,40% pada tahun 2015 namun menurun pada tahun 2016 menjadi 22,23%. Jenis lantai lain yang dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni parket, vinil permadani, ubin, tegel, teraso, kemudian kayu, papan kualitas tinggi, dan tanah lainnya.

Tabel 2.52 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Jenis Lantai Terluas	2015	2016	2017
Marmer, Granit, Keramik	22,40	22,23	26,28
Parket, Vinil, Permadani, Ubin, Tegel, Teraso	0,66	0,54	-
Kayu, Papan Kualitas Tinggi	17,46	11,09	44,12
Semen, Bata Merah	25,74	29,85	28,02
Bambu, Kayu, Papan Kualitas Rendah	30,50	35,55	-
Tanah, lainnya	1,21	0,74	1,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan data Susenas 2017 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan angka 99,95% yang artinya hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki rumah dengan lantai terluas selain tanah. Konsentrasi jenis lantai terluas yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut terbagi menjadi 3, yaitu rumah dengan lantai terluas berupa marmer, granit, atau keramik, kemudian rumah tangga yang lantai terluasnya berupa semen atau bata merah, dan sebagian lagi adalah rumah tangga dengan lantai terluas berupa kayu dengan kualitas rendah. Jenis lantai yang digunakan oleh rumah tangga tentu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di daerah tersebut, namun secara umum penggunaan jenis lantai yang bukan tanah sudah dapat dikatakan baik.

Jenis Atap Terluas

Atap merupakan bagian bangunan tempat tinggal yang berfungsi untuk melindungi penghuni rumah secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan seperti panas dan hujan. Kemampuan atap dalam melindungi penghuni dari cuaca yang tidak diinginkan tergantung dari jenis bahan dasar atap. Berdasarkan jenis atap terluas, maka pada tahun 2015 sebesar 36,13% rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki jenis atap seng. Selanjutnya, sebesar 33,11% rumah tangga memiliki jenis atap asbes. Pada tahun 2016, sebagian besar rumah tangga masih menggunakan jenis atap seng yakni sebesar 40,01% dan penggunaan jenis atap asbes mengalami penurunan menjadi

27,91%. Jenis atap lain yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni beton, genteng, bambu, kayu, dan sirap, serta jerami ijuk, daun, rumbia, dan lainnya. Jenis atap yang paling sedikit digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yakni beton.

Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Jenis Atap Terluas	2015	2016	2017
Beton	0,01	0,54	-
Genteng	16,03	11,78	11,31
Asbes	33,11	27,91	28,91
Seng	36,13	43,01	47,79
Bambu, Kayu, Sirap	12,13	13,00	11,71
Jerami, Ijuk, Daun, Rumbia, Lainnya	2,59	3,76	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang sudah tidak menggunakan atap berupa jerami/ijuk/daun/rumbia/lainnya. Penggunaan atap berupa jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan karena terkait sirkulasi yang digunakan dan penggunaan atap berupa bahan tersebut dapat mengurangi jarak antara langit-langit dengan atapnya. Pada tahun 2017, rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan atap berupa seng ada sebanyak 47,79% rumah tangga. Kemudian terbanyak kedua adalah penggunaan atap berupa asbes yaitu sebanyak 28,91%. Pengguna seng di Kabupaten Tanah Laut meningkat dari dua tahun terakhir dari yang hanya 36,13%, di tahun 2016 meningkat sebesar 6,89% dari persentase sebelumnya menjadi 43,01%, dan di tahun 2017 menjadi 47,79%.

Jenis Dinding Terluas

Dinding yang baik harus tegak lurus agar dapat memikul beban yang berat sendiri, beban tekanan angin dan bila sebagai dinding pemikul harus dapat memikul beban di atasnya, dinding pun harus terpisah dari pondasi oleh lapisan yang kedap air agar air tanah tidak meresap naik sehingga dinding terhindar dari basah, lembab, dan tampak bersih tidak berlumut. Jenis bahan dinding yang kualitasnya paling baik adalah tembok. Berdasarkan jenis dinding terluas, maka sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut memiliki rumah dengan dinding berjenis kayu dan batang kayu, yakni sebesar 62,15% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 58,52%. Jenis dinding lain yang banyak digunakan adalah tembok,

plasteran, anyaman bambu, dan kawat yakni sebesar 37,43% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan pada 2016 menjadi sebesar 39,99%.

Tabel 2.54 Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Jenis Dinding	2015	2016	2017
Tembok, Plasteran Anyaman Bambu, Kawat	37,43	39,99	43,13
Kayu, Batang Kayu	62,15	58,52	55,54
Bambu, Anyaman Bambu, Lainnya	0,41	1,49	1,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Persentase tertinggi dinding terluas yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut adalah berupa kayu atau batang kayu yaitu sebesar 55,54 persen. Meskipun demikian, angka tersebut sudah berkurang dari tahun 2016 yang sebanyak 58,52%. Salah satu penyebabnya adalah karena rumah tangga mulai beralih pada tembok, plasteran anyaman bambu, dan kawat. Rumah tangga yang menggunakan tembok pada tahun 2017 ada sebanyak 43,13%, meningkat dari tahun 2016 yang sebanyak 39,99%. Hal ini ditengarai bahwa terjadi peningkatan taraf hidup rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut karena sudah beralih ke dinding yang lebih baik dan kuat yaitu tembok.

Pengelolaan Persampahan

Kota yang bersih merupakan salah satu tuntutan masyarakat dan harus menjadi salah satu prioritas pelayanan pemerintah. Dalam rangka menjaga kebersihan kota, masyarakat juga dituntut ikut serta dalam menjaga kebersihan kota melalui pola hidup yang bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentunya difukung oleh berbagai sarana dan prasarana untuk menuju kota yang bersih dan membuat warganya nyaman. Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah diantaranya adalah truk sampah, truk ekskavator, truk amrol, loader, dozer, bak kontainer, truk ninja, tangka air, truk dump pick up, bak sampah, TPA, tosa hercules, tractor mini, dan tenaga lapangan. Dalam kurun waktu 2015-2017, terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung terciptanya kebersihan kota terus meningkat dibuktikan dengan penambahan beberapa sarana seperti truk amrol yang meningkat menjadi sebanyak 27 unit, tosa hercules menjadi sebanyak 13 unit, dan bertambahnya tenaga lapangan menjadi sebanyak 163 unit.

Tabel 2.55 Persentase Rumah Tangga menurut Dinding di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

Sarana dan Prasarana	2015	2016	2017
Truk sampah	3	3	3
Truk ekskavator	1	1	1
Truk amrol	7	7	27
Loader	-	1	1
Dozer	1	1	1
Bak container	15	13	11
Truk ninja	-	-	-
Tangki air	1	2	2
Truk dump pick up	2	2	2
Bak sampah	121	121	121
TPA	1	1	1
Tosa hercules	3	3	13
Traktor mini	-	-	-
Tenaga lapangan	79	85	163

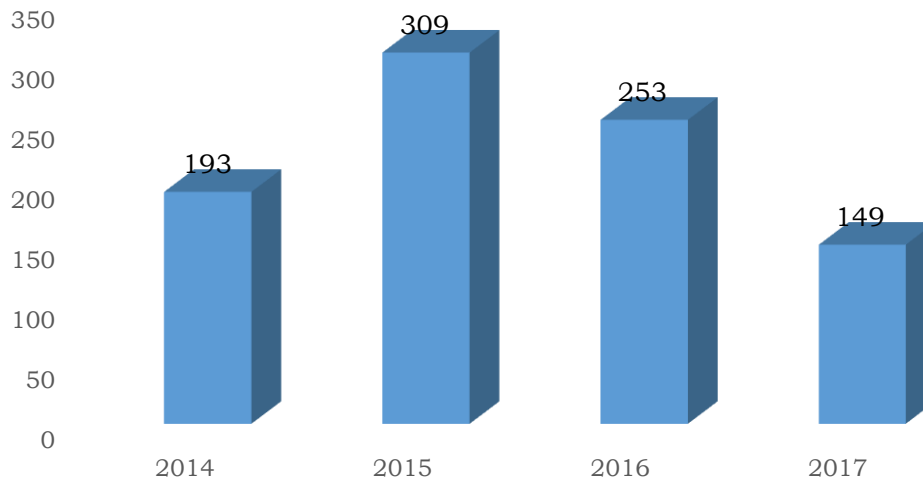
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Angka Kriminalitas dan Tindak Pidana

Angka ini menunjukkan jumlah kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah. Dalam 3 tahun terakhir, kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut fluktuatif. Pada tahun 2014, jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 193 kasus. Kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2015 yakni sebesar 309 kasus, dan mengalami penurunan pada 2016 yakni sebesar 253 kasus. Selanjutnya di tahun 2017, jumlah tindak pidana di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi sebanyak 149 kasus. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten Tanah Laut terjadi perbaikan ketentraman dan ketertiban umum (Gambar 2.18).



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.18 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Tanah Laut (kasus), 2014-2017

Menurut data yang berasal dari masing-masing kepolisian sektor, pada tahun 2014 tindak pidana terbanyak terjadi di Kecamatan Jorong yakni sebesar 75 kasus. Kemudian pada tahun 2015, tindak pidana terbanyak terjadi di Kecamatan Kintap yakni sebesar 75 kasus, dan pada tahun 2016 tindak pidana terbanyak terjadi di Kecamatan Kintap yakni sebesar 58 kasus. Pada tahun 2017, jumlah tindak pidana terbanyak di Kabupaten Tanah Laut terjadi di Kecamatan Kintap dengan kasus sebanyak 21 kasus, diikuti Kecamatan Bati-bati dan Jorong masing-masing sebanyak 17 kasus, dan Kecamatan Takisung dan Pelaihari masing-masing sebanyak 16 kasus. Sementara itu, kasus tindak pidana terendah terjadi di Kecamatan Bajuin yaitu sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.56 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

No.	Kepolisian Sektor	2014	2015	2016	2017
1.	Panyipatan	1	3	5	15
2.	Takisung	6	8	16	16
3.	Kurau	5	20	12	10
4.	Bumi Makmur*	-	-	-	5
5.	Bati-Bati	29	38	38	17
6.	Tambang Ulang	17	26	24	15
7.	Pelaihari	26	44	28	16
8.	Bajuin*	-	-	-	2
9.	Batu Ampar	25	36	24	15
10.	Jorong	75	59	48	17
11.	Kintap	9	75	58	21
Jumlah		193	309	253	149

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

*: Bumi Makmur bergabung dengan Kurau; Bajuin bergabung dengan Pelaihari

Penyelesaian Tindak Pidana

Angka ini menunjukkan jumlah tindak pidana yang telah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dijadikan indikator dengan mengetahui seberapa banyak kasus yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2014 dan 2015, penyelesaian tindak pidana terbesar terjadi di Kecamatan Jorong yakni 51% dan 44% secara berurutan. Sedangkan pada tahun 2016, penyelesaian tindak pidana terbesar terjadi di Kecamatan Kintap yakni sebesar 41%. Pada tahun 2017, dari kasus pidanan sebanyak 149 kasus, jumlah kasus yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 116 kasus (77,85%). Jika dirinci menurut wilayah, kecamatan dengan persentase penyelesaian tindak pidanan tertinggi adalah Kecamatan Bajuim yaitu sebesar 100%, diikuti Kecamatan Jorong sebesar 88,24%, dan Kecamatan Pelaihari sebesar 87,50%.

Tabel 2.57 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2017

No.	Kepolisian Sektor	2014	2015	2016	2017
1.	Panyipatan	1	9	16	10
2.	Takisung	4	13	21	13
3.	Kurau	3	12	12	8
4.	Bumi Makmur*	-	-	-	2
5.	Bati-Bati	15	18	27	13
6.	Tambang Ulang	12	21	22	12
7.	Pelaihari	20	34	18	14
8.	Bajuin*	-	-	-	2
9.	Batu Ampar	7	15	20	10
10.	Jorong	51	44	37	15
11.	Kintap	7	35	41	17
Jumlah		120	201	214	116

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

*: Bumi Makmur bergabung dengan Kurau; Bajuin bergabung dengan Pelaihari

Agama

Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat merupakan wujud dari sikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat khususnya generasi muda, agama dan kepercayaan berguna sebagai tuntunan serta pedoman dalam menjalani kehidupan. Dengan hal tersebut, masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih terarah sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Peningkatan kualitas pada sektor agama merupakan bagian dari upaya dalam meningkatkan kualitas manusia. Peningkatan kualitas manusia akan berkontribusi pada upaya pembangunan. Maka dari itu, agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Pada tahun 2017, data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Laut memeluk agama islam yakni sebanyak 315.124 jiwa.

Kemudian, pada urutan selanjutnya penduduk pemeluk agama protestan sebanyak 1.525 jiwa, pemeluk agama katolik sebanyak 819 jiwa, pemeluk agama hindu sebesar 1.412 jiwa, dan pemeluk agama budha sebesar 255 jiwa. Fasilitas tempat ibadah yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 272 masjid, 651 musala, 12 gereja protestan, 5 gereja katolik, 4 pura, dan 1 vihara.

Tabel 2.58 Jumlah penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Panyipatan	24.430	86	13	-	-
2.	Takisung	29.395	30	8	-	6
3.	Kurau	12.237	2	-	-	-
4.	Bumi Makmur	13.616	2	-	-	2
5.	Bati-bati	38.388	33	98	-	-
6.	Tambang Ulang	16.427	52	7	14	4
7.	Pelaihari	67.646	316	320	193	231
8.	Bajuin	16.377	214	38	-	-
9.	Batu Ampar	21.607	271	152	802	-
10.	Jorong	34.280	90	28	6	3
11.	Kintap	40.721	429	155	397	9
Jumlah		315.124	1.525	819	1.412	255

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.6 Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka memfasilitasi penduduk miskin, Pemerintah mencanangkan berbagai program perlindungan sosial mulai dari bantuan beras hingga bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Tanah Laut, persentase rumah tangga yang menerima bantuan berupa Raskin/Rastra/BPNT pada tahun 2017 adalah sebesar 33,46%, Program Indonesia Pintar sebesar 10,53%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 11,67%, dan Program Keluarga Harapan sebesar 3,40%.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki maupun menerima jaminan sosial di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 13,48%, meningkat dari tahun 2016 yang

hanya 11,79%. Penerima jaminan terbanyak adalah pada jaminan pensiun atau veteran yaitu sebanyak 3,60%. Di wilayah perkotaan, persentase terbesar rumah tangga yang memiliki jaminan sosial adalah berupa jaminan pensiun/veteran yaitu sebesar 11,98%. Sedangkan di daerah perdesaan persentase terbesar rumah tangga yang memiliki jaminan sosial adalah pada jaminan asuransi kecelakaan kerja sebesar 1,66%.

Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis Program	Persentase (%)
Raskin/Rastra/BPNT	10,53
Program Indonesia Pintar	10,53
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	11,67
Program Keluarga Harapan	3,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

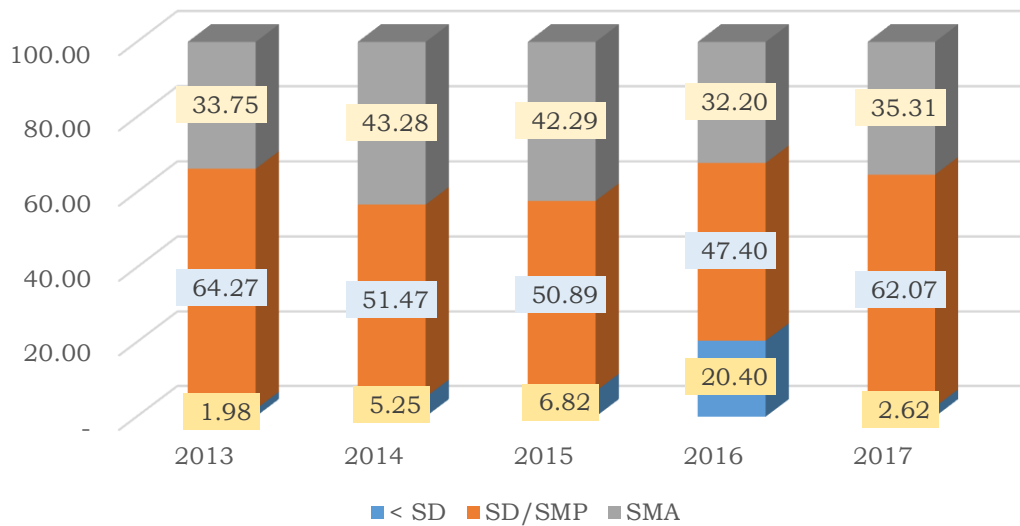
Tabel 2.60 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Maksud Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Jaminan Pensiun/Veteran	11,98	0,79	3,60
Jaminan Hari Tua	5,21	0,56	1,72
Asuransi Kecelakaan Kerja	7,67	1,66	3,17
Jaminan Asuransi Kematian	8,69	0,83	2,80
Pesangon PHK	4,91	1,28	2,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga Miskin

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan seseorang cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Pada tahun 2017 tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas masih didominasi oleh penduduk yang tamat SD/SMP (62,07%). Angka tersebut sebenarnya angka yang terus menurun sejak tahun 2013 yang sebesar 64,27% hingga tahun 2016 mencapai 47,40% namun kembali meningkat di tahun 2017 ini (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2013-2017

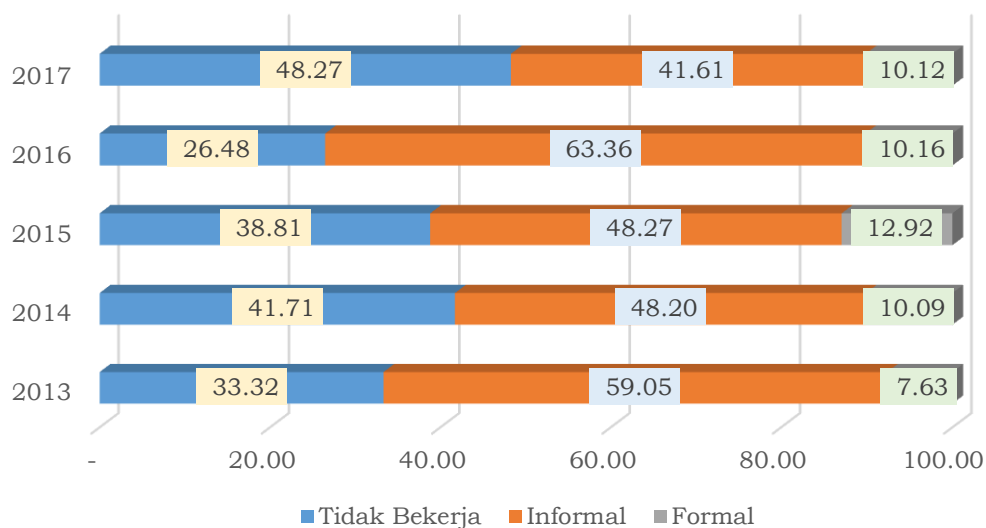
Karakteristik tersebut sejalan dengan fenomena yang sebelumnya terjadi, bahwa penduduk dengan pendidikan yang lebih baik (SMA ke atas) dapat memperbaiki taraf hidup mereka hingga akhirnya berada di atas garis kemiskinan. Dengan adanya hal ini sehingga persentase penduduk miskin yang berpendidikan SD atau SMP ke bawah mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menunjukkan proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu, yaitu 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017, terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, baik pada kelompok umur 7-12 tahun maupun kelompok umur 13-15 tahun. Di tahun 2017 ada sebanyak 88,52% penduduk miskin yang berumur 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut yang masih bersekolah, padahal beturut-turut 3 tahun sebelumnya mencapai angka 100%. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, ada sebanyak 82,50% penduduk miskin yang sedang bersekolah, juga menurun dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016. Turunnya penduduk miskin yang bersekolah seharusnya menjadi fokus program pemerintah dalam pengentasan penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut, mengingat terjadi penurunan hingga di atas 10 persen pada penduduk miskin yang bersekolah pada normalnya jenjang SD atau berusia 7-12 tahun. Selanjutnya, Angka

Melek Huruf (AMH) juga dapat menjadi indikator yang menunjukkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017, AMH penduduk miskin sudah berada pada taraf yang baik yaitu pada angka 99,95% (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Karakteristik Ketenagakerjaan Penduduk Miskin

Beberapa ahli menyatakan bahwa pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Secara sederhana, pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Penduduk miskin identik dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah dan hal tersebut berpengaruh pada pemilihan jenis pekerjaan. Sehingga indikator setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik penduduk miskin yaitu ketenagakerjaan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.20 Persentase Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan, 2013-2017

Pada tahun 2017, di Kabupaten Tanah Laut persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal pada tahun 2017 sebesar 41,61% dan angka ini memiliki kecenderungan fluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya meskipun tidak begitu ekstrim. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin yang bekerja di

sektor informal berada pada angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 63,35%. Penduduk miskin banyak yang bekerja pada sektor informal sehingga tak jarang sektor informal memunculkan permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Beberapa permasalahan yang seringkali muncul pada sektor informal sehingga membuat kemiskinan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meningkat diantaranya keterbatasan modal dan akses terhadap pasar, belum adanya upaya advokasi yang tumbuh dari dalam sektor informal itu sendiri, pelaku pekerja yang belum memiliki manajemen usaha yang bisa membuat pekerjaan lebih efisien, dan belum adanya wadah yang dapat menampung secara maksimal sektor informal melalui teknologi. Menurunnya penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal, namun penduduk miskin yang bekerja di sektor informal jauh lebih banyak daripada sektor informal dapat memunculkan kesimpulan yang ganda (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Di satu sisi, pekerjaan sektor informal dapat menjadi indikasi “penolong” penduduk miskin yang berada mendekati garis kemiskinan dapat memperbaiki taraf hidup mereka, namun dapat juga berarti bahwa penduduk miskin sulit terlepas dari kemiskinan karena alasan pekerjaan di sektor informal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentu diperlukan analisis lebih lanjut apabila pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan melakukan penanganan kemiskinan yang terfokus pada penduduk miskin yang bekerja di sektor informal. Selanjutnya adalah pada penduduk miskin yang tidak bekerja. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja, mencapai angka yang paling tinggi pada periode lima tahun terakhir, yaitu 48,27 persen. ini adalah pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

2.1.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan

sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian besar dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi penganggur (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.61 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Pendidikan Tertinggi	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak Sekolah	5,16	7,39	2,37	6,94	9,91
SD	6,67	11,96	12,42	9,00	0,05
SMP	28,42	15,25	31,22	21,29	5,04
SMA ke Atas	59,75	65,40	53,99	62,76	85,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan jenjang pendidikan, selama periode tahun 2013 hingga 2017 tren TPT cukup fluktuatif terjadi pada penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan SD. Namun, pada tahun 2017 mencapai pada angka yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 9,91%. Berbeda dengan para pengangguran dengan pendidikan tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, pengangguran di Kabupaten Tanah Laut dengan pendidikan terakhir SD dan SMP mengalami angka yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Terus menurunnya TPT di Kabupaten Tanah Laut ternyata berbanding terbalik dengan TPT pada penduduk yang berpendidikan SMA ke atas. Hal ini akan berdampak pada munculnya pengangguran terdidik di Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.62 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak Sekolah	19,14	26,34	21,54
SD	33,53	29,82	32,30
SMP	21,16	17,64	19,99
SMA ke Atas	26,16	26,19	26,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran terdidik dapat muncul karena ada beberapa faktor diantaranya adalah penduduk dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih suka memilih untuk menunggu pekerjaan yang dirasa cocok dengan pendidikan dan menolak untuk bekerja dibidang lain, terutama jika upah yang diterima di bawah standar yang diinginkan. Faktor yang kedua adalah kurangnya minat penduduk untuk berwirausaha, mayoritas penduduk yang berpendidikan tinggi terutama pada lulusan universitas bertujuan hanya mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Menjadi seorang wirausaha adalah alternatif yang bijaksana, selain dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat membantu orang lain. Selanjutnya bila usahanya maju dapat menyerap semakin banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu lebih banyak orang (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Selain dapat dilihat adanya pengangguran terdidik, hal ini juga bisa menjadi suatu refleksi pemerintah Kabupaten Tanah Laut bahwa dalam setahun terakhir, ketersediaan lapangan kerja untuk penduduk yang berpendidikan SD dan SMP telah cukup optimal. Sehingga selanjutnya pemerintah kabupaten Tanah Laut dapat mulai berfokus pada penyediaan lapangan kerja untuk pengangguran yang berpendidikan SD dan pendidikan Menengah Atas. Pemerintah tentu sudah melakukan upaya untuk terus menangani pengangguran di Kabupaten Tanah Laut, namun dengan melihat tren pengangguran terdidik yang terus meningkat, akan lebih baik jika pendidikan wirausaha diimplementasikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga Perguruan tinggi, karena cara berpikir/budaya Indonesia masih berpikir bagaimana mencari pekerjaan bukan bagaimana membuat lapangan kerja. Jika setiap lulusan memiliki jiwa wirausaha maka mereka akan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap pengangguran (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Hanya sektor industri yang agak mencolok mengalami perubahan dari angka berkisar pada tiga koma sekian menjadi enam koma sekian (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.63 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Lapangan Pekerjaan	2013	2014	2015	2017
Pertanian	47,36	48,12	48,29	50,99
Pertambangan dan Penggalian	7,61	7,80	3,97	6,50
Industri	3,67	3,78	3,33	6,91
Listrik, Gas, dan Air	0,17	0,19	1,34	0,76
Konstruksi	5,23	4,55	7,75	1,97
Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel	18,37	19,97	18,83	17,39
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,52	3,49	3,53	3,70
Asuransi, Real Estate, Tanah, dan Jasa Perusahaan	2,01	0,77	0,96	1,05
Jasa Kemasyarakatan	12,04	11,33	11,99	10,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan masih menjadi primadona di Kabupaten Tanah Laut yaitu 50,99% di tahun 2017 dan dengan angka yang terus meningkat dari tahun 2013. Pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar karena pemerintah memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, komoditas pangan utama yang ditetapkan sebagai sasaran pembangunan prioritas nasional ketahanan pangan adalah padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sedangkan di Kabupaten Tanah Laut sendiri, komoditas jagung digadang-gadang menjadi komoditas yang seharusnya diunggulkan dari Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, tentu saja dijumpai berbagai permasalahan dan kendala. Secara umum permasalahan tersebut adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian yang dapat memenuhi peningkatan permintaan

penduduk. Seiring dengan meningkatkan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, bisa dipastikan permintaan terhadap produk pertanian akan terus meningkat. Berkaitan dengan produksi pertanian, produktivitas yang relatif lambat peningkatannya dan luas areal tanaman yang semakin terbatas menjadi penyebab utama rendahnya peningkatan produksi pangan utama. Penyusutan lahan sebagai akibat dari konversi lahan, jaringan irigasi yang rusak, sulitnya memperluas areal tanam baru dan perubahan iklim diduga dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan produksi yang belum sesuai dengan target. Lambatnya peningkatan produktivitas merupakan kendala dalam peningkatan produksi pangan. Penyebabnya antara lain adalah masih terbatasnya difusi benih unggul hasil penelitian dan pengembangan, terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan budidaya yang sesuai dengan anjuran (*good agricultural practices*), dan rendahnya akses petani terhadap sumber pembiayaan. Dengan kondisi demikian, pendampingan penyuluhan dan pelatihan bagi petani menjadi hal penting untuk diperhatikan, disamping perlunya perbaikan kelembagaan perkreditan untuk petani (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya jika dilihat menurut status dalam pekerjaan penduduk pada tahun 2017, terdapat perbedaan pola pada penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja. Penduduk laki-laki yang bekerja memiliki kecenderungan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sedangkan penduduk perempuan berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Dengan kata lain, 3 dari 10 penduduk laki-laki yang bekerja adalah mereka yang dipekerjakan oleh orang lain dengan gaji yang pasti baik sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai. Sedangkan 3 dari 10 penduduk perempuan, hanya menjadi pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Tabel 2.64 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Berusaha Sendiri	27,45	21,74	25,55
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	19,18	10,45	16,28
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,08	2,24	3,47
Buruh/Karyawan/Pegawai	34,12	25,03	31,10
Pekerja Bebas Pertanian	4,08	4,60	4,26
Pekerja Bebas Non Pertanian	3,63	2,18	3,14
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	7,45	33,75	16,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kenyataan ini berdampak pada pekerja rentang atau *vulnerable employment* yaitu pekerja yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Pekerja rentan merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka yang jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata, seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan Pekerja Bukan Penerima Upah lainnya. Pekerja rentan pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Laut yang berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 61,80%, sedangkan penduduk yang bekerja yang berjenis kelamin perempuan 72,73 persennya adalah pekerja rentan. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka sebaiknya pemerintah dapat memberikan perlindungan secara sosial, jaminan hari tua dan kesejahteraan terhadap para pekerja rentan ini mengingat jumlahnya yang masih relatif besar di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap daerah. Sering kali masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan seperti ketidakadilan gender terjadi sebagai akibat dari adanya sistem dan struktur sosial. Selain itu, masih adanya anggapan masyarakat mengenai perbedaan gender juga menjadi pemicu adanya ketidakadilan gender. Apabila keadilan gender tercapai, tentunya akan tercipta keseimbangan proporsi dan siklus antara perempuan dan laki-laki sehingga mewujudkan kondisi yang serasi, seimbang, dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender yang selanjutnya disingkat menjadi IPG merupakan salah satu indeks yang menunjukkan pencapaian kemampuan dasar pembangunan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks ini hampir serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun memperhatikan komponen ketimpangan gender yang mengarah pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPG sama dengan nilai IPM.

Tabel 2.65 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Laut, 2010-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rasio IPG terhadap IPM (%)
2010	80.63	71.16	113.30
2011	83.41	72,00	115.84
2012	85.49	72.75	117.51
2013	86.88	73.46	118.26
2014	87.68	66,50	131.84
2015	87.50	66,99	130.61
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tren dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2010 hingga 2015 cenderung positif atau mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, IPG berada pada angka 80,63% yang kemudian meningkat hingga mencapai angka 87,50% pada tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun yang sama justru cenderung mengalami penurunan, yakni pada tahun 2010 berada pada angka 71,16% menurun hingga berada pada angka 66,99% di tahun 2015. Jika dilihat dari sisi kesenjangan gender, rasio IPG terhadap IPM menunjukkan rasio lebih dari 100% yang berarti bahwa masih terdapat kesenjangan gender di Kabupaten Tanah Laut dimana cenderung kepada penduduk perempuan. Hal tersebut juga ditunjukkan pula melalui angka IPG yang lebih besar dari angka IPM selama kurun waktu 2010-2015. Rasio IPG terhadap IPM di Kabupaten Tanah Laut berkisar pada angka 113-131%.

Partisipasi Perempuan di Kursi DPRD

Menurut BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), jumlah anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 35 orang yang terdiri dari 30 anggota laki-laki dan 5 anggota perempuan. Dapat dilihat bahwa perbandingan antara anggota DPRD

perempuan dan laki-laki adalah 1:6, dimana anggota laki-laki masih mendominasi kursi DPRD. Partai politik yang memiliki anggota DPRD perempuan pada tahun 2017 adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan Hanura dengan masing-masing anggota sebanyak 1 orang perempuan. Jika dilihat berdasarkan persentase, anggota DPRD dengan jenis kelamin perempuan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 14,29%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada lembaga DPRD masih kurang, karena masih didominasi oleh anggota laki-laki.

Tabel 2.66 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2017

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PDI-P	7	1	8
2.	Golkar	3	1	4
3.	Gerindra	5	-	5
4.	Demokrat	2	-	2
5.	Nasdem	3	1	4
6.	PPP	3	-	3
7.	PKB	1	1	2
8.	Hanura	1	1	2
9.	PKPI	1	-	1
10.	PAN	2	-	2
11.	PKS	2	-	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi penduduk perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat melalui jumlah pegawai negeri sipil (PNS) perempuan pada dinas/instansi pemerintah. Menurut data BPS Kabupaten Tanah Laut, jumlah pegawai negeri sipil pada dinas/instansi pemerintah yakni sebanyak 5.273 orang yang terdiri dari 2.829 PNS perempuan dan 2.444 PNS laki-laki. Tercatat bahwa PNS dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 385 orang daripada PNS dengan jenis kelamin laki-laki. Dinas/instansi dengan jumlah PNS perempuan terbanyak yakni guru, tata usaha, dan penjaga sekolah dengan jumlah 1.712. selain itu, instansi yang lebih banyak didominasi perempuan pada tahun 2017 adalah UPTS Puskesmas dimana jumlah pegawai perempuan sebanyak 407 orang, sedangkan laki-laki hanya berjumlah 162 orang. Hal yang sama juga terjadi di instansi kesehatan lainnya yaitu RSUD H. Boejasin dimana pegawai perempuan berjumlah 167 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 90 orang. Persentase pegawai perempuan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa partisipasi penduduk perempuan di lembaga pemerintah sudah cukup baik.

Tabel 2.67 Jumlah PNS Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Dinas/Instansi Pemerintah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat Daerah	83	37	120
Sekretariat DPRD	26	11	37
Sekretariat KPU	7	3	10
Inspektorat	18	14	32
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	35	16	51
Badan Kesbangpol	17	11	28
BPBD	13	1	14
Badan Pendapatan Daerah	19	12	31
BPKAD	31	21	52
Bappeda	22	16	38
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	7	19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	12	27
Dinas Kesehatan	18	14	32
UPT Balai Laboratorium	4	3	7
UPT Instalasi Farmasi	2	5	7
UPT Puskesmas	162	407	569
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	21	13	34
Diskominfo	15	7	22
Diskop, UKM, dan Perdagangan	35	7	42
Dinas Pariwisata	15	9	24
UPT Objek Wisata Pantai Takisung	2	-	2
Dinas PUPR dan Pertanahan	59	23	82
UPT Laboratorium PU	1	1	2
UPT Peralatan	4	1	5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	26	11	37
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13	8	21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33	19	52
UPT Disdikbud Kecamatan	65	15	80
UPT SKB	3	4	7
Dinas PPKB dan PPPA	9	25	34
UPT DPPKB dan PPPA Kecamatan	27	18	45
Dinas Perhubungan	21	8	29
UPT Pelabuhan	12	-	12
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	2	-	2
UPT Terminal	2	1	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	7	20
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH	44	14	58
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31	17	48
Distan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunana	98	51	149
Disnaker dan Perindustrian	31	14	45
RSUD H. Boejasin	90	167	257
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kecamatan	37	5	42
	162	74	236
Guru, TU, dan Penjaga Sekolah	1.077	1.712	2.789
Jumlah	2.444	2.829	5.273

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Penduduk Perempuan Korban Kekerasan

Jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 25 kasus. Berdasarkan jenis kekerasan yang diterima perempuan, kasus kekerasan fisik merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 11 kasus, disusul

kekerasan seksual dan penelantaran masing-masing sebanyak 4 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 3 kasus. Sementara itu, jika dilihat dari unit pelayanan penanganan kekerasan pada perempuan, sebanyak 14 kasus kekerasan ditangani oleh Unit P2PTP2A, 7 kasus ditangani oleh UPPA Polres, dan 4 kasus ditangani unit pelayanan lainnya

Tabel 2.68 Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dan Unit Pelayanan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kekerasan	P2PTP2A	UPPA Polres	Lainnya
Fisik	6	5	-
Psikis	3	-	-
Seksual	2	2	-
Penelantaran	2	-	2
Lainnya	1	-	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Anak Korban Kekerasan

Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 101 kasus. Berdasarkan jenis kekerasan yang diterima anak, kasus kekerasan seksual merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 30 kasus, disusul kekerasan fisik sebanyak 25 kasus, kekerasan psikis sebanyak 4 kasus. Sementara itu, jika dilihat dari unit pelayanan penanganan kekerasan pada perempuan, sebanyak 53 kasus kekerasan ditangani oleh Unit P2PTP2A, 24 kasus ditangani oleh UPPA Polres, dan 24 kasus ditangani unit pelayanan lainnya

Tabel 2.69 Jumlah Korban Kekerasan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Unit Pelayanan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kekerasan	P2PTP2A	UPPA Polres	Lainnya
Fisik	6	16	3
Psikis	4	-	1
Seksual	16	7	7
Penelantaran	1	-	-
Lainnya	26	1	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.9 Pangan

Selain sandang dan papan, tentunya pangan menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia. Pangan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat kecukupan gizi. Semakin tercukupi gizi masyarakat mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan asupan makanan sesuai standar gizi yang baik, meningkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang juga digunakan untuk menunjukkan tingkat

kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X, tahun 2012 menetapkan patokan kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari masing-masing 2.150 kkal dan 57 gram protein (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Berdasarkan data Susenas 2016, angka kecukupan konsumsi di Kabupaten Tanah Laut yang dicerminkan melalui konsumsi kalori dan protein sudah berada diatas batas kecukupan konsumsi penduduk Indonesia. Namun, konsumsi kalori selama tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pada tahun 2015, konsumsi kalori di perkotaan yakni sebesar 2.324,87 kkal/kapita/hari sedangkan konsumsi kalori di pedesaan yakni sebesar 2.307,48 kkal/kapita/hari. Konsumsi protein pada tahun 2015 di perkotaan yakni sebesar 66,74 gram/kapita/hari dan dipedesaan sebesar 64,70 gram/kkal/kapita/hari. Pada tahun 2016, konsumsi kalori menunjukkan penurunan yakni konsumsi diperkotaan sebesar 2.265,83 kkal/kapita/hari dan dipedesaan sebesar 2.122,16 kkal/hari/gram. Sedangkan konsumsi protein menunjukkan pola yang berbeda di perkotaan dan pedesaan. Konsumsi protein menunjukkan peningkatan di daerah perkotaan pada tahun 2016 yakni sebesar 67,05 gram/kapita/hari sedangkan di pedesaan menunjukkan penurunan yakni sebesar 60,24 gram/kapita/hari.

Tabel 2.70 Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) Per Kapita Sehari Menurut Kuintil Pengeluaran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis Kuintil	Kalori	Protein
Kuintil 1	1.718,48	49,48
Kuintil 2	2.058,33	61,82
Kuintil 3	2.119,68	64,21
Kuintil 4	2.317,10	70,69
Kuintil 5	2.558,08	82,74
Kabupaten Tanah Laut	2.154,68	65,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel di atas menunjukkan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017. Dibandingkan dengan kecukupan kalori dan protein di kabupaten Tanah Laut, maka penduduk yang berada pada kuintil 3 rata-rata telah mencukupi kebutuhan kalori minimal. Berbeda dengan kecukupan protein di Kabupaten Tanah Laut yang relatif lebih baik, rata-rata penduduk pada kuintil 2 sudah

mencukupinya. Kurang terpenuhinya standar gizi pada penduduk kuintil 1 tersebut kemungkinan disebabkan karena 3 hal. Pertama, kesadaran bergizi masyarakat masih perlu ditingkatkan lewat berbagai penyuluhan langsung maupun lewat media komunikasi yang lainnya. Kedua, produksi komoditas yang mengandung kalori dan protein masih dapat ditingkatkan lagi, hal ini sebagai akibat dari kurangnya pemahaman petani akan teknologi budidaya yang tepat dan benar. Ketiga dan yang paling utama, harga komoditas yang mengandung kalori dan protein diduga belum sepenuhnya terjangkau oleh kebanyakan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus untuk konsumsi kalori dan protein di wilayah perdesaan karena kedua kebutuhan inilah yang akan menunjang bagaimana kecukupan energi pada wilayah Kabupaten Tanah Laut dan pada jangka panjang sangat berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

2.1.3.1.10 Pertanahan

Permasalahan mengenai pertanahan masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Diberbagai daerah masih banyak ditemukan masalah salah satunya yakni tanah yang tidak memiliki sertifikat. Padahal, pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disertai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kepada pemegang hak tanah. Sebagai upaya pengukuran masalah pertanahan maka dapat menggunakan beberapa indikator seperti persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Pada tahun 2017, layanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat adalah Prona, P3HT, tanah Pemda, Wakaf, dan Redistribusi tanah. Dari target yang ditetapkan sebanyak 9.263 layanan, jumlah layanan yang selesai adalah sebanyak 7.563 layanan.

Tabel 2.71 Produk Pelayanan Proyek/SPK oleh Kantor Pertanahan di Kab. Tanah Laut, 2017

Jenis Kegiatan	Target	Diproses	Selesai	Sisa
Prona, P3HT	9.000	7.392	7.392	-
Tanah Pemda/Instansi	135	47	45	90
Wakaf	7.392	1	1	2
Redistribusi Tanah	125	125	125	-
Jumlah	9.263	7.565	7.563	92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Terkait dengan jenis pelayanan pertanahan pada tahun 2017, jenis layanan yang paling banyak masuk adalah informasi pertanahan yaitu sebanyak 1.752 layanan, disusul layanan peralihan hak sebanyak 936 layanan, pembebanan hak/hak tanggungan sebanyak 668 layanan, pengukuran dan pemetaan sebanyak 542 layanan, dan pendaftaran tanah pertama kali sebanyak 369 layanan. Dari 16 layanan yang tercatat, terdapat dua jenis layanan yang belum mencapai persentase 100% yaitu pengukuran dan pemetaan yang masih menyisakan 119 layanan dan permohonan hak/pemeriksaan tanah yang masih menyisakan 8 layanan.

Tabel 2.72 Rekapitulasi Jenis Pelayanan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Kegiatan	Masuk	Selesai	Sisa
1.	Informasi Pertanahan/Pengecekan	1.752	1.752	-
2.	Pengukuran dan Pemetaan	542	423	119
3.	SKPT	109	109	-
4.	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	369	369	-
5.	Peralihan Hak	936	936	-
6.	Pembebasan Hak/Hak Tanggungan	668	668	-
7.	Roya	347	347	-
8.	Pemisahan/Pemecahan Sertifikat	77	77	-
9.	Penggabungan Sertifikat	2	2	-
10.	Ganti Nama	-	-	-
11.	Penggantian Sertifikat	37	37	-
12.	Permohonan Hak/Pemeriksaan Tanah	360	352	8
13.	Perpanjangan SK	6	6	-
14.	Pertimbangan Teknis/Izin Lokasi	-	-	-
15.	Pertimbangan Teknis/Izin Perubahan	12	12	-
16.	Perubahan HGB menjadi Hak Milik	93	93	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Limbah, dan sebagainya. Selain didukung dengan data dan penjelasan dari beberapa indikator tersebut, perlu adanya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan

RPPLH perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Selain itu, RPPLH juga memuat rencana mengenai pemanfaatan dana atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian utama dimana dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi persyaratan dalam pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Layanan yang diberikan oleh dinas yang mengurus kewenangan lingkungan hidup diantaranya adalah izin lingkungan. Pada tahun 2018, izin lingkungan diberikan kepada Rumah Sakit Ammariz, PT Charoen Pokphand Jaya, PT Megah Mulia Jaya Persada, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2017, izin lingkungan diberikan diantaranya kepada PT Akbar Mitra Jaya, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Berkat Panyipatan Jaya, Endik Medical Clinic, dan perusahaan lainnya.

2.1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftarkan pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Dalam rangka mewujudkan program strategi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperlukan penataan pada bidang administrasi kependudukan. Salah satu usaha untuk mendukung keberhasilan program tersebut adalah dengan memiliki database melalui penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Dengan adanya database tersebut, nantinya dapat digunakan sebagai acuan perumusan maupun

perencanaan pembangunan nasional. KTP Nasional atau saat ini disebut sebagai e-KTP (KTP elektronik) diterapkan berbasis NIK, sehingga data yang didapat tunggal dan akurat sehingga mencegah serta mengurangi adanya potensi KTP ganda atau palsu. Selain itu, data yang telah direkam dapat diakses dari seluruh Indonesia. Tentunya hal ini sangat memudahkan pemerintah dalam urusan administratif penduduk. Di Kabupaten Tanah Laut, proses perekaman e-KTP berbasis NIK telah dilakukan sejak tahun 2012. Hingga tahun 2018, persentase laki-laki dan perempuan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Tanah Laut masing-masing adalah sebesar 99,98%. Untuk semua kelompok pengeluaran baik dari 40 persen terbawah, 40% tengah, dan 20% teratas. Dari tingkat pendidikan, penduduk yang berpendidikan hanya pada tingkat SD ke bawah dan SMP ke atas, persentase kepemilikan NIK adalah sebesar 99,98. Dengan persentase yang tinggi tersebut baik menurut kelompok pengeluaran dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran penduduk terhadap administrasi kependudukan sangat tinggi.

Tabel 2.73 Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
Jenis Kelamin		
Laki-laki	99,97	99,98
Perempuan	99,97	99,98
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	99,97	99,98
40% Tengah	99,97	99,98
20% Teratas	99,98	99,98
Pendidikan Tertinggi		
SD ke Bawah	99,97	99,98
SMP ke Atas	99,98	99,98
Kabupaten Tanah Laut	99,98	99,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu arsip kependudukan mengenai pencatatan kelahiran yang penting dimiliki oleh setiap penduduk. Pembuatan akta kelahiran ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen negara yang berisi identitas anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang dalam mengesahkan dokumen tersebut. Beberapa fungsi dari kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bukti sah hubungan anak dengan orang tua, identitas diri anak, syarat administrasi sekolah, syarat pembuatan KTP, SIM dan paspor, hingga melamar

pekerjaan. Data menunjukkan dalam 4 tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut yakni tahun 2012 hingga 2015, jumlah pemegang akta kelahiran cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang mengajukan permohonan akta sebanyak 4.808 jiwa. Meningkat hampir lebih dari dua kali lipat pada tahun 2013 hingga mencapai 10.808 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah permohonan akta kelahiran menurun hingga mencapai 9.591 jiwa. Pada tahun selanjutnya yakni tahun 2015, jumlah permohonan akta kelahiran kembali menunjukkan penurunan hingga berada pada angka 8.453 jiwa.

Tabel 2.74 Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Akta Kelahiran (jiwa)
2012	4.808
2013	10.808
2014	9.591
2015	8.453
2016	-
2017	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

Pada tahun 2018, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut sebesar 94,55%. Menurut kelompok pengeluaran, persentase penduduk 40% terbawah adalah sebesar 93,03%, penduduk 40% tengah sebesar 95,08%, dan penduduk 20% teratas sebesar 97,52%. Sementara itu, jika melihat berdasarkan tingkat pendidikannya, persentase penduduk berpendidikan SD ke bawah yang memiliki akta kelahiran sebesar 94,25% dan penduduk berpendidikan SMP ke Atas sebesar 94,92%

Tabel 2.75 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2018

Karakteristik	Penduduk 0-17 Tahun
Jenis Kelamin	
Laki-laki	96,13
Perempuan	92,94
Kelompok Pengeluaran	
40% Terbawah	93,03
40% Tengah	95,08
20% Teratas	97,52
Pendidikan Tertinggi	
SD ke Bawah	94,25
SMP ke Atas	94,92
Kabupaten Tanah Laut	94,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Akta Perkawinan

Berdasarkan data pada tahun 2012 hingga 2015, jumlah pemegang akta perkawinan di Kabupaten Tanah Laut juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang mengurus akta perkawinan sebanyak 67 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2013 yakni mencapai angka 97 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang mengurus akta perkawinan menurun hingga mencapai angka 61 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang mengurus akta perkawinan kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 44 jiwa.

Tabel 2.76 Jumlah Akta Perkawinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Akta (jiwa)
2012	67
2013	97
2014	61
2015	44
2016	-
2017	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

Akta Kematian

Data menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 4 tahun antara tahun 2012 hingga 2015, jumlah akta kematian yang dimiliki penduduk Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah pemegang akta kematian sebanyak 73 jiwa. Kemudian menurun drastis pada tahun 2013 yakni hanya sebanyak 14 jiwa. Pada tahun 2014, pemegang akta kematian menunjukkan peningkatan namun tidak cukup signifikan yakni mencapai angka 18 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah pemegang akta kematian menunjukkan peningkatan hampir lebih dari sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya yakni mencapai 182 jiwa.

Tabel 2.77 Jumlah Pemegang Akta Kematian di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Pemegang (jiwa)
2012	73
2013	14
2014	18
2015	182
2016	-
2017	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keterangan: data tahun 2016-2017 tidak diketahui

2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan lembaga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan desa dalam program serta kegiatan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mendorong merumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa. Dalam upaya memutus mata rantai ketimpangan pembangunan, maka dapat dilakukan dengan cara mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta sumber daya manusia di desa, seperti peningkatan sarana dan prasarana desa seperti transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan perumahan; serta peningkatan makanan dan nutrisi, pendidikan dasar, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan dana dari pemerintah pusat kepada desa dalam rangka pembangunan desa. Keberhasilan implementasi dana desa akan berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian desa.

Dalam rangka pembangunan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan beberapa program di bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi pemberdayaan usaha dan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pemerintah terus menggalakkan pendirian Badan Usaha Milik Desa, serta pembinaan usaha ekonomi kreatif berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa. Selain itu,

pemerintah kabupaten juga melakukan pembinaan data dan profil desa, serta pembinaan adat dan budaya desa. Desa yang memiliki potensi selanjutnya akan dikembangkan baik terkait adat maupun budaya desa. Tidak hanya itu, pemberdayaan desa juga dilakukan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penataan administrasi pemerintahan desa, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Bimbingan teknis terus dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, dan lainnya.

2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada dasarnya, pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu caranya adanya dengan program keluarga berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera. KB juga akan mendorong pencapaian SDGs (AKI) dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian dan perpindahan. Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk terus meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan berisiko menghambat pembangunan nasional (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan Angka Kelahiran Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa

usia suburnya. Indikator TFR memiliki kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017, TFR (berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010- 2020) di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan angka 2,84. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2 sampai 3 anak. Ternyata, angka tersebut tidak banyak mengalami perubahan yang berarti dari tahun ke tahun, bahkan sedikit mengalami penambahan angka dari tahun 2010 yang hanya mencapai 2,61 meskipun peningkatan angka tersebut tidak begitu signifikan. Tidak banyak berubahnya angka TFR ini menunjukkan bahwa benar, bonus demografi sudah mulai terjadi di Kabupaten Tanah Laut. GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya. Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. GRR Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah 1,38, sedikit meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar 1,27 (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Status perkawinan penduduk erat kaitannya dengan indikator penduduk lainnya misalnya penggunaan alat/cara KB, pekerjaan, pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya. Status perkawinan dapat dikelompokkan menjadi belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Pengamatan status perkawinan ini sangat perlu dilakukan karena menyangkut tingkat kesejahteraan penduduk. Persentase penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 yang berjenis kelamin laki-laki dengan status belum kawin lebih banyak daripada persentase penduduk berjenis kelamin perempuan, bahkan hampir mencapai dua kali lipatnya. Indikasi dari perbedaan persentase ini adalah bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki cenderung melakukan penundaan perkawinan dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.78 Persentase Penduduk Berusia 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Belum Kawin	31,53	16,58	24,23
Kawin	62,25	79,82	72,36
Cerai Hidup	2,51	1,88	2,20
Cerai Mati	0,71	1,72	1,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan penduduk di suatu daerah adalah tinggi rendahnya angka kelahiran. Disisi lain, tinggi rendahnya angka kelahiran tersebut sangat dipengaruhi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan karena secara kodrat perempuanlah yang melakukan fungsi reproduksi yakni melahirkan, khususnya mereka yang tergolong usia subur (rentang usia 15 – 49 tahun). Dengan adanya teori tersebut maka dapat ditarik premis bahwa semakin tinggi jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, semakin tinggi pula risiko melahirkan anak dalam jumlah besar secara agregat kewilayahan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Usia perkawinan pertama pada penduduk berjenis kelamin perempuan merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki dampak positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Pengaruhnya pada laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada asumsi bahwa semakin muda usia perkawinan pertama penduduk berjenis kelamin perempuan maka rentang waktu untuk dapat melahirkan akan semakin besar. Semakin besarnya rentang waktu untuk melahirkan akan memunculkan risiko tingkat kelahiran yang semakin tinggi dan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya pengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa semakin muda usia perkawinan pertama, maka risiko kematian saat melahirkan menjadi sangat tinggi. Hal ini dimungkinkan mengingat pada usia yang relatif muda kondisi fisik, psikologis maupun fungsi organ reproduksi relatif belum siap dan matang untuk dapat melahirkan secara normal (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.79 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 20-24 Tahun Menurut Umur Perkawinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Pendidikan	<18 Tahun	18 Tahun ke Atas
SD	56,42	43,58
SMP	41,40	58,60
SMA	21,08	78,92
Tanah Laut	39,44	60,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Persentase penduduk berjenis kelamin perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2016 dan 2017 proporsi terbesar usia perkawinan pertama di Kabupaten Tanah Laut adalah pada kelompok perempuan yang berusia 18 tahun ke atas, yaitu sebesar 60,56%. Angka ini dapat menjadi indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Tanah Laut mulai menunda kawin pertama mereka yang tadinya di tahun 2016 ada sebanyak 48,83%. Usia kawin pertama yang semakin meningkat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan pemahaman terhadap perkawinan yang semakin baik, serta karena tuntutan ekonomi atau perkembangan zaman yang mengharuskan wanita bekerja yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kelahiran penduduk karena masa suburnya semakin berkurang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan tren meningkat dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan perempuan lulusan SMA hanya setengah dari perempuan lulusan SD yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Dengan adanya gambaran ini, dapat menjadi fokus pemerintah untuk membuat kebijakan terkait kesehatan ibu, keluarga berencana, dan kebijakan fertilitas lain yang disasarkan pada perempuan yang lulusan SD atau tidak lulus SD yang sudah kawin karena memiliki presentase terbesar dibandingkan pendidikan lainnya (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Penggunaan Alat/Cara KB

Kebijakan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Salah satu program yang terus mendapat perhatian pemerintah, mengenai fertilitas adalah Program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program ini ditentukan dari berbagai faktor baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Faktor pendidikan terakhir anggota keluarga, pengetahuan mengenai keluarga berencana, dan tingkat kemampuan ekonomi merupakan faktor internal dalam keluarga peserta KB yang berpengaruh pada partisipasi maupun pemilihan alat kontrasepsi. Dari Tabel 2,75 dapat dilihat bahwa masih ada 16,45% perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan tidak menggunakan KB. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 2,33%. Hal ini menunjukkan pencapaian pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang membaik pada program Keluarga Berencana sehingga pengguna KB meningkat (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Alasan utama terbesar dari perempuan yang tidak menggunakan KB adalah karena responden sedang hamil, akses ke fasilitas kesehatan, biaya terlalu mahal, dan takut gemuk. Selain adalah tersebut, ada juga alasan lain seperti karena adanya alasan fertilitas seperti jarang “kumpul”, sudah memasuki masa menopause, mandul, ingin anak sebanyak mungkin, dan adanya kepercayaan atau tradisi tertentu. Selain dilihat dari persentase wanita yang tidak pernah menggunakan KB, juga dapat dilihat melalui persentase wanita yang pernah menggunakan, yang berarti sekarang sudah tidak menggunakan lagi, yang mengalami penurunan. Penurunan dari angka 16,36% pada tahun 2016 menjadi 15,05% pada tahun 2017, serta adanya peningkatan TFR menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut melakukan perencanaan dalam bereproduksi melalui program KB, karena mereka tetap menghasilkan keturunan (bertambah) namun pengguna KBnya bertambah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB, 2012-2017

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jumlah Akseptor KB Aktif	Rasio Akseptor KB (%)
2012	67.928	55.724	82,03
2013	67.928	57.557	84,73
2014	71.428	60.104	84,15
2015	71.207	58.468	82,11
2016	68.065	53.198	78,16
2017	64.928	51.143	78,77

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada Tabel 2.76 di atas tampak bahwa perkembangan rasio penggunaan akseptor KB meningkat pada periode 2012 hingga 2013. Namun pada perkembangannya di beberapa tahun terakhir rasio akseptor KB yang aktif menurun. Pada awalnya di tahun 2012, jumlah pasangan usia subur mencapai 67.928 sementara rasio akseptor KB sudah mencapai 82,03% dan bertambah menjadi 84,73% pada tahun 2013 dengan kondisi jumlah pasangan usia subur yang sama. Akan tetapi pada tahun selanjutnya justru turun menjadi 84,15% dengan jumlah pasangan usia subur mencapai 71.428. Selanjutnya pada tahun 2015 ketika jumlah pasangan usia subur mencapai 71.207, rasio akseptor KB turun kembali mencapai level 82,11% dan pada data terakhir tahun 2016 tingkat rasio akseptor KB menurun kembali hingga level 78,16% dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 68.065. Pada tahun 2017, Jumlah PUS di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 64.928 pasangan. Wilayah dengan PUS

tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 13.046 PUS, disusul Kecamatan Kintap sebanyak 8.896 PUS, dan Kecamatan Bati-bati sebanyak 7.420 PUS. Melihat dari peserta KB, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 51.143 peserta sehingga rasio akseptor KB aktif pada tahun 2017 adalah sebesar 78,77%. Jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan yaitu sebanyak 26.861, disusul pil sebanyak 17.702, dan implant sebanyak 3.797.

Sementara itu terkait dengan keberadaan fasilitas kesehatan terkait dengan keluarga berencana, dapat dilihat melalui jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Kondisi yang ada pada tahun 2017 di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut:

Tabel 2.81 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	KKB	PPKBD
1.	Panyipatan	2	10
2.	Takisung	1	12
3.	Kurau	2	11
4.	Bumi Makmur	1	11
5.	Bati-Bati	4	14
6.	Tambang Ulang	1	9
7.	Pelaihari	4	20
8.	Bajuin	2	9
9.	Batu ampar	2	14
10.	Jorong	3	11
11.	Kintap	2	14
Jumlah		24	135

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada Tabel 2.81 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah KKB cukup bervariasi di setiap kecamatan. Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 memiliki 24 unit Klinik Keluarga Berencana yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah KKB di setiap kecamatan berkisar antara 1 hingga 4 unit KKB. Kecamatan yang memiliki fasilitas Klinik Keluarga Berencana terbanyak yaitu Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Pelaihari yang masing-masing memiliki 4 unit KKB. Sementara Kecamatan yang hanya memiliki 1 unit KKB adalah Kecamatan Takisung, Kecamatan Bumi Makmur, dan Kecamatan Tambang Ulang. Selanjutnya terkait dengan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD), di seluruh Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 tercatat memiliki 135 PPKBD

yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah PPKBD cukup bervariasi di tiap kecamatannya, yang terbanyak berada di kecamatan pelaihari dengan 20 PPKBD. Sementara itu kecamatan yang memiliki PPKBD paling sedikit adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin yang masing-masing memiliki 9 PPKBD.

2.1.3.1.15 Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang giat melaksanakan pembangunan di semua sektor ekonomi. Untuk itu, sarana dan prasarana transportasi yang bagus merupakan syarat mutlak yang diperlukan dan menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mobilitas antar kecamatan, ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi darat dibagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan, terminal penumpang, dan jaringan pelayanan angkutan umum. Pada Tabel 2.82 berikut dipaparkan jenis jalan yang menghubungkan berbagai tempat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017:

Tabel 2.82 Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2017

Jenis	Keterangan
Sistem jaringan jalan nasional	a. jaringan jalan kolektor primer K-1, meliputi :
	1. sp. Liang Anggang – Desa Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut);
	2. Ds. Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut) – Bati Bati;
	3. Bati Bati – Batas Kota Pelaihari;
	4. Batas Kota Pelaihari – KP. Asam Asam;
	5. KP. Asam Asam – Kintap;
	6. Kintap – Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu);
	7. Jalan Gunung Kayangan;
	8. Jalan KH. Mansyur;
	9. Jalan Muslimin (Pelaihari);
	10. Jalan Kemakmuran (Pelaihari);
	11. Jalan Sarang Halang (Pelaihari);
	12. Jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari).
13. jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol), meliputi :	

Jenis	Keterangan	
	14. Lianggang-Pelaihari dan	
	15. Pelaihari-Pagatan.	
	b. jaringan jalan strategis nasional rencana(Arteri Primer), meliputi :	
	1. rencana pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis Jorong,	
	2. Jalan akses menuju pelabuhan Pelaihari :	
	3. Jalan akses pelabuhan pelaihari 4 km(bagian dari rencana pembangunan jalan missing link 1000 km),	
	4. Jalan Kurau Pulau sari,	
	5. Jalan Ambungan – Tajau Pecah dan Tajau Pecah – pelabuhan Swarangan,	
	6. Jalan Gunung Kayangan (Pelaihari). Untuk akses Utara : Pelabuhan Swarangan – Salaman – Riam Adungan – utara(Kab. Banjar).	
	Sistem jaringan jalan provinsi	a. jaringan jalan kolektor primer K-2, meliputi:
		1. Banjarbaru – Bati-bati,
		2. Gambut – Pulau Sari,
	3. Pelaihari – Takisung, dan	
	4. Pelaihari – Batakan;	
	b. jaringan jalan kolektor primer K-3, meliputi:	
	1. Jalan Antasari (Pelaihari),	
	2. Jalan arah Takisung dan	
	3. Jalan arah Batakan.	
Sistem jaringan jalan Kabupaten	Jaringan jalan lokal primer, meliputi : seluruh ruas jalan lokal di Pelaihari	

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Perkembangan jaringan jalan di Kabupaten Tanah Laut akan membuat aktivitas ekonomi seluruh kabupaten menjadi Hidup. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung semakin meningkat. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Melihat perkembangan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Tanah Laut, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah kendaraan dalam kurun waktu 2012-2017. Pada tahun 2012, jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan adalah sebanyak 15.173 unit dan pada tahun 2017 berkurang menjadi sebanyak 9.121 unit. Dalam kurun waktu tersebut, jenis kendaraan yang mengalami penambahan unit adalah mobil penumpang dari sebanyak 804 unit pada tahun 2017 menjadi sebanyak 1.132 unit.

Tabel 2.83 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Mobil Ransus	Jumlah
2012	804	-	1.046	13.211	112	15.173
2013	766	5	973	11.519	97	13.360
2014	1.298	2	917	10.815	123	13.155
2015	1.098	-	857	6.699	147	8.801
2016	936	3	448	5.956	237	7.580
2017	1.132	1	557	7.387	44	9.121

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut yang salah satunya dilakukan dengan melakukan pengawasan kendaraan bermotor (uji berkala). Jumlah kendaraan yang wajib uji di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 3.735 unit, yang terdiri dari 950 unit kendaraan umum, kereta tempel/gantungan sebanyak 2 unit, dan kendaraan tidak umum/dinas sebanyak 2.783 unit, diikuti pick up sebanyak 91 unit, dan bus sebanyak 24 unit. Kendaraan umum yang wajib melaksanakan uji paling banyak adalah truk yaitu sebanyak 826 unit. Sementara untuk kendaraan tidak umum/dinas yang paling banyak diwajibkan melakukan uji adalah mobil pick up yaitu sebanyak 2.364 unit disusul truk sebanyak 384 unit dan bus sebanyak 27 unit.

Tabel 2.84 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2017

No.	Jenis Kendaraan	2015	2016	2017
A.	Kendaraan Umum			
1.	Mobil Barang			
a.	Truk	729	823	826
b.	Pick Up	92	99	91
c.	Tangki	19	12	9
2.	Mobil Bus			
a.	Bus	39	36	24
	Jumlah	879	970	950
B.	Kereta Tempel/Gandengan	1	2	2
C.	Tidak Umum/Dinas			
1.	Mobil Barang	432	372	384
a.	Pick Up	2.518	2.539	2.364
b.	Tangki	5	8	3
c.	Lainnya	2	5	5
2.	Mobil Bus	24	24	27
	Jumlah	2.981	2.948	2.783

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selanjutnya, berkaitan dengan transportasi laut yang ada di Kabupaten Tanah Laut merupakan moda transportasi yang cukup banyak digunakan. Berdasarkan data terakhir tersebut dapat dikatakan bahwa kapal motor merupakan moda transportasi laut pilihan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang jumlahnya mencapai 1953 unit dan tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutnya diikuti oleh perahu tanpa motor yang berjumlah 90 unit, dan perahu motor tempel sejumlah 24 unit.

Tabel 2.85 Jumlah Transportasi Laut Berdasarkan Jenisnya, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kendaraan		
		Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
1.	Panyipatan	54	-	357
2.	Takisung	6	23	590
3.	Kurau	15	-	217
4.	Bumi Makmur	-	-	282
5.	Bati-Bati	-	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	-	-	-
8.	Bajuin	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-
10.	Jorong	-	1	289
11.	Kintap	15	-	218
Jumlah		90	24	1.953

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam perkembangannya kedepan, dalam Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 dipaparkan juga mengenai system Jaringan Perkeretaapian. Sistem Jaringan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Rencana pengembangan sistem jaringan jalan kereta api, meliputi jalan angkutan penumpang Jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL, yaitu ruas Banjarmasin – Pelaihari – Pelabuhan Pelaihari Jorong - Asam-Asam – Kintap - Satui – Pagatan – Pelabuhan Batulicin dan Kersik Putih Batulicin – Serongga – Senggayam – Tanah Grogot - Balikpapan. Selain itu ruas Pelaihari – Batakan (Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Dewa). Untuk pembangunan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Selain itu dalam Perda yang sama juga dibahas mengenai Sistem Jaringan Transportasi Udara. Sistem Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, adalah rencana penyusunan Rencana Induk Pembangunan Bandar Udara Internasional sebagai bandar udara alternatif, yakni bandara Maluka

Baulin di Kecamatan Kurau, seluas kurang lebih 939,58 (sembilan ratus tiga puluh Sembilan koma lima puluh delapan) hektar.

2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Salah satu layanan komunikasi dan informatika yaitu menggunakan layanan komunikasi melalui kantor pos di Kabupaten Tanah Laut. Pada Tabel 2.86, di bawah ini adalah perkembangan jumlah kantor pos berdasarkan jenisnya di Kabupaten Tanah Laut pada periode 2012-2017:

Tabel 2.86 Jumlah Kantor Pos Berdasarkan Jenisnya, 2012-2017

Tahun	Kantor Pos	Pos Pembantu	Rumah Pos	Agen Pos	Jumlah
2012	7	1	0	0	8
2013	7	1	0	0	8
2014	8	0	1	4	13
2015	8	0	1	7	13
2016	8	0	1	9	18
2017	7	-	3	5	15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Untuk tahun 2017, jumlah layanan pos di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 15 unit yang terdiri dari 7 unit kantor pos, 3 unit rumah pos dan 5 unit agen pos. Kantor pos di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Kurau, Bati-Bati, Pelaihari, Jorong, dan Kintap. Pada tahun 2016 terdapat 18 (delapan belas) kantor pos di Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri dari 8 Kantor pos, 1 buah rumah pos, dan 9 agen pos. Jumlah ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kantor pos pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012-2013 hanya berjumlah 8 kantor pos, selanjutnya pada tahun 2014-2015 semakin bertambah menjadi 13 kantor pos, hingga pada tahun 2016 sudah mencapai 18 kantor pos di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya berkaitan dengan layanan surat yang diterima menurut sifat pengirimannya pada periode 2012-2017, jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.87 di bawah:

Tabel 2.87 Banyaknya Surat Pos yang Diterima Menurut Sifat Pengiriman, 2012-2017

Tahun	Kilat Khusus	Kilat	Surat Pos Biasa	Luar Negeri	Dinas
2012	12.120	3020	750	41	372
2013	-	-	-	-	-
2014	15.107	-	4.652	21	474
2015	44.325	736	4.281	51	689
2016	-	-	-	-	-
2017	55.990	667	7.211	226	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan data yang dihimpundari BPS, pada periode 2012-2017 terdapat lima jenis surat yang dikirim melalui kantor pos. Pada data terakhir yang sudah dipublikasikan, surat kilat khusus di Kabupaten Tanah laut sejumlah 55.990 surat, surat kilat berjumlah 667 surat, surat pos biasa sejumlah 7.211 surat, dan surat luar negeri sejumlah 51 surat. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan tren pada jenis surat kilat khusus dan surat pos biasa. Akan tetapi menunjukkan tren yang turun pada jenis surat kilat. Sementara itu, untuk jumlah paket pos di Kabupaten Tanah Laut dibedakan menjadi paket kilat khusus dan kilat dimana jumlahnya masing-masing pada tahun 2017 sebanyak 18.969 paket dan 2.779 paket.

Tabel 2.88 Jumlah Peket Pengiriman dan Penerimaan Paket Pos Menurut Kecamatan, 2017

No.	Kantor Pos	Kilat Khusus	Kilat
1.	Panyipatan	435	-
2.	Takisung	1.273	-
3.	Kurau	1.600	250
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-Bati	6.503	681
6.	Tambang Ulang	-	-
7.	Pelaihari	6.970	1.267
8.	Bajuin	-	-
9.	Batu Ampar	920	206
10.	Jorong	456	375
11.	Kintap	812	-
Jumlah		18.969	2.779

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan Tabel 2.89 dapat dilihat tren yang cukup bervariasi bagi para pengguna layanan Speedy. Pada tahun 2012 penggunanya mencapai 1.112 lalu naik menjadi 1.333 pada tahun 2013. Kenaikan tersebut tidak berlanjut ketika jumlah pengguna layanan Speedy tercatat anjlok menjadi sejumlah 835 pengguna di tahun

2014. Selanjutnya di tahun 2015 dan 2016 terjadi tren kenaikan jumlah pengguna layanan Speedy yang masing-masing sejumlah 937 dan 1154 pengguna. Selanjutnya di tahun 2017, jumlah pelanggan Speedy mengalami lonjakan signifikan menjadi sebanyak 2.148 pengguna. Lain halnya dengan Jumlah warung internet atau *warnet* di Kabupaten Tanah Laut, jumlahnya secara perlahan mengalami penurunan, dan hanya sekali mengalami kenaikan di periode tahun 2014-2015 dari 15 menjadi 23 warung internet. Pada tahun 2012 jumlah warung internet yang ada di Kabupaten Tanah Laut mencapai 29 buah, namun pada tahun 2016 jumlahnya tinggal 12 warung internet saja, dan pada tahun 2017 bertambah lagi menjadi sebanyak 13 unit.

Tabel 2.89 Jumlah Pengguna Layanan Internet Speedy dan Warung Internet, 2012-2017

Tahun	Pengguna Layanan Speedy	Jumlah Warung Internet
2012	1.112	29
2013	1.333	29
2014	835	15
2015	937	23
2016	1.154	12
2017	2.148	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Perkembangan gawai cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi gawai membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan gawai/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya. Kegiatan sosial lain yang dilakukan penduduk adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses pada informasi dan hiburan, seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar dan mengakses internet. Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media masa, salah satunya adalah internet.

Situs internet saat ini sangat beragam jenisnya, salah satunya adalah media sosial yang bisa digunakan oleh masyarakat facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan banyak media sosial lain. Namun di tahun 2017 penduduk Kabupaten Tanah Laut masih relatif rendah dalam mengakses internet yaitu sebanyak 22,25% bahkan angka tersebut

mengalami penurunan dari tahun 2016. Setelah dilihat datanya lebih detail, dapat dilihat bahwa sebenarnya kelompok jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hanya saja kelompok penduduk jenis kelamin perempuan di perdesaan mengalami penurunan yang memengaruhi angka agregasi pengguna internet di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017.

Tabel 2.90 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, 2016-2017

Jenis Kelamin	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Laki-laki	35,45	39,17	18,84	18,97	23,00	24,19
Perempuan	33,65	36,43	18,23	14,68	22,01	20,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang mengakses internet lebih besar daripada penduduk berjenis kelamin perempuan baik di perdesaan maupun perkotaan, yaitu sebesar 24,19% untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 20,22% untuk penduduk berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan perbedaan desa kota, terdapat kesenjangan yang relatif besar. Pada tahun 2017 penduduk di daerah perkotaan yang mengakses internet ada sebanyak 37,84% sedangkan di perdesaan hanya sebanyak 16,88%. Angka pengguna internet di perdesaan bahkan menurun dari tahun sebelumnya. Salah satu indikasi mengapa pengguna internet di perdesaan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan mengalami penurunan adalah karena adanya migrasi penduduk muda perempuan yang melek teknologi. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya adalah masyarakat menjadi semakin mudah dalam memperoleh akses internet sehingga masyarakat dapat mengakses beragam informasi yang akan menambah wawasan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Secara defimisi Koperasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan Koperasi di

Kabupaten Tanah Laut jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Melihat potensi koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan ini, dan sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang dewasa ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka keberadaan koperasi harus terus dikembangkan dengan meningkatkan profesionalitas manajemen para pengurus koperasi. Di Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa jenis koperasi seperti Koperasi Unit desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), dan jenis-jenis koperasi lainnya.

Tabel 2.91 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	KUD	KPR	KPN	Lainnya	Jumlah
2012	53	-	23	87	163
2013	53	-	23	91	167
2014	52	-	23	84	159
2015	53	-	22	87	162
2016	38	-	16	107	161
2017	38	14	16	78	146

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2012, total koperasi di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 163 koperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 53 Koperasi Unit Desa, 23 Koperasi Pegawai Negeri dan 87 Koperasi jenis lainnya. Pada tahun 2013 jumlah total naik menjadi 167 koperasi karena penambahan koperasi lainnya sebanyak 4 koperasi, sementara KUD dan KPN jumlahnya tetap. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Tanah Laut turun menjadi 159 Koperasi. Hal tersebut dikarenakan Koperasi Unit Desa turun menjadi 52 koperasi dan koperasi jenis lain turun juga menjadi sejumlah 84 koperasi saja. Pada tahun 2015 jumlah koperasi secara keseluruhan naik menjadi 162 koperasi dikarenakan penambahan KUD menjadi 53 koperasi dan koperasi lainnya menjadi 87 buah, akan tetapi juga terjadi penurunan pada jenis koperasi pegawai negeri menjadi 22 koperasi. Terakhir, pada tahun 2016 tercatat bahwa jumlah koperasi keseluruhan di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 161 Koperasi terdiri dari 38 Koperasi Unit Desa, 16 Koperasi Pegawai Negeri dan 107 koperasi lainnya. Secara mendetail, komposisi jumlah koperasi per kecamatan pada tahun 2017 tampak pada Tabel 2.92 berikut ini:

Tabel 2.92 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kab.Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi				Jumlah
		KUD	KPR	KPN	Lainnya	
1.	Panyipatan	3	-	-	5	8
2.	Takisung	4	1	2	4	11
3.	Kurau	1	-	-	2	3
4.	Bumi Makmur	3	-	-	1	4
5.	Bati-Bati	3	2	1	2	8
6.	Tambang Ulang	2	-	1	5	8
7.	Pelaihari	4	3	11	27	45
8.	Bajuin	5	-	-	1	6
9.	Batu Ampar	3	3	1	7	14
10.	Jorong	5	2	-	13	20
11.	Kintap	5	3	-	111	19
Jumlah		38	14	16	78	146

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dari jumlah KUD sebanyak 38 unit pada tahun 2017, wilayah yang memiliki jumlah KUD terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari, Jorong, dan Kintap yang masing-masing memiliki 5 unit KUD. Jumlah keseluruhan anggota KUD pada tahun 2017 adalah 12.522 anggota dimana jumlah anggota KUD tebranyak berasal dari Kecamatan Pelaihari yaitu 2.518 anggota. Secara keseluruhan jumlah simpanan anggota KUD adalah sebesar Rp 3,53 miliar dimana simpanan terbesar berada di Kecamatan Kintap yaitu sebesar Rp 640,32 juta.Sementara itu, dari jumlah koperasi Non KUD sebanyak 108 unit, sebagian besar koperasi berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 108 unit. Jumlah anggota koperasi Non KUD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 16.051 anggota dengan jumlah simpanan sebesar Rp 41,631 miliar.

Tabel 2.93 Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Simpanan (Rp Juta), 2017

No.	Kecamatan	KUD			Non KUD		
		Jumlah	Anggota	Simpanan	Jumlah	Anggota	Simpanan
1.	Panyipatan	3	614	592,14	5	889	579,51
2.	Takisung	4	1.038	601,99	7	1.025	3.209,86
3.	Kurau	1	48	61,11	2	71	-8,49
4.	Bumi Makmur	3	534	27,75	1	32	6,75
5.	Bati-Bati	3	309	145,40	5	1.621	6.059,77
6.	Tambang Ulang	2	1.223	45,36	6	314	218,92
7.	Pelaihari	4	2.518	147,75	41	5.528	10.233,13
8.	Bajuin	5	1.300	549,71	1	539	593,50
9.	Batu Ampar	3	1.613	324,56	11	2.532	1.924,41
10.	Jorong	5	1.931	389,52	15	738	16.164,62
11.	Kintap	5	1.393	640,32	14	2.762	2.649,06
Jumlah		38	12.522	3.525,61	108	16.051	41.631,04

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang juga dicakup dalam susenas adalah berkaitan dengan penerima kredit usaha. Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dalam bentuk kredit usaha ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan UMKM, peningkatan produktifitas, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Beberapa contoh pemberian kredit usaha yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), kredit usaha rakyat, program koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 2017, rumah tangga penerima kredit usaha di Kabupaten Tanah Laut sebesar 17,04%, meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 6,51%. Jika dilihat menurut wilayah, jumlah rumah tangga penerima kredit perkotaan yaitu sebesar 21,43% dengan persentase yang lebih besar daripada wilayah perdesaan yaitu sebesar 15,91 persen. Dengan adanya perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan ini menjadi sebuah indikasi bahwa di wilayah perkotaan akses untuk mendapatkan modal untuk melakukan usaha bagi para pengusaha terutama usaha informal, lebih baik daripada wilayah perdesaan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Secara umum, kredit usaha rakyat terbesar di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 adalah program bank selain KUR. Namun jika dilihat berdasarkan agregasi wilayah desa kota, dapat terjadi perbedaan kredit usaha rakyat yang digunakan. Di perkotaan, kredit dengan persentase terbesar adalah berupa program Bank selain KUR yaitu sebesar 9,28%. Kredit usaha dari Bank Umum selain KUR yaitu ketika ada rumah tangga yang mendapatkan kredit usaha dari bank dengan cara mengajmisalnya kredit perumahan seperti KPR, kredit usaha kecil seperti Kupedes, dsb. Sedangkan di perdesaan, persentase terbesar adalah program kredit usaha rakyat yaitu sebesar 5,96%. Hal ini menandakan bahwa salah satu skim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat di wilayah perdesaan. Dengan adanya hal ini, diharapkan di wilayah perdesaan, UMKM dan koperasi mulai banyak yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Selain itu, diharapkan akan semakin sedikit masyarakat yang terjebak pada sistem rentenir dan ijon.

Tabel 2.94 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis dan Daerah Tempat Tinggal, 2017

Jenis Kredit Usaha	Kota	Desa	KPN
Kredit Usaha Rakyat	5,06	5,96	5,47
Program Bank Selain KUR	9,28	2,63	4,30
BPR	0,18	0,21	0,20
Program Koperasi	0,00	3,16	2,37
Perorangan (Dengan Bunga)	0,71	0,78	0,77
Perusahaan Leasing	5,69	1,20	2,33
Lainnya	0,51	1,97	1,60

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Pada RPJMN 2015-2019 sudah tertuang pula poin mengenai peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, yang menandakan keseriusan dari pemerintah nasional untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk memudahkan proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyediakan website yang dapat menjadi panduan dalam pengurusan perizinan. Website yang ada telah menampilkan prosedur pendaftaran izin, simulasi perhitungan retribusi, cek status proses perizinan, dan berbagai informasi perizinan seperti TDP, SIUP, dan izin lainnya. Selain itu, website juga menampilkan potensi daerah unggulan berupa video yang dapat menjadi pertimbangan calon investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Tanah Laut.

Perkembangan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2012-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, nilai investasi PMA adalah sebesar US\$ 64,15 juta dan pada tahun 2018, nilai investasi mengalami penurunan menjadi sebesar US\$ 2,88 juta. Dari sisi jumlah proyek yang dikerjakan, terdapat 84 proyek investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (Tabel 2.95). Melihat sektor yang menjadi primadona bagi PMA, terlihat bahwa sebagian besar PMA menanamkan modalnya pada sektor pertambangan. Sektor lain yang menjadi primadona bagi PMA adalah sektor industri makanan dan sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Untuk investasi yang berasal dari Penanamam Modal Dalam Negeri (PMDN), terdapat 192 proyek yang dikerjakan dalam kurun waktu 2012-2018. Jika investasi PMA cenderung menurun, investasi yang berasal dari PMDN justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, investasi yang berasal dari PMDN adalah sebesar Rp 85,99 miliar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp 701,45 miliar. Di sektor primer, primadona PMDN adalah sektor pertambangan dan sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sektor lain yang menjadi primadona adalah sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Pada tahun 2017, sektor yang menerima investasi adalah sektor industri makanan dan sektor listrik, gas, dan air.

Tabel 2.95 Jumlah Proyek dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2018

Sektor		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)	Proyek	Investasi (US \$ Ribu)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	3,4	-	-	-	-	3	5.980,0	2	749,2	2	3.029,9	1	-
	Kehutanan	1	6.000,0	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Pertambangan	4	48.961,9	5	-	3	7.211,4	4	3.600,0	6	857,3	5	-	5	1.706,4
	Jumlah	6	54.965,3	8	-	4	7.211,4	7	9.580,0	9	1.606,5	7	3.029,9	6	1.706,4
Sektor Sekunder	Industri Makanan	1	458,0	2	-	-	-	3	5.580,0	3	8.843,2	6	17.144,2	2	997,5
	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75,6	1	-	1	-
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	8.735,0	3	7.614,0	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Jumlah	3	9.193,0	5	7.614,0	-	-	4	5.580,0	4	8.918,8	8	17.144,2	3	997,5
Sektor Tersier	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	273,3	2	16,6
	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Transportasi,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sektor	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)	Pro yek	Investasi (US \$ Ribu)
Gudang, dan Telekomunikasi														
Jasa Lainnya	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	160,4
Jumlah	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	2	273,3	3	177,0
Total	9	64.158,3	14	7.614,0	5	7.211,4	11	15.160,0	16	10.525,3	17	20.447,4	12	2.880,9

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018

Tabel 2.96 Jumlah Proyek dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2018

Sektor	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		
	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	1.810,1	4	-	2	66.902,4	6	120.405,8	4	-	6	752,9	4	-
	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	2	4.700,0	-	-	-	-	-	-
	Perikanan	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertambangan	-	-	2	534.830,7	-	3.000,0	2	-	-	-	10	35.247,7	8	0,6
	Jumlah	2	1.810,1	8	534.830,7	4	69.902,4	10	125.105,8	4	-	16	36.000,6	12	0,6
Sektor Sekunder	Industri Makanan	10	37.693,0	12	12.240,8	6	272.872,6	2	3.534,7	6	34.782,2	20	307.036,2	18	62.063,2
	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	Industri	2	-	2	13.906,5	2	-	-	-	4	39.659,3	4	21,5	2	-

Sektor	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)	Pro yek	Investasi (Rp Juta)
Karet dan Plastik														
Industri Mineral Non Logam	-	-	2	-	2	-	2	58.600,0	-	-	2	2.400,0	-	-
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	4	20.353,0	2	149,1	-	-	2	70.107,5	2	-	2	-	-	-
Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Jumlah	16	58.046,0	18	26.296,4	10	272.872,6	6	132.242,2	12	74.441,5	30	309.457,7	24	62.063,2
Sektor Tersier														
Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	639.389,6
Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	-	-	6	3.993.877,8	2	432.932,4	2	-	2	-	2	-	-	-
Jasa Lainnya	2	26.131,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	26.131,5	6	3.993.877,8	2	432.932,4	2	-	2	-	2	-	4	639.389,6
Total	20	85.987,6	32	4.555.004,9	16	775.707,4	18	257.348,0	18	74.441,5	48	345.458,3	40	701.453,4

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018

2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Kepemudaan

Pembangunan Pemuda merupakan agenda strategis baik secara nasional maupun di daerah dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 12 pemuda di Kalimantan Selatan adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan pemuda ini perlu didukung dan ditopang oleh beragam kebijakan berbasis data dan informasi. Pada tahun 2017, Indonesia telah merilis data terkait Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau *sustainable development goals*). Indeks tersebut mencakup lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2017, Kalimantan Selatan berada dalam kelompok terbawah bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Meski telah mencatat dua poin kenaikan indeks dari tahun sebelumnya, peringkat Kalimantan Selatan justru turun dari 31 ke 34. Hal ini sekali lagi menunjukkan pentingnya akselerasi pembangunan. Dalam pertumbuhan yang terbatas, capaian relatif suatu provinsi dapat tertinggal dari provinsi lain dengan pertumbuhan yang lebih besar, apalagi jika titik pijak IPP juga tertinggal. Kalimantan selatan sesungguhnya membukukan juga perubahan impresif hingga 10 poin dalam domai kesehatan dan kesejahteraan. Tidak dari empat indikator di dalamnya menunjukkan perbaikan. Walau demikian, domain-domain lain dan indikator-indikator

penopangnya praktis tidak berubah. Bahkan, indikator APK perguruan tinggi menurun, karena nilai sub-indeksnya turun dari tiga poin menjadi dua poin. Empat indikator lain yang dihitung rendah dan membutuhkan perhatian kebijakan adalah partisipasi pemuda dalam organisasi, pemuda memberikan pendapat dalam rapat kemasyarakatan, pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi, serta pemuda wirausaha (*white collar*) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada domain pendidikan, terdapat 3 indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekolah menengah, dan APK perguruan tinggi. Data rata-rata lama sekolah adalah berupa rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dialami. APK Sekolah Menengah adalah persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun. Kemudian APK Perguruan Tinggi merupakan persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19-24 tahun. Melihat data tersebut, perlu dilakukan peningkatan ketiga indikator tersebut, karena jika dibandingkan data tersebut dengan indikator dari kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tanah Laut cukup tertinggal pada ketiga indikator tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.97 Indikator Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Aspek	Indikator	Persentase
1.	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,30
		APK Sekolah Menengah	84,33
		APK Perguruan Tinggi	12,90
2.	Kesehatan	Angka Keaskitan Pemuda	9,64
		Pemuda Korban Kejahatan	0,90
		Pemuda Merokok	28,04
		Fertilitas Pemuda Perempuan	4,45
		Aktivitas Olahraga Pemuda	11,21
3.	Lapangan dan Kesempatan Kerja	Indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	-
4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	-
		Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	-
		Pemuda Berpendapat dalam Rapat Kemasyarakatan	-
5.	Gender dan Diskriminasi	Perkawinan Usia Anak	55,47
		Pemuda Perempuan sedang Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	28,98
		Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	49,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Indikator yang menjadi cerminan atas domain kesehatan dan kesejahteraan, yaitu berupa angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, dan remaja perempuan yang sedang hamil. Selain itu, untuk memperkaya analisis domain ini juga ditambahkan indikator lainnya berupa aktivitas olahraga pemuda. Data remaja perempuan yang sedang hamil digunakan untuk melihat fertilitas pemuda perempuan, karena data tersebut tidak tersedia hingga pada tahun 2018, sehingga indikator tersebut didekati dari data remaja perempuan yang pernah melakukan kawin. Angka kesakitan pemuda merupakan data persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Pemuda korban kejahatan adalah pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Persentase pemuda merokok adalah persentase pemuda umur 16-30 tahun yang pernah merokok dalam seminggu terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Selanjutnya aktivitas olahraga pemuda adalah pemuda yang melakukan aktivitas olahraga pada selang waktu seminggu terakhir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan domain lapangan dan kesempatan kerja adalah indikator pemuda wirausaha kerah putih (*white collar*) yaitu persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan jenis jabatan white collar (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun. Indikator selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka pada pemuda yaitu persentase jumlah pengangguran pemuda umur 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda umur 16-30 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada domain partisipasi dan kepemimpinan, tiga indikator digunakan untuk menggambarkan domain ini yaitu partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Indikator kedua adalah partisipasi pemuda dalam organisasi yaitu persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun. Indikator ketiga adalah pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan, yaitu persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang pernah

mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut dalam kelompok umur 16-30 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018). Pada tahun 2017, Dalam rangka peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah merekrut 20 orang tenaga Pemuda Penggerak Pembangunan Perdesaan. Pemuda yang telah direkrut tersebut ditempatkan di 10 kecamatan dan tersebar di 20 desa pada kecamatan-kecamatan tersebut.

Domain gender dan diskriminasi diperoleh dari indikator berupa perkawinan usia anak, pemuda perempuan yang sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta indikator pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Indikator perkawinan usia anak adalah berupa persentase pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun. Indikator kedua yaitu pemuda perempuan yang sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi diperoleh dari persentase pemuda perempuan berumur 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi dalam kelompok perempuan umur 16-24 tahun. Indikator ketiga adalah pemuda perempuan bekerja di sektor formal yaitu persentase pemuda perempuan berumur 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal dalam kelompok perempuan umur 16-30 tahun. Indikator yang seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam domain ini namun belum dimasukkan ke dalam indikator adalah berupa kesenjangan akses yang dirasakan oleh pemuda disabilitas. Perlu adanya perhatian pemerintah kepada pemuda disabilitas mengingat diskriminasi seringkali terjadi pada pemuda disabilitas, baik berupa moral, material, maupun sarana dan prasarana yang diperoleh mereka (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Olah Raga

Untuk menunjang kegiatan olah raga di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 1 gelanggang olah raga di tingkat kabupaten yang cukup representatif untuk menyelenggarakan kegiatan di dalam ruangan yaitu Gelanggang Olah Raga (GOR) Pelahihari. Selain telah memiliki GOR, fasilitas kegiatan olahraga seperti sepakbola, basket, dan voli di Kabupaten Tanah Laut juga tersebar di seluruh kecamatan baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga telah memberikan insentif kepada 350 atlet dan 58 pelatih dari

berbagai cabang olahraga. Insentif tersebut perlu diberikan agar atlet dan pelatih semakin bersemangat menghadapi Porprov yang akan menjadi ajang pembuktian mereka selanjutnya. Dalam kaitannya dengan peran serta Kabupaten Tanah Laut dalam memajukan urusan kepemudaan dan olahraga, pada bulan Juli 2017, Kabupaten Tanah Laut menjadi salahsatu kabupaten yang ditunjuk ditunjuk Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai tuan rumah Gowes Pesona Nusantara 2017. Kabupaten/kota di Kalsel yang ditunjuk Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai tuan rumah adalah, kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Acara Gowes Pesona Nusantaradilaksanakan serentak tanggal 22 Juli 2017. Gowes Pesona Nusantara dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia untuk sehat, bugar dan berkarakter melalui olahraga. Gowes Pesona Nusantara merupakan program nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk gemar berolahraga, khususnya bersepeda. Selain menjadi tuan rumah Gowes pesona Nusantara 2017. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pembinaan olahraga tradisional. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan melakukan seleksi atlit yang akan mengikuti Fetival Olahraga Tradisional. Jenis olahraga tradisional yang dibina diantaranya adalah Asinan, Batungkau, Kurtau, Balogo, Sumpit, Dagongan, dan Trompah.

2.1.3.1.20 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPS Kabupaten Tanah Laut telah merangkum berbagai statistik Kabupaten Tanah Laut. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Tanah Laut. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain (1) Buku Kabupaten dalam angka; (2) Buku Statistik Daerah; dan (3) Buku PDRB Kabupaten. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.98. Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2012-2017 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan

tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Tanah Laut dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 2.98 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

No.	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Tanah Laut yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Laut dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Tanah Laut baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama Periode 2012-2017, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor

neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan *konsep System of national Accounts 2008* seperti yang telah direkomendasikan oleh *United Nations*. Tidak hanya data statistik yang bersumber dari Publikasi BPS, langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memuat seluruh data hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan juga adanya Tanah Laut Integrasi Data dimana hasil pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat terkumpul dalam satu data integratif sehingga memudahkan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

2.1.3.1.21 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan

persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, 2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.3.1.22 Kebudayaan

Walaupun mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh Suku Banjar dan Suku Jawa, namun terdapat beberapa suku bangsa lainnya seperti Suku Madura, Sunda, Bukit, Bakumpai, Mandar, dll. Suku Dayak yaitu suku bangsa asli di Kalimantan yang tersebar di beberapa lokasi. Salah satu lokasinya berada di Kabupaten Tanah Laut. Suku Dayak atau sering disebut Suku Dayak Maratus yang berada di Kabupaten Tanah Laut adalah Dayak Bukit. Penduduk Suku Dayak yang tinggal di pedalaman biasanya memiliki kebiasaan dan tradisi yang khas, seperti pola huniannya. Pola hunian utama Suku Dayak yaitu pola rumah tunggal berbentuk rumah panggung yang mengelompok dan pola hunian di balai dengan tata ruang seragam. Dengan berbagai suku yang tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka berbagai budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut menjadi sebuah kekayaan yang bernilai bagi perkembangan seni budaya di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut juga memiliki tarian khas yaitu Tari Batatungkal, tarian ini diangkat dari upacara adat Suku Biaju dari Bajuin, upacara ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu dan untuk memperoleh semangat batu agar mendapatkan hasil panen yang lebih berkah. Selain itu terdapat pula upacara adat Balian, upacara adat ini merupakan kegiatan tradisi yang menggambarkan aturan-aturan dari nenek moyang Suku Dayak Maratus dan bertujuan untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kampungnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan upacara adat ini dikelola oleh pemilik Belian yaitu meliputi Masni (Kepala Pimpinan Balian), Anang Idar, Nayan, Jainuddin sebagai penerjemah saat penari belian dimasuki roh-roh nenek moyang Suku Dayak Maratus. Lokasi pelaksanaan acara adat Balian dilaksanakan di dalam balai kampung Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap (kalsel.kemenag.go.id).

Pada Tabel 2.99 dapat dilihat bahwa terdapat empat obyek wisata budaya di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan cagar budaya Desa Riam Adungan yang berlokasi di Kecamatan Kintap, situs sejarah di Desa Tabanio Kecamatan Takisung, dan juga Bunker Jepang terletak di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin (Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036).

Tabel 2.99 Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung
2.	Cagar Budaya Desa Riam Adungan	Riam Adungan, Kintap
3.	Bunker Jepang	Sungai Bakar, Bajuin

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

2.1.3.1.23 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah bahan pustaka yang disediakan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu. Tujuan dari perpustakaan sendiri yaitu untuk meningkatkan angka melek huruf, meningkatkan peran budaya baca dalam menyerap pengetahuan, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, dan juga sebagai salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan. Kabupaten Tanah Laut memiliki satu unit perpustakaan umum yaitu Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Angsau, Kecamatan Pelaihari.

Apabila dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut pun berbeda-beda di setiap tahunnya. Realisasi anggaran ada tahun 2011 sebesar Rp189.836.825, sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi Rp145.895.100. Pada tahun 2013 realisasi anggarannya naik hingga mencapai Rp2.477.999.111, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi Rp2.165.235.301. sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 realisasi anggarannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan masing-masing sebesar Rp8.470.984.250 dan Rp5.047.831.382, peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan gedung perpustakaan baru yang dimulai di tahun 2015. Program-program lain yang juga menjadi tanggung jawab urusan perpustakaan diantaranya pembangunan gedung perpustakaan dan prasarana perpustakaan, dan program pengadaan rak buku perpustakaan.

2.1.3.1.24 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat

menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

Dalam menjalankan program-program tersebut pengalokasian anggaran dari pemerintah menjadi hal yang penting. Pada umumnya alokasi dana untuk bidang kearsipan menjadi satu dengan urusan perpustakaan, sehingga sulit untuk membedakan pos dana untuk kearsipan atau perpustakaan. Program-program yang ada di urusan perpustakaan antara lain program pengumpulan data kearsipan, program pemeliharaan jaringan informasi kearsipan, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen. Sedangkan indikator pencapaian bidang kearsipan dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dan juga dari peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu dengan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Garis pantai Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan Laut Jawa menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial, yang meliputi sektor perikanan, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Akan tetapi, potensi di bidang kelautan dan perikanan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga di masa mendatang melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, pemenuh kebutuhan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian kondisi perairan juga dipengaruhi oleh perubahan musim yaitu musim dari barat ke timur atau sebaliknya yang akan menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain.

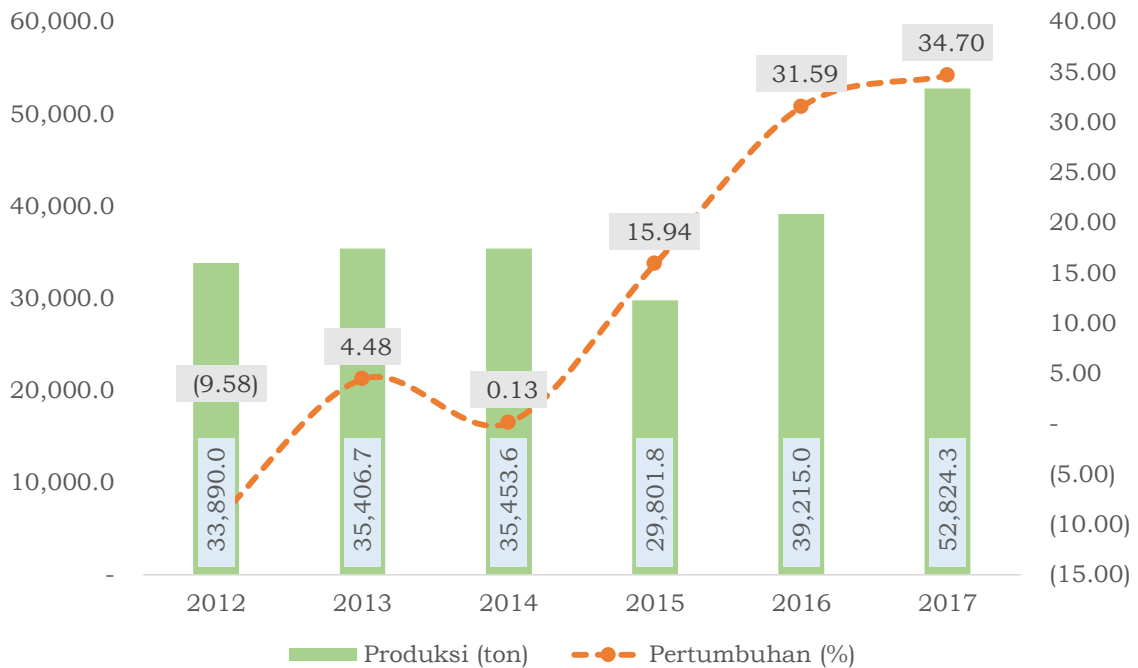
Selain mengembangkan potensi yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perairan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan perubahannya Undang-undang Nomor

45 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam suatu ekosistem pesisir yang terdiri dari komponen hayati dan nirhayati saling berhubungan saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga ketika terjadi perubahan pada salah satu dari komponen tersebut akan berdampak pada keseluruhan baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Oleh karena itu dalam menjamin kelestarian sumber daya alam juga perlu memperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung diantara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem. Program utama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perairan yaitu dengan mempertahankan ekosistem pantai seperti hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan estuaria.

Kawasan konservasi atau lindung laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 yaitu meliputi kawasan konservasi tanaman bakau pesisir pantai dan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan. Kawasan konservasi pesisir pantai ini berada di Kecamatan Bumi Makmur dengan luas lahan kurang lebih 267,97 Ha. Sedangkan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan merupakan kawasan suaka alam Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas Kawasan Suaka Margasatwa Batakan kurang lebih 3.068,38 hektar, yang terdiri dari kawasan konservasi pesisir dan kawasan permukiman. Kawasan konservasi pesisir menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan memiliki luas kurang lebih 443,8685 Ha. Selain kawasan suaka margasatwa Desa batakan Kecamatan Panyipatan juga memiliki kawasan taman wisata alam Pantai Batakan dengan luas 1.368,02 hektar.

Jika dilihat dari volume produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Tanah Laut tahun 2012-2016 pada Gambar 2.21 terlihat bahwa dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2012 hingga tahun 2014 masing-masing sebesar 33.890 ton, 35.406,7 ton dan 35.453,6 ton. Namun demikian, produksi di tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 15,94%, yaitu dengan jumlah produksi sebesar 29.801,8 ton. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 31,59%, yaitu dengan volume produksi mencapai 39.215 ton. Selanjutnya pada tahun 2017, pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut mencapai level tertingginya yaitu sebesar

34,70% sehingga produksinya menjadi sebesar 52.824,3 ton. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut semakin optimal. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin banyaknya penggunaan kapal motor sehingga jangkauannya makin luas. Peningkatan jumlah produksi tangkap laut juga dapat diupayakan dengan menambah fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai untuk bersandarnya kapal motor besar.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

Gambar 2.21 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Melihat produksi per jenis ikan pada perikanan tangkap laut, terdapat 7 jenis komoditas ikan yang paling banyak ditangkap nelayan adalah udang putih dengan produksi sebesar 5.790 ton, diikuti manyung sebesar 5.617 ton, cumi-cumi sebesar 2.815 ton, pari sebesar 2.684 ton, gulamah sebesar 2.610 ton, peperek sebesar 2.534 ton, dan udang windu sebesar 2.439 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai jenis komoditas perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki nilai produksi tinggi terutama jenis udang-udangan, ikan demersal, dan ikan pelagis besar. Secara keseluruhan, nilai produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,21 triliun. Nilai produksi ikan terbesar adalah manyung dengan nilai produksi sebesar Rp 120,21 miliar, disusul udang windu

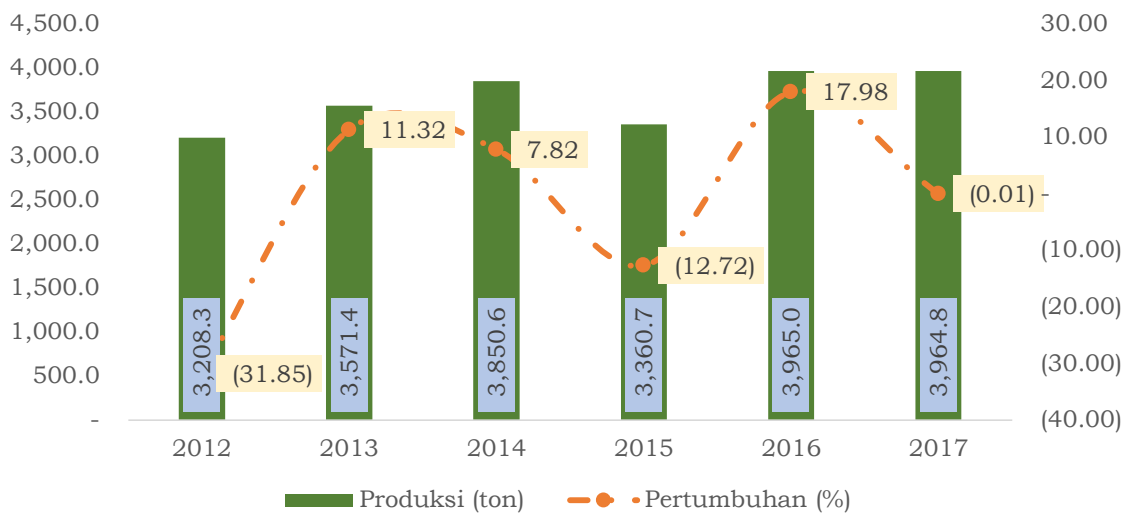
sebesar Rp 118,53 miliar, udang putih sebesar Rp 110,74 miliar, cumu-cumi sebesar Rp 80,54 miliar, dan tenggiri sebesar Rp 61,09 miliar.

Tabel 2.100 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Peperek	2.534	23.710.638
2.	Manyung	5.617	120.208.602
3.	Bambangan	655	15.527.366
4.	Kakap Putih	1.222	34.973.478
5.	Gulamah	2.610	45.462.487
6.	Pari	2.684	47.983.394
7.	Bawal Putih	1.557	51.123.864
8.	Selar	2.131	20.560.000
9.	Belanak	28	20.677.351
10.	Kuro/Senangin	55	676.500
11.	Teri	684	18.250.960
12.	Tembang	45	52.746
13.	Tenggiri Papan	2.006	42.344.112
14.	Tongkol	2.229	54.163.224
15.	Tenggiri	2.420	65.544.526
16.	Udang Windu	2.439	118.531.610
17.	Udang Putih	5.790	110.739.568
18.	Udang Lain	9.030	245.818.046
19.	Cumi-cumi	2.815	80.540.000
20.	Kembung	350	5.292.431
21.	Ikan Lainnya	4.771	61.091.292
22.	Rajungan	1.152	26.502.900
Jumlah		52.824	1.209.775.095

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain potensi di perikanan tangkap laut, Kabupaten Tanah Laut juga berpotensi dalam perikanan tangkap perairan umum. Berdasarkan Gambar 2.22 dapat dilihat bahwa selama periode 2012-2017 produksinya cenderung meningkat. Jumlah produksi perikanan perairan umum pada tahun 2012 merupakan produksi terendah sepanjang periode dengan penurunan dari tahun 2011 sebesar 31,85% atau produksi sebesar 3.208,3 ton. Kemudian pada dua tahun selanjutnya naik lagi secara berturut-turut masing-masing sebesar 3.571,4 ton dan 3.850,6 ton. Sama seperti produksi tangkap laut yang mengalami penurunan pada tahun 2015 produksi perikanan umum juga mengalami penurunan sebesar 12,72% menjadi 3.360,7 ton. Akan tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu 17,98% dengan jumlah produksi sebesar 3.965 ton. Pada tahun 2017, produksi perikanan umum sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 3.964,8 ton.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.22 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Jika dilihat dari sisi produksi per jenis ikan pada perairan umum, produksi ikan terbesar adalah komoditas gabus yaitu sebesar 703,9 ton, disusul oleh betook/papuyu sebesar 658,7 ton, tawes sebesar 496,6 ton, sepat siam sebesar 490,7 ton, dan sepat rawa sebesar 459,8 ton. Nilai produksi keseluruhan perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 67,72 miliar. Nilai terbesar komoditas perairan umum pada tahun 2017 adalah udang galah yaitu sebesar Rp 15,78 miliar, diikuti gabus sebesar Rp 12,67 miliar, betook/papuyu sebesar Rp 11,86 miliar, baung sebesar Rp 8,1 miliar, dan sepat siam sebesar 5,89 miliar. Secara rinci, jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.101 Jumlah & Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kab. Tanah Laut

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Betok/Papuyu	658,7	11.856.922
2.	Baung	324,0	8.100.620
3.	Sepat Rawa	459,8	4.597.942
4.	Sepat Siam	490,7	5.887.892
5.	Gabus	703,9	12.669.479
6.	Lele	14,6	116.570
7.	Tawes	496,6	4.965.958
8.	Lais	37,1	667.940
9.	Patin Jambal	71,8	718.211
10.	Ikan Lainnya	148,3	1.038.652
11.	Udang Galah	394,6	15.782.213
12.	Udang Lainnya	164,7	1.317.516
Jumlah		3.964,8	67.719.915

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Alat tangkap adalah sarana yang digunakan oleh manusisa untuk mempermudah penangkapan ikan dengan tujuan untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal. Jenis alat tangkap yang digunakan akan berpengaruh terhadap jenis ikan yang ditangkap, sehingga alat tangkap merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan. Misalnya penggunaan alat tangkap pancing digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis besar, sedangkan pukot cincin digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil. Selain itu berpengaruh pula pada jumlah produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan berbagai jenis alat tangkap di Kabupaten Tanah Laut akan berpengaruh pada beragamnya hasil tanggapan dan jumlah produksi ikan yang diperoleh. Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan adalah lampara, jaring insang hanyut (rengge), jaring insang tetap, pancing tonda, dan rawai.

Salah satu komponen penting yang berpengaruh pada jumlah produksi perikanan tangkap laut adalah jumlah dan komposisi armada penangkapan. Penggunaan armada modern kapal motor yang semakin banyak akan memperluas jamgkauan wilayahnya sehingga akan meningkatkan produktivitas per unit armada. Pada tahun 2017 jumlah armada perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.067 unit yang terdiri dari 90 unit perahu tanpa motor (PTM), 24 unit perahu motor tempel (PMT), dan 1.953 unit kapal motor. Tiga kecamatan yang menggunakan kapal motor terbanyak adalah Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 590 unit, Panyipatan sebanyak 357 unit, dan Jorong sebanyak 289 unit. Sedangkan penggunaan PTM terbanyak di Kecamatan Panyipatan sebanyak 54 unit, dan penggunaan perahu motor temple di Kecamatan Takisung dengan jumlah armada 23 unit. Dari data tersebut terlihat bahwa penggunaan kapal motor untuk menangkap ikan lebih banyak dari jenis perahu PTM dan perahu motor tempel sehingga wajar jika pada tahun 2016 jumlah produksi tangkap laut meningkat hingga mencapai 31,59%.

Tabel 2.102 Jumlah Perahu Menurut Kecamatan dan Jenis (unit), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Perahu		
		PTM	PMT	Kapal Motor
1.	Panyipatan	54	-	357
2.	Takisung	6	23	590
3.	Kurau	15	-	217
4.	Bumi Makmur	-	-	282
5.	Bati-Bati	-	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	-	-	-
8.	Bajuin	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-
10.	Jorong	-	1	289
11.	Kintap	15	-	218
Jumlah		90	24	1.953

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 2.213 unit. Angka tersebut bertambah jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebanyak 1.866 unit. Di Kabupaten Tanah Laut, rumah tangga perikanan tangkap laut tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Jorong, dan Kintap. Kecamatan dengan rumah tangga perikanan tangkap laut terbanyak berada di Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 740 unit. Untuk rumah tangga perairan umum, jumlahnya secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.475 unit. Rumah tangga perairan umum sendiri tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bumi Makmur yaitu sebanyak 314 unit.

Tabel 2.103 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Sub-sektor		
		Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
1.	Panyipatan	401	158	559
2.	Takisung	740	54	794
3.	Kurau	253	254	507
4.	Bumi Makmur	284	314	598
5.	Bati-Bati	-	248	248
6.	Tambang Ulang	-	50	50
7.	Pelaihari	-	165	165
8.	Bajuin	-	19	19
9.	Batu Ampar	-	9	9
10.	Jorong	306	200	506
11.	Kintap	229	4	233
Jumlah		2.213	1.475	3.688

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum Kabupaten Tanah Laut juga memiliki produksi perikanan yang berasal dari perikanan budidaya. Jenis budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah tambak, kolam, keramba, dan jaring apung. Pada tahun 2017, jumlah produksi perikanan budidaya adalah sebesar 1.157,46 ton. Produksi tambak adalah sebesar 933,76 ton dimana produksi berasal dari Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Kintap. Untuk kolam, produksinya berasal dari seluruh kecamatan dengan produksi total mencapai 171,3 ton. Produksi kolam terbesar berasal dari Kecamatan Pelaihari yang mencapai 94,5 ton, diikuti Kecamatan Jorong sebesar 23,83 ton, dan Kecamatan Bati-bati sebesar 19,03 ton. Pada budidaya keramba, produksinya sebesar 30,50 ton dan berasal dari Kecamatan Bati-bati, sedang produksi jaring apung sebesar 21,90 ton berasal dari Kecamatan Pelaihari.

Tabel 2.104 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	3,88	-	-
2.	Takisung	-	7,34	-	-
3.	Kurau	43,04	2,00	-	-
4.	Bumi Makmur	592,96	2,30	-	-
5.	Bati-Bati	-	19,03	30,50	-
6.	Tambang Ulang	-	10,34	-	-
7.	Pelaihari	-	94,50	-	21,90
8.	Bajuin	-	1,65	-	-
9.	Batu Ampar	-	5,43	-	-
10.	Jorong	-	23,83	-	-
11.	Kintap	297,76	1,00	-	-
Jumlah		933,76	171,30	30,50	21,90

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada budidaya tambak, jenis ikan yang diproduksi adalah bandeng yaitu sebesar 583,60 ton, disusul udang windu sebesar 291,80 ton, dan udang putih sebesar 58,36 ton. Untuk budidaya kolam, jenis ikan yang diproduksi adalah lele (114 ton), patin (46 ton), nila (9 ton), dan ikan mas (1,10 ton). Pada budidaya keramba, komoditas yang dikembangkan adalah ikan mas dan nila dengan produksi masing-masing sebesar 23,10 dan 7,40 ton, sedangkan ikan yang dikembangkan pada budidaya jaring apung adalah nila dengan produksi sebesar 21,90 ton. Nilai produksi budidaya tambak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 24,98 miliar, kolam sebesar Rp 2,78 miliar, keramba sebesar Rp 831,80 juta, dan jaring apung sebesar Rp 547,50 juta.

Tabel 2.105 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Bandeng	583,60	-	-	-
2.	Udang Windu	291,80	-	-	-
3.	Udang Putih	58,36	-	-	-
4.	Ikan Mas	-	1,10	23,10	-
5.	Nila	-	9,00	7,40	21,90
6.	Lele	-	114,00	-	-
7.	Patin	-	46,00	-	-
8.	Lainnya	-	1,20	-	-
Jumlah		933,76	171,30	30,50	21,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Rumah tangga perikanan yang terlibat dalam kegiatan perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah sebanyak 861 unit. Kecamatan yang paling banyak memiliki rumah tangga perikanan budidaya adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 130 unit, disusul Kecamatan Kintap sebanyak 121 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 94 unit. Dari sisi jenis budidaya, jumlah rumah tangga perikanan terbanyak adalah rumah tangga perikanan budidaya kolam yaitu sebanyak 676 unit, disusul rumah tangga perikanan budidaya tambak sebesar 137 unit, rumah tangga perikanan budidaya jaring apung sebanyak 30 unit, dan rumah tangga perikanan budidaya keramba sebanyak 18 unit.

Tabel 2.106 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2017

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	50	-	-
2.	Takisung	24	70	-	-
3.	Kurau	27	55	-	-
4.	Bumi Makmur	26	55	-	-
5.	Bati-Bati	-	70	18	-
6.	Tambang Ulang	-	45	-	-
7.	Pelaihari	-	100	-	30
8.	Bajuin	-	45	-	-
9.	Batu Ampar	-	70	-	-
10.	Jorong	-	55	-	-
11.	Kintap	60	61	-	-
Jumlah		137	676	18	30

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.2.2 Pariwisata

Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, yang pada akhirnya secara

simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain. Sementara itu menurut Bappenas (2015), arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan agar mampu bersaing di dalam maupun luar negeri, pembangunan industri pariwisata nasional dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk maupun jasa pariwisata nasional di setiap lokasi pariwisata yang ingin dipasarkan, dan pembangunan kelembagaan pariwisata yaitu melalui pembangunan sumberdaya manusia dan organisasi kepariwisataan nasional.

Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut merupakan potensi yang cukup besar untuk dijadikan tujuan wisata, terlebih terdapat berbagai jenis obyek wisata yang dapat dikunjungi seperti wisata pantai, wisata sejarah dan budaya, wisata alam, dan wisata taman. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), hingga saat ini terdapat 25 obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian masih ada beberapa obyek wisata yang belum dikunjungi para wisatawan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi dan juga kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung.

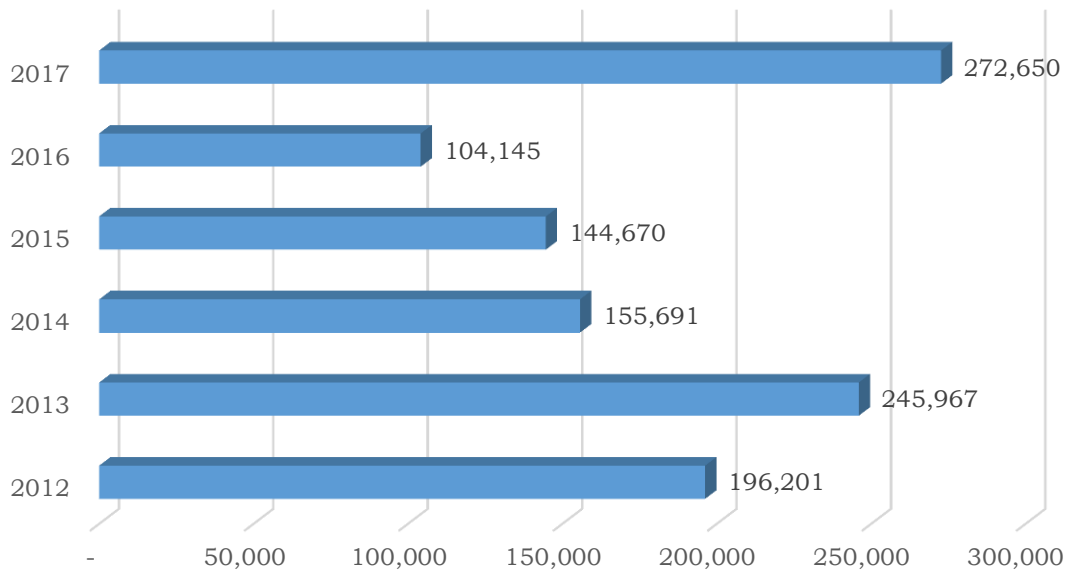
Hampir di setiap kecamatan memiliki tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila destinasi pariwisata tersebut dipasarkan secara bersama-sama terutama destinasi-destinasi wisata unggulan seperti Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Selain pemasaran juga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dibidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Berikut adalah daftar obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.107 Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2018

No.	Nama	Lokasi	Jenis	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
1.	Pantai Takisung	Takisung, Takisung	Alam	22 km
2.	Pantai Batakan	Batakan, Panyipatab	Alam	40 km
3.	Pantai Swarangan	Swarangan, Jorong	Alam	41 km
4.	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisung	Alam	42 km
5.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
6.	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25 km
7.	Air Terjun Hamindra	Tanjung, Pelaihari	Alam	17 km
8.	Air Terjun Habulu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18 km
9.	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6 km
10.	Kawasan Goa Marmer	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
11.	Goa Macan/Liang Babau	Tanjung, Pelaihari	Alam	19 km
12.	Mina Tirta	Pusat Kota Pelaihari	Alam	1 km
13.	Tanjung Dewa	Tanjung Dewa, Panyipatan	Alam	40 km
14.	Kerbau Rawa	Benua Raya, Bati-bati	Alam	26 km
15.	Air Terjun Lalaran	Pamalongan, Bajuin	Alam	14 km
16.	Bekantan	Swarangan, Jorong	Alam	39 km
17.	Bekantan	Panjaratan, Pelaihari	Alam	15 km
18.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung	Sejarah	25 km
19.	Pulau Datu Pamulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Religius	38 km
20.	Datu Insad	Sambangan, Bati-bati	Religius	33 km
21.	Makam Keramat Istana	Karang Taruna, Pelaihari	Religius	6 km
22.	Tanam Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	1 km
23.	Taman Hutan Kota	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
24.	Taman Kijang Kencana	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
25.	Bumi Perkemahan	Sungai Jelai, Tambang Ulang	Buatan	9 km

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, obyek wisata yang diminati di Kabupaten Tanah Laut adalah pantai. Jumlah kunjungan tertinggi wisatawan di Kabupaten Tanah Laut adalah di Pantai Takisung yang dikunjungi 84.286 wisatawan. Obyek wisata selanjutnya yang menjadi favorit adalah Pantai Batakan yaitu sebanyak 29.924 wisatawan, dan Pantai Sarangan sebanyak 8.268 wisatawan. Obyek wisata lain yang juga cukup diminati wisatawan adalah Gunung Kayangan dan Air Terjun Bajuin yang masing-masing dikunjungi 9.500 dan 4.529 wisatawan. Melihat pada bulan kunjungan, terlihat bahwa pada bulan Januari, Mei, dan Juli menjadi puncak kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanah Laut.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.23 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Selama periode 2012-2016 terlihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut semakin menurun. Jumlah pengunjung tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 245.967 pengunjung tumbuh sebesar 25,36% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 36,70% menjadi 155.691 pengunjung. Demikian pula pada tahun 2015 dan 2016 juga mengalami penurunan berturut-turut yaitu masing-masing sebesar 144.670 dan 104.145 pengunjung. Dari dapat tersebut menunjukkan bahwa semakin tidak diminatinya obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu dilakukan upaya-upaya seperti promosi perbaikan fasilitas pendukung dan juga mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengoptimalkan potensi pariwisata. Pada tahun 2017, upaya promosi dan perbaikan fasilitas destinasi wisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan hasil yang menggembirakan dimana jumlah wisatawan melonjak signifikan menjadi sebanyak 272.650 wisatawan.

Data wisatawan asing dan domestik di tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya ada 15 orang wisatawan asing berkunjung di Kabupaten Tanah Laut yakni 3orang di bulan Juni dan 12 orang di bulan Agustus. Sedangkan wisatawan domestik sepanjang tahun cukup berfluktuatif. Pengunjung domestik tertinggi di tahun 2017 pada bulan Januari yaitu sebanyak 60.611 wisatawan, disusul pada bulan Juli sebanyak 50.918

wisatawan, dan Desember sebanyak 33.324 wisatawan. Sedangkan pengunjung terendah pada bulan November yang hanya sebanyak 7.170 wisatawan. Dari segi fasilitas pendukung pariwisata, berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dipaparkan bahwa terdapat 27 hotel dengan 225 kamar yang tersebar di Kecamatan Pelaihari dan Jorong.

Tabel 2.108 Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
1.	Januari	60.611	-
2.	Februari	16.935	-
3.	Maret	14.087	-
4.	April	15.388	-
5.	Mei	21.380	-
6.	Juni	11.258	3
7.	Juli	50.918	-
8.	Agustus	10.751	12
9.	September	19.698	-
10.	Oktober	11.115	-
11.	November	7.170	-
12.	Desember	33.324	-
Jumlah		272.635	15

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dengan target wisatawan yang sebagian besar domestik, rata-rata lama menginap wisatawan di Kabupaten Tanah Laut hanya berkisar antara 1-2 hari pada setiap kunjungan. Untuk wisatawan domestik, rata-rata lama tamu menginap adalah selama 1,01 hari dan pada bulan Agustus selama 1,12 hari. Sementara itu, pada wisatawan domestik, rata-rata lama menginap tertinggi adalah pada bulan Juni yaitu selama 2,59 hari, disusul pada bulan Desember selama 2,23 hari, dan bulan Januari selama 2,14 hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah Laut datang ke tempat wisata kemudian langsung pulang kembali setelah mengunjungi obyek wisata.

Tabel 2.109 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing Asing dan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
1.	Januari	2,14	-
2.	Februari	1,15	-
3.	Maret	1,11	-
4.	April	1,44	-
5.	Mei	1,52	-
6.	Juni	2,59	1,01
7.	Juli	1,82	-
8.	Agustus	1,27	1,12
9.	September	1,21	-
10.	Oktober	1,56	-
11.	November	1,12	-
12.	Desember	2,23	-

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam susenas adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Data BPS Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan persentase penduduk yang bepergian 6 bulan terakhir baik pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan di antara kedua tahun tersebut. Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bepergian adalah 38,25% dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 38,37% dan penduduk berjenis kelamin perempuan yang bepergian sebanyak 38,12%

Tabel 2.110 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Perjalanan Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017

Jenis Kelamin	2016	2017
Laki-laki	24,41	38,37
Perempuan	23,71	38,12
Laki-laki + Perempuan	24,06	38,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Persentase penduduk Kabupaten Tanah Laut yang melakukan bepergian pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016. Peningkatan ini diduga karena sudah semakin *mobile*-nya penduduk dan menjadi suatu alasan munculnya hipotesis bahwa jika penduduk melakukan bepergian karena berlibur, maka penduduk Kabupaten Tanah

Laut sudah semakin sejahtera. Lebih tingginya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang melakukan bepergian pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa preferensi laki-laki untuk *mobile* atau melakukan bepergian cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan angka tersebut menjadi fenomena yang kerap terjadi di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Penduduk dengan jenis kelamin perempuan cenderung melakukan aktivitas yang mayoritas dilakukan di dalam rumah baik berupa pekerjaan maupun aktivitas lain. Sedangkan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih *mobile* untuk urusan terkait bisnis, pendidikan, profesi, dsb.

2.1.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan tanaman pangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Lebih lagi, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan terus meningkat.

Tanaman Pangan

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 mencapai 74.061 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 7.209 ha dan sawah non irigasi seluas 66.852 ha. Sawah non irigasi di Kabupaten Tanah Laut tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan sawah irigasi hanya terdapat di 7 kecamatan. Luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 1.936 ha, sedangkan sawah non irigasi terluas berada di Kecamatan Bati-bati yaitu seluas 11.500 ha. Berdasarkan data luas sawah pada tabel dibawah maka dapat dikatakan bahwa sawah non irigasi mempunyai wilayah yang sangat luas dibandingkan sawah irigasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur pengairan sangat diperlukan, sehingga pengairan

sawah tidak akan hanya bergantung pada air dari alam yang nantinya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan kemandirian pangan.

Tabel 2.111 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Panyipatan	1.389	8.130	9.519
2.	Takisung	1.625	5.646	7.271
3.	Kurau	-	8.257	8.257
4.	Bumi Makmur	-	5.098	5.098
5.	Bati-Bati	-	11.500	11.500
6.	Tambang Ulang	-	6.530	6.530
7.	Pelaihari	1.936	10.724	12.660
8.	Bajuin	1.249	5.123	6.372
9.	Batu Ampar	630	538	1.168
10.	Jorong	270	4.303	4.573
11.	Kintap	110	1.003	1.113
Jumlah		7.209	66.852	74.061

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain lahan sawah, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Berdasarkan data luas lahan yang ada, lahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar sudah dimanfaatkan. Hal ini terlihat pada luas lahan yang sementara tidak digunakan mempunyai luas yang kecil yaitu sebesar 8.579 ha dibandingkan jumlah lahan tegal dan ladang yaitu sebesar 42.125 ha. Secara keseluruhan, luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 34.295 ha. Kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Takisung dengan luas 7.589 ha, disusul Kecamatan Panyipatan dengan luas 6.597 ha, dan Kecamatan Jorong dengan luas 5.572 ha. Sementara itu, luas ladang/huma di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 7.830 ha. Luasan ladang/huma terbesar berada di Kecamatan Palaihari yaitu sebesar 1.813 ha, diikuti oleh Kecamatan Bajuin sebesar 1.297 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 1.295 ha.

Tabel 2.112 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Lahan		
		Tegal/Kebun	Ladang/huma	Sementara Tidak Diusahakan
1.	Panyipatan	6.597	650	200
2.	Takisung	7.589	-	2.334
3.	Kurau	450	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-
5.	Bati-Bati	1.500	1.120	1.542
6.	Tambang Ulang	1.904	1.295	1.445
7.	Pelaihari	1.936	1.813	265
8.	Bajuin	1.264	1.297	337
9.	Batu Ampar	5.333	320	181
10.	Jorong	5.572	550	1.529
11.	Kintap	2.150	785	746
Jumlah		34.295	7.830	8.579

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Padi, terutama padi sawah merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen padi sawah pada tahun 2012 adalah seluas 43.642 ha, kemudian menurun hingga tahun 2014 menjadi seluas 45.513 ha. Selanjutnya hingga tahun 2017, luas panen padi sawah meningkat signifikan menjadi seluas 53.869 ha. Dari sisi produksi, dengan peningkatan luas panen, maka produksi padi sawah juga meningkat signifikan hingga mencapai 100%. Produksi padi sawah pada tahun 2012 adalah sebesar 153.095 ton dan pada tahun 2-17 meningkat menjadi sebesar 300.819 ton. Luas panen padi sawah juga meningkat dalam kurun waktu 2012-2017 dimana luas panen pada tahun 2012 adalah seluas 2.197 ha dan pada tahun 2017 meningkat menjadi seluas 2.967 ha. Peningkatan produksi yang signifikan juga terjadi pada produksi padi ladang, produksi padi ladang pada tahun 2012 adalah sebesar 4.4646 ton dan pada tahun 2017 meningkat hampir 3 kali lipat menjadi sebesar 11.169 ton.

Tabel 2.113 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	43.642	153.095	2.197	4.646
2013	42.836	161.818	2.373	6.660
2014	42.011	151.860	2.717	7.526
2015	45.513	167.041	1.852	5.315
2016	48.613	190.927	2.651	10.336
2017	53.869	300.819	2.967	11.169

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jika dirinci menurut kecamatan, luas panen padi sawah terbesar berada di Kecamatan Kurau yang mencapai 7.873 ha, disusul Kecamatan Bumi Makmur seluas 7.656 ha, dan Kecamatan Panyipatan seluas 7.185 ha. Dari sisi produksi, produsen padi sawah terbesar justru berasal dari Kecamatan Bumi Makmur yang mencapai 49.120 ton. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas padi sawah di Kecamatan Bumi Makmur lebih baik dibandingkan Kecamatan Kurau. Posisi kedua penghasil padi sawah terbesar adalah Kecamatan Panyipatan yaitu sebesar 48.274 ton, dan Kecamatan Kurau sebesar 48.274 ton. Untuk padi ladang, terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki luasan padi ladang yaitu Kecamatan Bumi Makmur dan Pelaihari. Luas panen padi ladang terbesar berada di Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 776 ha dengan produksi mencapau 3.624 ton.

Tabel 2.114 Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	7.185	48.274	776	3.624
2.	Takisung	6.705	34.239	211	690
3.	Kurau	7.873	41.989	80	22
4.	Bumi Makmur	7.656	49.120	-	-
5.	Bati-bati	6.152	29.333	2	5
6.	Tambang Ulang	4.580	22.570	45	132
7.	Pelaihari	6.809	37.805	-	-
8.	Bajuin	2.499	17.492	580	2.413
9.	Batu Ampar	1.911	9.360	329	1.076
10.	Jorong	1.445	7.373	476	1.714
11.	Kintap	1.054	3.264	468	1.493
Jumlah		53.869	300.819	2.967	11.169

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Salah satu tanaman pangan lain yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah jagung. Sama seperti padi sawah, jagung juga menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut setelah padi. Luas panen jagung pada tahun 2016 mencapai 19.135 ha. Luas panen jagung pada tahun tersebut merupakan nilai terluas selama periode 2012 hingga 2016. Selama periode tersebut, luas panen jagung mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2013, luas panen semakin melebar menjadi 14.420 ha di mana pada tahun sebelumnya luas panen jagung hanya mencapai 14.034 ha. Setelah tahun 2012, luas panen jagung terus mengalami penurunan yaitu mencapai 13.574 pada 2014 dan 12.932 pada 2015. Pada tahun 2017, luas panen jagung kembali mengalami peningkatan menjadi seluas 24.903 ha.

Tabel 2.115 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Kab. Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jagung	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	14.034	77.638
2013	14.420	77.999
2014	13.574	83.596
2015	12.932	81.363
2016	19.135	115.834
2017	24.903	179.556

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Sejalan dengan peningkatan luas panen jagung, produktivitas jagung pada tahun 2016 juga meningkat cukup banyak yaitu dari 81.363 ton pada tahun 2015 menjadi 115.834,3 ton pada tahun 2016. Namun, peningkatan kedua aspek tersebut ternyata tidak menjamin adanya peningkatan produktivitas jagung di Kabupaten Tanah Laut. Ketika produksi meningkat pada tahun 2016, produktivitas jagung pada tahun tersebut menurun dari 6.29 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 6,05 ton/ha pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen meningkat secara signifikan menjadi seluas 24.903 ha dan diiringi peningkatan produktivitas menjadi sebesar 7,21 ton/ha. Kecamatan dengan luas panen jagung tertinggi adalah Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 7.246 ha. Dengan tingginya luas panen, maka produksi jagung tertinggi juga berada di Kecamatan Panyipatan yaitu sebesar 61.446 ton.

Tabel 2.116 Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jagung	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	7.246	61.446
2.	Takisung	1.301	9.363
3.	Kurau	325	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	594	3.109
6.	Tambang Ulang	1.307	9.037
7.	Pelaihari	4.270	32.727
8.	Bajuin	1.252	9.687
9.	Batu Ampar	3.837	27.995
10.	Jorong	3.550	20.958
11.	Kintap	1.221	5.234
Jumlah		24.903	179.556

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis tanaman bahan makanan potensial lainnya adalah kedelai. Luas panen kedelai mengalami peningkatan yang tajam hingga lebih dari dua kali lipat pada tahun 2014, di mana luas panen kedelai berturut-turut dari tahun 2012 adalah 706 ha (2012), 707 ha (2013), dan 1.759 ha (2014). Pada tahun 2015, luas panen kedelai masih mengalami peningkatan yaitu menjadi 1.819 ha. Namun, luas panen kedelai mengalami penurunan yang cukup banyak pada tahun berikutnya. Luas panen kedelai pada tahun 2016 adalah 1.290 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen kedelai berkurang secara signifikan menjadi hanya 233 ha.

Tabel 2.117 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kedelai di Kab. Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kedelai	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	706	854
2013	707	859
2014	1.759	2.379
2015	1.810	2.577
2016	1.290	1.940
2017	233	647

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Peningkatan maupun penurunan pada luas panen kedelai diikuti oleh peningkatan dan penurunan produksi dari kedelai. Luas panen maupun produksi mempunyai pergerakan yang sama, di mana produksi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.577 ton. Secara berturut turut produksi kedelai Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2012 hingga 2014 adalah 854 ton, 859 ton, dan 2379 ton. Pada tahun 2016,

penurunan luas panen menyebabkan penurunan produksi kedelai hingga produksi kedelai mencapai 1.940 ton. Tren yang sama antara luas panen dan produksi menyebabkan produktivitas tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Produktivitas kedelai terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut hanya mempunyai selisih yang kecil. Selama periode 2012 hingga 2016, produktivitas kedelai secara berturut-turut adalah 1,21 ton/ha; 1,21 ton/ha; 1,35 ton/ha; 1,42; dan 1,5 ton/ha. Pada tahun 2017, produktivitas kedelai justru meningkat menjadi sebesar 2,78 ton/ha.

Tabel 2.118 Luas Panen dan Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Kedelai	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	20	14
2.	Takisung	148	537
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-
7.	Pelaihari	1	3
8.	Bajuin	-	-
9.	Batu Ampar	44	91
10.	Jorong	1	2
11.	Kintap	19	-
Jumlah		233	647

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kecamatan yang memiliki tanaman kedelai pada tahun 2017 adalah Kecamatan Panyipatan, Takisung, Pelaihari, Batu Ampar, Jorong, dan Kintap. Luas panen kedelai tertinggi berada di Kecamatan Takisung yaitu seluas 148 ha. Dari sisi produksi, hanya terdapat 5 kecamatan yang menyumbang produksi kedelai yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Pelaihari, Batu Ampar, dan Jorong. Dengan luas panen tertinggi, maka produksi tertinggi kedelai juga berasal dari Kecamatan Takisung yaitu sebesar 537 ton.

Tabel 2.119 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah di Kab. Tanah Laut,

Tahun	Kacang Tanah	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	954	1.330
2013	641	918
2014	908	1.337
2015	657	866
2016	666	943
2017	565	1.189

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2012-2017, luas panen kacang tanah Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Luas panen kacang tanah pada tahun 2012 adalah seluas 954 ha, kemudian mengalami penurunan yang cukup luas pada tahun selanjutnya menjadi 641 ha. Pada tahun 2014, luas panen kacang tanah mengalami peningkatan hingga mencapai 908 ha, tetapi luas panen mengalami penurunan lagi pada tahun selanjutnya menjadi 657 ha. Sementara itu, luas panen kacang tanah pada tahun 2016 meningkat kembali walaupun dengan nilai yang kecil. Pada tahun tersebut, luas panen kacang merah adalah seluas 666 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen kacang tanah menurun menjadi hanya seluas 565 ha. Produksi kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut mempunyai pergerakan yang fluktuatif dan mempunyai pergerakan yang sama dengan luas panen kacang tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada luas panen kacang tanah cenderung meningkatkan produksi kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut. Berbeda dengan luas panen maupun produksi kacang tanah, produktivitas kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut mempunyai sedikit perbedaan dengan pergerakan dari produksi maupun luas panen. Selama periode 2012-2014, produktivitas kacang tanah mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,39 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 1,43 ton/ha dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2014 dengan nilai 1,47 ton/ha. Untuk tahun selanjutnya, produktivitas kacang tanah menurun menjadi 1,32 ton/ha dan meningkat lagi menjadi 1,42 ton/ha pada tahun 2016.

Tabel 2.120 Luas Panen & Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Kacang Tanah	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	11	37
2.	Takisung	333	636
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	5	30
6.	Tambang Ulang	65	144
7.	Pelaihari	5	26
8.	Bajuin	57	175
9.	Batu Ampar	4	-
10.	Jorong	12	47
11.	Kintap	75	94
Jumlah		567	1.189

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Kecamatan yang memiliki tanaman kacang tanah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 tersebar di 9 kecamatan dimana terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki tanaman kacang tanah yaitu Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Kecamatan dengan luas panen kacang tanah tertinggi adalah Kecamatan Takisung yaitu seluas 333 ha, disusul Kecamatan Kintap seluas 75 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang seluas 65 ha. Untuk produksi kacang tanah, produsen kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Takisung yaitu sebesar 636 ton, diikuti Kecamatan Bajuin sebesar 175 ton, dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 144 ton.

Seperti komoditi kacang tanah, kacang hijau mempunyai luas panen dan produksi dengan pergerakan yang sama dengan luas panen maupun produksi kacang tanah. Selama periode 2012-2016, penurunan luas panen kacang hijau terjadi pada tahun 2013, di mana luas panen menurun dari 111 ha pada tahun 2012 menjadi 81 ha pada tahun 2013. Selain itu penurunan luas panen juga terjadi pada tahun 2015, di mana pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, luas panen kacang hijau Kabupaten Tanah Laut adalah seluas 93 ha. Selanjutnya pada tahun 2017, luas panen kacang tanah berkurang menjadi seluas 92 ha.

Tabel 2.121 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kacang Hijau	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	111	114
2013	81	86
2014	120	127
2015	80	76
2016	93	87
2017	92	77

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Produksi kacang hijau Kabupaten Tanah Laut mempunyai pergerakan yang fluktuatif sesuai dengan pergerakan dari luas panen kacang hijau. Produksi tertinggi tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 127 ton. Sama seperti luas panen kacang hijau, penurunan produksi terjadi pada tahun 2013, yaitu dari 114 ton pada tahun 2012 menjadi 86 ton pada tahun 2013, dan tahun 2015, di mana produksi kacang tanah menjadi 86,99 ton. Untuk produktivitas, produktivitas kacang hijau tidak mempunyai penurunan maupun peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, produksi kacang hijau turun menjadi sebesar 92 ton.

Tabel 2.122 Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Kacang Hijau	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	2	-
2.	Takisung	66	55
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	-	-
6.	Tambang Ulang	3	2
7.	Pelaihari	5	7
8.	Bajuin	3	3
9.	Batu Ampar	-	-
10.	Jorong	-	-
11.	Kintap	13	10
Jumlah		92	77

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Rata-rata produktivitas kacang hijau selama periode 2012-2016 adalah sebesar 1,008 ton/ha. Produktivitas mengalami peningkatan hanya pada tahun 2013, yaitu dari produktivitas sebesar 1,03 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 1,06 pada tahun 2013. Pada tahun selanjutnya tidak terjadi perubahan nilai produktivitas, tetapi produktivitas kacang hijau terus mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dengan nilai berturut-turut adalah sebesar 0,95 ton/ha dan 0,94 ton/ha. Untuk tahun 2017, terjadi penurunan produktivitas lahan kacang hijau menjadi sebesar 0,83 ton/ha. Produsen terbesar kacang hijau pada tahun 2017 adalah Kecamatan Takisung dengan produksi sebesar 55 ton. Tingginya produksi kacang hijau tersebut disebabkan karena luas panen kacang hijau di Kecamatan Takisung menempati urutan tertinggi yaitu seluas 66 ha.

Tabel 2.123 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Ubi Kayu	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	2.535	41.029
2013	1.440	27.901
2014	1.313	25.247
2015	1.156	23.022
2016	984	32.417
2017	743	736

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Komoditi tanaman pangan lainnya di Kabupaten Tanah Laut adalah komoditi ubi kayu. Luas panen ubi kayu di kabupaten ini terus mengalami penurunan selama periode 2012-2017. Pada tahun 2012, luas panen ubi kayu mencapai 2535 ha. Luas panen ubi kayu terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016, luas panen hanya mencapai 984 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas panen ubi kayu juga mengalami penurunan menjadi seluas 92 ha. Sama seperti luas panen ubi kayu, produksi ubi kayu juga mengalami penurunan hingga tahun 2015. Selama periode 2012-2017, produkti tertinggi tercapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 41.029 ton dengan produktivitas sebesar 16,19 ton/ha. Produksi mengalami penurunan menjadi 27.901 ton pada tahun selanjutnya, tetapi produktivitas mengalami peningkatan menjadi 19,38 ton/ha. Pada tahun 2014, produksi maupun produktivitas kembali mengalami penurunan menjadi 25.247 ton dengan produktivitas sebesar 19,23 ton/ha. Selanjutnya, pada tahun 2015 penurunan produksi menjadi 23.022 ton tidak diikuti dengan penurunan produktivitas, di mana pada tahun tersebut produktivitas ubi kayu Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 19,90 ton/ha. Sementara itu, penurunan luas panen ubi kayu tidak mengakibatkan terjadinya penurunan produksi ubi kayu pada tahun 2016. Produksi ubi kayu pada tahun tersebut mengalami peningkatan hingga produksi ubi kayu mencapai 32.416,52 ton. Selanjutnya, penurunan luas panen dan produksi berdampak pada penurunan produktivitas ubi kayu hingga pada tahun 2017 produktivitas ubi kayu hanya sebesar 0,99 ton/ha.

Tabel 2.124 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Ubi Kayu	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	-	-
2.	Takisung	326	-
3.	Kurau	5	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	22	19
6.	Tambang Ulang	75	221
7.	Pelaihari	175	411
8.	Bajuin	39	-
9.	Batu Ampar	29	85
10.	Jorong	5	-
11.	Kintap	67	-
Jumlah		743	736

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jika dirinci menurut kecamatan pada tahun 2017, luas panen tertinggi ubi kayu berada di Kecamatan Takisung yang mencapai 326 ha, disusul Kecamatan Pelaihari seluas 175 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang seluas 75 ha. Namun dari sisi produksi, justru Kecamatan Pelaihari yang menjadi penyumbang terbesar yang mencapai 411 ton, disusul Kecamatan Tambang Ulang sebesar 221 ton, dan Kecamatan Batu Ampar sebesar 85 ton. Selain ubi kayu, Kabupaten Tanah Laut juga memproduksi komoditi ubi jalar. Selama periode 2012-2017, luas panen ubi jalar mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Luas panen ubi jalar pada tahun 2017 adalah seluas 165 ha. Pada tahun 2012, luas panen ubi jalar adalah seluas 203 ha. Luas panen ubi jalar mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya berturut-turut adalah seluas 205 ha dan 228 ha. Pada tahun 2015, luas panen ubi jalar mengalami penurunan menjadi 198 ha. Luas panen ini terus mengalami penurunan sebesar 2 ha pada tahun selanjutnya, sehingga pada tahun tersebut tercatat bahwa luas panen ubi jalar adalah seluas 196 ha. Kemudian pada tahun 2017, seiring dengan penurunan luas panen, produksi ubi jalar juga mengalami penurunan menjadi sebesar 2.252 ton.

Tabel 2.125 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Ubi Kayu	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	203	2.117
2013	205	2.144
2014	228	2.789
2015	198	2.996
2016	196	2.970
2017	165	2.252

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selama periode 2012-2017, produksi ubi jalar Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Produksi ubi jalar pada tahun 2016 mengalami penurunan, tetapi penurunan produksi menunjukkan angka yang kecil, yaitu dari 2.996 ton pada tahun 2015 menjadi 2.970 ton pada tahun 2016. Walaupun terjadi penurunan produksi pada tahun tersebut, produktivitas ubi jalar mengalami peningkatan menjadi 13,65 ton/ha pada tahun 2017. Peningkatan produktivitas tidak hanya terjadi pada tahun 2017, tetapi sepanjang periode 2012-2017 yang mana pada tahun 2012 produktivitas ubi jalar hanya mencapai 10,43 ton/ha. Kecamatan yang memiliki luas panen ubi jalar terbesar adalah Kecamatan Takisung yang mencapai 75 ha sehingga

menjadi produsen ubi jalart terbesar yang mencapai 996 ton. Produksi ubi jalar berasal dari 6 kecamatan dimana kecamatan yang tidak memiliki produksi adalah Kecamatan Panyipatan, Kurau, Bumi Makmur, Bati-bati, dan Batu Ampar.

Tabel 2.126 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Ubi Kayu	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	-	-
2.	Takisung	75	996
3.	Kurau	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	-	-
6.	Tambang Ulang	2	26
7.	Pelaihari	29	626
8.	Bajuin	26	383
9.	Batu Ampar	13	-
10.	Jorong	5	36
11.	Kintap	15	185
Jumlah		165	2.252

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Peningkatan produksi pertanian tentunya didorong oleh ketersediaan lembaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jumlah keseluruhan Balai Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 adalah sebanyak 11 unit yang masing-masing berada di setiap kecamatan. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah sebanyak 107 orang yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Penyuluh terbanyak di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 17 orang, diikuti Kecamatan Bati-bati sebanyak 13 orang, dan Kecamatan Batu Ampar sebanyak 12 orang. Untuk kelompok tani, jumlahnya pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah laut adalah sebanyak 1.591 kelompok dimana kecamatan dengan kelompok tani terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (223 kelompok).

Tabel 2.127 Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), PPL, dan Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	BPP	PPL	Kelompok Tani
1.	Panyipatan	1	7	190
2.	Takisung	1	10	205
3.	Kurau	1	7	105
4.	Bumi Makmur	1	9	112
5.	Bati-bati	1	13	145
6.	Tambang Ulang	1	9	131
7.	Pelaihari	1	17	223
8.	Bajuin	1	10	104
9.	Batu Ampar	1	12	143
10.	Jorong	1	5	114
11.	Kintap	1	8	119
Jumlah		11	107	1.591

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tanaman Hortikultura

Selain tanaman pangan, pertanian di Kabupaten Tanah Laut juga mencakup hortikultura. Usaha tanaman hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran terdiri dari 10 jenis sayuran yang dibudidayakan pada lahan panen seluas 1.255 ha pada tahun 2017. Jenis sayuran di Kabupaten Tanah Laut meliputi bawang merah, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, kangkung, dan bayam. Pada tahun 2017, cabemerupakan jenis sayuran dengan luas panen terbesar yaitu seluas 278 ha. Cabe hampir dibudidayakan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut kecuali Kecamatan Bumi Makmur. Kecamatan dengan luas panen cabe terbesar adalah Kecamatan Batu Ampar dengan luas sebesar 50 ha. Kecamatan yang memiliki luas panen sayuran terbesar adalah Kecamatan Takisung dengan luasan mencapai 255 ha, disusul Kecamatan Batu Ampar seluas 144 ha, dan Kecamatan Pelaihari seluas 160 ha. Selain cabe, sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kacang panjang yaitu seluas 205 ha dimana luas panen terbesar berada di Kecamatan Takisung yaitu seluas 44 ha.

Dari sisi produksi, jenis sayuran yang mempunyai produksi terbesar pada tahun 2017 adalah cabe dengan produksi sebesar 10.931 ton. Kecamatan yang memproduksi cabe terbesar adalah Kecamatan Kurau yaitu sebesar 2.619 ton. Sementara itu, produksi kacang panjang pada tahun 2017 adalah sebesar 7.059 ton. Sama seperti cabe, produksi

kacang panjang berasal dari 10 kecamatan dengan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Takisung (1.110 ton), disusul Kecamatan Kintap sebesar 1.108 ton, dan Kecamatan Batu Ampar sebesar 932 ton. Untuk terung, produksinya pada tahun 2017 adalah sebesar 8.071 ton. Produksi terung terbesar di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Tambang Ulang yaitu sebesar 1.503 ton dan Kecamatan Takisung sebesar 1.350 ton. Sayuran potensial lain yang dikembangkan dan diproduksi dalam jumlah besar adalah tomat dengan produksi sebesar 5.905 ton. Secara rinci, luas panen dan produksi sayuran ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.128 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Bawang Merah	Sawi	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terong	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
1.	Panyipatan	-	-	20	40	-	19	-	18	-	-
2.	Takisung	5	24	44	35	24	45	12	32	17	17
3.	Kurau	-	-	5	14	5	5	-	4	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	12	20	3	9	-	10	-	-
6.	Tambang Ulang	1	10	12	17	11	11	10	11	-	-
7.	Pelaihari	6	-	20	19	16	27	8	16	24	24
8.	Bajuin	2	-	16	42	15	17	11	16	9	10
9.	Batu Ampar	5	26	25	50	24	29	22	25	22	16
10.	Jorong	-	7	24	27	3	5	-	6	9	10
11.	Kintap	-	11	27	14	9	10	2	3	12	12
Jumlah		19	78	205	278	110	177	65	141	93	89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.129 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Bawang Merah	Sawi	Kacang Panjang	Cabe	Tomat	Terong	Buncis	Ketimun	Kangkung	Bayam
1.	Panyipatan	-	-	418	580	-	806	-	1.376	-	-
2.	Takisung	0,76	555	1.110	866	830	1.350	304	1.132	400	400
3.	Kurau	-	-	756	2.619	900	867	-	200	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	467	1.224	152	561	-	225	-	-
6.	Tambang Ulang	0,25	1.477	461	601	1.380	1.503	1.344	2.046	-	-
7.	Pelaihari	0,22	-	482	857	953	804	200	844	319	272
8.	Bajuin	0,25	-	498	1.086	433	506	200	497	148	167
9.	Batu Ampar	0,60	652	932	1.591	787	908	778	1.115	497	319
10.	Jorong	-	265	827	857	97	314	-	274	219	230
11.	Kintap	-	333	1.108	650	373	452	50	61	240	241
Jumlah		2,08	3.282	7.059	10.931	5.905	8.071	2.876	7.770	1.823	1.629

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.130 Jumlah Panen Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas	Alpukat	Semangka	Rambutan	Duku	Sawi	Salak	Nangka	Jambu
1.	Panyipatan	450	800	1.775	5.500	1.600	3.810	-	-	300	-	1.375	490	1.850	405
2.	Takisung	-	2.200	2.400	14.760	495	1.920	-	33	875	200	330	700	4.950	750
3.	Kurau	780	-	-	4.773	217	880	-	-	-	-	299	-	301	197
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	5.496	2.735	5.040	6.326	38.151	4.423	-	9	3.406	456	2.004	-	23.200	1.427
6.	Tambang Ulang	1.436	845	5.500	11.750	11.150	1.290	170	14	4.400	65	350	-	110.950	985
7.	Pelaihari	-	2.127	-	19.287	4.567	4.141	-	28	4.125	-	1.492	-	11.709	2.215
8.	Bajuin	915	3.500	5	449	2.000	153	9	17	2.011	-	468	35	4.528	1.176
9.	Batu Ampar	545	2.457	1.138	11.270	731	773	-	16	572	-	590	262	73.257	586
10.	Jorong	-	2.076	1.736	13.690	687	11.904	-	34	2.791	215	541	85	1.863	947
11.	Kintap	-	150	480	4.900	125	325	10	14	65	-	70	270	76	97
Jumlah		9.622	16.890	18.074	92.705	59.723	29.619	189	165	18.545	936	7.519	1.842	232.684	8.785

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel 2.131 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas	Alpukat	Semangka	Rambutan	Duku	Sawi	Salak	Nangka	Jambu
1.	Panyipatan	220	96	1.181	2.050	140	75	-	-	100	-	518	41	775	204
2.	Takisung	-	440	310	1.476	37	21	-	6.200	875	29	57	70	990	85
3.	Kurau	277	-	-	290	20	24	-	-	-	-	299	-	92	18
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bati-bati	1.296	2.177	490	697	4.449	83	-	788	1.331	63	522	-	4.079	267
6.	Tambang Ulang	1.078	555	1.660	1.410	1.229	36	47	1.855	2.200	52	82	-	43.849	81
7.	Pelaihari	-	590	-	2.200	2.100	174	-	1.386	2.125	-	636	-	2.295	638
8.	Bajuin	620	720	4	210	1.325	10	11	562	871	-	231	3	2.615	264
9.	Batu Ampar	227	693	583	1.036	152	28	-	2.429	60	-	106	18	16.083	209
10.	Jorong	-	519	208	796	50	217	-	2.751	418	32	92	2	270	72
11.	Kintap	-	28	88	290	19	6	2	323	7	-	28	13	28	10
Jumlah		3.718	5.818	4.524	10.455	9.521	674	60	16.294	7.987	176	2.571	147	71.076	1.848

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis tanaman buah yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut adalah mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, alpukat, semangka, rambutan, duku, sawi, salak, nangka dan jambu. Jumlah pohon buah di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 497.298 pohon. Pohon buah yang banyak ditanam masyarakat adalah nangka (232.684 pohon), pisang (92.705 pohon), pepaya (59.723 pohon), nanas (29.619 pohon), dan rambutan (18.545 pohon). Untuk produksi, buah yang paling banyak diproduksi adalah nangka (71.076 ton), disusul semangka (16.294 ton), pisang (10.455 ton), pepaya (9.521 ton), dan rambutan (7.987 ton). Secara keseluruhan, produksi buah adalah sebesar 134.869 ton. Kecamatan penghasil buah terbesar adalah Kecamatan Tambang Ulang (54.134 ton), diikuti Kecamatan Batu Ampat (21.624 ton), dan Kecamatan Pelaihari (12.144 ton).

Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kemiri, kapuk, dan aren. Jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman karet, termasuk luas area yang belum menghasilkan dan rusak, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2012-2016. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2012 adalah seluas 13.271 ha dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2016 menjadi seluas 18.652 ha. Namun pada tahun 2017, luas areal tanaman karet mengalami penurunan menjadi 14.746 ha. Pada tahun 2017, luas areal tanaman yang belum menghasilkan (TBM) adalah seluas 5.433 ha, tanaman menghasilkan (TM) seluas 9.196 ha, dan tanaman tua/rusak (TT/TR) seluas 117 ha. Kecamatan yang memiliki luas areal tanaman karet terbesar adalah Kecamatan Batu Ampar dimana luas areal TBM seluas 1.078 ha dan luas TM seluas 2.945 ha. Jika dari luas areal menunjukkan peningkatan, produksi karet selama periode 2012-2017 justru mengalami penurunan. Pada tahun 2012, produksi karet adalah sebesar 8.625 ton dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 6.437,2 ton. Penurunan produksi tersebut dimungkinkan mengingat struktur tanaman karet yang ada sekarang sebagian besar termasuk tanaman belum menghasilkan. Produksi maupun luas areal yang dijelaskan tersebut merupakan produksi dan luas dari perkebunan rakyat. Produksi dan luas areal yang ditunjukkan pada tabel-tabel perkembangan luas areal dan produksi

tanaman perkebunan di bawah tidak termasuk luas dan produksi perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

Tabel 2.132 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2012	13.271	8.625,0	1.117	1.242,0	11.152	9.814,0
2013	13.170	8.756,5	1.140	1.353,4	11.388	-
2014	14.433	-	1.146	-	11.651	14.383,0
2015	14.746	6.437,2	1.011	336,54	11.822	15.191,4
2016	18.652	6.407,8	844	327,04	11.823	15.339,3
2017	14.746	6.437,2	1.034	883,96	11.821	17.109,7

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Komoditi lainnya seperti kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan potensial di Kabupaten Tanah Laut. Luas areal maupun produksi kelapa sawit selama periode 2012-2017 mengalami peningkatan. Pada awal periode, luas areal kelapa sawit mencaoai 11.152 ha dengan produksi sebesar 9.814 ton. Luas maupun produksi terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 luas areal kelapa sawit mencapai 11.821 ha dengan produksi 17.109,7 ton. Kecamatan yang memiliki luas areal kelapa sawit terbesar adalah Kecamatan Pelaihari yaitu seluas 3.025 ha dengan produksi sebesar 6.451,5 ton.

Berbeda dengan luas dan produksi kelapa sawit yang terus meningkat, luas areal dan produksi komoditi kelapa cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2012, luas areal komoditi kelapa adalah seluas 1.117 ha dengan produksi sebesar 1.242 ton. Pada tahun selanjutnya, produksi kelapa meningkat mencapai 1.353 ton yang disebabkan karena meningkatnya luas areal tanam komoditi kelapa yaitu seluas 1.140 ha. Pada tahun 2015 maupun 2016, luas areal maupun produksi kelapa mengalami penurunan yaitu seluas 1.011 ha dengan produksi sebesar 336,54 ton pada tahun 2015 dan luas areal sebesar 843,5 ha dengan produksi sebesar 327,04 ton. Pada tahun 2017, luas areal kelapa meningkat menjadi 1.034 ton dengan produksi sebesar 883,96 ton. Kecamatan dengan luas areal kelapa terbesar adalah Kecamatan Pelaihari dengan luas TBM sebesar 36 ha, luas TM sebesar 264 ha, dan luas TT/TR sebesar 6 ha. Produksi kelapa di Kecamatan Pelaihari sendiri merupakan yang terbesar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 yaitu sebesar 237,6 ton.

Kopi, lada, dan cengkeh merupakan jenis komoditi perkebunan lainnya di Kabupaten Tanah Laut. Perkembangan luas areal dan produksi kopi mempunyai kecenderungan yang tidak menentu. Luas areal kopi terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Pada tahun 2012 luas areal kopi sebesar 193 ha, sedangkan pada tahun 2015 luas areal kopi menjadi 148 ha. Pada tahun 2016, luas areal kopi mengalami kenaikan menjadi 154 ha. Selanjutnya di tahun 2017, luas areal kopi kembali menurun menjadi seluas 142 ha. Berbeda dengan luas areal, produksi kopi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu dari 78 ton menjadi 206,7 ton. Namun, pada tahun berikutnya produksi kopi menurun menjadi 72,5 ton dan menurun lagi menjadi 14,9 ton pada tahun 2016. Untuk jenis tanaman perkebunan lada dan cengkeh, kedua komoditi tersebut mempunyai perkembangan luas areal yang terus mengalami penurunan sepanjang periode 2012-2017. Luas areal tanaman lada pada tahun 2012 adalah seluas 22 ha pada, sedangkan komoditi cengkeh mempunyai luas areal sebesar 272 ha. Luas areal tanam kedua tanaman perkebunan tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 luas areal tanam lada adalah seluas 12 ha dan luas areal tanam cengkeh adalah seluas 53 ha. Dengan adanya penurunan luas areal tanam kedua komoditi perkebunan tersebut, produksi lada dan cengkeh Kabupaten Tanah Laut juga mengalami penurunan dari 11 ton pada tahun 2012 menjadi 4,2 ton pada tahun 2016 untuk lada dan 97 ton pada tahun 2012 menjadi 34,5 ton pada tahun 2017 untuk produksi cengkeh.

Tabel 2.133 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi, Lada, dan Cengkeh di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kopi		Lada		Cengkeh	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2012	193	78,0	22	11,0	272	97
2013	163	206,7	22	16,6	262	135,25
2014	149	-	20	-	246	-
2015	148	72,5	15	5,0	169	33,909
2016	154	14,9	15	7,0	164,5	1,36
2017	142	76,8	12	4,2	53	34,5

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis tanaman perkebunan lain yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah kemiri, kapuk, dan aren. Kemiri dan aren tidak mempunyai perbedaan yang signifikan pada luas areal tanamnya selama periode 2012-2017, sedangkan luas areal

kapuk mengalami penurunan yang cukup banyak. Luas areal tanam kapuk pada tahun 2012 adalah seluas 18 ha. Luas areal tanaman ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 luas tanam kapuk menjadi 1 ha. Dengan adanya penurunan luas areal tanam kapuk, produksi kapuk periode 2012-2017 juga mengalami penurunan. Produksi kapuk pada tahun 2012 adalah sebesar 6 ton dan pada tahun 2017 produksi hanya mencapai 1 ton. Sementara itu, luas areal tanam kemiri mempunyai kecenderungan untuk menurun. Luas arela tanam kemiri di Kabupaten Tanah Laut adalah seluas 146 ha pada tahun 2012 dan 130 ha pada tahun 2017. Berbeda dengan luas areal tanamn yang menurun, produksi kemiri justru meningkat di mana pada tahun 2012 produksinya adalah sebesar 48 ton dan pada tahun 2017 adalah sebesar 51,6 ton. Seperti luas areal kemiri, luas areal tanam aren tidak mempunyai perubahan yang signifikan. Namun, produksi aren periode 2012-2017 mengalami kenaikan dari 276 ton pada tahun 2012 menjadi 510 ton pada tahun 2013. Peningkatan produksi pada tahun tersebut mengindikasikan bahwa produktivitas tanaman aren mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015 dengan luas areal sebesar 87 ha, produksi aren hanya mencapai 31,99 ton dan meningkat lagi menjadi 156 ton pada tahun berikutnya dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 44,3 ton.

Tabel 2.134 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kemiri, Kapuk, dan Aren di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Kemiri		Kapuk		Aren	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2012	146	48,0	18	6,0	83	276,0
2013	146	-	16	5,3	83	510,0
2014	136	-	14	-	83	-
2015	138	47,0	1	1,0	87	32,0
2016	138	16,0	1	0,1	82	156,0
2017	130	51,6	1	1,0	82	44,3

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Peternakan

Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu pusat peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik). Selama periode 2012-2017, populasi ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas cenderung berfluktuatif.

Populasi sapi perah di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami penurunan selama periode 2012 hingga 2015 dan meningkat pada tahun 2017. Populasi sapi perah pada tahun 2012 adalah sebanyak 50 ekor, selanjutnya menurun menjadi 45 ekor pada tahun berikutnya. Pada dua tahun berikutnya, populasi sapi perah masih mengalami penurunan yaitu menjadi 13 ekor pada tahun 2014 dan 11 ekor pada tahun 2015. Populasi sapi perah meningkat pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebanyak 24 ekor. Sama dengan populasi sapi perah, selama periode 2012-2017 populasi sapi potong juga mengalami penurunan pada awal periode. Perbedaannya adalah populasi sapi potong meningkat mulai tahun 2015. Populasi sapi potong pada tahun 2012 adalah sebanyak 62.235 ekor dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 populasi sapi potong menjadi 56.571 ekor. Pada dua tahun berikutnya, populasi sapi potong meningkat menjadi 61.225 ekor dan 65.155 pada tahun 2015 ekor pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, populasi sapi potong terus meningkat hingga mencapai populasi tertingginya menjadi sebanyak 75.641 ekor. Selama periode 2012-2017, populasi kerbau terbanyak terjadi pada tahun 2012 dengan populasi sebanyak 4.007 ekor. Pada tahun 2013, populasi kerbau turun cukup banyak yaitu menjadi 2.785 ekor. Pada tahun 2017, populasi kerbau di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 3.692 ekor.

Tabel 2.135 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kab. Tanah Laut (ekor), 2012-2017

Jenis Ternak	Populasi (ekor)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ternak Besar						
Sapi Perah	50	45	13	11	14	24
Sapi Potong	62.235	51.190	56.571	61.225	65.155	75.641
Kerbau	4.007	2.785	3.265	3.280	3.078	3.692
Ternak Kecil						
Kambing	19.447	14.072	14.829	14.797	14.784	20.808
Domba	447	305	292	244	202	178
Babi	69	29	15	-	-	-
Ternak Unggas						
Ayam Buras	1.134.746	1.205.061	1.686.487	2.210.147	2.733.807	2.426.741
Ayam Petelur	2.342.776	2.777.266	4.023.256	5.244.362	6.473.994	6.729.689
Ayam Pedaging	13.139.320	21.970.607	26.438.945	49.061.691	50.693.299	51.375.593
Itik	208.230	227.585	267.505	256.511	232.959	192.333

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi kambing terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 20.808 ekor, sementara untuk domba populasinya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, populasi domba adalah sebanyak 447 ekor dan pada tahun 2017 berkurang menjadi sebanyak 178 ekor. Berbeda dengan ternak besar dan kecil yang rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan pada populasinya, populasi jenis unggas cenderung mengalami peningkatan selama periode 2012-2017 kecuali itik. Pada tahun 2012 populasi ayam buras dan ayam ras adalah 1.134.746 ekor ayam buras, 2.342.776 ekor ayam petelur, dan 13.139.320 ekor ayam pedaging. Populasi ketiga jenis unggas tersebut terus meningkat hingga pada 2017 populasinya adalah sebanyak 2.426.741 ekor ayam buras, 6.729.689 ekor ayam petelur, dan 51.375.593 ekor ayam pedaging. Sementara itu, populasi itik di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 populasi itik mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2017, populasi itik mencapai titik terendahnya menjadi hanya sebanyak 192.333 ekor.

Tabel 2.136 Populasi Ternak Besar dan Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2017

No.	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1.	Panyipatan	-	13.873	95	15	2.500	10
2.	Takisung	7	15.470	108	-	3.299	-
3.	Kurau	-	523	-	-	642	-
4.	Bumi Makmur	-	51	-	-	589	-
5.	Bati-Bati	-	2.085	78	-	341	-
6.	Tambang Ulang	-	2.435	18	-	2.329	-
7.	Pelaihari	17	18.989	73	-	870	133
8.	Bajuin	-	7.328	298	-	397	-
9.	Batu Ampar	-	8.584	453	-	2.664	21
10.	Jorong	-	3.482	1.864	-	2.842	14
11.	Kintap	-	2.821	705	-	4.335	-
	Jumlah	24	75.641	3.692	15	20.808	178

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, populasi sapi potong terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 18.989 ekor, Kecamatan Takisung menempati posisi kedua dengan populasi sebanyak 15.470 ekor, disusul Kecamatan Panyipatan dengan populasi sebanyak 13.873 ekor. Total populasi sapi potong di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 75.641 ekor pada tahun 2017. Untuk sapi perah, populasi hewan ternak

tersebut adalah sebanyak 24 ekor yang berada di Kecamatan Takisung dengan jumlah 7 ekor dan di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah 17 ekor. Hewan ternak besar yang lain adalah kerbau, di mana total populasi kerbau di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 3.692 ekor pada tahun 2017. Populasi kerbau terbesar berada di Kecamatan Jorong dengan jumlah sebanyak 1.864 ekor. Ternak kecil yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah kambing dan domba. Pada tahun 2016, tiga kecamatan dengan populasi kambing terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Kintap dengan jumlah sebanyak 4.335 ekor, Kecamatan Takisung dengan jumlah sebanyak 3.299 ekor, dan Kecamatan Jorong dengan jumlah sebanyak 2.842 ekor. Untuk hewan ternak domba, populasi terbesar berada di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah sebanyak 133 ekor domba. Selain Kecamatan tersebut, wilayah lain yang mempunyai populasi domba adalah Kecamatan Panyipatan (10 ekor), Batu Ampar (21 ekor), dan Jorong (14 ekor).

Tabel 2.137 Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2017

No.	Kecamatan	Jenis Unggas			
		Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1.	Panyipatan	95.654	86.727	6.087.169	19.584
2.	Takisung	104.676	885.542	7.372.000	4.515
3.	Kurau	60.121	-	746.686	47.752
4.	Bumi Makmur	44.129	-	107.626	63.176
5.	Bati-Bati	679.527	1.388.797	10.554.900	6.517
6.	Tambang Ulang	134.553	2.261.230	4.903.261	5.367
7.	Pelaihari	541.538	165.533	9.512.713	9.569
8.	Bajuin	226.919	574.479	4.404.054	133
9.	Batu Ampar	230.886	153.570	4.359.958	11.111
10.	Jorong	159.364	1.105.253	2.275.400	2.112
11.	Kintap	185.374	109.908	1.051.826	22.497
	Jumlah	2.462.741	6.729.689	51.375.593	192.333

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut meliputi ayam buras yang sering disebut sebagai ayam kampung, ayam ras yang terdiri dari ayam petelur dan ayam pedaging, serta itik. Pada tahun 2017, populasi ayam buras di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 2.462.741 ekor. Tiga kecamatan dengan populasi ayam buras terbesar adalah Kecamatan Bati-bati yaitu sebanyak 679.527 ekor, disusul Kecamatan Pelaihari dengan jumlah ayam sebanyak 541.538 ekor, dan Kecamatan Batu Ampar dengan jumlah sebanyak 230.886 ekor. Sementara itu,

populasi ayam ras petelur di Kabupaten Tanah Laut lebih besar dibandingkan ayam buras yaitu sebanyak 6.729.689 ekor dengan populasi terbanyak berada di Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 2.261.230 ekor, Kecamatan Bati-bati sebanyak 1.388.797 ekor, dan Kecamatan Jorong sebanyak 1.105.253 ekor. Ayam ras yang lain yaitu ayam pedaging merupakan jenis unggas dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Populasi ayam pedaging di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 51.375.593 ekor. Populasi ayam pedaging terbesar berada di Kecamatan Bati-bati yaitu sebanyak 10.554.900 ekor, diikuti Kecamatan Pelaihari sebanyak 9.512.713 ekor, dan Kecamatan Takisung sebanyak 7.372.000 ekor. Jenis unggas terakhir yang dikembangkan masyarakat Tanah Laut adalah itik. Populasi itik pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 192.333 ekor dengan populasi tersebar di seluruh kecamatan. Populasi terbesar itik dengan jumlah sebanyak 63.176 ekor berada di Kecamatan Bumi Makmur.

Produksi pangan yang dihasilkan dari kegiatan peternakan diantaranya adalah daging dan telur. Produksi daging sapi menunjukkan peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dari 422.438 kg pada tahun 2011 menjadi 942.045 kg pada tahun 2012 dan 1.058.463 kg pada tahun 2013. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi sapi mengalami penurunan menjadi 323.745 kg pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 263.356 kg. Produksi daging kerbau dan kambing mempunyai pergerakan yang sama, di mana populasi kedua hewan ternak tersebut meningkat selama periode 2011-2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2011, produksi daging kerbau adalah sebanyak 35.724 kg dan daging kambing adalah sebanyak 32.032 kg. Pada tahun 2017, produksi daging kerbau menurun dibandingkan produksi daging kerbau pada tahun 2015 yaitu dari 94.002 kg menjadi 50.204 kg. Sementara itu, produksi daging kambing juga mengalami penurunan sehingga produksi daging pada tahun 2017 mempunyai jumlah yang lebih sedikit dibandingkan produksi tahun 2011 yaitu sebesar 12.608 kg.

Produksi daging jenis ternak kecil lainnya yaitu domba dan babi di Kabupaten Tanah Laut cukup berfluktuatif. Produksi daging domba mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu dari 791 kg menjadi 689 kg. Pada tahun berikutnya, produksi daging domba mengalami peningkatan menjadi 791 kg. Selanjutnya, produksi daging domba mengalami penurunan dengan jumlah yang cukup banyak melebihi kenaikan jumlah produksi daging sebelumnya pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, produksi daging

hanya mencapai 396 kg. Produksi daging domba mengalami kenaikan walaupun tidak mencapai jumlah produksi pada tahun 2013 yaitu sebesar 536 kg. Produksi daging domba pada tahun 2017 adalah sebanyak 408 kg. Sementara itu, produksi daging babi terus mengalami penurunan selama periode 2011-2017. Produksi daging babi pada tahun 2011 adalah sebesar 3.447 kg dan terus menurun menjadi tidak diproduksi pada tahun 2017.

Tabel 2.138 Perkembangan Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2011-2017

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2011	422.438	35.724	32.032	791	3.447
2012	942.045	79.846	57.617	689	5.228
2013	1.058.463	88.030	62.336	791	3.447
2014	615.508	94.002	63.886	396	1.724
2015	323.745	58.613	15.268	536	632
2016	-	-	-	-	-
2017	263.356	50.204	12.608	408	-

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Produksi daging ternak unggas di Kabupaten Tanah Laut berasal dari ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Jumlah produksi ayam buras dan ayam ras (ayam petelur dan pedaging) cenderung berfluktuasi. Produksi daging dari ayam buras dan ayam petelur meningkat pada tahun 2012 yaitu dari 454.663 kg menjadi 628.051 kg untuk ayam buras dan 391.095 kg menjadi 690.665 kg untuk ayam petelur. Pada tahun berikutnya, kedua produksi jenis unggas tersebut mengalami penurunan menjadi 585.514 kg untuk ayam buras dan 633.600 untuk ayam petelur. Produksi daging kedua jenis unggas ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi sebanyak 486.904 kg untuk ayam buras dan 1.170.480 untuk ayam petelur. Pada tahun 2017, produksi daging ayam buras dan ayam petelur kembali meningkat sehingga masing-masing menjadi sebesar 500.787 kg dan 1.224.846 kg.

Produksi daging dari ayam pedaging mengalami peningkatan selama periode 2011-2013. Produksi daging jenis unggas ini mencapai 5.000.009 kg pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 11.202.024 kg pada tahun 2013. Produksi daging ayam pedaging menurun setengahnya pada tahun berikutnya yaitu menjadi 5.121.556 kg. Pada tahun 2015, produksi daging ayam pedaging meningkat walaupun peningkatannya sangat kecil tidak mencapai jumlah produksi daging pada tahun 2013. Produksi daging

jenis unggas ini yaitu sebesar 5.149.139 kg. Pada tahun 2017, produksi daging unggas yang berasal dari ayam pedaging meningkat kembali menjadi sebesar 6.859.018 kg. Produksi daging jenis unggas yang lain yaitu itik, mempunyai kecenderungan untuk meningkat selama periode 2011-2015. Produksi daging itik adalah sebanyak 49.050 kg pada tahun 2011 dan menjadi 84.688 kg pada tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2017, produksi daging itik mengalami penurunan menjadi sebesar 70.958 kg.

Tabel 2.139 Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2011-2017

Tahun	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
2011	454.663	391.095	5.000.009	49.050
2012	628.051	690.665	9.390.968	56.620
2013	585.514	633.600	11.202.074	63.926
2014	976.418	1.782.876	5.121.556	78.960
2015	486.904	1.170.480	5.149.139	84.688
2016	-	-	-	-
2017	500.787	1.224.846	6.859.018	70.958

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain daging, produksi hasil ternak yang lain adalah telur. Produksi telur tersebut berasal dari ternak unggas yaitu ayam ras (ayam petelur dan pedaging), ayam buras, dan itik. Selama periode 2012-2017, produksi telur ayam selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Produksi telur ayam ras adalah sebesar 24.599.148 kg pada tahun 2012 dan menjadi 55.065.801 kg pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2017, produksi telur ayam ras melonjak signifikan menjadi sebesar 70.662.576 kg. Sama dengan produksi telur ayam ras yang selalu meningkat tiap tahunnya, produksi telur ayam buras juga meningkat tiap tahunnya selama periode 2012-2017. Produksi telur ayam buras pada tahun 2012 adalah sebesar 928.429 kg dan menjadi 2.014.969 kg pada tahun 2017. Sementara itu, produksi telur itik meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Produksi telur itik meningkat dari 1.427.863 kg pada tahun 2012 menjadi 1.560.583 kg pada tahun 2013 dan 1.765.749 kg pada tahun 2014. Pada tahun 2015, produksi telur itik menurun menjadi 1.758.933 kg. Selanjutnya pada tahun 2017, produksi telur itik kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1.318.854 kg. Selain daging dan telur, tercatat bahwa produk lain dari ternak adalah jeroan. Produksi jeroan sapi pada tahun 2017 adalah sebesar 80.318 kg, jeroan kerbau sebesar 14.127 kg, jeroan kambing sebesar 2.660 kg, jeroan domba sebesar 102 kg, jeroan ayam ras petelur sebesar

113.168 kg, jeroan ayam ras pedaging sebesar 623.547 kg, jeroan ayam buras sebesar 111.286 kg, dan jeroan itik sebesar 7.469 kg.

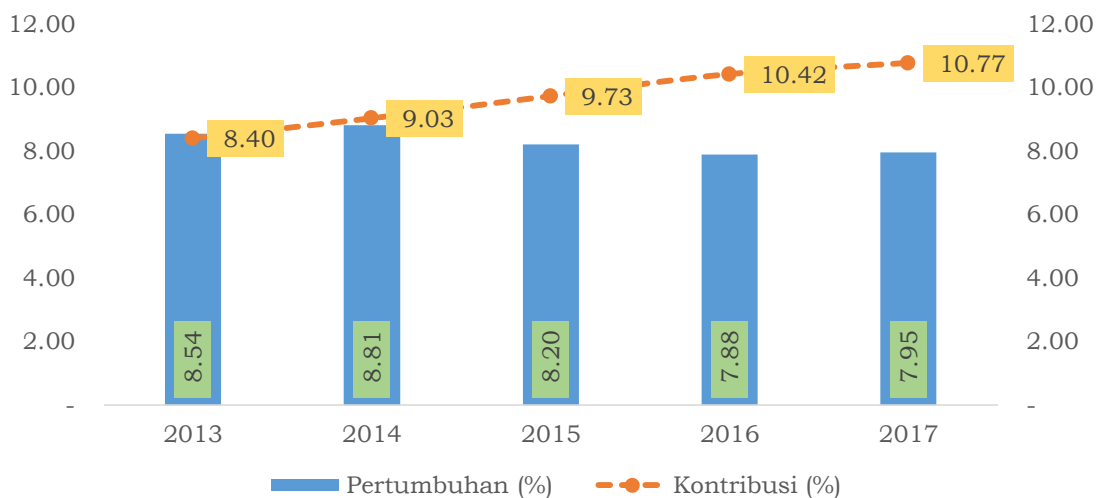
Tabel 2.140 Perkembangan Produksi Telur Unggas di Kabupaten Tanah Laut (kg), 2012-2017

Tahun	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
2012	928.429	24.599.148	1.427.863
2013	985.959	29.161.293	1.560.583
2014	1.379.853	42.244.188	1.765.749
2015	1.808.302	55.065.801	1.758.933
2016	-	-	-
2017	2.014.969	70.662.576	1.318.854

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.2.4 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013, kontribusinya adalah sebesar 8,40%, pada tahun 2017 kontribusinya terus meningkat setiap tahun hingga menjadi sebesar 7,95%. Di sisi pertumbuhan, terlihat selama periode 2013-2017 sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor terus tumbuh setiap tahunnya di atas angka 7%. Pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 8,81%. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut mengindikasikan bahwa sektor tersier di Kabupaten Tanah Laut akan menjadi penopang perekonomian daerah.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.24 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Sepeda Motor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Unit usaha perdagangan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Jumlah pedagang besar pada tahun 2017 adalah sebanyak 23 unit usaha yang tersebar di 6 kecamatan. Sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari memiliki unit pedagang besar terbanyak yaitu sebanyak 15 unit. Kecamatan lain yang memiliki unit pedagang besar adalah Kecamatan Bati-bat, Jorong, dan Kintap yang masing-masing memiliki 2 unit dan Kecamatan Takisung dan Batu Ampar yang masing-masing memiliki 1 unit pedagang. Untuk pedagang menengah, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 290 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Sama seperti pada pedagang besar, Kecamatan Pelaihari juga memiliki jumlah unit pedagang menengah terbesar yaitu sebanyak 68 unit, disusul Kecamatan Takisung sebanyak 38 unit, dan Kecamatan Bati-bati sebanyak 37 unit. Untuk pedagang kecil, jumlahnya pada tahun 2017 adalah sebanyak 9.554 unit. Sama seperti pada pedagang menengah, unitnya tersebar di seluruh kecamatan dengan kecamatan yang paling banyak memiliki unit pedagang kecil adalah Kecamatan Pelaihari (2.751 unit).

Tabel 2.141 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
1.	Panyipatan	-	15	171
2.	Takisung	1	38	1.102
3.	Kurau	-	21	181
4.	Bumi Makmur	-	10	132
5.	Bati-bati	2	37	1.109
6.	Tambang Ulang	-	11	125
7.	Pelaihari	15	68	2.751
8.	Bajuin	-	11	121
9.	Batu Ampar	1	26	721
10.	Jorong	2	22	1.358
11.	Kintap	2	31	1.783
	Jumlah	23	290	9.554

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Selain manusia yang menjadi pedagang, dalam kegiatan perdagangan juga membutuhkan sarana perdagangan. Di Kabupaten Tanah Laut, sarana perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pasar, toko, kios, dan warung. Jumlah pasar dalam periode 2013-2017, jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 32 unit pada tahun 2013 menjadi sebanyak 36 unit pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada toko, kios, dan warung yang meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Jumlah toko meningkat dari 571 unit menjadi sebanyak 596 unit, kios meningkat dari 1.250 unit menjadi sebanyak 1.940 unit, dan warung meningkat dari 3.250 unit menjadi sebanyak 4.012 unit.

Tabel 2.142 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Tahun	Pasar	Toko	Kios	Warung
2013	32	571	1.250	3.250
2014	33	579	1.321	3.371
2015	33	582	1.381	3.856
2016	34	585	1.571	3.978
2017	36	596	1.940	4.012

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Tanah Laut, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor barang dan jasa sebesar Rp 9.543,68 miliar menurun menjadi sebesar Rp 9.154,51 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2017 nilai ekspor barang dan jasa sebesar Rp 8.928,21 miliar; Rp 8.914,19 miliar dan Rp 10.532,58 miliar. Pertumbuhan riil total ekspor selama kurun waktu 2013-2016 hanya berkisar diangka 0,25% sampai 9,11%. Bahkan di tahun 2015, angka pertumbuhan ekspor bernilai negatif, yaitu -7,18%. Angka pertumbuhan yang kecil tersebut disebabkan adanya penurunan produksi batubara serta anjloknya harga komoditas ini yang mendorong semakin menurunnya permintaan ekspor komoditas ini (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.143 Perkembangan Ekspor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total Nilai Ekspor ADHB (Rp miliar)	9.543,68	9.154,51	8.928,21	8.914,19	10.532,58
Total Nilai Ekspor ADHK (Rp miliar)	8.601,94	8.510,71	7.919,65	7.919,65	8.641,02
Proporsi terhadap PDRB ADHB (% ADHB)	101,41	89,71	78,24	78,24	85,20
Pertumbuhan (%)	0,34	-1,06	-7,18	0,25	9,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Tanah Laut di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Tanah Laut terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri. Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Tanah Laut berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.680,57 miliar, kemudian menurun di tahun 2014 menjadi Rp 6.582,90 miliar, Rp 6.432,04 miliar pada tahun 2015, Rp 6.410,19 miliar pada tahun 2016, dan menjadi Rp 6.994,44 miliar pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2013 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 78,64%. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 71,27%, 68,22% pada tahun 2015 dan 72,77% tahun 2017 (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Tabel 2.144 Perkembangan Impor Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

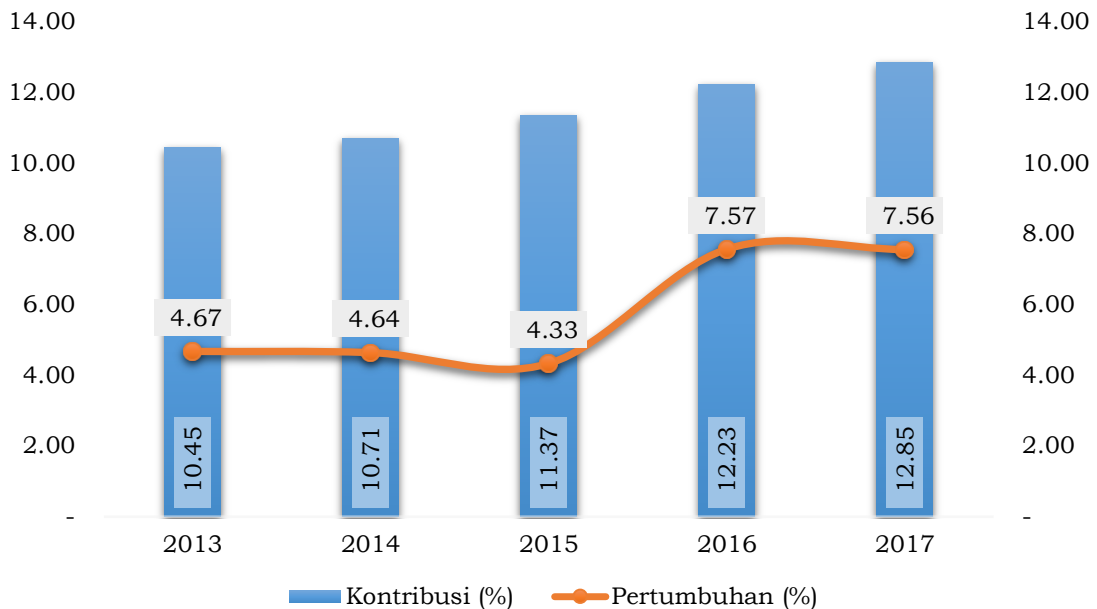
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total Nilai Ekspor ADHB (Rp miliar)	7.401,23	7.272,85	7.369,42	7.594,24	8.995,63
Total Nilai Ekspor ADHK (Rp miliar)	6.680,57	6.582,90	6.432,04	6.410,19	6.994,44
Proporsi terhadap PDRB ADHB (% ADHB)	78,64	71,27	68,22	66,65	72,77
Pertumbuhan (%)	-1,92	-1,46	-2,29	-0,34	9,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.2.5 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kabupaten Tanah Laut, dan juga pertumbuhannya lebih cepat dibanding sektor lainnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat sepanjang periode 2013-2017. Pada tahun 2013, kontribusi sektor industri pengolahan adalah sebesar 10,45%,

kemudian meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar 12,85%. Di sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan juga terus tumbuh setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,75%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 7,56%, sedangkan pertumbuhan terendah berlangsung pada tahun 2015 yang hanya sebesar 4,33%.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.25 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Laut beraneka ragam dari industri kecil seperti industri makanan hingga industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Jumlah industri yang paling banyak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah industri makanan yang mencapai 1.004 unit dengan tenaga kerja sebanyak 2.353 tenaga kerja dan nilai produksi mencapai Rp 174,61 miliar. Industri lain yang berkembang adalah industri pakaian jadi yang pada tahun 2017 berjumlah 143 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 263 tenaga kerja dan nilai produksi sebesar Rp 19,08 miliar. Industri lain yang memberikan nilai produksi yang cukup besar adalah industri bahan galian bukan logam yang berjumlah 60 unit dengan tenaga kerja sebanyak 192 tenaga kerja dan nilai produksi sebesar Rp 51,33 miliar. Industri furnitur juga memberikan dampak yang signifikan dengan nilai produksi sebesar Rp 42,45

miliar. Jumlah industri furniture pada tahun 2017 adalah sebanyak 92 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 214 tenaga kerja.

Tabel 2.145 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Laut, 2016

Kode KBU	Deskripsi	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp miliar)
10	Industri makanan	1.004	2.353	174,61
11	Industri minuman	50	95	4,02
13	Industri tekstil	7	59	0,90
14	Industri pakaian Jadi	143	263	19,08
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	97	255	7,58
18	Industri pencetakan umum	10	44	2,11
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	17	110	2,04
21	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	20	28	1,55
23	Industri barang galian bukan logam	60	192	51,33
31	Industri furniture	92	214	42,45

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Berdasarkan persebarannya jumlah industri pengolahan terbesar berada di Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 383 unit, kemudian Kecamatan Panyipatan sebanyak 383 unit, dan Kecamatan Pelaihari sebanyak 340 unit. Total tenaga kerja yang terserap dari sebanyak 1.966 unit perusahaan adalah 4.493 tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah di Kecamatan Takisung yang mencapai 1.009 orang. Nilai produksi perusahaan-perusahaan tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 5,05 triliun.

Tabel 2.146 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp miliar)
1.	Panyipatan	381	717	74,58
2.	Takisung	383	1.009	76,77
3.	Kurau	57	138	10,16
4.	Bumi Makmur	99	288	13,52
5.	Bati-Bati	125	281	12,41
6.	Tambang Ulang	78	184	4,65
7.	Pelaihari	340	705	100,02
8.	Bajuin	190	366	19,40
9.	Batu Ampar	83	242	18,84
10.	Jorong	164	402	62,72
11.	Kintap	66	161	14,80

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.3.2.6 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedangkan transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan.

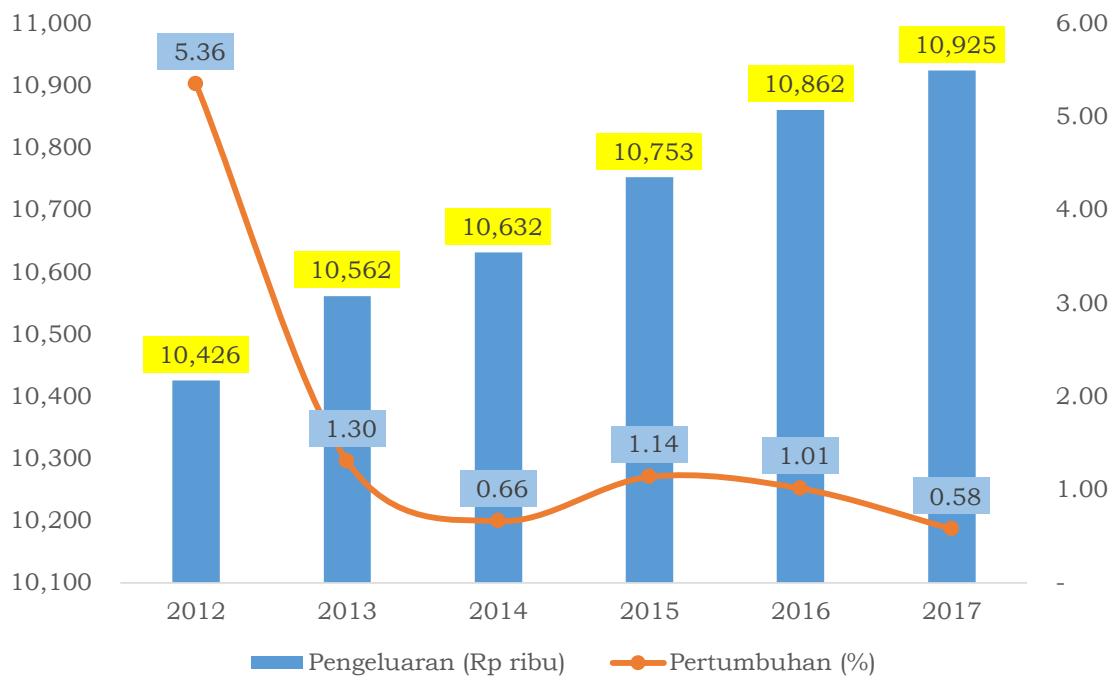
Transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut terakhir berjalan pada tahun 2008 dengan jumlah transmigran sebesar 100 KK. Program transmigrasi yang direncanakan pada tahun 2015 tidak bisa berjalan karena terkendala pembebasan lahan seluas 446 hektar di Desa Padang Luas dan Desa Kurau Kematan Kurau yang kepemilikan tanahnya diakui oleh penduduk. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan permasalahan pasca transmigran menempati lokasi transmigrasi tersebut maka program transmigrasi tahun 2015 tidak dilaksanakan. Demikian pula pada tahun 2016 dan 2017 juga tidak ada data mengenai transmigrasi karena tidak adanya program transmigrasi di tahun tersebut.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui beberapa aspek yakni pendapatan, tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, kecenderungan akan meningkatkan pengeluaran konsumsinya. Selain itu, pola pengeluaran konsumsi seseorang juga akan berubah dari pengeluaran untuk makanan ke non makanan. Hal tersebut dikarenakan jika kebutuhan seseorang terhadap makanan sudah terpenuhi dan mencapai kepuasan maksimum maka seseorang akan mulai mengkonsumsi non makanan.



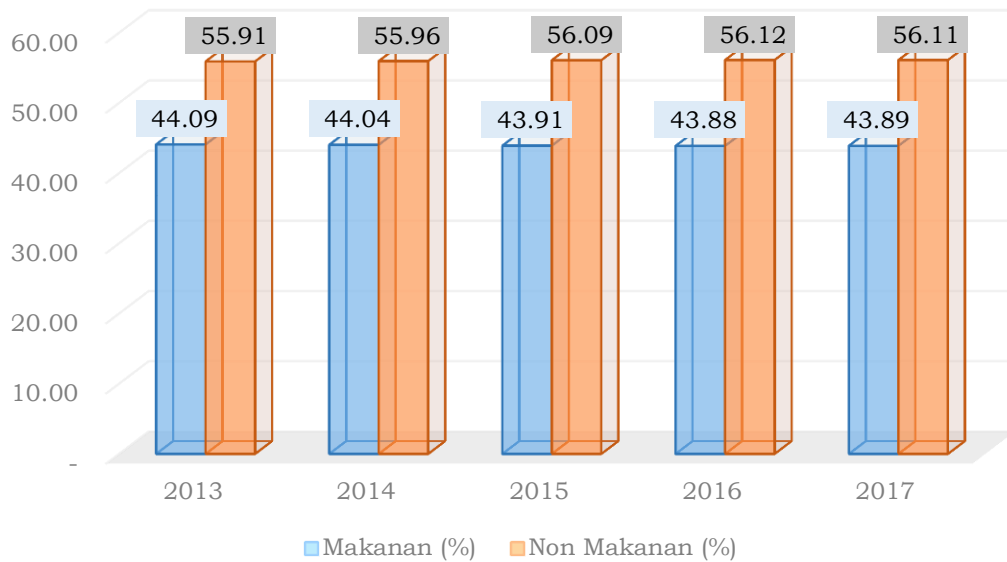
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.26 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kabupaten Tanah Laut (Ribu Rp/Tahun), 2012-2017

Selama tahun 2012-2017, tingkat kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2012, pengeluaran perkapita penduduk sebesar Rp10,43 juta, meningkat 5,36% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, pengeluaran perkapita naik 1,30% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 10,56 juta dan pada tahun 2014 pengeluaran perkapita naik 0,66% menjadi Rp 10,63 juta. Kemudian pada 2015-2016, pengeluaran perkapita naik masing-masing sebesar 1,14% dan 1,01% yaitu menjadi Rp 10,75 juta pada tahun 2015 dan Rp 10,86 juta pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, besaran pengeluaran perkapita kembali meningkat menjadi sebesar Rp 10,93 juta. Kenaikan pengeluaran perkapita tertinggi selama periode tersebut yakni pada tahun 2012 dengan kenaikan nominal sebesar 5,36% dari tahun sebelumnya dan kenaikan terendah yakni pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,58% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya pengeluaran perkapita ini, maka terdapat indikasi bahwa kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan.

2.1.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan mejadi dua yakni pengeluaran konsumsi untuk makanan dan pengeluaran konsumsi untuk non makanan. Seperti dijelaskan sebelumnya, apabila rumah tangga memiliki pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran konsumsi makanan maka tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut lebih baik. Selama 5 tahun terakhir yakni selama periode 2013 hingga 2017, pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan masih pada konsumsi makanan. Pada tahun 2013, persentase pengeluaran konsumsi makanan yakni sebesar 44,09% dan konsumsi non makanan sebesar 55,91%. Pada tahun 2014-2016, pengeluaran konsumsi makanan terus mengalami penurunan sedangkan pengeluaran konsumsi untuk non makanan mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi makanan pada tahun 2012-2016 turun menjadi 43,88%, sedangkan konsumsi makanan naik menjadi 56,12%. Pada tahun 2017, pengeluaran untuk makanan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,89%. Jika dilihat struktur pengeluaran non makanan pada tahun 2017, persentase pengeluaran terbesar digunakan untuk pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya dengan persentase sebesar 27,58%. Porsi pengeluaran konsumsi non makanan terbesar kedua digunakan untuk kegiatan pengeluaran perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dengan persentase sebesar 9,43%. Dengan melihat pola konsumsi makanan dan non makanan maka dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut sudah mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan non makanan dan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.27 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

2.1.4.1.3 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tanah laut ternyata digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tanah laut maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Tabel 2.143 menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya, kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Selama periode 2013-2017, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB cenderung fluktuatif, pada tahun 2013, proporsinya adalah sebesar 42,24%, kemudian pada tahun 2014-2016 meningkat setiap tahun hingga menjadi sebesar 45,42%. Namun pada tahun 2017, besaran proporsi mengalami penurunan

menjadi sebesar 44,98%. Menurut BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), pada masa pemulihan ekonomi, institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atas pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum, tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.147 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kab. Tanah Laut, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total konsumsi rumah tangga ADHB (Rp miliar)	3.975,50	4.409,22	4.797,70	5.175,3	5.560,38
Total konsumsi rumah tangga ADHK (Rp miliar)	3.565,21	3.744,41	3.913,85	4.095,65	4.280,62
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	42,24	43,21	44,42	45,42	44,98
Rata-rata konsumsi per kapita ADHB (Rp juta)	12,67	13,82	14,79	15,72	16,63
Rata-rata konsumsi per kapita ADHK (Rp juta)	11,36	11,73	12,07	12,44	12,80
Pertumbuhan total konsumsi rumah tangga (%)	4,40	5,03	4,53	3,06	2,94
Pertumbuhan per kapita (%)	2,67	3,26	2,85	3,06	2,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2013, setiap penduduk di Kabupaten Tanah Laut menghabiskan dana sekitar Rp 12,67 juta setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 16,31 juta. Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita tumbuh pada kisaran 2,96% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,26%. Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas maupun secara nilai. Rata-rata konsumsi perkapita riil meningkat pada kisaran 2,67-3,26%. Pada tahun 2013, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,40% dan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,452%. Dari data perbandingan antara rata-rata konsumsi rumah tangga dan perkapita, terlihat bahwa telah terjadi peningkatan konsumsi riil rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan konsumsi perkapita yang berada pada kisaran 4,70%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.1.4 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (2018), nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani dalam bentuk persentase. Nilai tukar petani menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang atau produk yang dihasilkan oleh petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai tukar petani berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk petani, melihat perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu, dan menunjukkan daya saing produk petani. Berdasarkan perhitungannya, apabila NTP >100 maka petani mengalami surplus. Kenaikan harga produksi lebih besar dari harga konsumsi yang menyebabkan pendapatan petani naik dan pengeluaran petani turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani lebih baik. Apabila NTP = 100 maka petani mengalami impas, yakni ketika kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan kenaikan atau penurunan harga konsumsi. Apabila NTP <100 maka petani mengalami defisit. Hal tersebut terjadi jika kenaikan harga produksi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsi.

Tabel 2.148 Nilai Tukar Petani di Kalimantan Selatan, 2012-2017

Tahun	Nilai Tukar Petani
2012	107,85
2013	105,51
2014	99,83
2015	99,99
2016	97,52
2017	96,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Data yang bersumber dari BPS Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa selama periode 2012-2017 nilai tukar petani Kalimantan Selatan yang dijadikan acuan, cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, NTP di Kalimantan Selatan berada pada angka >100 yakni 107,85. Pada tahun 2013, NTP mengalami penurunan namun masih diatas nilai 100 yakni sebesar 107,51. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2013 petani mengalamim surplus. Pada tahun 2014-2016, NTP Kalimantan Selatan menunjukkan angka < 100 yang berarti petani mengalami defisit. Tahun 2014 NTP berada pada angka 99,83, naik menjadi 99,99 di tahun 2015 dan kembali menurun hingga tahun 2017 menjadi 96,68. Hal ini berarti pada tahun 2017, rata-rata laju kenaikan harga barang-barang konsumsi dan rata-rata laju kenaikan harga

barang-barang yang digunakan sebagai biaya produksi lebih cepat dibandingkan rata-rata laju kenaikan harga hasil produksi pertanian para petani. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir.

2.1.4.1.5 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah adalah salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan ekonomi suatu daerah. Nilai dari produktivitas total daerah menunjukkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor terhadap perekonomian suatu daerah. Nilai produktivitas sendiri dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas masing-masing sektor per angkatan kerja, yaitu dengan membagi output lapangan usaha dalam PDRB dengan jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya tiga sektor utama di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, setelah itu Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, dan yang terakhir sektor Industri Pengolahan, dan berikut adalah nilai produktivitas di masing-masing sektor tersebut.

Tabel 2.149 Produktivitas Sektor dan Produktivitas Total Daerah (Rp Juta), 2017

No.	Lapangan Usaha	Produktivitas (Rp juta)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	22,77
2.	Pertambangan dan Penggalian	294,87
3.	Industri Pengolahan	105,22
4.	Lainnya	71,88
Produktivitas Total Daerah		494,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas total daerah di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 mencapai Rp 494,74 juta per tenaga kerja. Dari ketiga sektor tersebut produktivitas tertinggi yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 294,87 juta, lalu sektor industri pengolahan sebesar Rp 105,22 juta, dan sector Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan sebesar Rp 22,77 juta. Sedangkan sektor selain ketiga sektor utama tersebut mencapai nilai produktivitas sebesar Rp 71,88 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor lain diluar sektor dominan juga memiliki kemampuan ekonomi dalam mendorong perekonomian daerah.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur jua pada akhirnya akan mendorong pekonomian daerah kerana adanya kemudahan aksesibilitas.

2.1.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas transportasi seperti jalan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi infrastruktur. Dengan tersedianya akses melalui ketersediaan jalan maka konektivitas antarwilayah akan semakin mudah sehingga dapat berdampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut (2018), pada tahun 2017, Panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan sepanjang 2.215,78 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 141,83 km, jalan provinsi sepanjang 247,32 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.826,63 km. Tercatat bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten tanah Laut terdapat 9.121 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 1.132 unit mobil penumpang, 1 unit bus, 557 mobil barang, 7.387 unit sepeda motor, dan 44 unit mobil ransus. Apabila dihitung menggunakan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan maka didapatkan hasil yakni sebesar 4,11 unit per km yang berarti bahwa setiap jalan sepanjang 1 km dapat diakes oleh 4 unit kendaraan.

2.1.4.2.2 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.631,35 km². Rencana Kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 5.204,96 ha di Kecamatan Kintap, hutan produksi tetap seluas 68.764,87 ha, dan hutan produksi konversi seluas 9.739,52 ha. Untuk kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian

lahan basah seluas 42.322,38 ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.904,74 ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 39.425,54 ha, dan proyeksi untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.680,82 ha. Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 10 kecamatan dengan luasan keseluruhan sebesar 786 ha. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan, dan Kurau. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut seluas 106.233,30 ha yang tersebar di seluruh kecamatan termasuk Kawasan agropolitan. Kawasan peternakan yang dikembangkan merupakan pengembangan komoditas sapi, sapi perah, kerbau rawa, dan kerbau darat.

Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan terdiri atas: (a) kawasan perikanan tangkap, (b) kawasan perikanan budidaya, (c) kawasan pengolahan perikanan, dan (d) kawasan konservasi sumberdaya perikanan. Kawasan perikanan tangkap sebesar kurang lebih 219.498,44 ha. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat padaperikanan tangkap darat tersebar di seluruh kecamatan terutama di kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Bumi Makmur dan Kurau, dengan komoditas unggulan berupa ikan gabus, betok, nila, patin, udang serta pengembangan rumput laut. Perikanan tangkap laut terdapat pada hampir semua kawasan perairan sampai 4 mil laut di luar peruntukan alur; dan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Jorong, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Kintap.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 ha terdiri atas: (1) perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap. Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan Kawasan

konservasi seluas kurang lebih 3.080,09 ha yang terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

2.1.4.2.3 Luas Wilayah Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati-Bati.

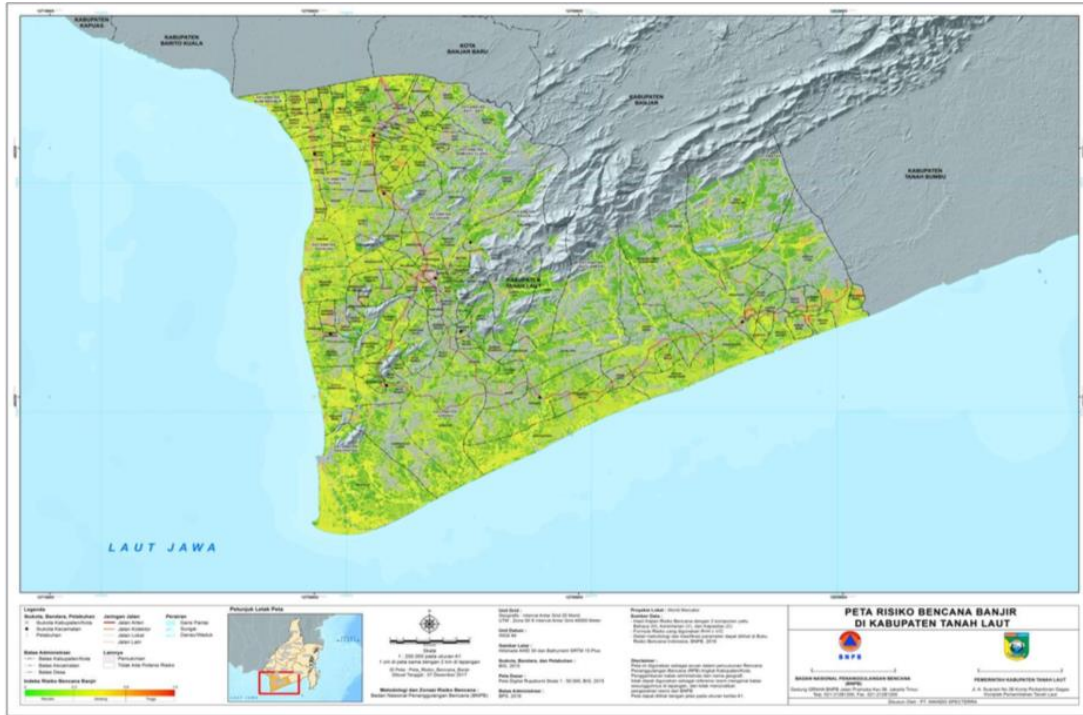
Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana kawasan peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati-Bati dan

Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.4.2.4 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

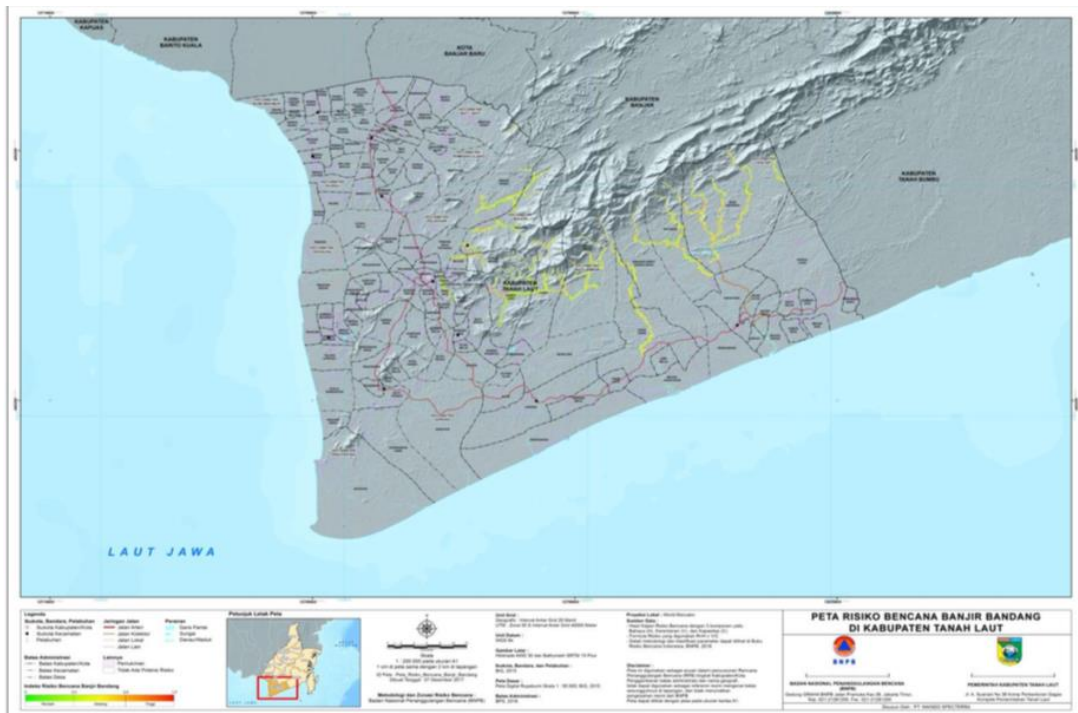
Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi (a) Kecamatan Pelaihari terdapat di Desa Panjaratan; (b) hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Kuala Tambangan, Takisung, Gunung Makmur, Benua Tengah, dan Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Jorong, Asam-Asam, Swarangan, dan Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipat di Desa Kuringkit, Batu Mulya dan Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Kintapura, Riam Adungan, Muara Kintap, Salaman, Kintap Kecil, dan Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Kunyit, dan Sungai Bakar; dan (k) hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur. Dalam kurun waktu 2000-2017, jumlah bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 137 kejadian dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 9 orang dan rumah yang terendam mencapai 3.697 rumah. Ancaman bahaya banjir di Kabupaten Tanah Laut termasuk pada kelas tinggi dengan areal yang terdampak bisa mencapai 182.755 ha.

Untuk bencana kekeringan, potensi bahayanya termasuk dalam kategori sedang dengan luasan terdampak dapat mencapai 363.135 ha. Potensi penduduk yang terpapar kekeringan adalah sebanyak 338.291 jiwa dimana kelompok umur rentan yang terpapar mencapai 23.809 jiwa, penduduk miskin sebanyak 56.698 jiwa, dan penduduk cacat sebanyak 802 jiwa. Potensi kerugian akibat kekeringan di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai Rp 2,12 miliar dengan potensi kerusakan lingkungan seluas 66.583 ha. Di satu sisi, kelas ketahanan daerah dalam menghadapi kekeringan masih dalam kategori sedang dengan kelas kesiapsiagaan yang rendah sehingga kelas kapasitas daerah masih dalam kategori rendah.



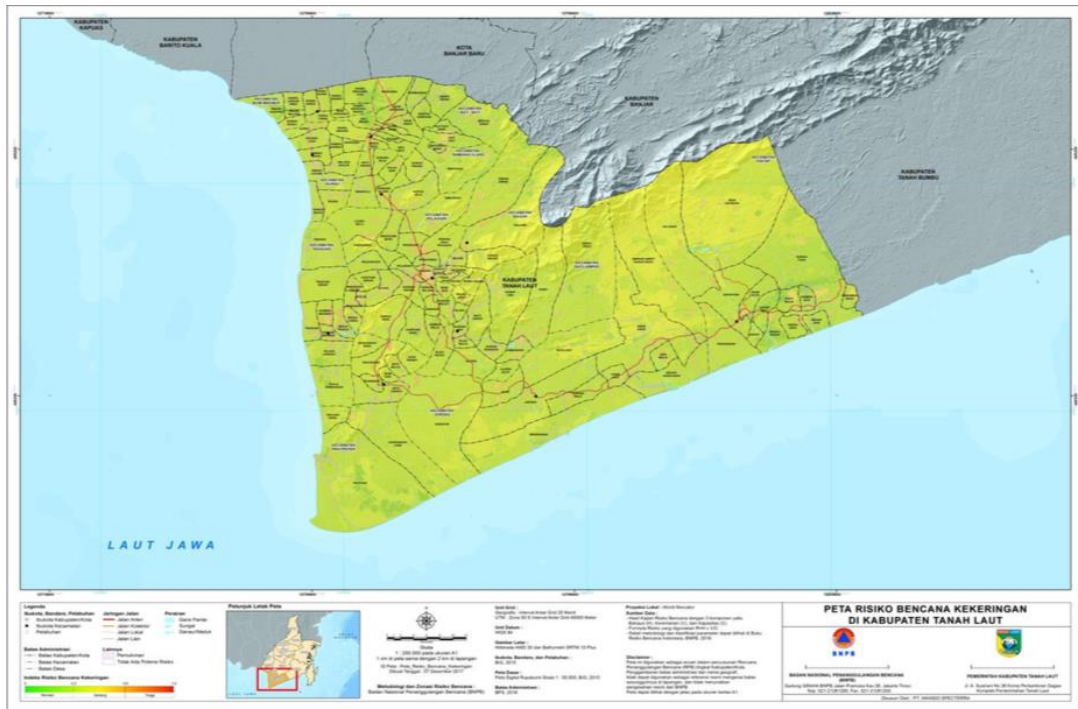
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.28 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.29 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.30 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut

2.1.4.2.5 Luas Wilayah Perkotaan

Pemerintah Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut 2016-2036. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem perkotaan terdiri dari Pusat kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Pelaihari yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan luas daerah perkotaan sekitar 60 km². Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yakni Perkotaan Bati-Bati sebagai salah satu Kota Satelit Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Banjar Bakula dengan luas perkotaan kurang lebih 28 km², dan Perkotaan Jorong sebagai Kawasan Strategis Nasional Jorong sebagai kawasan industri, luas Perkotaan Jorong kurang lebih 76 km². Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari Perkotaan Takisung dan Kintap. Perkotaan Takisung berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun jasa dalam skala kecamatan, dan juga

sebagai pelayanan kegiatan pariwisata di beberapa desa untuk skala lokal dan provinsi. Luas kawasan perkotaan takisung sekitar 45 km². Sedangkan Perkotaan Kintap berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten dan beberapa kecamatan, luas Perkotaan Kintap sekitar 48 km². Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL menurut RTRW Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Desa Kurau Kecamatan Kurau, Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, Desa Tambang Kecamatan Tambang Ulang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan. Dan Desa Bajuin Kecamatan Bajuin.

2.1.4.2.6 Fasilitas Jasa Perbankan

Fasilitas jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Perbankan memiliki peran penting yakni memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan transaksi keuangan. Selain itu, bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Sehingga bank dapat menjadi salah satu pihak yang membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 8 bank nasional yang beroperasi yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BTPN, Bank Danamon, Bank Kalsel, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah baik berupa bank cabang, cabang pembantu, atau bank unit.

Tabel 2.150 Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2018

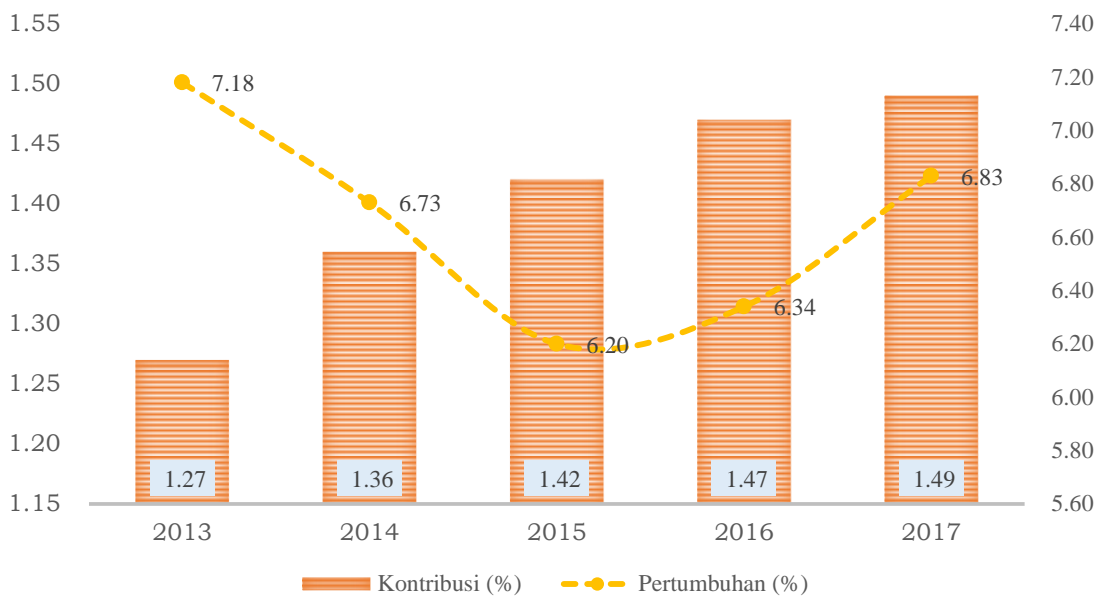
No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
1.	BNI	2	Kantor Kas BNI KK Asam-Asam Kantor Bank BNI KCP Pelaihari
2.	BRI	16	Kantor Kas BRI Teras Pasar Batu Ampar Kantor Kas BRI Teras Sarang Halang Kantor Kas BRI Teras Angsau Kantor Kas BRI Teras Nusa Indah Kantor Kas BRI Teras Pasar Pelaihari Kantor Kas BRI Teras RSUD H. Boedjasin BRI Teras Keliling KCP Bank BRI Unit Sungai Cuka KCP Bank BRI Unit Kintap KCP Bank BRI Unit Bati-Bati KCP Bank BRI Unit Gagas KCP Bank BRI Unit Pelaihari Kota KCP Bank BRI Unit Takisung KCP Bank BRI Unit Jorong KCP Bank BRI Unit Asam-Asam Kantor Cabang BRI Pelaihari
3.	BTN	7	Kantor Kas BTN Pelaihari

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
			Kantor Kas BTN Takisung
			Kantor Kas BTN Kurau
			Kantor Kas BTN Kintap
			Kantor Kas BTN Tajau Pecah
			Kantor Kas BTN Batu Tungku
			Kantor Kas BTN Bat-Bati
4.	Bank Mandiri	2	Kantor Fungsional Bank Mandiri Pasar Pelaihari KCP Bank Mandiri Pelaihari
5.	Bank Mandiri Syariah	1	KCP Bank Mandiri Syariah Pelaihari
6.	Bank Kalsel	8	KCP Bank Kalsel Unit Asam-Asam KCP Bank Kalsel Unit Bati-Bati KCP Bank Kalsel Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Bank Kalsel Keliling Layanan Syariah Bank Kalsel KCP Pemkab Tanah Laut Layanan Syariah Bank Kalsel LS Unit Asam-Asam Layanan Syariah Bank Kalsel LS Cabang Pelaihari Kantor Cabang Bank Kalsel Pelaihari
7.	Bank BTPN	1	KCP BTPN Pelaihari
8.	Bank Danamon	1	KCP Bank Danamon Tapandang Berseri Pelaihari

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.4.2.7 Fasilitas Hotel dan Rumah Makan

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam kurun waktu 2013-2017 selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sebesar 1,27% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,49%. Dari sisi pertumbuhan, sektor tersebut juga terus tumbuh setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66% per tahun. Pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,18%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,20%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 2.31 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Pengembangan sektor pariwisata perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan. Perkembangan jumlah penginapan sendiri dapat menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 17 hotel yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 14 unit dan Kecamatan Jorong sebanyak 3 unit. Ketersediaan kamar pada hotel-hotel tersebut adalah sebanyak 225 kamar dengan tempat tidur sebanyak 254 unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran dari tahun 2015 ke tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 64 unit, dengan lokasi restoran terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sejumlah 32 unit.

Tabel 2.151 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Hotel			Rumah Makan
		Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
1.	Panyipatan	-	-	-	4
2.	Takisung	-	-	-	4
3.	Kurau	-	-	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	-	6
6.	Tambang Ulang	-	-	-	8
7.	Pelaihari	14	205	234	32
8.	Bajuin	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-	-
10.	Jorong	3	20	20	10
11.	Kintap	-	-	-	-
Jumlah		17	225	254	64

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.4.2.8 Rumah Tangga Pelanggan Air Minum

Pada tahun 2017, sebanyak 1 dari 2 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan sumber air minum berupa air bersih. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55 persen rumah tangga. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ada sebanyak 28,58 persen untuk kuintil 1, berbeda jauh dengan kuintil teratas yaitu sebanyak 61,51 persen. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

Tabel 2.152 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sosial	1.101	19.025	48.211.900
2.	Rumah Tangga	43.839	720.402	2.682.634.300
3.	Instansi Pemerintah	981	40.173	141.748.100
4.	Niaga	696	20.443	88.899.500
5.	Industri	398	61.324	186.096.700
6.	Khusus	1.435	21.250	58.482.350
Jumlah		48.450	882.617	3.206.072.850

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan air di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri, dan khusus. Jumlah pelanggan air secara keseluruhan adalah sebanyak 48.450 pelanggan dengan pelanggan terbesar adalah kelompok rumah tangga yang mencapai 43.839 pelanggan. Volume air yang disalurkan PDAM Kabupaten Tanah Laut pada 6 kelompok tersebut adalah sebesar 882.617 m³. Penjualan tertinggi air pada tahun 2017 adalah pada kelompok rumah tangga yang mencapai 720.402 m³, disusul kelompok industri sebesar 61.324 m³, dan kelompok instansi pemerintah sebesar 40.173 m³. Nilai keseluruhan penjualan air tersebut adalah sebesar Rp 3,21 miliar dimana kelompok rumah tangga menyumbang penjualan air sebesar Rp 2,68 miliar, disusul kelompok industri sebesar Rp 186,10 juta, dan kelompok instansi pemerintah sebesar Rp 141,75 juta. Melihat data yang ada, terlihat bahwa cakupan penyediaan air bagi rumah tangga telah memadai di Kabupaten Tanah Laut. Cakupan penyediaan air minum oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut, terlihat bahwa pelayanan PDAM masih terbatas pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Takisung, Bati-bati, Pelaihari, Batu Ampar, dan Jorong. Penjualan air tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 668.413 m³, disusul Kecamatan Jorong sebesar 128.501 m³, dan Kecamatan Bati-bati sebesar 37.899 m³.

Tabel 2.153 Jumlah Produksi, Penggunaan Air Minum yang Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi (m ³)	Penggunaan (m ³)	Terjual (m ³)
1.	Panyipatan	16.070	16.070	13.574
2.	Takisung	29.385	19.603	12.761
3.	Kurau	-	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-
5.	Bati-Bati	59.616	53.136	37.899
6.	Tambang Ulang	-	-	-
7.	Pelaihari	1.625.580	888.258	668.413
8.	Bajuin	-	-	-
9.	Batu Ampar	32.141	32.141	21.469
10.	Jorong	215.240	192.917	128.501
11.	Kintap	-	-	-
Jumlah		1.978.032	1.202.125	882.617

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.4.2.9 Ketersediaan Daya Listrik

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah tangga menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya fasilitas penerangan yang memadai. Fasilitas

penerangan rumah terdiri atas rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan Non-PLN) dan rumah tangga yang tidak menggunakan penerangan. Rumah tangga yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk ke dalam kelompok rumah tangga yang tidak menggunakan penerangan. Pemakaian penerangan berupa listrik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk yang dapat mengakses listrik dapat diasumsikan telah mempunyai kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya. Sumber penerangan pada Susenas 2017 terdiri dari listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), listrik non PLN, dan bukan listrik (petromak, lampu aladin, pelita, sentir, dan obor). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN mengindikasikan keterjangkauan listrik PLN di Indonesia. Sebaliknya persentase rumah tangga pengguna listrik non PLN maupun bukan listrik memberikan gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan listrik PLN.

Tabel 2.154 Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2017

Sumber Penerangan	2016	2017
Listrik PLN	97,78	99,85
Listrik Non-PLN	1,77	0,01
Bukan Listrik	0,45	0,14

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Ditinjau dari sumber penerangan utama, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan penerangan listrik PLN dengan persentase sebesar 97,78%. Akan tetapi masih ada rumah tangga yang menggunakan penerangan dengan listrik non-PLN sebesar 1,77%, sedangkan yang menggunakan bukan listrik masih ada 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk dapat mengakses penerangan yang memadai berupa listrik PLN.

Tabel 2.155 Daya terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN di Kabupaten Tanah Laut, 2011-2017

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
2011	45.092.530	101.480.860	89.115.713
2012	51.259.780	118.783.620	103.573.943
2013	64.600.130	141.614.134	121.440.135
2014	72.531.380	142.239.541	136.227.770
2015	77.182.100	171.882.396	150.863.892
2016	86.218.800	180.505.454	164.628.169
2017	95.053.800	195.716.108	176.755.685

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut termasuk fasilitas kelistrikan untuk menyediakan kebutuhan listrik baik itu untuk pembangunan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Produksi listrik dapat ditingkatkan melalui pembangunan pembangkit yang harapannya mampu meningkatkan rasio elektrifikasi dan juga mendorong tumbuhnya industri. Selama periode 2011-2017, daya terpasang listrik di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011, daya terpasang listrik adalah sebesar 45.092.530 KW dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 95.053.800 KW. Dengan adanya peningkatan daya terpasang, maka produksi listrik juga mengalami lonjakan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2011, produksi listrik di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 101.480.860 KWh dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 195.716.108 KWh. Pelanggan listrik juga turut melonjak dari sebanyak 51.574 pelanggan pada tahun 2011 menjadi sebanyak 69.689 pelanggan pada tahun 2017. Pelanggan prabayar pada tahun 2017 adalah sebanyak 28.538 pelanggan dan pelanggan pasca bayar sebanyak 41.151 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan bahwa tingkat elektrifikasi di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan.

Tabel 2.156 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Tipe KWh Meter di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Prabayar	Pasca Bayar
2012	6.998	44.576
2013	13.568	42.883
2014	17.486	42.376
2015	21.194	41.864
2016	24.631	41.587
2017	28.538	41.151

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.4.2.10 Ketersediaan Sarana Komunikasi

Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi terbantu oleh banyaknya alat teknologi informasi dan teknologi yang berkembang saat ini seperti komputer, internet, dan telepon seluler. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut perkembangan teknologi informasi menunjukkan peningkatan yang dilihat dari jumlah kepemilikan internet speedy dan jumlah warung internet. Pada tahun 2014 pelanggan jaringan internet speedy sebanyak 835 pelanggan, kemudian naik di tahun 2015 menjadi 937 pelanggan, dan pada 2016 naik lagi sebesar 23% menjadi 1.154 unit. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan kembali mengalami peningkatan

sebanyak 2.148 pelanggan. Pelanggan internet tersebut berada di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Takisung (65 pelanggan), Kecamatan Bati-bati (107 pelanggan), Kecamatan Tambang Ulang (10 pelanggan), Kecamatan Pelaihari (1.866 pelanggan), dan Kecamatan Jorong (100 pelanggan). Berbeda dengan jumlah warung internet di Kabupaten Tanah Laut, pada 2014 jumlah warung internet sebanyak 15 unit, kemudian naik di tahun 2015 menjadi 23 unit, namun turun kembali menjadi 12 unit pada 2016 yang tersebar di Kecamatan Pelaihari 10 unit, Kecamatan Bati-Bati 1 unit, dan Kecamatan Takisung 1 unit. Pada tahun 2017, jumlah warung internet meningkat menjadi 13 unit yang tersebar di Kecamatan Takisung (1 unit), Kecamatan Pelaihari (9 unit), dan Kecamatan Jorong (3 unit). Penurunan jumlah warung internet di Kecamatan Bati-bati dan Pelaihari mungkin disebabkan oleh berpindahnya pelanggan dari warung internet ke pelanggan internet speedy, karena penggunaan internet pribadi lebih praktis dan fleksibel. Sehingga kedepannya dimungkinkan juga terjadi siklus yang sama yaitu peningkatan jumlah pelanggan speedy.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, karena selain dapat memberikan keuntungan kepada penanam modal, penanaman modal juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Iklim investasi di suatu wilayah dapat dipengaruhi salah satunya oleh angka kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin rendah angka kriminalitas maka dapat menciptakan kondisi yang aman dan terjamin sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya karena alasan keamanan yang dapat

berakibat pada ketidakpastian usaha. Selama 5 tahun terakhir yakni periode 2012-2017, angka kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut cenderung rendah dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, angka kriminalitas Kabupaten Tanah Laut sebesar 0,12%, kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 0,11%. Penurunan angka kriminalitas juga terjadi pada tahun 2014 sehingga menjadi 0,06%. Namun, pada tahun 2015 terjadi sedikit peningkatan angka kriminalitas tetapi tidak signifikan sehingga menjadi 0,09%. Pada tahun 2016, angka kriminalitas Kabupaten Tanah Laut kembali menurun menjadi 0,07% dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 0,04%. Selama periode 2012-2017, tindak kriminalitas terbanyak terjadi pada tahun 2012 yakni 381 kasus, sedangkan tindak kriminal terendah terjadi pada 2017 yakni 149 kasus.

Tabel 2.157 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (kasus)	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas (%)
2012	381	308.818	0,12
2013	343	313.725	0,11
2014	193	319.098	0,06
2015	309	337.291	0,09
2016	253	340.909	0,07
2017	149	334.328	0,04

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

2.1.4.3.2 Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi pkegiatan enanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di Kabupaten Tanah Laut. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut di alamat http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi_izin. Rincian dan lama proses perizinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.158 Jenis dan Lama Proses Perizinan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan	Lama Proses Perizinan	Biaya (Rp)
1.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
2.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
4.	Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
5.	Izin Gangguan (HO)	Diketahui	-	Sesuai Perda
6.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
7.	Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan (IMB)	Diketahui	7	Sesuai Perda
8.	Izin Usaha Perkebunan	Diketahui	15	Tanpa Biaya
9.	Izin Usaha Hiburan Umum	Diketahui	3	Tanpa Biaya
10.	Izin Usaha Perhotelan/Penginapan	Diketahui	5	Tanpa Biaya
11.	Izin Usaha Rumah Makan	Diketahui	5	Tanpa Biaya
12.	Izin Reklame	Diketahui	3	Sesuai Perda
13.	Izin Pemanfaatan/Pemungutan Sarang Burung Walet	Diketahui	7	Tanpa Biaya
14.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Diketahui	3	Sesuai Perda
15.	Izin Usaha Peternakan	Diketahui	7	Tanpa Biaya
16.	Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat	Diketahui	7	Tanpa Biaya
17.	Izin Penggilingan Padi	Diketahui	7	Tanpa Biaya
18.	Izin Usaha Perbengkelan	Diketahui	3	Tanpa Biaya
19.	Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
20.	Izin Praktek Dokter Hewan	Diketahui	4	Tanpa Biaya
21.	Izin Penyelenggaraan Kursus	Diketahui	3	Tanpa Biaya
22.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	Diketahui	7	Sesuai Perda
23.	Izin Usaha Kepariwisata	Diketahui	5	Tanpa Biaya
24.	Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta	Diketahui	12	Tanpa Biaya
25.	Izin Klinik Swasta	Diketahui	6	Tanpa Biaya
26.	Izin Klinik Perusahaan	Diketahui	6	Tanpa Biaya
27.	Izin Apotek	Diketahui	12	Tanpa Biaya
28.	Izin Toko Obat	Diketahui	12	Tanpa Biaya
29.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Diketahui	12	Tanpa Biaya
30.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Diketahui	12	Tanpa Biaya
31.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Diketahui	7	Tanpa Biaya
32.	Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Diketahui	7	Tanpa Biaya
33.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Diketahui	-	-
34.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
35.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
36.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	Diketahui	-	-
37.	Izin Usaha Penanaman Modal	Diketahui	-	-
38.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
39.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
40.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	Diketahui	-	-
41.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah Kabupaten Tanah Laut	Diketahui	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, 2018

2.1.4.3.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang perlu untuk dikelola dengan baik agar mampu mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian peningkatan potensi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi juga memperhatikan prinsip pelayanan optimal yang tidak memberatkan masyarakat. Peningkatan PAD yang disertai dengan peningkatan kontribusi PAD pada pendapatan daerah menunjukkan adanya ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan.

Sumber PAD sendiri berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pungutan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan pungutan retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha yang jenis retribusinya memiliki turunan masing-masing dan ragamnya disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing.

Tabel 2.159 Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten tanah Laut, 2017

No.	Uraian	Jenis Pajak dan Retribusi
1.	Pajak Daerah	Pajak Hotel
		Pajak Restoran
		Pajak Hiburan
		Pajak Reklame
		Pajak Penerangan Jalan
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
		Pajak Parkir
		Pajak Air Bawah Tanah
		Pajak Bumi dan Bangunan
		Pajak BPHTB
2.	Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehata
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
		Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
		Retribusi Pelayanan Pasar
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
		Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Terminal		

No.	Uraian	Jenis Pajak dan Retribusi
		Retribusi Tempat Khusus Parkir
		Retribusi Rumah Potong Hewan
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
		Retribusi Izin Gangguan Keramaian /HO
		Retribusi Pemberian Izin Trayek

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut, 2017

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah periode 2011-2017, penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011 yaitu sebesar Rp 5,24 miliar hingga pada tahun 2015 dengan realisasi pajak sebesar Rp 20,86 miliar. Namun demikian, pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp 18,94 miliar. Pada tahun 2017, penerimaan pajak daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 28,85 miliar. Berbeda dengan penerimaan pajak yang trennya meningkat, penerimaan retribusi daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, penerimaan retribusi sebesar Rp 4,12 miliar, kemudian meningkat pada dua tahun selanjutnya hingga mencapai Rp 7,49 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 5,63 miliar, dan naik kembali di tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi sebesar Rp 6,98 miliar dan Rp 7,93 miliar.

Tabel 2.160 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2011-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2011	5.238.621.626,00	4.121.980.346,00
2012	6.905.138.950,00	3.934.102.980,00
2013	9.631.149.328,00	4.680.960.696,00
2014	14.731.607.725,00	7.492.552.435,00
2015	20.857.114.355,00	5.633.292.680,00
2016	18.939.010.059,50	6.979.519.851,00
2017	28.854.073.560,00	7.934.695.295,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut, 2011-2017

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek penting dalam pembangunan daerah maupun nasional, karena manusia merupakan obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, harapannya pembangunan SDM dapat meningkatkan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional, dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu dan teknologi yang inovatif yang berguna untuk mendorong

pembangunan nasional. Aspek daya saing SDM Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan ratio ketergantungannya.

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dalam kerangka pembangunan daerah. Kualitas SDM dapat dicerminkan melalui kualitas dari tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin baik kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2017), pada tahun 2016 sebagian besar penduduk di Kabupaten Tanah Laut yang bekerja masih memiliki pendidikan yang rendah. Sebanyak 20,20% penduduk tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD dan 31,98% merupakan lulusan SD. Sedangkan 22,64% merupakan lulusan sekolah menengah pertama dan 19,58% merupakan lulusan sekolah menengah atas. Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan diploma I/II/III/Akademi sebesar 2,09% dan berpendidikan S1/S2/S3 hanya sebesar 3,51%.

Tabel 2.161 Persentase Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016-2017

Pendidikan	2016	2017
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	20,20	21,54
Sekolah Dasar	31,98	32,97
Sekolah Menengah Pertama	22,64	21,69
Sekolah Menengah Atas	19,58	16,49
Diploma I/II/III/Akademi	2,09	1,13
Universitas (S1/S2/S3)	3,51	6,18

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan universitas melonjak signifikan dari hanya 3,51% menjadi 6,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan universitas banyak yang langsung masuk pasar tenaga kerja dan langsung mendapatkan pekerjaan pada tahun 2017. Kenaikan juga terjadi pada penduduk yang tidak sekolah dan masuk ke pasar tenaga kerja dimana persentasenya meningkat menjadi 21,54%. Kenaikan yang sama juga terjadi pada penduduk berpendidikan SD yang masuk pasar tenaga kerja dibuktikan dengan kenaikan persentase menjadi 32,97%. Kenaikan persentase penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD bahkan tidak sekolah harus menjadi perhatian

pemerintah daerah mengingat sifat pekerjaan dengan tingkat pendidikan tersebut sangat rentan akan masuk ke dalam kelompok pengangguran.

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Penduduk produktif yakni penduduk dengan usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif yakni penduduk dengan usia 0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Tabel 2.162 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut, 2012-2017

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	>65 tahun	Rasio Ketergantungan (%)
2012	29,87	66,40	3,73	50,60
2013	29,76	66,44	3,80	50,49
2014	29,63	66,50	3,87	50,37
2015	29,48	66,56	3,96	50,24
2016	29,27	66,90	3,83	49,47
2017	29,09	66,75	4,16	49,81

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, yakni tahun 2012-2017, rasio ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penurunan. Jika angka beban ketergantungan semakin kecil, maka akan menyebabkan munculnya peluang keuntungan demografi yang dikenal dengan bonus demografi, meskipun secara skala nasional bonus demografi diprediksikan baru akan terjadi pada tahun 2025-2030. Pada tahun 2012, rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 50,60%, menurun pada tahun 2013 menjadi 50,49%. Kemudian pada tahun 2014 rasio ketergantungan yakni sebesar 50,37% dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 50,24%. Selanjutnya rasio ketergantungan terus menurun menjadi 49,47% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 49,81%. Hal tersebut berarti pada tahun 2017, dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung beban hidup sekitar 49 sampai 50 penduduk usia tidak produktif. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan perkembangan yang baik karena beban penduduk produktif menjadi berkurang.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018

2.2.1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2018

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja, dimana pada tahun 2018 diperoleh rata-rata tingkat realisasi anggaran keuangan pada belanja langsung tercapai sebesar 85,65%. Dan realisasi fisik sebesar 90,25 %. Data capaian kinerja terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 2.163 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
BELANJA LANGSUNG	775,129,447,137.00	663,913,298,656.60	85.65
Belanja Pegawai	26,880,243,900.00	24,171,513,700.00	89.92
Belanja Barang dan Jasa	388,200,446,180.00	332,379,686,587.00	85.62
- Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,064,425,000.00	7,603,182,250.00	94.28
- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	380,136,021,180.00	324,776,504,337.00	85.44
Belanja Modal	360,048,757,057.00	307,362,098,369.60	85.37

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2018

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan belanja langsung per perangkat daerah dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164 Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2018 per perangkat daerah

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6,293,392,340	4,082,213,646	64.9
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,352,707,200	2,036,174,042	86.5
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,545,420,060	2,339,796,063	91.9
4	Badan Pendapatan Daerah	3,021,931,859	1,959,544,708	64.8
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,024,920,600	5,333,675,230	88.5
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,304,163,800	3,676,261,293	85.4
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	11,123,432,733	10,076,437,850	90.6
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,951,099,138	1,723,604,645	58.4
9	Dinas Kesehatan	51,146,590,722	44,031,441,523	86.1
10	Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan	166,000,000	143,653,775	86.5
11	Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi	289,869,000	154,787,637	53.4

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
12	Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari	183,586,952,239	140,473,418,590	76.5
13	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati	2,034,549,900	1,811,677,041	89.0
14	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau	896,841,000	882,526,113	98.4
15	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam	1,279,355,900	946,793,878	74.0
16	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan	1,006,333,090	618,058,867	61.4
17	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur	1,105,024,800	898,052,410	81.3
18	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong	919,828,300	898,052,410	97.6
19	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait	713,796,000	525,985,939	73.7
20	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap	2,279,095,000	1,550,220,158	68.0
21	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau	850,205,000	691,119,323	81.3
22	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas	897,443,000	645,009,342	71.9
23	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan	1,097,629,000	816,465,534	74.4
24	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari	2,637,035,000	1,906,464,837	72.3
25	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka	884,531,300	778,328,486	88.0
26	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam	561,126,000	387,906,174	69.1
27	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah	1,340,362,000	1,179,654,603	88.0
28	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung	1,587,889,000	1,372,689,637	86.4
29	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang	1,443,618,000	1,200,677,356	83.2
30	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu	622,953,000	483,905,279	77.7
31	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya	872,020,220	791,085,724	90.7
32	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,128,457,200	952,954,849	84.4
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,007,948,100	2,611,413,235	86.8
34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8,468,221,650	7,855,297,180	92.8
35	Dinas Pariwisata	4,206,736,950	3,999,690,209	95.1
36	Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung	68,539,000	38,657,323	56.4
37	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	193,926,109,013	185,393,851,752	95.6
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum	537,822,600	333,194,496	62.0
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,086,392,221	4,311,257,823	84.8
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,004,368,547	598,686,511	59.6

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45,380,233,090	26,082,141,324	57.5
55	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,314,889,333	3,836,259,713	72.2
67	Dinas Perhubungan	4,255,785,795	3,130,166,175	73.6
68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,459,450,100	1,253,367,739	85.9
69	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	30,262,016,906	25,728,615,147	85.0
70	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1,621,710,700	1,476,519,312	91.0
71	Dinas Sosial	2,803,561,540	2,079,888,314	74.2
72	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6,024,534,802	5,582,389,185	92.7
73	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4,633,734,703	3,804,483,983	82.1
74	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja	637,609,108	598,222,066	93.8
75	Inspektorat Kabupaten	4,534,237,432	3,076,660,040	67.9
76	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9,320,307,205	7,983,854,129	85.7
77	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	617,503,100	568,028,700	92.0
78	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan	764,245,000	646,679,050	84.6
79	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan	8,543,402,400	7,820,799,229	91.5
80	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	1,179,694,200	876,487,700	74.3
81	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	400,000,000	315,194,000	78.8
82	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	279,463,000	238,519,950	85.3
83	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	18,559,497,700	17,202,250,558	92.7
84	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	2,945,093,000	2,808,292,650	95.4
85	Sekretariat Daerah Bagian Umum	16,849,548,790	12,192,103,790	72.4
86	Sekretariat DPRD	39,087,702,475	31,990,962,535	81.8
87	Kec Bumi Makmur	685,205,660	657,216,022	95.9
88	Kec Kurau	1,074,001,699	969,294,344	90.3
89	Kec Bati-Bati	615,107,881	490,103,995	79.7
90	Kec Tambang Ulang	626,355,500	564,337,335	90.1
91	Kec Pelaihari	647,879,600	561,037,517	86.6
92	Kec Bajuin	566,873,861	545,835,867	96.3
93	Kec Batu Ampar	552,160,734	532,428,701	96.4
94	Kec Panyipatan	653,590,500	587,240,620	89.8
95	Kec Takisung	650,857,300	586,922,646	90.2

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
96	Kec Jorong	597,977,650	535,597,630	89.6
97	Kec Kintap	620,646,400	587,111,986	94.6
98	Kel. Pabahanan	201,900,900	185,380,771	91.8
99	Kel. Angsau	226,480,000	220,024,033	97.1
100	Kel. Pelaihari	207,863,916	201,218,494	96.8
101	Kel. Karang Taruna	202,095,000	175,000,219	86.6
102	Kel. Sarang Halang	181,190,500	168,767,202	93.1
JUMLAH		728,055,117,962	607,370,088,162	90,25

2.2.2 Faktor Penghambat, Faktor Pendorong dan Rekomendasi

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Tahun 2018 antara lain :

1. Di kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 diadakan pemilihan kepala daerah.
2. Ada beberapa kegiatan yang keuangannya tidak terserap 100% (gap diatas 10%) dikarenakan adanya efisiensi.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala.
2. Proses pengadaan barang/jasa agar dilakukan seawal mungkin
3. Meningkatkan kualitas pada tahapan perencanaan selanjutnya, baik pada saat survey harga pengadaan barang, pada penentuan dan perumusan output, maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja

2.2.3 Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 disajikan dalam lampiran tentang Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pembangunan tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran daerah:
 - a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - 1) Angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 96,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3,93% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis;
 - 2) belum optimalnya partisipasi pendidikan anak usia dini pada usia 0 – 6 tahun;
 - 3) Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanah Laut masih di bawah rata-rata lama sekolah propinsi Kalimantan Selatan dan Nasional;
 - 4) belum optimalnya partisipasi pendidikan dasar (pada SD dan SMP).
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - 1) Masih terjadi kasus kematian Anak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebanyak 14 kasus. Sementara itu, kasus ibu mati lahir pada tahun 2017 adalah sebanyak 16 kasus. angka kematian ibu masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 2) perlunya peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas (hasil rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI, Kabupaten Tanah Laut masih kurang 2 unit Puskesmas sesuai dengan kondisi jumlah penduduk);
 - 3) pelayanan kesehatan belum optimal;

- 4) perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 5) perlunya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- 6) masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
- c. meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - 1) belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
 - 2) belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) dan kelestariannya;
 - 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya;
 - 4) belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan;
 - 5) sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.
2. Prioritas Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan sasaran daerah:
 - a. Meningkatnya pendapatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi
 - 1) Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja
 - 2). Masih lambatnya progress Kawasan Industri Jorong
 - 3). Kurangnya pemberdayaan KUMKM;
 - 4). Belum optimalnya kualitas dan peran BUMD;
 - 5). Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata;
 - 6). Lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan;
 - 7). Kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industri relatif masih rendah;
 - 8). Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang.
 - 9). Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, dan perikanan masih rendah.

- 10). Sarana prasarana pertanian yang belum memadai. Sarana prasarana (alat mesin pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan) yang belum memadai menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi.
 - 11). Keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran produk perikanan.
3. Prioritas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan publik dengan sasaran daerah:
- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - 1) Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di daerah;
 - 2) Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - 3) Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;
 - 4) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika kurang memadai;
 - 5) Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing masing OPD belum merata.
 - b. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - 1) Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat sehingga tindak pidana yang terjadi masih cukup tinggi.
 - 2) Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
 - 3) Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati Peraturan Daerah masih belum optimal.
4. Prioritas peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran daerah:
- a. meningkatnya pelayanan infrastruktur yang berkualitas, permasalahan yang dihadapi:
 - 1) Belum optimal dan terbangunya infrastruktur pendukung penopang Kawasan Industri Jorong;

- 2) Masih terdapat jalan kabupaten di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi rusak. Pada tahun 2017, jalan dalam kondisi rusak sepanjang 715,28 km, sedangkan kondisi rusak berat sepanjang 127,39 km;
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase;
 - 4) Masih tingginya rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memperoleh sanitasi layak. Persentasenya sanitasi layak pada tahun 2017 secara keseluruhan adalah sebesar 35,98 dimana sanitasi layak di perkotaan sebesar 43,22, sedangkan di perdesaan sebesar 33,55;
 - 4) perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardraill dan LPJU belum dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimum.
- b. meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi:
- 1) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) Menurunnya kualitas air sungai dan tutupan lahan;
 - 3) Belum tercapainya RTH sebesar 30 dari luas wilayah kota.
- c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi:
- 1) Belum seluruh Kecamatan memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan belum seluruh Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) selesai disusun;
 - 2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
 - 3) Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2020 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 96,07. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3,93 penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 7,37 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan RLS Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 11,82 tahun yang berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai anak umur tertentu di masa yang akan datang hanya pada pendidikan kelas 2 SMA. Angka HLS pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan RLS Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (7-12 tahun) mengalami penurunan dari 99,68 pada tahun 2016 menjadi 99,40 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 0,6 penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah SD/MI;
- f. Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Laut pada jenjang pendidikan dasar (13-15 tahun) mengalami penurunan dari 92,16 pada tahun 2016 menjadi 91,59 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada 8 penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Tanah Laut tidak bersekolah SMP/MTS;
- g. Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD sebesar 109,54 dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 9,54 penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD;
- h. Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP sebesar 80,16 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah SMP berapapun usianya di antara penduduk usia 13-15 tahun hanya sebesar 80,16;
- i. Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih rendah

yaitu sebesar 71,31. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang berusia 13-15 tahun, terdapat hanya 71 orang yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTS;

- j. Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota;
 - k. Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;
2. Kesehatan
- a. Masih terjadi kasus kematian Anak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebanyak 14 kasus. Sementara itu, kasus ibu mati lahir pada tahun 2017 adalah sebanyak 16 kasus. Angka kematian ibu ini lebih tinggi dari AKI Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. Kasus bayi gizi buruk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebanyak 1 kasus. Walaupun kasusnya menurun pada tahun 2017, adanya kasus gizi buruk tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut masih terpusat di Kecamatan Pelaihari (ibukota kabupaten). Selain itu, fasilitas RSUD yang ada kondisinya belum memadai terutama dalam hal daya tampung jumlah pasien. Pengembangan RSUD Kintap diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif layanan fasilitas kesehatan selain di Kecamatan Pelaihari;
 - d. Pembangunan RSUD di Kabupaten Pelaihari secara fisik akan selesai dikerjakan pada tahun 2018. Untuk optimalisasi pelayanan RSUD, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD menjadi prima;
 - e. Perlu adanya kejelasan pengelolaan RSUD eksisting setelah adanya perpindahan layanan di gedung baru sehingga bangunan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Ketersediaan tenaga medis terutama dokter belum merata antar kecamatan dan sebagian besar masih berada di Kecamatan Pelaihari;

- g. Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terkreditasi di Kabupaten Tanah Laut masih cukup tinggi yaitu sebesar 29. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi hanya sebesar 49;
 - h. Belum seluruh balita di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan imunisasi lengkap. Persentase balita dengan cakupan imunisasi tertinggi pada tahun 2017 adalah pada imunisasi polio 1-4 yaitu sebesar 95,86, diikuti BCG sebesar 95,23, dan hepatitis B1-B3 sebesar 93,55. Dengan masih banyaknya balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai imunisasi kesehatan pada balita;
 - i. Masih tingginya kasus penyakit di Kabupaten Tanah Laut seperti penyakit hipertensi primer (43.876 kasus), ISPA (17.958 kasus), dan Dyspesia (15.611 kasus);
 - j. Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - k. Banyak masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang belum memiliki kartu kesehatan (Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga akan menyulitkan dalam akses pelayanan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit. Persentase penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar 57,86;
 - l. Masih banyak masyarakat belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimana persentasenya hanya sebesar 40. Hal tersebut menjadi indikasi penyebab masih tingginya kasus diare di masyarakat.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Masih terdapat jalan kabupaten di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi rusak. Pada tahun 2017, jalan dalam kondisi rusak sepanjang 715,28 km, sedangkan kondisi rusak berat sepanjang 127,39 km;
 - b. Masih banyak jalan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu ditingkatkan kualitas permukaannya dari kerikil dan tanah menjadi aspal. Panjang jalan dengan permukaan kerikil hingga tahun 2017 sepanjang 917,1 km dan permukaan tanah sepanjang 92,94 km;
 - c. Belum terbangunnya jalan penghubung antara sentra produksi menuju pelabuhan dan perlunya pembangunan jalan alternatif lingkaran dalam dan luar.

Selain itu, perlu adanya pembangunan ruas jalan strategis kabupaten seperti antara ruas Bentok Darat-Imban, Riam Pinang-Riam Kanan, Telaga-Panjatan-Manaran, Lok Serapang-Awang Makmur-Panggung, dan Kunyit-Tiang Aji;

- d. Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - e. Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, maka terdapat potensi yang tinggi abrasi kawasan pantai. Wilayah yang berpotensi terkena abrasi berada di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau, Takisung, Jorong, Panyipatan, Kintap, dan Bumi Makmur;
 - f. Masih tingginya rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memperoleh sanitasi layak. Persentasenya sanitasi layak pada tahun 2017 secara keseluruhan adalah sebesar 35,98 dimana sanitasi layak di perkotaan sebesar 43,22, sedangkan di perdesaan sebesar 33,55;
 - g. Persentase rumah tangga yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55 rumah tangga;
 - h. Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;
 - i. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian SPM penataan ruang tidak tercapai. Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada;
 - j. Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan status milik sendiri pada tahun 2017 adalah sebesar 82,69. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 17,31 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memiliki rumah;

- b. Masih tingginya kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam kawasan kumuh dimana luasannya mencapai 340 Ha;
 - c. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut dimana jumlahnya hingga tahun 2017 mencapai 17.000 unit rumah;
 - d. Belum tersedianya legislasi daerah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, norma kebijakan bidang perumahan, dan penanganan kawasan kumuh permukiman;
 - e. Masih terdapat backlog (kekurangan) rumah sekitar 80.000 unit di Kabupaten Tanah Laut;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat sehingga tindak pidana yang terjadi masih cukup tinggi. Pada tahun 2014, jumlah tindak pidana sebanyak 193 kasus, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 253 kasus, selanjutnya pada tahun 2017 tindak pidana mengalami penurunan menjadi 149 kasus;
 - b. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati Peraturan Daerah masih belum optimal;
 - c. Masih belum optimalnya penegakan Perda;
 - d. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan, terutama di wilayah perkotaan maupun di pesisir;
 - e. Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada;
 - f. Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat;
 - g. Perlunya peningkatan religiusitas masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan;
6. Sosial
- a. Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM dimana persentasenya sebesar 18,47 pada tahun 2017;
 - b. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - c. Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada

masyarakat;

- d. Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- e. Belum tersedianya data yang valid tentang warga komunitas adat terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial;
- f. Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat;
- g. Kabupaten Tanah Laut termasuk kabupaten yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi dengan keseluruhan skor sebesar 178. Potensi bencana yang tinggi tersebut dapat mengancam ketentraman hidup masyarakat;
- h. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana;
- i. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
- j. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut masih cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2017 sebesar 67,27. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Dalam kurun waktu 2013-2017, TPAK Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dari sebesar 69,41 pada tahun 2013 menjadi sebesar 67,27 pada tahun 2017;
- b. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017 dari sebesar 2,99 pada tahun 2013 menjadi sebesar 370 pada tahun 2017;
- c. Tingkat pengangguran penduduk yang berpendidikan SMA ke atas d.mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar 85. Hal tersebut akan berdampak pada munculnya pengangguran terdidik di Kabupaten Tanah Laut;
- d. Pencari kerja di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh lulusan SMA;

- e. Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka IDG yang baru mencapai 68,36;
 - b. Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio IPG terhadap IPM yang nilainya lebih dari 100 pada tahun 2017 yang berarti masih terjadi kesenjangan gender di Kabupaten Tanah Laut
 - c. Belum optimalnya pemenuhan hak anak/rendahnya pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak dimana kelas Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kelas pratama;
 - d. Masih cukup tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 sebanyak 25 kasus, sedangkan kasus kekerasan pada anak sebanyak 101 kasus;
 - f. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal yang paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Tanah Laut;
 - g. Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikkan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal;
 - h. Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak;
 - i. Belum optimalnya SKPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif

Gender (PPRG);

- j. Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam legislatif dimana persentasenya belum mencapai 30. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 14,29;

3. Pangan

- a. Rata-rata konsumsi kalori di kelompok pengeluaran kuintil 1 di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 hanya sebesar 1.718,48 kkal, sedangkan rata-rata konsumsi protein sebesar 49,48 gram. Angka tersebut masih berada di bawah patokan kec ukupan konsumsi kalori (2.150 kkal) dan protein (57 gram);
- b. Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih terbatas jumlahnya yaitu 98 KRPL pada tahun 2017
- c. Peningkatan akses pangan masyarakat mensyarakatkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas;
- d. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan;
- e. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan;
- f. Masih kurangnya promosi olahan pangan lokal dan kampanye diversifikasi pangan sebagai salah satu kunci dalam pencapaian diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah;
- g. Belum optimalnya fungsi cadangan pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama berkaitan dengan inflasi pangan;

4. Pertanahan

- a. Belum optimalnya kinerja penyediaan lahan kawasan industri untuk pengembangan industri terpadu di Kecamatan Jorong;
- b. Masih cukup tingginya konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut;
- c. Belum optimalnya pemetaan tanah hak milik di Kabupaten Tanah Laut;
- d. Belum optimalnya optimalnya pelayanan administrasi pertanahan;
- e. Masih cukup tingginya tanah di Kabupaten Tanah Laut yang belum

bersertifikat;

5. Lingkungan Hidup

- a. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;
- b. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Belum tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD);
- e. Belum optimalnya penegakan pelanggaran lingkungan hidup;
- f. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik pencemaran air dan udara;
- g. Masih terbatasnya prasarana utilitas berupa penerangan jalan umum dan masih banyak jaringan penerangan jalan umum yang liar;
- h. Terbatasnya kapasitas TPA Bakunci dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Tanah Laut;
- i. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan ruang terbuka hijau (RTH);
- j. Belum tercapainya RTH sebesar 30 dari luas wilayah kota;
- k. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemantauan;
- l. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif;
- m. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan taman sebagai wahana terbuka hijau kota dan belum adanya standar baku pengelolaan taman kota;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang. Persentase penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan pada tahun 2018 adalah sebesar 99,98.

- b. Belum optimalnya data kependudukan di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang berasal dari perangkat daerah dengan BPS;
 - c. Kepemilikan e-KTP dan akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut belum optimal. Target secara nasional pada tahun 2019 mencapai 100 penduduk telah terjangkau oleh e-KTP dan memiliki akta kelahiran. Persentase penduduk perempuan yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2018 adalah sebesar 92,94, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 96,13;
7. .
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa. Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat desa dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa. Belum optimalnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian di masing-masing desa;
 - c. Belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa berjalan di tempat. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah;
 - d. Sebagian besar desa di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJMD Desa dan RKP Desa;
 - e. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa;
 - f. Belum optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa. Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 adalah sebesar 1,53 dan lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 1,49;
 - b. Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi akseptor KB. Rasio akseptor KB di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan selama periode 2012-

2017. Pada tahun 2012, rasio akseptor KB di Kabupaten Tanah Laut sebesar 82,03 dan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 78,77;

- c. Belum optimalnya pelayanan kesehatan reproduksi disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat yang mengakibatkan belum terpenuhi layanan Unmet Need dimana persentasenya sebesar 25,22 di Kabupaten Tanah Laut;
- d. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal;
- e. Masih rendahnya jumlah kader KB berkualitas;

9. Perhubungan

- a. Belum terkoneksi akses jalan dari Pelabuhan Laut Tanjung Dewa menuju sentra produksi;
- b. Belum optimalnya fungsi Terminal Tanah Habang Pelaihari. Hal tersebut terjadi karena banyak angkutan umum yang enggan melakukan aktivitas bongkar muat barang dan menaikkan/menurunkan penumpang di terminal;
- c. Belum selesainya proyek pembangunan Pelabuhan Swarangan sehingga memperlambat arus barang masuk dan keluar di Kabupaten Tanah Laut;
- d. Sarana dan prasarana transportasi umum di Kabupaten Tanah Laut dirasakan kurang memadai sehingga minat masyarakat menggunakan angkutan menjadi rendah. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya;
- f. Belum optimalnya penerimaan PAD dari bidang perhubungan;
- g. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya;
- h. Masih kurangnya rambu petunjuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- i. Fasilitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor masih kurang memadai;

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki sambungan jaringan internet mobile;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung di berbagai bidang pembangunan daerah. Informasi

- pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- c. Belum adanya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
 - d. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki telepon seluler di Kabupaten Tanah Laut dengan persentase 34,94 pada tahun 2017;
 - f. Persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Tanah Laut masih rendah yaitu sebesar 22,25;
 - g. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika;
 - h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- a. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Laut masih rendah;
 - b. Sebagian besar koperasi di Kabupaten Tanah Laut masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam;
 - c. Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas;
 - d. Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha lain sebagai induk semang dan tingkat produktivitas UKM masih rendah. Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN;
 - e. Kualitas produk UKM di Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk;
12. Penanaman Modal
- a. Nilai penanaman modal asing di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2012, nilai penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Tanah Laut sebesar \$ US 64,16 juta menjadi sebesar \$ US 2,88 juta pada tahun 2018;
 - b. Rasio daya serap tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal asing menurun dari sebesar 0,075 pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,054 pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada rasio penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal dalam negeri juga menurun dari sebesar 0,003 (2016)

menjadi sebesar 0,002 (2017);

- c. Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA berada di posisi 5;
- d. Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN berada di posisi 6;
- e. Belum adanya regulasi terkait tentang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut, serta regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut;
- f. Pelayanan perizinan di Kabupaten Tanah Laut yang tertera dalam website masih menggunakan acuan peraturan daerah yang tidak berlaku lagi;

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga antar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Minimnya kompetisi olahraga dalam daerah karena keterbatasan SDM perangkat pertandingan;
- c. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum muncul atlet unggulan Kabupaten Tanah Laut di tingkat provinsi maupun nasional;
- d. Belum optimalnya peran Pemuda Penggerak Pembangunan dan Perdesaan di Kabupaten Tanah Laut;
- e. Belum terbentuknya Forum Pemuda Tanah Laut (FPTL);
- f. Masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda;
- g. Pemuda Kabupaten Tanah Laut yang berprestasi lebih memilih berkarir di luar Kabupaten Tanah Laut;

14. Statistik

- a. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b. Belum adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tanah Laut yang berisi seluruh data pada setiap aspek pembangunan;
- c. Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;

- d. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah;
15. Persandian
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah;
 - b. Kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah;
 - c. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
 16. Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pembinaan pegiat seni dan budaya di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Belum terlaksananya festival tahunan Tanah Laut yang menampilkan kebudayaan Tanah Laut;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut seperti Benteng Belanda Tabanio, Cagar Budaya Desa Riam Andungan, dan Bunker Jepang belum dikelola secara terpadu;
 - d. Promosi budaya lokal Kabupaten Tanah Laut belum optimal;
 - e. Sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya belum representatif;
 17. Perpustakaan
 - a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah;
 - b. Keterbatasan jumlah perpustakaan keliling. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan keliling di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 unit
 - c. Sistem perpustakaan digital di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksana. Selain itu, pelayanan perpustakaan masih dilakukan secara manual;
 - d. Masih kurangnya masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan;
 - f. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal;
 18. Kearsipan
 - a. Belum semua SKPD/Pemerintah Desa/BUMD memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;
 - b. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan di Kabupaten Tanah Laut masih rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil

sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;

- c. Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
- d. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;
- e. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal;

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang tinggi di bidang perikanan tangkap laut karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Namun dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola sumber daya tersebut mengalami keterbatasan;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif walaupun selama periode 2012-2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.964,8 ton;
- c. Hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau belum ditangani dengan baik untuk proses penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Karena itu, pengembangan industri pascapanen (pengolahan) menjadi kegiatan bisnis yang perlu dikembangkan;
- d. Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;
- f. Belum adanya pengembangan industri pengolahan terpadu di bidang perikanan. Usaha pengolahan ikan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber PAD, penyerap tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu klaster yang saling terkait (sistem minabisnis);
Masih rendahnya mutu bahan baku industri perikanan;
- g. Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kabupaten Tanah Laut;
- h. Masih terbatasnya akses terhadap pasar produksi. Kebijakan nasional pelarangan alat tangkap menyebabkan banyak kapal yang tidak beroperasi

apabila menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan eks asing;

- i. Masih banyaknya produk usaha perikanan terutama hasil olahan tanpa label, sehingga mengurangi traceability produk dan nilai tambah yang akan diperoleh daerah/negara;
 - j. Masih sulitnya pengembangan budidaya perikanan rumput laut dan unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan karena kesulitan pemasaran produk dan ketersediaan benih dan indukan berkualitas;
 - k. Masih terbatasnya pakan ikan untuk budidaya perikanan. Salah satu masalah budidaya perikanan rakyat adalah masalah pakan;
 - l. Produk khas Kabupaten Tanah Laut yang berasal komoditas perikanan belum berkembang dan daya saingnya kalah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pariwisata
- a. Jumlah pengunjung obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah pengunjung secara keseluruhan sebanyak 196.201 pengunjung dan pada tahun 2016 berkurang menjadi sebanyak 104.145 pengunjung, dan pada tahun 2017 meningkat kembali hingga mencapai level tertingginya yaitu sebanyak 272.650 pengunjung;
 - b. Daya tarik objek wisata di Kabupaten Tanah Laut perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas;
 - c. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi
 - e. Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut yang mencakup

prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism development);

- f. Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut;

3. Pertanian

- a. Sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut mengandalkan jaringan non irigasi. Lahan sawah yang mengandalkan jaringan irigasi pada tahun 2017 seluas 7.209 Ha, sedangkan lahan sawah non irigasi seluas 66.852 Ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaringan irigasi teknis sebagian besar belum menjangkau lahan sawah yang ada;
- b. Masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan budidaya dimana luasannya pada tahun 2017 mencapai 8.579 ha;
- c. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal;
- d. Keterbatasan akses pasar produk pangan;
- e. Tidak tersedia gudang penyimpanan produk pertanian;
- f. Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi;
- g. Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;
- h. Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas;
- i. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik;
- j. Ketersediaan sumber bibit perkebunan yang berkualitas sangat terbatas (tidak ada kebun induk tanaman perkebunan);
- k. Jumlah petugas penyuluh perkebunan sangat kurang dan terjadinyapenurunan mutu genetik ternak;
- l. Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan). Selain itu, lahan penggembalaan peternakan rakyat mengalami penurunan luasan;
- m. Belum tersedia lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak;
- n. Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak; Bahan baku

- sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung);
- o. Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten. Hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat;
 - p. Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang. Selain itu, kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah;
 - q. Hasil usaha peternakan belum optimal sehingga menurunkan produksi ternak. Selain itu, belum adanya pemetaan potensi agribisnis peternakan sehingga belum menjadi daya tarik bagi investor;
 - r. Terjadinya pemotongan betina produktif. Belum semua pelaku usaha di rumah potong hewan mengetahui larangan pemotongan betina produktif yang diatur dalam UU Nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan;
 - s. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di RPH Sarang Halang belum memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana agar target pangan asal hewan yang dihasilkan RPH dapat tercapai. Selain itu, daya tampung pasar hewan terbatas;
4. Perdagangan
- a. Ekspor unggulan di Kabupaten Tanah Laut masih didominasi komoditas tambang;
 - b. Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di berbagai kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya;
 - c. Bangunan yang ada di pasar lama belum dimanfaatkan secara optimal;
 - d. Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah retribusi tera ulang pedagang;
 - e. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen;
 - f. Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku

usaha belum terlaksana dengan baik;

5. Perindustrian

- a. Belum terbangunnya kawasan industri Jorong karena masalah pembebasan lahan;
- b. Belum terbangunnya sentra IKM terpadu di Kabupaten Tanah Laut seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa di setiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada di dalam atau di luar Kawasan Industri;
- c. Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;
- d. Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri. Selain itu, kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu masih lemah;
- e. Kewajiban perusahaan pemegang izin usaha industri baik skala menengah dan besar di Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini belum menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan;

6. Transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi lokal antar kecamatan dan masih kurangnya penataan lokasi transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi terpadu
- b. Program transmigrasi yang direncanakan pada tidak bisa berjalan dengan optimal karena terkendala pembebasan lahan seluas 446 hektar di Desa Padang Luas dan Desa Kurau Kematan Kurau yang kepemilikan tanahnya diakui oleh penduduk
- c. Kurangnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi;

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan Umum

- a. Belum adanya penegasan batas wilayah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Jalanan kerjasama yang dilakukan masih terbatas pada wilayah regional;
- c. Sarana dan prasarana kecamatan masih belum optimal dalam pelayanan

- kepada masyarakat;
- d. Pemilihan kepala desa belum dilakukan secara serentak sehingga visi dan misi RPJM Desa terkadang tidak selaras dengan visi dan misi dalam RPJMD;
 - e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan civil society;
 - f. Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (Pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan);
 - g. Belum lancarnya pelaksanaan system informasi manajemen pemerintah daerah;
 - h. Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;
 - i. Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan, menjadi money follow programme;
 - j. Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
 - k. Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
 - l. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
 - m. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
 - n. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
 - o. Belum terbentuknya BUMD yang mengelola Kawasan Industri Jorong;
 - p. Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi;
 - q. Belum terciptanya pemerataan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - r. Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah;
 - s. Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel;

- t. Belum optimalnya kinerja legilatif dalam proses legislasi daerah;
2. Perencanaan Pembangunan
 - a. Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
 - b. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun SKPD;
 - c. Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan SKPD-SKPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - d. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
 - e. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang berkualitas;
 - f. Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - g. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan pembangunan;
 3. Keuangan
 - a. Belum terintegrasi antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan;
 - b. Belum ada fakta integritas mulai pimpinan daerah sampai dengan pimpinan SKPD dalam mempertahankan opini WTP;
 - c. Masih terjadinya perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban yang masih harus diperbaharui dengan konversi akun;
 - d. Perbaiki sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatn BMD;
 - e. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
 - f. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan dana desa ;

- g. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - h. Belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah;
 - i. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum Optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017. Hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah penurunan ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang persentasenya mencapai 70,31 pada tahun 2017.
 - j. Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD;
 - k. Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah;
 - l. Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- a. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. Masih rendahnya profesionalisme birokrasi;
 - c. Belum berkembangnya sistem reward dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja;
 - e. Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi;
5. Penelitian dan Pengembangan
- a. Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah;
 - d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya penelitian dan

pengembangan;

6. Pengawasan Pembangunan

- a. Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran satuan kerja perangkat daerah
- b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh satuan kerja perangkat daerah
- c. Masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

BAB III

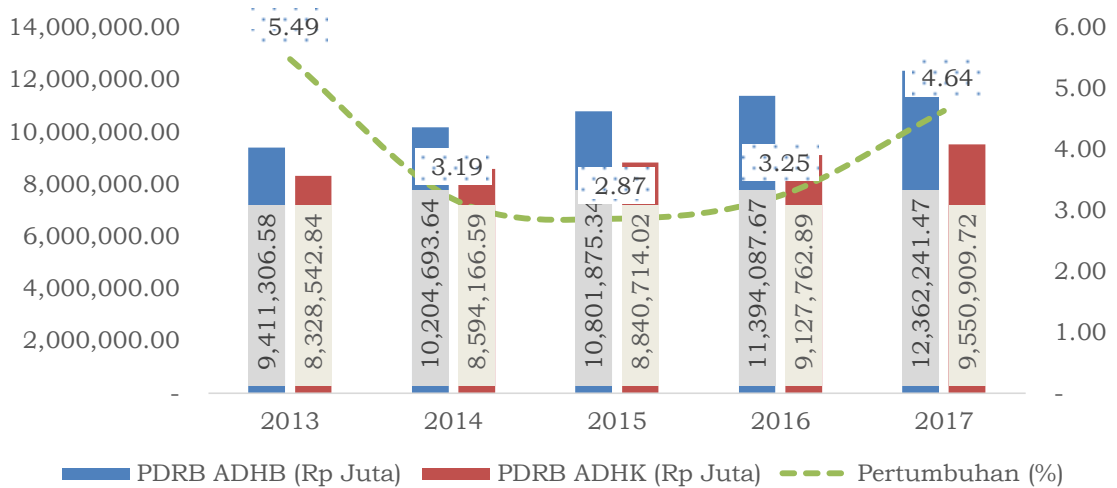
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2018, proyeksi Tahun 2020 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2020. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.



Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 3.1 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

Selama periode 2013-2017, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 9,41 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 12,36 triliun pada tahun 2017. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 8,33 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 9,55 triliun pada tahun 2017. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,89% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,87%. Pada tahun 2015 merupakan titik balik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 3,25% dan pada tahun 2017 tumbuh kembali sebesar 4,64%.

PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa terdapat 16 sektor yang ada memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut ditunjukkan oleh sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 16,68%, kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,28% per tahun, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,99% per tahun. Selama periode 2013-2017, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami perlambatan, hal ini dikarenakan gejolak perekonomian Kabupaten

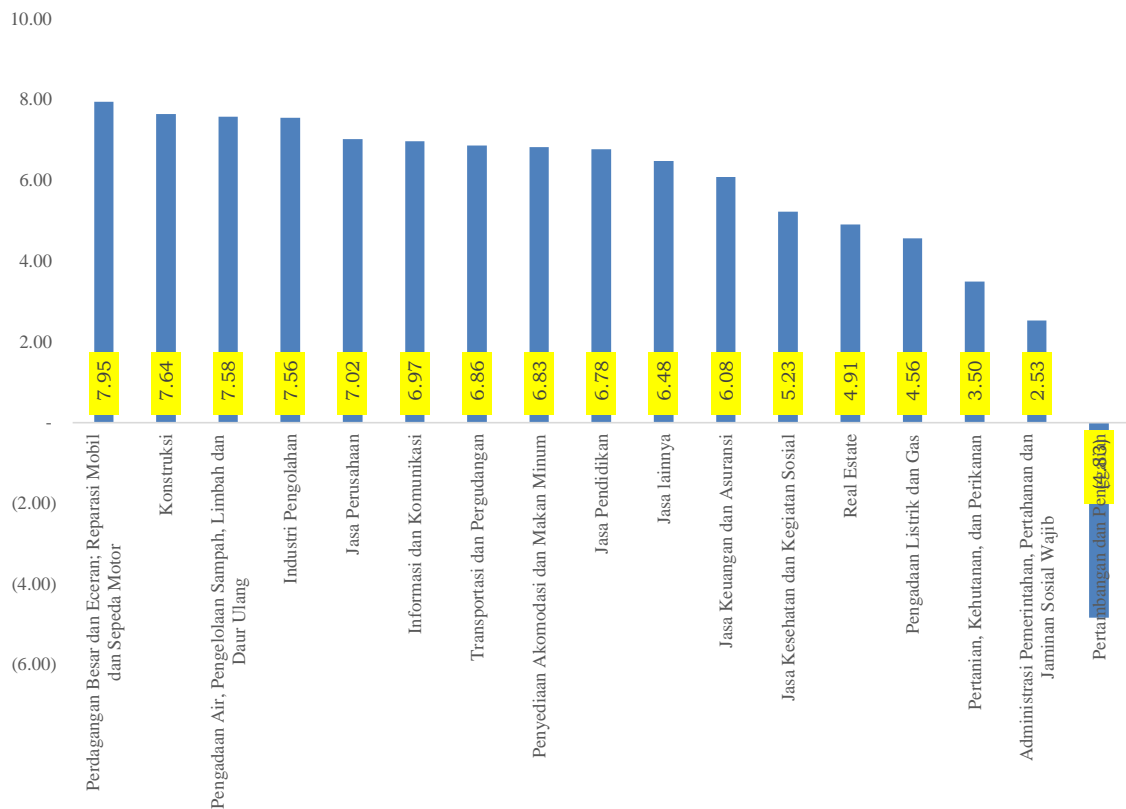
Tanah Laut masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan, terutama pertambangan batubara. Harga batubara yang terus melemah menyebabkan banyak pengusaha batubara di Kabupaten Tanah Laut memutuskan untuk vakum. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi selama periode 2014-2017 dengan kontraksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 4,83%. Tak hanya itu, perlambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi pada sektor pertanian, terutama perkebunan dan kehutanan.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2013-2017

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,83	2,31	2,22	3,84	3,50	3,14
Pertambangan dan Penggalian	4,94	(0,91)	(2,20)	(2,33)	(4,83)	(1,07)
Industri Pengolahan	4,67	4,64	4,33	7,57	7,56	5,75
Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	36,35	31,67	5,00	4,56	16,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	8,86	5,64	7,43	7,58	6,43
Konstruksi	5,75	6,47	6,34	5,23	7,64	6,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,54	8,81	8,20	7,88	7,95	8,28
Transportasi dan Pergudangan	7,12	6,76	6,97	6,50	6,86	6,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,73	6,20	6,34	6,83	6,66
Informasi dan Komunikasi	6,52	9,36	8,37	8,75	6,97	7,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	14,02	7,24	4,92	5,71	6,08	7,59
Real Estate	6,73	5,46	5,65	6,47	4,91	5,84
Jasa Perusahaan	7,44	6,89	6,58	8,05	7,02	7,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,81	5,81	8,78	2,03	2,53	4,99
Jasa Pendidikan	7,40	8,14	8,76	7,87	6,78	7,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,44	6,75	7,53	9,05	5,23	7,80
Jasa lainnya	2,60	8,24	6,12	7,68	6,48	6,22
PDRB	5,49	3,19	2,87	3,25	4,64	3,89

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2017, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 7,95%, kemudian sektor konstruksi sebesar 7,64% pada posisi kedua, dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 7,58% pada posisi ketiga. Sedangkan 3 (tiga) sektor yang memiliki posisi terendah memiliki pertumbuhan sektor kurang dari 4% dan salah satunya memiliki pertumbuhan yang negatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,50%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,05%, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar -4,83 persen.



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2017

3.1.2 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 3.2 PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2013-2017

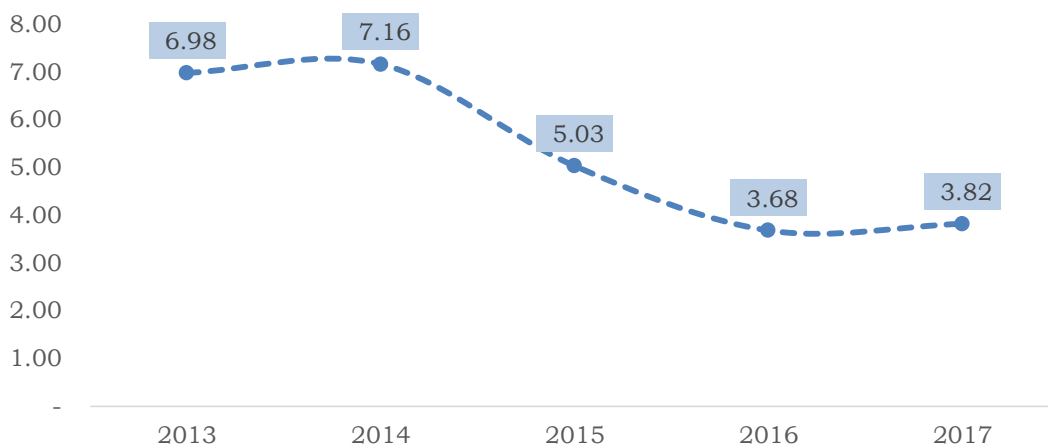
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Rp Ribu)	29.998,59	31.979,81	33.310,03	34.602,41	36.976,39
PDRB ADHK (Rp Ribu)	26.547,27	26.932,69	27.262,34	27.719,86	28.567,48
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,73	1,45	1,22	1,68	3,06

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut pada Tabel 2.22 memiliki tren yang cenderung positif, yang artinya meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2013 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 29,99 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 36,98 juta. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK terus meningkat dari Rp 26,55 juta dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 28,57 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 3,73%. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

3.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari 5,96% menjadi 7,16%, kemudian menurun hingga tahun 2016 menjadi 3,68% dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,82%. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2013-2017

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2018, realisasi RPJMD, dan kondisi ekonomi daerah tahun 2018 dan perkirakan tahun 2020 meliputi :

1. Kondisi internal

a. Faktor kekuatan

1) Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kabupaten Tanah Laut didominasi pada sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata terutama wisata alam dan wisata edukasi.

2) Aspek demografi

Aspek demografi di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 sebesar 334.328 jiwa. Dengan didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar maka diharapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanah Laut diharapkan semakin baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian Kabupaten Tanah Laut.

4) Investasi

Investasi Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat khususnya PMDN. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai, kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif kondusif, dimulainya pembangunan bandara internasional, dan adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Adanya

regulasi tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif bagi investor.

5) Komitmen pemerintah daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai inovasi daerah yang mengoptimalkan potensi lokal yang mensejahterakan masyarakat.

b. Faktor kelemahan

1) Pemanfaatan sumber daya alam Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.

2) Nilai tambah produk pertanian

Nilai tambah produk-produk pertanian di Kabupaten Tanah Laut masih belum di manfaatkan secara optimal menjadi bahan-bahan olahan, sehingga keragaman hasil produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai tambah (*added values*).

2. Kondisi eksternal

a. Faktor peluang

1) Posisi *geostrategic*

Dengan telah ditetapkannya Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Perkotaan Banjarbakula (Kecamatan Bati-bati dan Tambang Ulang) nantinya akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Laut. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan investasi dan menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi melalui beberapa strategi antara lain kemudahan perijinan, insentif investasi dan percepatan infrastruktur pendukung.

2) Pasar bebas ASEAN

Kondisi pasar bebas ASEAN membuka peluang bagi produk-produk lokal baik dari segi tenaga kerja, produksi maupun pemasaran.

b. Faktor ancaman.

1) Pasar bebas ASEAN.

Pasar bebas ASEAN menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Tanah Laut sebab persaingan akan semakin tajam. Ketidaksiapan

daerah dalam menghadapi persaingan tersebut akan menyebabkan Kabupaten Tanah Laut menjadi tujuan bagi pemasaran produk dan tenaga kerja terlatih.

2) Perubahan iklim.

Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan dampak pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam petani, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu tanaman, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial.

Adapun strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. Pengoptimalan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal
5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain : (1) pengelolaan perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, (2) pengembangan potensi wilayah, (3) Peningkatan komoditas produksi unggulan, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) Peningkatan ketrampilan bagi tenaga usia kerja dan (6) pengembangan infrastruktur wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait

langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut di atas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2) **Disiplin Anggaran**

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Dalam hal peralihan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah :

1. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
3. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
4. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khususnya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.
5. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
6. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan daerah.
7. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Dengan melihat analisis kondisi perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

1. peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
2. peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi pendapatan daerah,
3. peningkatan kualitas SDM,
4. peningkatan investasi.

Dengan strategi tersebut diatas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Peninjauan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,

2. Meningkatkan kualitas BUMD,
3. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan,
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi,
5. Meningkatkan kualitas SDM,
6. Meningkatkan pelayanan perijinan,
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Adapun upaya upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi,
- b. peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD,
- c. menambah penyertaan modal kepada BUMD,
- d. merancang design/mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak,
- e. ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan,
- f. memperbaiki fasilitas obyek retribusi,
- g. peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
- h. penegakan peraturan daerah,
- i. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah,
- j. melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan keajiban pembayaran pajak daerah,
- k. bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah,
- l. penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan,
- m. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima,
- n. pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral

Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak daerah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
 - 1) Bagi Hasil Pajak terdiri dari :
 - a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
 - c) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan.
 - b) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent).
 - c) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Dana Alokasi Umum merupakan :

- 1) Komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi fiskal yang didasarkan atas formula dengan pendekatan alokasi dasar dan celah fiskal dengan memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
 - 2) *Block Grant* yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi dan memperbaiki kesenjangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
 - 3) *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan daerah dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Rancangan awal RKPD tersebut belum memasukkan dana DAK, baik DAK fisik maupun DAK Non fisik yang dikarenakan dana tersebut dicantumkan dalam dokumen kalau sudah ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
Kabupaten Tanah Laut mendapat alokasi dana penyesuaian dimana dana tersebut bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang mendasarkan peraturan perundang undangan berlaku dan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dana Penyesuaian otonomi khusus hanya terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID)

yang pada tahun 2020 memprediksikan sebesar Rp107.000.000.000,00,- dengan asumsi Pemerintah Tanah Laut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK, menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tepat waktu dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu serta memenuhi batas minimum penilaian kinerja.

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah
- e. Pendapatan lainnya

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1.1	Pendapatan asli daerah	187,174,984,474.43	128,454,917,428.69	119,114,389,085.00	131,201,504,000.00	137,576,260,000.00
1.1.1	Pajak daerah	28,731,494,191.00	32,602,101,845.60	26,080,000,000.00	29,160,000,000.00	31,127,750,000.00
1.1.2	Retribusi daerah	7,949,865,095.00	6,875,885,025.00	6,884,374,500.00	6,968,105,000.00	7,034,912,000.00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11,247,397,477.00	12,090,537,348.00	12,090,537,348.00	13,000,000,000.00	14,000,000,000.00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	139,246,227,711.43	76,886,393,210.09	74,059,477,237.00	82,073,399,000.00	85,413,598,000.00
1.2	Dana perimbangan	919,129,656,785.00	1,177,983,858,093.00	1,097,428,461,200.00	1,144,000,000,000.00	1,202,000,000,000.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	216,475,791,297.00	409,402,276,402.00	289,619,171,200.00	309,000,000,000.00	338,000,000,000.00
1.2.2	Dana alokasi umum	528,690,162,000.00	528,690,162,000.00	560,583,764,000.00	588,000,000,000.00	617,000,000,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	173,963,703,488.00	239,891,419,691.00	247,225,526,000.00	247,000,000,000.00	247,000,000,000.00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	257,750,415,280.00	251,519,326,411.00	233,137,681,552.00	244,000,000,000.00	249,000,000,000.00
1.3.1	Hibah	15,575,695,925.00	38,468,125,704.00	37,111,800,000.00	37,000,000,000.00	37,000,000,000.00
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	88,963,502,355.00	111,500,961,007.00	88,897,530,552.00	100,000,000,000.00	105,000,000,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	153,211,217,000.00	101,550,239,700.00	107,128,351,000.00	107,000,000,000.00	107,000,000,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya					
	Jumlah	1,364,055,056,539.43	1,557,958,101,932.69	1,449,680,531,837.00	1,519,201,504,000.00	1,588,576,260,000.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi

money follow program berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Penggunaan dana Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa dan partai politik, serta digunakan untuk belanja tidak terduga, sedangkan penggunaan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/ kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak termasuk pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Penjelasan mengenai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana uraian berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, Adapun Belanja Tidak meliputi:

a. Belanja pegawai yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan

kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Belanja pegawai tersebut sudah memasukkan belanja pegawai untuk PNS baru.

Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Belanja Bunga

Belanja bunga

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dialokasikan.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dan hibah ini secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

f. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran tersebut digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan bantuan kepada partai politik.

h. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2020. Belanja langsung merupakan komponen belanja yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah melalui penanganan kegiatan urusan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2017 s/d 2021 dituangkan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	503,696,231,099.00	520,655,981,705.00	641,770,455,113.00	642,027,455,108.00	645,878,141,485.19
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah	21,450,815,040.00	37,209,695,603.00	18,277,500,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
2.1.5	Belanja bantuan social	4,842,461,000.00	3,706,334,000.00	10,023,213,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Kabupaten	3,358,125,996.00	3,348,893,350.00	3,296,437,450.00	3,612,810,500.00	3,816,266,200.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	175,608,502,125.00	172,541,089,900.00	235,653,277,880.00	243,609,556,600.00	252,309,556,600.00
2.1.8	Belanja tidak terduga		769,814,040.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	708,956,135,260.00	738,231,808,598.00	913,020,883,443.00	916,249,822,208.00	929,003,964,285.19
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	32,562,427,295.00	24,171,513,700.00	20,309,435,080.00	15,660,575,700.00	17,226,633,270.00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	369,374,040,548.00	332,379,686,587.00	461,590,523,169.62	403,308,844,808.00	415,408,110,152.00
2.2.3	Belanja modal	509,090,221,986.30	307,362,098,369.60	205,724,290,998.02	380,799,527,981.00	408,911,750,992.81
	Jumlah Belanja Langsung	911,026,689,829.30	663,913,298,656.60	687,624,249,247.64	799,768,948,489.00	841,546,494,414.81
	Total Jumlah Belanja	1,619,982,825,089.30	1,402,145,107,254.60	1,600,645,132,690.64	1,716,018,770,697.00	1,770,550,458,700.00

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah, untuk Tahun 2020 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah

hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, dan dalam hal pengeluaran pembiayaan daerah, pemerintah daerah mengambil kebijakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk penyertaan modal yang alokasi anggarannya berdasarkan amanat yang ada di Peraturan Daerah Tanah Laut. Adapun untuk penyertaan modal sebesar Rp 30.500.000.000,00. Selain itu juga dengan akan direncanakannya pembangunan perkantoran pelayan terpadu diintegrasikan dengan Kantor Bupati yang menggunakan skema pembiayaan system Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang pendanaannya menggunakan pengeluaran pembiayaan. Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 kemudian dituangkan dalam Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Realisasi, Target/Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2020
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	695,373,802,114.36	436,894,591,211.49	253,148,879,118.64	227,317,266,697.00	214,474,198,700.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	695,373,802,114.36	436,894,591,211.49	253,148,879,118.64	227,317,266,697.00	214,474,198,700.00
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	552,600,000.00				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,552,600,000.00	1,000,000,000.00	11,100,000,000.00	30,500,000,000.00	32,500,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Netto	692,821,202,114.36	435,894,591,211.49	242,048,879,118.64	196,817,266,697.00	181,974,198,700.00

Sumber ; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari tahapan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2020 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Propinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Propinsi Kalimantan Selatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 disajikan di Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
			Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)
			Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)
			Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)
			Indeks Pembangunan Pemuda
Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Jumlah Atlet yang berprestasi	
		Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi public	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)
			Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
		Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)
		Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)
		Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
			Indeks Gini (skor)
			PDRB per kapita
		Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)
Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)			
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
			Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%
			Pertumbuhan sektor Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Pertumbuhan sektor Industri olahan
			Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)
		Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)
			Desa Berketahanan Pangan (%)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik (%)
			Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun (%)
			Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)
			Jumlah Desa di bina berciri khas
		Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)
			Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan yang dapat dilihat pada Bab VI tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

4.2.1 Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (RKP 2020) memiliki tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- d. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut yaitu “memacu daya saing perekonomian yang didukung sumber daya manusia berkualitas” dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Indikasi Tema Pembangunan Tanah Laut dalam RPJMD 2018-2023 untuk tahun 2020 adalah Memacu Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas. Mendasari pada tema pembangunan RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, indikatif tema Kab. Tanah Laut dalam RPJMD, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 adalah “Memacu Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas”. Sesuai dengan tema pembangunan tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan (a) kualitas pendidikan; (b) budaya membaca; (c) kualitas manajemen pendidikan; (d) produktivitas tenaga kerja; (e) karakter dan budaya masyarakat; (f) kualitas kesehatan masyarakat; (g) meningkatkan kesejahteraan keluarga; serta (h) menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Prioritas ini ditujukan untuk (a) meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, (b) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (c) meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya (d) meningkatkan prestasi generasi muda (e) meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial

Tujuan prioritas ini ialah pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat, melalui pengembangan dan pemberdayaan industri,

mengembangkan usaha perdagangan, pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah tujuan investasi pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan publik.

Prioritas ini ditetapkan untuk:

- a. mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
 - b. mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance;
 - c. menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan; (b) Meningkatkan pelayanan sumber daya air; (c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai; (d) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; (e) Meningkatkan kinerja layanan transportasi; (f) Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan; (g) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta (h) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

4.2.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2020 dengan prioritas pembangunan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini

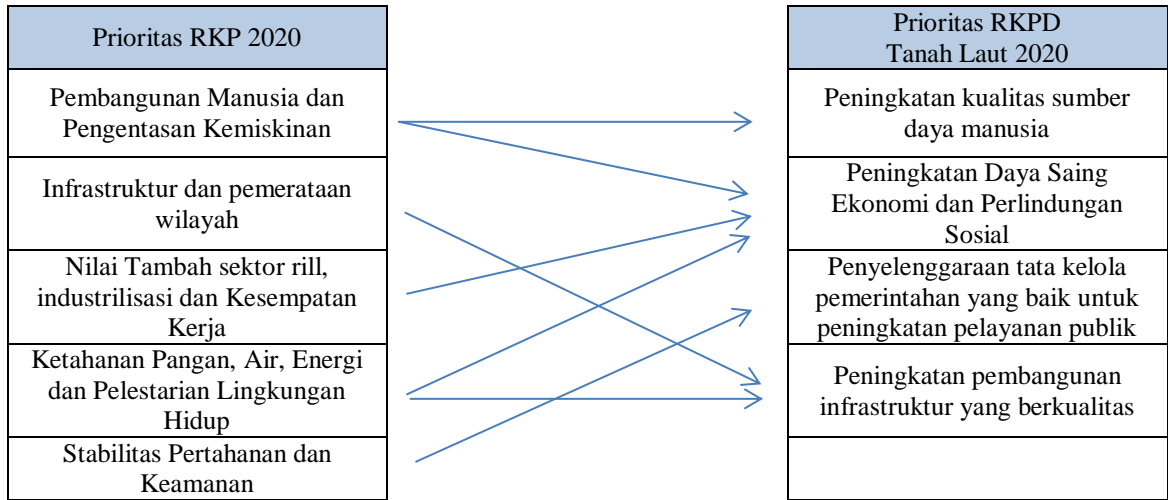
Sasaran Daerah 2020	Prioritas Daerah 2020
meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan publik
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	
meningkatnya pelayanan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	
meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	

Gambar 4.1

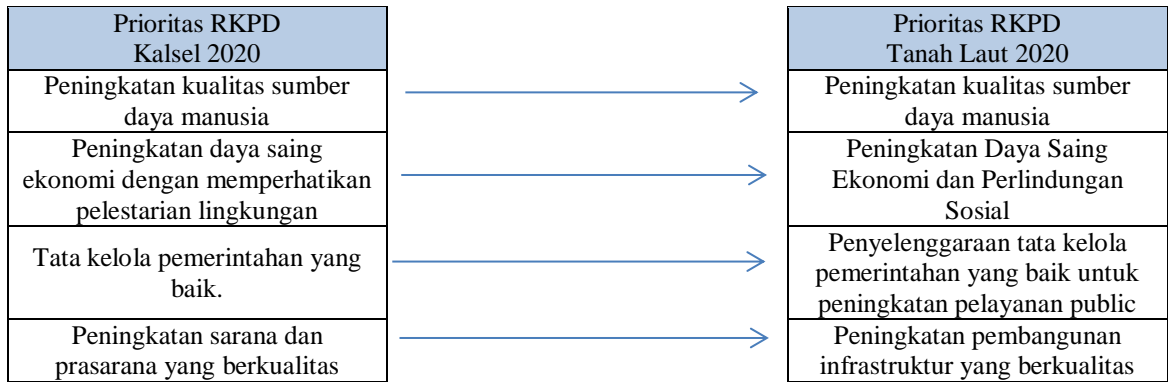
Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

4.2.3 Sinkronisasi prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Tanah Laut

Penyelarasan prioritas pembangunan RKP tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, dapat diselaraskan dan disinkronkan dengan gambar berikut.



Gambar 4.2 Penyelarasan prioritas RKP dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut



Gambar 4.3 Penyelarasan prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut

4.2.4 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Dalam RKPD ini SPM yang berkaitan dengan 6 (enam) urusan wajib tersebut dilaksanakan dan sudah disinkronkan dengan prioritas daerah tahun 2020 yang dapat tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Keselarasan antara Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	peningkatan kualitas sumber daya manusia
	Pendidikan Dasar	
	Pendidikan Kesetaraan	
Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	peningkatan kualitas sumber daya manusia
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	
	Pelayanan kesehatan balita;	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.		
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota.	
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sosial	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan public Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial
	Pelayanan informasi rawan bencana	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
	Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana	
	Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran	
	Rehabilitasi sosial dasar	

Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah
	penyangang disabilitas telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan	
	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	

4.2.5 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Prioritas

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2020 seperti pada uraian berikut ini.

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- Strategi :
1. Meningkatkan sistem pendidikan
 2. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda
 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
 4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
 5. Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
 6. Peningkatan pelestarian/pengembangan seni dan budaya
 7. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

- Kebijakan :
1. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
 2. Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
 4. Meningkatkan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
 5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai

6. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
 7. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
 9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 10. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial
- Strategi : 1. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
3. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan local
4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
5. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
6. Meningkatkan perlindungan social
- Kebijakan : 1. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industry, KUMKM
2. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan dan peningkatan diversifikasi pangan
3. Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata
4. Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi
5. Peningkatkan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat
6. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
7. Peningkatkan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial
3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan public

Strategi : 1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
 2. Meningkatkan sistem pelayanan publik
 3. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

Kebijakan : 1. Peningkatan penggunaan teknologi informasi
 2. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah
 3. Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah
 4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
 5. Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik
 6. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban

4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Strategi : 1. Meningkatkan infrastruktur berbasis kawasan
 2. Peningkatan pengelolaan lingkungan
 3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
 3. Peningkatan penanganan bencana alam

Kebijakan : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan perkantoran baru
 2. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 3. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan
 4. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan, dirumuskan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2020 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			-									
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	3 Nilai						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten			Jumlah Pameran 2 Kegiatan Pameran	2 Kegiatan Pameran	25,000,000	18,150,000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	3 Nilai						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD 230 SPPD	230 SPPD	500,000,000	550,000,000		
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 15 Jenis	15 Jenis	60,000,000	66,000,000		
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 230 Orang	230 Orang	5,832,954,868	6,416,250,355		
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Baik						Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pelaksanaan kegiatan Pameran	SKPD			Jumlah Event 2 Event	2 Event	25,000,000	25,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan								
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	85 Baik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah Orang 35 Orang	35 Orang	1,005,902,775	1,021,562,775	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 13 Jenis	13 Jenis	452,147,490	457,574,850	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 15 Orang	15 Orang	340,896,960	335,469,600	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	SKPD			Jumlah website/aplikasi 1 website/aplikasi	1 website/aplikasi	50,000,000	55,000,000	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	60,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 8 Jenis	8 Jenis	350,891,750	500,175,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah Orang 250 Orang	250 Orang	1,136,000,000	1,400,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 14 Orang	14 Orang	362,040,000	350,000,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	78,28					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Index kepuasan masyarakat 78,5 IKM	78,5 IKM	20,000,000	17,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	78,28					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar dan dalam daerah			Jumlah SPPD 50 SPPD	50 SPPD	270,000,000	361,500,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah 4 jenis	4 jenis	387,461,550	806,491,350	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah 29 orang	29 orang	702,423,708	675,617,452	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran	SKPD			Jumlah event 1 event	1 event	28,000,000	32,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan								
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	2 Nilai					Dinas Perhubungan
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Nilai IKM 84,16 Nilai	84,16 Nilai	331,464,570	820,900,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah orang 876 orang	876 orang	949,700,000	945,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			jumlah honorarium PTT dan Premi asuransi 23 orang	23 orang	641,976,000	658,000,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah event 2 Event	2 Event	24,999,960	27,500,000	
			Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	SKPD			Jumlah produk 3 Produk	3 Produk	50,000,000	55,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah orang 200 Orang	200 Orang	1,212,380,311	1,321,402,463	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 200 Jenis	200 Jenis	674,778,448	770,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah orang 49 Orang	49 Orang	1,083,575,004	1,242,125,306	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai Sakip	1 Nilai					Inspektorat Kabupaten
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah event 2 event	2 event	25,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Inspektorat Kabupaten
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah orang 130 orang Jumlah SPPD 75 buah	130 orang 75 buah	514,145,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			jumlah item 35 item	35 item	175,000,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah orang 12 orang	12 orang	225,000,000	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	SKPD			Jumlah pemeliharaan sistem pelayanan perizinan terpadu 1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	30,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Pameran Pembangunan yang terikuti 2 kali	2 kali	25,000,000	25,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Masyarakat	0 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah orang untuk konsumsi makanan dan minuman rapat 463 Orang/kali Jumlah SPPD keluar Daerah 67 Orang/Kali Jumlah SPPD Kedalam Daerah 360 Orang/Kali	463 Orang/kali 67 Orang/Kali 360 Orang/Kali	494,150,00 0	475,000,00 0	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah surat yang terkirim 194 buah Jumlah jenis komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar 36 Jenis Jumlah Materai yang terbeli dan jasa tranfer 700 lembar Jenis Peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli 18 Jenis Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli 47 Jenis Jumlah jenis barang cetakan yang dicetak 13 Jenis Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli 6 Jenis Jumlah Eksemplar koran dan jumlah buku 12 Eksemplar	194 buah 36 Jenis 700 lembar 18 Jenis 47 Jenis 13 Jenis 6 Jenis 12 Eksemplar	221,440,00 0	1,870,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang Pegawai Tidak Tetap 10 orang	10 orang	223,800,00 0	251,000,00 0	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Jumlah Pameran	1 kali					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah Pameran 2	2	20,000,000	19,800,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1.887.182.167 Baik					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 0	0	369,291,486	504,900,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD 0	0	387,246,434	384,913,638	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah PTT 48 orang	48 orang	818,580,000	900,438,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Cakupan Ketersediaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dalam SIPD	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	SKPD			Jumlah Website 1 Website	1 Website	30,000,000	10,000,000	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah Pameran 2 Pameran Pembangunan	2 Pameran Pembangunan	19,999,800	25,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	3 Baik					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 8 Jenis	8 Jenis	219,982,050	231,980,502	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah Makan Minum dan SPPD 1.368 Orang	1.368 Orang	755,850,400	607,470,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 12 Orang	12 Orang	301,518,000	334,969,498	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah kegiatan pameran pembangunan yang diikuti 1 kali	1 kali	20,000,000	16,500,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia 15 ob	15 ob	178,055,032	121,221,905	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan 12 bulan	12 bulan	309,164,367	253,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah honorarium PTT yang terbayar 12 bulan	12 bulan	384,000,000	422,400,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	SKPD			Jumlah fasilitasi 1 event	1 event	23,000,000	20,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 9 Jenis	9 Jenis	337,035,000	232,902,452	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah SPPD 700 Buah	700 Buah	128,080,000	123,899,950	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah orang 87 orang	87 orang	1,526,403,412	1,441,097,598	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %						Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran (rapat koordinasi dalam/ luar daerah) 146 kali	146 kali	329,450,000	-		
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas rumah sakit 5 jenis	5 jenis	12,140,950,558	-		
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian 12 bulan Jumlah pemenuhan sumber daya manusia (SDM) 327 orang	12 bulan 327 orang	9,537,445,696	-		
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah Pameran Pembangunan 2 Kali	2 Kali	20,000,000	20,000,000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Nilai						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	245,183,872	275,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah Makmin & SPPD 2 Jenis	2 Jenis	437,555,000	575,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD			Jumlah Orang 143 Orang	143 Orang	3,603,616,128	3,830,400,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0 75					Sekretariat DPRD
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD 490 SPPD	490 SPPD	2,300,000,000	2,314,581,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 8 Jenis	8 Jenis	790,621,000	968,053,600	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 34 Orang	34 Orang	860,691,250	895,119,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten, SKPD			Jumlah Pameran 3 Pameran	3 Pameran	28,500,000	29,930,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	3 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah jenis 2 Jenis	2 Jenis	210,145,000	220,652,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 9 Jenis	9 Jenis	103,236,000	113,398,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah orang 17 Orang	17 Orang	410,100,000	430,600,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah even 2 even	2 even	20,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 4 jenis	4 jenis	279,800,000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD 200 SPPD Jumlah orang 550 orang	200 SPPD 550 orang	309,256,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah orang 6 orang	6 orang	146,880,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3 Indeks					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik, air Komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, (peralatan rumah tangga, buku peraturan/perundangan dan makan minum) 13	13	900,000,000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi 12 bulan	12 bulan	1,084,461,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas pelayanan kesehatan (honor PTT) 399 orang	399 orang	11,698,117,274	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Panyipatan			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah) 7 jenis	7 jenis	133,200,000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Panyipatan			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah 162 kali	162 kali	25,260,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 jenis					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Panyipatan			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah 48 kali	48 kali	7,260,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Panyipatan			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air, komonikasi, peralatan perlengkapan kantor,cetak pengadaan ATK, peralatan 7 jenis	7 jenis	49,820,800	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Takisung			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah 34 kali	34 kali	10,200,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Takisung			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan) 9 jenis	9 jenis	96,236,100	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kurau			Jumlah Rapat koordinasi Dalam daerah 40 kali	40 kali	15,000,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kurau			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 7 jenis	7 jenis	39,950,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentasi pelayanan adminitrasi perkantoran	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Padang Luas
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kurau			jumlah pelaksanaan rapat - rapat, konsultasi dan koordinasi 100 kl	100 kl	18,000,000	18,900,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kurau			jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan 27 jenis	27 jenis	54,790,000	58,999,500	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bati-Bati			Jumlah Rapat koordinasi Dalam daerah 350 kali	350 kali	60,000,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bati-Bati			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik, air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 7 Jenis	7 Jenis	132,900,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bati-Bati			Jumlah Rapat koordinasi Dalam daerah 150 kali	150 kali	27,000,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bati-Bati			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik, air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 4 jenis	4 jenis	48,725,700	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Tambahan Ulang			Jumlah Rapat koordinasi Dalam daerah 230 kali	230 kali	17,250,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Tambahan Ulang			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 5 jenis	5 jenis	166,800,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pelaihari			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik, air, Kominikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, pengadaan, ATK, Peralatan rumah 9 Jenis	9 Jenis	231,728,531	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 90 Jenis	90 Jenis	36,100,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Rapat koordinasi Dalam daerah 166 ok	166 ok	4,980,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bajuin			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK dan lainnya peralatan rumah tangga 7 jenis	7 jenis	26,000,000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bajuin			Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah 150 kali	150 kali	23,250,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bajuin			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, Peralatan 6 jenis	6 jenis	60,500,000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bajuin			Jumlah Rapat koordinasi Dalam daerah 300 ok	300 ok	21,032,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Batu Ampar			Jumlah puskesmas yang melaksanakan rapat koordinasi dalam daerah 344 kali	344 kali	51,720,000	54,306,000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Batu Ampar			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional, fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK 22 jenis) Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional, fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK 3 rekening)	22 jenis 3 rekening	104,616,000	110,635,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jorong			Jumlah Rapat, konsultasi dan koordinasi di puskesmas 221 ok	221 ok	38,675,000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jorong			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik, air Komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 4 jenis	4 jenis	54,552,800	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jorong			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah 90 kali	90 kali	15,300,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jorong			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan 7 jenis	7 jenis	83,250,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kintap			Jumlah Rapat koordinasi Dalam daerah 250 KALI	250 KALI	59,000,000	64,900,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kintap			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 6 JENIS	6 JENIS	173,622,500	192,964,750	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kintap			jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 7 jenis	7 jenis	183,920,000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kintap			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah 39 kali	39 kali	15,650,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Angsau
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pelaihari			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 7 jenis	7 jenis	127,957,900	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3 indeks					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan 41 jenis	41 jenis	45,364,240	50,560,664	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten			Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 ok	14 ok	18,750,000	20,625,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kabupaten			Jumlah Pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran(rapat - rapat,koordinasi luar daerah) 1 tahun	1 tahun	18,900,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 9 jenis	9 jenis	197,506,000	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	SKPD			bandwith tebayar 12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	400,000,000	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			JUmlah kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	25,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Tersedia jasa, bahan, peralatan, 1 Tahun	1 Tahun	1,789,869,630	2,023,356,593	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Tersedia Perjalanan Dinas 1 Tahun	1 Tahun	850,000,000	955,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah PTT dibayar 1.980 orang	1.980 orang	18,000,000,000	18,976,380,500	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 NILAI					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah terlaksananya fasilitasi pemasaran produk peternakan daerah 5 Kali/Tahun	5 Kali/Tahun	50,000,000	60,000,000	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah Terikutinya Pameran Pembangunan dan pameran anggrek 2 Kali	2 Kali	25,000,000	25,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	Kabupaten, SKPD			Terpeliharanya sistem informasi SKPD 1 Sistem	1 Sistem	-	15,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah Rakor dan konsultasi koordinasi dalam dan ke luar daerah 1 Tahun	1 Tahun	496,273,000	355,000,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten, SKPD			Jenis ATK terbeli 32 JenisJumlah jenis kegiatan makan dan minum 3 Jenis/KegiatanJumlah Lembar penggandaan 10.000 LembarJumlah jenis barang cetakan tercetak 13 JenisJumlah unit Perpanjangan STNK dibayarkan 19 Unit/TahunJumlah jasa KIR terbayarkan 2 Unit/4 KaliJumlah jasa pengiriman 10 Kali/KgJumlah jenis rekening terbayarkan 5 RekeningJumlah Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih terbeli 17 JenisJumlah spanduk terbeli 100 MeterJumlah Materai terbeli 220 LembarJumlah Alat Listrik dan penerangan terbeli 12 Jenis	32 Jenis3 Jenis/Kegiatan10.000 Lembar13 Jenis19 Unit/Tahun2 Unit/4 Kali10 Kali/Kg5 Rekening17 Jenis100 Meter220 Lembar12 Jenis	292,531,000	297,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD			Jumlah Honorarium PTT dan Premi Asuransi yang dibayarkan 26 Orang/Tahun	26 Orang/Tahun	580,232,640	660,000,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Terlaksana 1 Kegiatan	1 Kegiatan	24,300,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana 12 Bulan	12 Bulan	2,603,858,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Peralatan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Terlaksana 12 Bulan Jumlah rekening Telpon, Air, Listrik dan Surat Kabar Terbayar 12 Bulan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Terbeli 12 Bulan Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Terbeli 12 Bulan Jumlah Makan Minum Terlaksana 12 Bulan Jumlah Alat Tulis Kantor dan Peralatan Listrik Terbeli 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2,148,961,650	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga PTT untuk Keperluan Administrasi Perkantoran 80 orang/bulan	80 orang/bulan	2,304,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah pembayaran rek. air, listrik, telpon dan internet dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan mengakses berbagai informasi	0 bulan					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah pembayaran rek. air, listrik, telpon dan internet terbayar, pemeliharaan alat kerja, makan minum, ATK, Alat Listrik, alat kebersihan, Pakaian kerja lapangan, mesin potong rumput, 2 lemari besi, filling kabinet, Kulkas, Papan Nama, TV, AC, PC, Laptop, Printer 12 Bulan	12 Bulan	148,848,500	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten			Jenis 7 Jenis	7 Jenis	3,532,188,860	3,685,000,000	
			Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	Kabupaten			WTP 30 Jenis	30 Jenis	150,000,000	180,400,000	
			Sensus Barang Milik Daerah	Kabupaten			WTP 30 WTP	30 WTP	-	187,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Pelaporan					Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD dan jumlah porsi makan minum rapat 3 Jenis	3 Jenis	23,500,000	22,850,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 6 Jenis	6 Jenis	31,500,000	34,650,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 indeks; 34.446.572					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Makmur
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bumi Makmur			jumlah rapat koordinasi dalam daerah 108 kali	108 kali	20,520,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bumi Makmur			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (listrik, air, komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, AYK, peralatan rumah tangga) 9 jenis	9 jenis	34,018,901	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase tersedianya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran; Indeks Kepuasan Masyarakat	20 persen; 0					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Penyediaan Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	77,997,600	93,597,120	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah Pameran 1 Kali	1 Kali	20,000,000	23,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah Orang 152 Orang	152 Orang	180,000,000	190,000,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis Bahan/Peralatan/Perlengkapan 36 Jenis	36 Jenis	150,000,000	155,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 6 Orang	6 Orang	131,822,784	138,413,923	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten, Pelaihari			Jumlah pameran terlaksana 1 kali	1 kali	24,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah SPPD 388 SPPD	388 SPPD	422,865,250	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten, SKPD, Pelaihari			Jumlah jenis 4 jenis	4 jenis	116,071,600	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah honorarium dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai honorer / tidak tetap (PTT) yang terbayarkan 0 bulan Jumlah orang 21 orang	0 bulan 21 orang	386,349,888	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	0 nilai					Dinas Sosial
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten			jumlah event 1 event	1 event	20,000,000	15,750,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	1 Baik					Dinas Sosial
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			jumlah jenis 10 jenis	10 jenis	205,415,000	174,000,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah jenis 3 jenis	3 jenis	863,912,000	424,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			jumlah PTT 16 orang	16 orang	382,823,424	384,000,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	SKPD			Jumlah Produk Unggulan 3 Produk	3 Produk	39,000,000	-	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Promosi 2	2	25,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD 600 SPPD jumlah makan minum rapat 12 bulan	600 SPPD 12 bulan	510,880,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 8 Jenis	8 Jenis	98,255,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 17 Orang	17 Orang	428,921,016	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD			indeks kepuasan masyarakat	0 nilai				Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	SKPD			jumlah SI 2 aplikasi sistem informasi SKPD	2 aplikasi sistem informasi SKPD	20,000,000	22,500,000	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			jumlah pameran 2 pameran/expo	2 pameran/expo	25,000,000	30,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			indeks kepuasan masyarakat	0 nilai				Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			jumlah jenisbahan/peralatan/perlengkapan 35 jenis	35 jenis	200,233,500	350,000,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah orang 1.700 orang	1.700 orang	542,000,000	579,070,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			jumlah orang 18 orang	18 orang	403,460,352	434,414,464	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			jumlah unit 1 unit	1 unit	20,000,000	21,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			jumlah orang 30 org	30 org	809,575,000	777,077,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			jumlah jenis 85 jenis	85 jenis	533,370,300	604,483,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			jumlah orang 52 orang	52 orang	1,245,525,120	1,231,200,000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah kegiatan pameran pembangunan 2 Even	2 Even	25,000,000	25,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			jumlah penyediaan bahan peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis	20 jenis	467,615,856	475,444,856	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar			Jumlah ASN yang mengikuti rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 250 Orang	250 Orang	656,979,500	661,680,500	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah tenaga pegawai tidak tetap 14 Orang PTT	14 Orang PTT	336,124,320	336,124,320	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	1 Nilai					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Event 2 Event	2 Event	25,000,000	35,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 10 Jenis	10 Jenis	740,170,000	760,580,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah jenis 3 Jenis	3 Jenis	996,358,000	1,240,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah PTT 19 PTT	19 PTT	431,262,000	550,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	80 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen 15 dokumen	15 dokumen	65,750,000	72,325,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah SPPD 3.296 kali	3.296 kali	5,030,000,000	5,533,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			, PelaihariJumlah Tenaga Ahli 143 orang	143 orang	3,236,629,536	3,459,996,038	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 pelaporan					Dinas Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Pameran yang diikuti 1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	22,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Dinas Pariwisata
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD dan jumlah porsi makan minum rapat 0 184 SPPD & 636 porsi makan	0 184 SPPD & 636 porsi makan	407,111,850	450,000,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 14 Jenis	14 Jenis	145,118,150	130,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah PTT di Dinas dan PTT di UPT OW Pantai Takisung 27 Orang PTT	27 Orang PTT	613,614,528	620,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kintap			Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran (Rapat koordinasi Dalam/luar daerah) 1 tahun	1 tahun	30,000,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kintap			Jumlah jenis pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunikasi, peralatan perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, peralatan rumah tangga) 7 jenis	7 jenis	2,000,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Kurau
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kurau			Jumlah SPPD dan Jumlah Rapat 0 SPPD dan Rapat	0 SPPD dan Rapat	137,561,380	152,811,380	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kurau			Jumlah Jenis 10 Jenis	10 Jenis	115,592,500	115,469,120	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kurau			JUmlah Orang 5 Orang	5 Orang	89,099,120	99,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		ikm	3 nilai					Bajuin
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran				jumlah jenis 100 jenis	100 jenis	87,780,000	75,350,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi				jumlah orang 22 orang	22 orang	182,000,000	156,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD				jumlah orang 6 orang	6 orang	163,200,000	126,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Jorong
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jorong			Jumlah jenis 100 jenis	100 jenis	74,340,000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jorong			Jumlah orang 22 orang	22 orang	151,000,000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jorong			Jumlah orang 6 orang	6 orang	125,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	441.847.834 jumlah jenis, orang, transaksi keu,exsemp lar					Batu Ampar
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Batu Ampar			Jumlah SPPD 70 sppd	70 sppd	140,000,000	155,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Batu Ampar			Jumlah jenis 130 jenis	130 jenis	114,070,000	165,220,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Batu Ampar			Jumlah orang 6 orang	6 orang	145,000,000	145,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Panyipatan			Jumlah rapat 504 kali	504 kali	238,550,000	200,000,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Panyipatan			Jumlah jenis kegiatan 10 jenis kegiatan	10 jenis kegiatan	128,024,000	145,104,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Panyipatan			Jumlah orang PTT 8 orang	8 orang	192,576,000	192,576,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Pelaihari
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Pelaihari			1. Jumlah SPPD rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi 50 lembar 2. Jumlah SPPD rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 75 lembar 1. Jumlah SPPD rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi 50 lembar 2. Jumlah SPPD rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 75 lembar	50 lembar 75 lembar 50 lembar 75 lembar	225,000,000	225,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pelaihari			1. Jumlah pembayaran jasa telepon, internet, air dan listrik 12 bulan2. Jumlah pembayaran pajak 2 unit kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 5 unit roda 2 7 unit3. Jumlah pembelian materai dan belanja transaksi keuangan 100 lembar4. Jumlah pembelian alat pembersih dan bahan pembersih kantor 13 jenis5. Jumlah pembelian alat tulis kantor 33 jenis6. Jumlah penyediaan barang cetakan dan fotocopy 7 jenis7. Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 10 jenis8. Jumlah pembelian kelengkapan kantor 2 jenis9. Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar 2 eksemplar	12 bulan7 unit100 lembar13 jenis33 jenis7 jenis10 jenis2 jenis2 eksemplar	165,070,000	165,070,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pelaihari			Jumlah pembayaran Jasa Penunjang Kinerja SKPD dan Premi Asuransi Kecamatan Pelaihari 8 orang	8 orang	182,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya barang cetak dan penggandaan; Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan; Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan; Terlaksananya penyediaan ATK; Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Terlaksananya penyediaan bacaan dan peraturan perundangan; Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman; Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah; Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah; Terlaksananya penyediaan jasa penunjang SKPD; Terlaksananya penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran; Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	10 jenis; 3 jenis; 430 jenis; 17 jenis; 27 jenis; 6 jenis; 24 eksemplar; 650 orang; 19 orang; 19 orang; 5 orang; 0 jenis; 0 kali						Tambang Ulang
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Tambang Ulang			Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi 30 kali	30 kali	145,000,00 0	145,000,00 0		
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Tambang Ulang			Terlaksananya penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 90 jenis	90 jenis	117,800,00 0	107,215,00 0		
			Penyediaan jasa penunjang kinerja	Tambang Ulang			Jumlah Pegawai honor tidak tetap yang terbayar 5 orang	5 orang	108,150,00	110,855,00		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD						0	0	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Bati-Bati
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bati-Bati			jumlah jenis 84 jenis	84 jenis	76,080,000	80,640,300	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bati-Bati			jumlah rapat/perjalanan dinas 484 kali	484 kali	131,340,000	147,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Bati-Bati			Jumlah Bulan 6 Bulan/orang	6 Bulan/orang	126,600,000	135,600,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0					Bumi Makmur
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Bumi Makmur			Jumlah SPPD 200 SPPD	200 SPPD	163,500,000	170,000,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bumi Makmur			jumlah Jenis 70	70	150,300,000	152,723,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Bumi Makmur			Terlaksananya pembayaran honorarium dan premi asuransi Pegawai Tidak Tetap 7 ORANG	7 ORANG	140,000,000	150,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 nilai					Kintap
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Kintap			jumlah SPPD 50 SPPD	50 SPPD	171,000,000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kintap			jumlah jenis 10 jenis	10 jenis	126,050,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kintap			jumlah orang 9 orang	9 orang	207,000,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Takisung			Jumlah terbayarnya jasa, bahan peralatan dan perlengkapan kantor 82 Jenis	82 Jenis	94,800,000	98,592,000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Takisung			Jumlah Kordinasi dan Rapat 30 SPPD	30 SPPD	166,400,000	171,392,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Takisung			Jumlah pembayaran honorarium tenaga non PNS 4 Orang	4 Orang	111,826,900	133,506,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 nilai					Angsau
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Angsau			jumlah sppd 15 sppd	15 sppd	78,000,000	80,000,000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Angsau			jumlah pembayaran jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 12 bulan	12 bulan	90,000,000	92,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Angsau			jumlah pembayaran jasa penunjang kinerja kelurahan 3 orang	3 orang	64,800,000	72,000,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Karang Taruna			1. Jumlah rapat/perjalanan dinas 13 Kali	13 Kali	70,000,000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Karang Taruna			Jumlah pembayaran jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 12 Bulan	12 Bulan	73,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Karang Taruna			Jumlah pembayaran jasa penunjang kinerja Kelurahan 3 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	57,600,000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Pabahanan
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pabahanan			jumlah pembayaran jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 12 bulan	12 bulan	58,000,000	60,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pabahanan			Jumlah SPPD 13 SPPD	13 SPPD	71,500,000	78,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pabahanan			jumlah pembayaran jasa penunjang kerja kelurahan 3 orang	3 orang	54,000,000	61,920,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pelaihari			Jumlah pembayaran, jasa, bahan, peralatan, dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	73,000,000	73,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaihari			Jumlah SPPD 12 bulan	12 bulan	70,000,000	75,000,000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pelaihari			Jumlah pembayaran honor non PNS 3 orang 12 bulan	12 bulan	57,600,000	57,600,000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 NILAI					Sarang Halang
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Sarang Halang			Jumlah SPPD 50.000.000 13 SPPD	50.000.000 13 SPPD	50,000,000	70,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Sarang Halang			Jumlah pembayaran jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 52.420.000 12 Bulan	52.420.000 12 Bulan	52,420,000	56,000,000		
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Sarang Halang			Jumlah Pembayaran jasa penunjang kinerja kelurahan 60.000.000 3 orang	60.000.000 3 orang	60,000,000	80,000,000		
			Pendidikan									
	Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Angka Partisipasi Kasar (APK)	35 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan biaya operasional Pendidikan daerah BOP PAUD	SKPD			jumlah sekolah 11 Negeri jumlah sekolah 330 swasta	11 Negeri 330 swasta	50,000,000	60,000,000		
			Pembinaan, Pengembangan kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF	SKPD			Jumlah peserta 200 Kepala sekolah	200 Kepala sekolah	150,000,000	200,000,000		
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (Dak Non fisik)						-	-		
			Penyelenggaraan paket A, Paket B dan Paket C	SKPD			Jumlah kelompok belajar 115 pokjar	115 pokjar	2,000,000,000	2,100,000,000		
			Pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini	SKPD			jumlah lomba 6 lomba kreatifitas anak	6 lomba kreatifitas anak	300,000,000	340,000,000		
			Bantuan Penyelenggaraan SKB (Dak SKB)						-	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	SKPD			jumlah LKP 13 LKP JUmlah PKBM 12 PKBM JUmlah SPNF 1 SPNF SKB JUmlah KF 24 KF JUmlah KUM 12 KUM JUmlah PKH 5 PKH Jumlah lomba hai 6 Lomba JUmlah kelompok belajar 25 Pokjar	13 LKP 12 PKBM 1 SPNF SKB 24 KF 12 KUM 5 PKH 6 Lomba 25 Pokjar	500,000,00 0	600,000,00 0	
			Pembinaan Kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana PAUD dan PNF	SKPD			Jumlah RKB swasta 10 RKB Jumlah WC murid TK swasta 5 ruang Jumlah bangunan 2 SPNF SKB 1 TKN Kintap 4 TK swasta aula atau speetoot 1 kurau 1 sentra alama pelaihari 3 TKN 2 TK swaasta Jumlah lembaga 36 Lembaga	10 RKB 5 ruang 2 SPNF SKB 1 TKN Kintap 4 TK swasta 1 kurau 1 sentra alama pelaihari 3 TKN 2 TK swaasta 36 Lembaga	4,515,000,00 00	3,500,000,00 00	
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C	SKPD			jumlah peserta Ujian Paket A 165 orang jumlah peserta Ujian Paket B 900 orang jumlah peserta Ujian Paket C 1.150 orang	165 orang 900 orang 1.150 orang	778,800,00 0	934,560,00 0	
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (Dak Non fisik)						-	-	
			Penyediaan biaya operasional pendidikan daerah BOP kesetaraan	SKPD			JUmlah PKBM 11 PKBM 1 SPNF	11 PKBM 1 SPNF	50,000,000	60,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan		Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP; Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD; Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	83 %; 77,58 %; 60 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar	SKPD			Jumlah sekolah 288 sekolah Jumlah peserta sosialisasi dan Pelatihan 1.153 orang JUmlah Penilaian PAK Guru 3.401 Guru	288 sekolah 1.153 orang 3.401 Guru	1,500,000,000	1,500,000,000	
			Pembinaan peningkatan mutu tenaga kebudayaan	SKPD			Jumlah peserta bintek 160	160	200,000,000	200,000,000	
			Pembinaan peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan paud dan pendidikan non formal	SKPD			Jumlah Peserta IGTK 1.800 orang Jumlah peserta seleksi kepala TK, penguatan mutu, pelatihan kopentensi, sosialisasi GTK, peserta PKB 652 orang	1.800 orang 652 orang	777,983,000	500,000,000	
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,52 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar	SKPD			Akreditasi Sekolah/Madrasah 100 sekolah Pembangunan Sarana Air Bersih & Sanitari (WC) 19 unit Pembangunan Gedung Perpustakaan 3 ruang Pembangunan ruang kelas baru 8 Ruang Rehab laboratorium sekolah 4 unit Pembangunan Gedung kantor 24 Unit Pembangunan Ruang Organisasi/UKS 1 Unit Pembangunan Sarana Olahraga 2 Unit Rehabilitasi Sedang/Berat WC Sekolah 16 Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas 20 Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 9 Unit Pembangunan Tempat Ibadah 1 Unit Pengadaan Meubeluer Sekolah 1.580 Set Pembangunan Taman, lapangan dan fasilitas parkir 7 paket Pembangunan pagar sekoah 10 paket Rehab gedung kantor 1 unit Rehab perpustakaan sekolah 5 unit	100 sekolah 19 unit 3 ruang 8 Ruang 4 unit 24 Unit 1 Unit 2 Unit 20 Ruang 9 Unit 1 Unit 1.580 Set 7 paket 10 paket 1 unit 5 unit	24,864,923,370	21,609,356,907	
			Penyelenggaraan ujian nasional pendidikan dasar	SKPD			Jumlah peserta ujian SD 6.000 siswa Jumlah peserta ujian SMP 3.500 siswa	6.000 siswa 3.500 siswa	4,163,959,000	4,300,000,000	
			Pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar	SKPD			Jumlah lomba 14 jenis lomba jumlah kegiatan sosialisasi 1 kegiatan	14 jenis lomba 1 kegiatan	825,000,000	910,000,000	
			Pembinaan, pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar	SKPD			Jumlah Peserta 100 orang jumlah kegiatan SPMI 1 kegiatan	100 orang 1 kegiatan	175,000,000	110,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	SKPD			Jumlah sekolah 49 sekolah	49 sekolah	2,548,750,000	3,118,500,000	
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)	SKPD			jumlah sekolah 237 sekolah	237 sekolah	3,620,705,000	4,344,846,000	
			Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK SD)						-	-	
			Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK SMP)						-	-	
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Persentase Dokumen evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan	100 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Fasilitasi Pendidikan Inklusi	SKPD			Jumlah peserta 100 sekolah	100 sekolah	97,000,000	99,000,000	
			Fasilitasi Desa Sahabat Keluarga	SKPD			Jumlah kecamatan 11 kecamatan	11 kecamatan	100,000,000	200,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan	SKPD			Jumlah laporan 1 laporan	1 laporan	100,000,000	150,000,000		
			Kesehatan									
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Informasi Kesehatan Medik		Persentase peningkatan kepuasan pelanggan pada rumah sakit	0 %						Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengadaan Cetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah jenis percetakan dan surat 90 jenis	90 jenis	282,750,000	-		
			Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah dokumen informasi rumah sakit 1 dokumen	1 dokumen	621,580,000	-		
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah pelayanan gratis pasien kelas III (Jamkesda) 9.120 jiwa	9.120 jiwa	12,000,000,000	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah evaluasi pelayanan kesehatan 36 kali	36 kali	192,850,000	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)		Persentase kepuasan pelanggan pada Rumah Sakit	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah pelatihan/ bimtek bagi karyawan 87 orang	87 orang	310,500,000	-	
			Kegiatan Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah penambahan gedung dan sarannya 2 jenis	2 jenis	5,000,000,000	-	
			Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah pembuatan dokumen audit keperawatan, mutu dan keselamatan pasien di rawat inap dan rawat jalan 2 dokumen	2 dokumen	178,593,850	-	
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan		Persentase penurunan AKI	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			jumlah pengawasan kualitas lingkungan rumah sakit 12 dokumen	12 dokumen	174,710,000	-	
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 161 jenis	161 jenis	1,499,200,000	-	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase pemenuhan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			jumlah dokumen indeks kepuasan pelanggan rumah sakit 1 dokumen	1 dokumen	18,900,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 14.367 orang	14.367 orang	59,278,050,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan		AKI	0 1100.000 Kelahiran Hidup					Dinas Kesehatan
			Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	SKPD			Jumlah Pembinaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19 Puskesmas Jumlah penyediaan media Promosi Kesehatan 22 media Jumlah Rumah Tangga berPHBS 3.000 Rumah tangga Jumlah Desa Siaga Aktif 135 desa Jumlah pembinaan kemitraan dan Koordinasi dengan UKBM (kali) 8 kali Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar 19 Sekolah Dasar	19 Puskesmas 22 media 3.000 Rumah tangga 135 desa 8 kali 19 Sekolah Dasar	550,000,00 0	-	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	SKPD			Jumlah Pengawasan TPM/IRT 1.300 tpm Jumlah Pembinaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 19 Puskesmas Jumlah desa STBM 122 desa Jumlah Desa ODF 41 desa Jumlah dokumen Lingkungan (Pusk. Kintap, T. Pecah, Kurau) 3 dokumen Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan limbah medis 1 dokumen	1.300 tpm 19 Puskesmas 122 desa 41 desa 3 dokumen 1 dokumen	600,000,00 0	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	SKPD			Jumlah Bumil KEK mendapat Makanan Tambahan dan vitamin 950 bumil Jumlah balita gizi kurus (wasting) mendapat Makanan Tambahan dan vitamin 595 balita Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.254 bayi Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 27.104 balita Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin 6.121 bulin Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.065 bumil Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi 19 Puskesmas Jumlah Pembinaan kader pendamping keluarga sadar gizi 19 kader	950 Bumil 595 balita 6.254 bayi 27.104 balita 6.121 bulin 6.065 bumil 19 Puskesmas 19 kader	350,000,000	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Utama	0 %					Dinas Kesehatan
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	SKPD			Jumlah Pembinaan program Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional 19 Puskesmas Jumlah keluarga mendapat pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga 53.510 keluarga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan tradisional 19 Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat 25 kali	19 Puskesmas 53.510 keluarga 19 Puskesmas 25 kali	224,435,174	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	SKPD			Jumlah Pembinaan Kegiatan Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 19 Puskesmas	19 Puskesmas	45,000,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDT PCS 199	SKPD			Jumlah Penanganan Krisis Kesehatan dan Public Service Center (PSC) 119 (termasuk pelayanan on call) 600 kasus Jumlah Pembinaan Kegiatan pelayanan krisis kesehatan dan SPGDT PSC 119 19 Puskesmas	600 kasus 19 Puskesmas	550,000,00 0	-	
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SKPD			Jumlah Pembinaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19 Puskesmas	19 Puskesmas	900,000,00 0	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	SKPD			Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti uji berkompentensi 250 Dokumen	250 Dokumen	460,476,15 0	-	
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	SKPD			Jumlah jenis penyediaan alat kesehatan UPT 5 Jenis Jumlah jenis obat dan perbekalan 5 Jenis Jumlah jenis alat yang dipelihara atau dikalibrasi 19 Jenis	5 Jenis 5 Jenis 19 Jenis	4,000,000,0 00	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SKPD			Jumlah Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana 5 BuahJumlah pemeliharaan sarana dan prasarana 10 BuahJumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11 Jenis	5 Buah10 Buah11 Jenis	7,265,000,000	-	
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Dana KTR)	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah promosi Kesehatan dengan berbagai media 22 macam	22 macam	-	-	
			Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit		Cakupan Desa UCI	0 %					Dinas Kesehatan
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kabupaten			Jumlah pembinaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 19 Puskesmas Jumlah deteksi dini RF PTM (HT, DM, IVA, Sadanis) 13.500 Jumlah pelayanan pada usia 20.455 Jumlah pelayanan orang dengan penyakit DM 23.523 Jumlah pelayanan orang dengan penyakit hipertensi 36.650 Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 477 JUmlah pelayanan kesehatan orang dengan ketergantungan nafza 2.284 Jumlah pelayanan pada usia produktif 218.182	19 Puskesmas 13.500 20.455 23.523 36.650 477 2.284 218.182	273,713,845	-	
			Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular	SKPD			Jumlah pembinaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular 19 Puskesmas	19 Puskesmas	320,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kabupaten			Jumlah desa KLB yang ditanggulangi 15 Kali Jumlah kematian di masyarakat didata 0 Kematian Jumlah desa KLB yang di PE 15 Kali Jumlah desa UCI 129 Desa Jumlah pembinaan kegiatan peningkatan imunisasi, surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 19 Puskesmas	15 Kali 0 Kematian 15 Kali 129 Desa 19 Puskesmas	320,146,155	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	100 Persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Panyipatan			Jumlah peserta JKN 8.018 orang	8.018 orang	695,960,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Panyipatan			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 114 kali	114 kali	136,235,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Panyipatan			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 Persen						Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Panyipatan			Jumlah Peserta JKN 8.461 Orang	8.461 Orang	554,935,500	-		
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Panyipatan			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 4.713 kali	4.713 kali	299,095,000	-		
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %						Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Panyipatan			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-		
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN	0 %						Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Takisung			Jumlah peserta JKN 14.873 orang	14.873 orang	970,018,260	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Takisung			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 2.454 kali	2.454 kali	177,030,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Takisung			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kurau			Jumlah Peserta JKN 4.771 orang	4.771 orang	365,275,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Kurau			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 3.322 kali	3.322 kali	411,865,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung	Kurau			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelayanan								
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Jumlah peserta JKN	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kurau			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 355 kali	355 kali	106,310,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kurau			Jumlah peserta JKN 6.658 orang	6.658 orang	497,000,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kurau			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati
			Pembinaan, Pelayanan	Bati-Bati			Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 10.000 kali	10.000 kali	320,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional						0		
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Bati-Bati			Jumlah Peserta JKN 15.000 orang	15.000 orang	1,769,800,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bati-Bati			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN; Persentase Keluarga Sehat	0 persen; 0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bati-Bati			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.629 kali	2.629 kali	153,930,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Bati-Bati			Jumlah peserta JKN 3.241 orang	3.241 orang	397,000,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bati-Bati			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Tambang Ulang			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 8.256 kali	8.256 kali	246,880,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Tambang Ulang			Jumlah Peserta JKN 7.500 orang	7.500 orang	883,400,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Tambang Ulang			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Pelaihari			Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.530 Kali	1.530 Kali	37,818,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pelaihari			Jumlah Peserta JKN 23.557 Orang	23.557 Orang	2,083,138,123	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Pelaihari, Pelaihari			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Pelaihari			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 676 kali	676 kali	197,716,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pelaihari			Jumlah peserta JKN 2.134 orang	2.134 orang	207,900,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Sungai Riam
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Pelaihari			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Bajuin			Jumlah Peserta JKN 4.594 orang	4.594 orang	388,200,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bajuin			Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.188 kali	2.188 kali	109,000,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	, Pelaihari()			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Keluarga Sehat; Persentase Peserta JKN	0 persen; 0 persen						Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bajuin			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.875 ok	1.875 ok	148,500,000	-		
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Bajuin			Jumlah Peserta JKN 2.479 orang	2.479 orang	311,003,894	-		
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %						Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bajuin			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-		
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan	0 %						Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan	Batu Ampar			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 1.900 kali	1.900 kali	384,397,500	404,250,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tradisional								
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Batu Ampar			Jumlah peserta JKN 13.692 orang	13.692 orang	669,844,935	738,105,169	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Batu Ampar			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Jorong			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 6.949 kali	6.949 kali	364,977,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jorong			Jumlah peserta JKN 6.200 orang	6.200 orang	437,800,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung	Jorong			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelayanan								
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Jorong			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 27.330 kali	27.330 kali	503,205,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jorong			Jumlah Peserta JKN 7.250 orang	7.250 orang	959,695,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Jorong			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Keluarga Sehat; Persentase Peserta JKN	0 persen; 0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan	Kintap			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 15.000 ORANG	15.000 ORANG	1,668,200,000	1,837,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan Kesehatan								
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kintap			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 8.500 KALI	8.500 KALI	320,000,000	352,000,000	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kintap			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kintap			jumlah peserta JKN 5.200 orang	5.200 orang	627,756,800	-	
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Kintap			jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 2.325 kali	2.325 kali	332,950,000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kintap			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Pelaihari			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 0 kali	0 kali	72,546,000	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Pelaihari			Jumlah Peserta JKN 12.991 orang	12.991 orang	809,469,884	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Pelaihari			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Keluarga sehat	25 %					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium	Kabupaten			jumlah pengujian laboratorium kesehatan yg dilaksanakan 1.000 sampel	1.000 sampel	217,100,000	240,350,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kesehatan								
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan	0 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Pembinaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kabupaten			Jumlah pembinaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan 12 bulan	12 bulan	121,070,000	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		persentase peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bumi Makmur			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 1 tahun	1 tahun	105,217,413	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Bumi Makmur			Jumlah peserta JKN 7.708 orang	7.708 orang	446,394,517	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bumi Makmur			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kintap			Jumlah jenis penyediaan alat kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan RS 5 Jenis	5 Jenis	3,000,000,000	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Keluarga Sehat	0 persen					Dinas Kesehatan RSUD Kintap
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kintap			Jumlah bahan logistik yang tersedia 2 Jenis	2 Jenis	1,000,000,000	-	
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Kintap			Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara 5 jenis	5 jenis	208,750,000	-		
			Pekerjaan Umum									
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Peralatan		untuk pencapaian peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat	0 IKM					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum	
			Pengadaan peralatan alat berat dan perlengkapan bengkel alat berat	Kabupaten, SKPD			Pengadaan 3 buah Alat Berat untuk menunjang PAD 3 buah	3 buah	4,800,000,000	-		
			Program Pengembangan Teknologi Konstruksi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium		Persentase Teknologi Konstruksi yang diaplikasikan dalam pembangunan	0 %					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum	
			Identifikasi dan Informasi teknik konstruksi	SKPD			Jumlah data dan informasi inventarisasi bahan dan teknik konstruksi 1 dokumen	1 dokumen	54,810,000	65,772,000		
			Optimalisasi laboratorium pengujian	SKPD			Jumlah penyediaan sumber daya dan peralatan laboratorium pengujian 12 bulan	12 bulan	20,001,600	24,001,920		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Program Keciaptakarya dan Pengaturan Jasa Konstruksi		Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun; Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak; Cakupan penduduk berakses air minum sehat; Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak; Cakupan pembangunan gedung/bangunan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan; Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik; Cakupan penyatuan kantor layanan publik, SKPD Koordinasi dan Kantor Bupati	0 ; 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 Persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pembinaan badan usaha jasa konstruksi	Kabupaten			Jumlah Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi 144 orang	144 orang	119,109,000	-	
			Pendamping Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Kabupaten			Jumlah Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 Kelurahan	1 Kelurahan	179,998,000	-	
			Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten	Kabupaten			Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga 1 dok	1 dok	20,000,000	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Kabupaten			Jumlah sistem jaringan distribusi air minum dan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum 2 jaringan	2 jaringan	7,554,180,000	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Kabupaten			Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air limbah 0 KK Jumlah panjang pembuatan saluran drainase/gorong-gorong dan persentase daerah terlayani sanitasi 4.150 m1	0 KK 4.150 m1	4,150,330,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	Kabupaten			Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman 0 SR	0 SR	-	-	
			Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan/Fasilitas Lainnya	Kabupaten			Jumlah sarana dan prasarana keciptakaryaannya 19 Paket Jumlah sarana dan prasarana keciptakaryaannya 29 dok	19 Paket 29 dok	7,900,132,0 50	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air minum (DAK)	Kabupaten			Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air limbah 0 Jaringan Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air limbah 0 SR	0 Jaringan 0 SR	-	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK)	Kabupaten			Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan akses air minum yang aman 0 SR	0 SR	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A); Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; Terlaksananya Pembangunan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung; Terlaksananya Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung; Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	0 Pertemuan; 0 Dokumen; 0 Paket; 0 Paket; 0 Paket					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Kabupaten			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi 13 Paket	13 Paket	-	-	
			Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung	Kabupaten			Jumlah Rehabilitasi Bangunan Irigasi dan Rawa 5 Buah Jumlah Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa 1 Paket Jumlah Pengawasan Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 16 Dokumen	5 Buah 1 Paket 16 Dokumen	3,096,334,000	-	
			Perencanaan Sumber Daya Air	Kabupaten			Jumlah Dokumen Perencanaan SDA untuk Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainnya tersusun 10 Dokumen	10 Dokumen	1,813,856,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung	Kabupaten			Jumlah pembangunan saluran pembawa dan pembuang 100 Meter Jumlah pelaksanaan normalisasi saluran sungai 2.700 Meter Jumlah pembuatan pintu air dan prasarana pengambilan 7 Buah Jumlah pembuatan/peningkatan jembatan pertanian 3 Buah Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong 600 Meter	100 Meter 2.700 Meter 7 Buah 3 Buah 600 Meter	3,633,760,500	-	
			Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Kabupaten			Jumlah Terlaksana pembinaan rutin P3A 20 Pertemuan Jumlah laporan dokumen rutin pembinaan P3A 1 Dokumen	20 Pertemuan 1 Dokumen	100,000,000	-	
			Program Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Terlaksananya Pembangunan/Rehailitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanah Laut	0 Persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kabupaten			Tercapainya Jumlah Pembangunan Jalan 10.719 m' Tercapainya Jumlah Pembangunan Jembatan 21 unit	10.719 m' 21 unit	15,239,040,800	-	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Kabupaten			Tercapainya Pemeliharaan Jalan 20.964 m'	20.964 m'	20,234,403,900	-	
			Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kabupaten			Tercapainya Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun 10 Dok	10 Dok	1,000,000,000	-	
			Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Kabupaten			Tercapainya Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun 5 Dokumen	5 Dokumen	500,000,000	-	
			Perumahan Rakyat								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun	100 Rumah					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SKPD			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	220,000,000		
			Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SKPD			Jumlah Rumah 100 Rumah Jumlah Ruas Jalan 2 Ruas Jalan	100 Rumah 2 Ruas Jalan	2,850,000,000	3,135,000,000		
			Penataan Ruang									
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang		Persentase tingkat capaian perwujudan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik dan tertib	0 Dokumen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten			Jumlah pelaksanaan GCP dan Data Laporan yang tersusun 1 Dokumen Luas peta citra yang tervalidasi 1.000 Km2	1 Dokumen 1.000 Km2	1,228,110,000	1,100,000,000		
			Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Kabupaten			Jumlah dokumen evaluasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	495,180,000	550,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	Kabupaten			Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Takisung 1 paket dokumen Jumlah berkas validasi KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pelaihari 1 paket berkas validasi KLHS Jumlah dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Takisung 1 paket dokumen Jumlah dokumen kelengkapan legalisasi perda RDTR 1 paket berkas kelengkapan persetujuan substansi	1 paket dokumen 1 paket berkas validasi KLHS 1 paket dokumen 1 paket berkas kelengkapan persetujuan substansi	3,146,132,500	2,420,000,000	
Perencanaan Pembangunan											
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP perangkat daerah (Kategori)	71 Nilai					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	105,736,750	116,310,425	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	27,500,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	27,500,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		IKM	0 Baik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Laporan 8 Laporan	8 Laporan	39,726,000	39,740,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	SKPD			Jumlah Dokumen 1 dok/lap	1 dok/lap	100,000,000	350,000,000	
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dok	2 Dok	500,000,000	218,734,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	105,000,000	110,000,000	
			Perencanaan Pemabangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	86,320,000	86,320,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD								an Daerah
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Jenis 4 lap	4 lap	10,000,000	15,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Jenis 5 Lap	5 Lap	8,000,000	10,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Jensi 5 Lap	5 Lap	12,000,000	15,000,000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Review RPJMD	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	299,999,950	-	
			Penyusunan RKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	699,999,750	800,000,000	
			Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	200,000,000	230,000,000	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	99,999,850	100,000,000	
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Lap	1 Lap	39,923,000	45,000,000	
			Penanggulangan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok			

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kemiskinan Daerah						48,000,000	60,000,000	
			Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dok	2 Dok	190,000,000	45,000,000	
			Program Penelitian dan Pengembangan		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Monitoring dan Evaluasi Hasil Kelitbangan	SKPD			Jumlah Laporan 1 Lap	1 Lap	-	75,000,000	
			Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	SKPD			Jumlah dok 2 Dok	2 Dok	564,645,000	800,000,000	
			Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	560,354,800	350,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	68,35					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah 7 dokumen	7 dokumen	7,000,900	6,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah 4 dokumen	4 dokumen	5,233,000	3,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah 2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	2,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai					Dinas Perhubungan
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Laporan 24 Laporan	24 Laporan	16,875,000	2,500,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 5 dokumen	5 dokumen	4,000,000	4,250,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah laporan 1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,850,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	6,999,850	7,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	6,999,700	7,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	6,999,750	7,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	1 Nilai					Inspektorat Kabupaten
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen Jumlah Laporan 18 Laporan	3 Dokumen 18 Laporan	7,000,000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen Jumlah Laporan 2 Laporan	3 Dokumen 2 Laporan	7,000,000	-	
			Penyusunan perencanaan dan	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	11,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kinerja SKPD								
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	0 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah penyusunan dokumen renja SKPD 2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah penyusunan laporan keuangan SKPD 48 Dokumen	48 Dokumen	6,000,000	6,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah penyusunan laporan kinerja SKPD (Lakip, LKPJ dan LPPD) 3 Dokumen	3 Dokumen	4,000,000	4,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Baik					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah dokumen pelaporan kinerja 4 dokumen	4 dokumen	15,000,000	16,500,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	16,500,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			jumlah dokumen laporan keuangan 4 dokumen	4 dokumen	13,000,000	14,300,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	100 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Perlindungan Anak
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah laporan 2 dokumen	2 dokumen	4,999,700	5,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 3 dokumen	3 dokumen	4,999,700	5,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	7,000,000	7,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	7,000,000	7,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	7,000,000	10,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Persentase nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyusunan laporan keuangan	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar 2 Dokumen	2 Dokumen	13,834,385	-	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen	10 dokumen	10,464,900	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	1 Nilai					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000	7,500,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 75					Sekretariat DPRD
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	48,039,600	49,961,500	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	68,399,800	69,650,000	
			Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan dan Verifikasi	SKPD			Jumlah Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen	35,780,000	36,800,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	0 Nilai					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan 6 Dokumen	6 Dokumen	3,800,000	3,800,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah dokumen laporan kinerja 2 Dokumen	2 Dokumen	500,000	500,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan 2 Dokumen	2 Dokumen	500,000	500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	0						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	12,997,000	-		
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 5 dokumen	5 dokumen	14,997,200	-		
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	13,805,000	-		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0						Dinas Kesehatan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar 2 dokumen	2 dokumen	25,000,000	-		
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar 23 dokumen	23 dokumen	201,710,715	-		
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar 2 dokumen	2 dokumen	35,000,000	-		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	5 Kategori						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen 1 buku	1 buku	200,000,000	250,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Laporan 1 laporan	1 laporan	50,000,000	100,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah laporan 1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	250,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD			Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan 5 Dok	5 Dok	7,000,000	7,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kabupaten, SKPD			Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel 5 Dok Jumlah Aset BMD tercatat 24 Dok	5 Dok 24 Dok	-	-	
			Penyusunan laporan keuangan	Kabupaten, SKPD			Penyusunan laporan keuangan, evaluasi dan pelaporan kinerja 5 Dok	5 Dok	5,750,000	2,500,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	71 NILAI					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	29,999,900	-	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Laporan Triwulan Tersusun 16 Dokumen Jumlah Laporan Semesteran Tersusun 8 Dokumen Jumlah Laporan Akhir Tahun Tersusun 6 Dokumen Jumlah Laporan Bulanan Tersusun 48 Dokumen	16 Dokumen 8 Dokumen 6 Dokumen 48 Dokumen	33,000,000	-	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	29,999,800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD, Pelaihari			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	500,000	-	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD, Pelaihari			Jumlah dokumen 3 dokumen	3 dokumen	2,551,900	-	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD, Pelaihari			Jumlah dokumen 32 dokumen	32 dokumen	5,000,000	-	
			Program Pengembangan Data/Informasi		Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	1 Ada/Tidak Ada					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyusunan profile daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen statistik sektoral daerah 1 dokumen	1 dokumen	32,500,000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		nilai saki	0 nilai					Dinas Sosial
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Luar Daerah, Kabupaten			hasil evaluasi dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan 1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	120,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			jumlah penyusunan laporan keuangan 4 dokumen	4 dokumen	3,000,000	3,350,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			tersedianya dokumen renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD 2 dokumen	2 dokumen	2,745,000	4,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan		Nilai Sakip	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Kinerja SKPD								Perikanan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah orang 7 Dok	7 Dok	7,000,000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 4 Dok	4 Dok	7,000,000	-	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dok	2 Dok	6,997,700	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		nilai sakisip	0 nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			jumlah dokumen dan laporan 3 dokumen dan laporan	3 dokumen dan laporan	6,999,850	7,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah dokumen dan laporan 3 dokumen dan laporan	3 dokumen dan laporan	6,999,850	7,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	6,999,850	7,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	9,722,000	9,722,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	10,579,000	10,579,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	12,780,000	12,780,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai						Badan Pendapatan Daerah
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah laporan pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan 3 Dokumen dan 16 Laporan	3 Dokumen dan 16 Laporan	10,000,000	14,000,000		
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 Dokumen dan 18 Laporan	1 Dokumen dan 18 Laporan	10,000,000	14,000,000		
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	14,000,000		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	1 Nilai						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	64,000,000	67,000,000		
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	4,000,000	6,000,000		
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	4,500,000	6,000,000		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Tingkat Maturitas SPIP	0 Level						Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah materai 800 buah Jumlah belanja transaksi keuangan 100 kali Jumlah buku 9 buah	800 buah 100 kali 9 buah	20,850,000	22,935,000		
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD 6 dokumen	6 dokumen	13,885,000	15,273,500		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD 10 dokumen	10 dokumen	45,800,000	50,380,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Kesesuaian Pagu antara RPJMD dengan RKPD	0 persen					Dinas Pariwisata
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	11,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah dokumen 3 dokumen	3 dokumen	10,000,000	11,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		IKM	0 Nilai					Kurau
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kurau			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	3,500,000	3,500,000	
			Penyusunan laporan keuangan	Kurau			Jumlah Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	3,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kurau			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	3,500,000	3,500,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	1 nilai					Bajuin
			Penyusunan laporan keuangan				jumlah dokumen 7 dok	7 dok	5,000,000	2,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja				jumlah dokumen 6 dok	6 dok	3,000,000	1,500,000	
			Penyusunan perencanaan dan				jumlah dokumen 7 dok	7 dok	3,030,000	1,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kinerja SKPD								
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		IKM	0 Nilai					Jorong
			Penyusunan laporan keuangan	Jorong			Jumlah dokumen 7 dokumen	7 dokumen	2,000,000	-	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jorong			Jumlah dokumen 7 dokumen	7 dokumen	1,500,000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jorong			Jumlah dokumen 6 dokumen	6 dokumen	1,500,000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	0 nilai					Batu Ampar
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Batu Ampar			Jumlah dokumen perencanaan 13 dokumen	13 dokumen	7,000,000	7,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Panyipatan			Jumlah laporan kinerja dan keuangan 12 dok	12 dok	4,500,000	3,500,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Panyipatan			Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 2 dok	2 dok	3,500,000	3,500,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	0 nilai					Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Pelaihari			Jumlah penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja dan dokumen SKPD 7 dokumen	7 dokumen	5,000,000	5,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan laporan kinerja; Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD; Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	0 dokumen; 0 dokumen; 0 dokumen					Tambang Ulang
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tambang Ulang			Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan laporan kinerja 3 dokumen	3 dokumen	1,500,000	2,000,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 4 dokumen	4 dokumen	2,000,000	2,500,000	
			Penyusunan laporan keuangan	Tambang Ulang			Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 12 dokumen	12 dokumen	1,500,000	1,500,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Lakip	0 Nilai					Bati-Bati
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Dokumen 7 Dokumen	7 Dokumen	7,500,000	9,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		NILAI LAKIP; ???	0 NILAI; 0					Bumi Makmur
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Bumi Makmur			jumlah dokumen 2	2	2,200,000	3,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	Bumi Makmur			JUMLAH DOKUMEN 5 DOKUMEN	5 DOKUMEN	1,500,000	1,300,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Bumi Makmur			jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	1,300,000	1,300,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Lakip	1 nilai					Kintap
			Penyusunan laporan keuangan	Kintap			jumlah dokumen 5 dokumen	5 dokumen	5,000,000	-	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kintap			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	2,500,000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kintap			jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	5,000,000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Lakip	3 Nilai					Takisung
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Takisung			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD yang Telah Disusun 4 Dokumen	4 Dokumen	3,270,000	3,850,000	
			Penyusunan laporan keuangan	Takisung			Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 19 Dokumen	19 Dokumen	1,780,000	1,869,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Takisung			Jumlah Dokumen 13 Dokumen	13 Dokumen	2,000,000	2,300,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	1 nilai					Angsau
			Penyusunan laporan keuangan	Angsau			jumlah dokumen penyusun laporan keuangan 4 dokumen	4 dokumen	2,500,000	3,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Angsau			jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 4 dokumen	4 dokumen	2,000,000	2,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Angsau			jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan kinerja skpd 4 dokumen	4 dokumen	2,500,000	3,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	1 NILAI					Karang Taruna
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Karang Taruna			Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	-	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Karang Taruna			Jumlah dokumen penyusunan dan kinerja SKPD 4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	-	
			Penyusunan laporan keuangan	Karang Taruna			Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan 4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	0 Nilai					Pabahanan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Pabahanan			Jumlah Dokumen Penyusun Perencanaan dan Kinerja SKPD 4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000	4,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan	Pabahanan			Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan 4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000	4,000,000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Pabahanan			Jumlah Dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja 4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	4,000,000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	1 nilai					Pelaihari
			Penyusunan laporan keuangan	Pelaihari			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	1,000,000	2,500,000	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Pelaihari			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	2,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Pelaihar i			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	1,000,000	2,000,000		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	0 NILAI					Sarang Halang	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Sarang Halang			Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 2.000.000 4 Dokumen	2.000.000 4 Dokumen	2,000,000	2,000,000		
			Penyusunan laporan keuangan	Sarang Halang			Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan 2.500.000 4 dokumen	2.500.000 4 dokumen	2,500,000	2,500,000		
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Sarang Halang			Jumlah dokumen penyusunan dan kinerja SKPD 2.500.000 4 dokumen	2.500.000 4 dokumen	2,500,000	2,500,000		
			Perhubungan									
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Program pengembangan sektor Perhubungan laut, sungai dan penyeberangan		Jumlah pelabuhan dan Dermaga penyeberangan	0 Buah					Dinas Perhubungan	
			Monitoring dan pengembangan sektor angkutan laut dan kepelabuhanan	Kabupaten			jumlah dokumen 2 Dokumen Jumlah pelabuhan 1 Pelabuhan	2 Dokumen 1 Pelabuhan	202,775,000	227,350,000		
			Pengembangan sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan	SKPD			Jumlah dermaga penyeberangan 1 Dermaga	1 Dermaga	118,855,000	361,000,000		
			Pengelolaan sarana Navigasi dan pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan sungai	SKPD			Jumlah sarana navigasi 16 buah	16 buah	300,000,000	385,500,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program peningkatan layanan angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat		Jumlah Fasilitas Jalan	0 Unit					Dinas Perhubungan
			Kegiatan pengelolaan manajemen, rekayasa lalu lintas dan pengembangan multimoda	SKPD			Jumlah Marka jalan 17.000 m1	17.000 m1	591,449,000	607,000,000	
			Kegiatan peningkatan, operasional dan Pengawasan disiplin lalu lintas angkutan jalan	SKPD			Jumlah uji petik 24 kali	24 kali	604,000,000	623,000,000	
			Kegiatan pengembangan sarana prasarana dan teknologi perhubungan darat	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	627,000,000	716,450,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan		Jumlah Dermaga Penyeberangan	0 buah					Dinas Perhubungan
			Pengelolaan Angkutan Penyeberangan	Kabupaten			Jumlah orang melalui dermaga per tahun 4.000 orang	4.000 orang	384,895,000	149,000,000	
			Pogram peningkatan pelayanan angkutan		Presentase layanan angkutan darat	40,7 %					Dinas Perhubungan
			Peningkatan pengelolaan dan penataan terminal angkutan darat & Perparkiran	SKPD			Jumlah lokasi parkir 40 Lokasi Jumlah terminal 1 Terminal	40 Lokasi 1 Terminal	231,210,000	258,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perhubungan	
			Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan	SKPD			jumlah kendaraan laik jalan 5.400 unit kendaraan	5.400 unit kendaraan	905,776,200	550,000,000		
			Lingkungan Hidup									
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Program Tata Lingkungan		Target IKLH Kab. Tanah Laut	60.208 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Pengendalian Perubahan Iklim	Kabupaten			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	225,000,000	247,500,000		
			Verifikasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan dan/ atau usaha	Kabupaten			Jumlah Izin 15 Izin	15 Izin	130,000,000	143,000,000		
			Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	Kabupaten			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	285,000,000	330,000,000		
			Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Kabupaten			Jumlah Dokumen 20 Dokumen	20 Dokumen	88,181,326	96,999,459		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Tata Kota dan Kebersihan		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (unit RTH); Jumlah timbunan sampah di TPA Bakunci yang dapat di kurangi (Ton)	1 RTH; 3.650 Ton					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penerangan Jalan Umum	Kabupaten, SKPD			Jumlah Kecamatan 11 Kecamatan	11 Kecamatan	10,179,686,090	14,497,654,699	
			Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten, SKPD			Penataan pasar lama pelaihari sebagai publik space 1 Paket Jumlah Taman/ Tugu 6 Taman/Tugu Optimalisasi eks stadion Hasan Basri 1 Paket	1 Paket 6 Taman/Tugu 1 Paket	3,400,000,000	3,400,000,000	
			Kebersihan dan Limbah	Kabupaten			Jumlah Ton 1.106.319 Ton	1.106.319 Ton	10,491,052,073	11,540,157,280	
			Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Pengawasan 10 Perusahaan	10 Perusahaan	200,000,000	220,000,000	
			Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kabupaten			Jumlah Pengaduan 5 Pengaduan	5 Pengaduan	88,089,770	96,898,747	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten			Jumlah Sekolah 10 Sekolah Adiwiyata; Bank Sampah Jumlah Dokumen 20 Dokumen Sekolah Adiwiyata	10 Sekolah Adiwiyata; Bank Sampah 20 Dokumen Sekolah Adiwiyata	250,000,000	275,000,000	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Pemantauan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara	100 %; 50,25 Skor; 81 Skor					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	300,000,000	330,000,000	
			Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	243,000,000	
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	310,000,000	341,000,000	
			Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok		Persentase Rumah Tangga berPHBS	40 %					Dinas Kesehatan
			Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)	Kabupaten			Jumlah rumah tangga berPHBS 2.905	2.905	1,247,570,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)		Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	100 %						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan
			Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Laporan 1 buah Laporan	1 buah Laporan	300,000,000	330,000,000		
			Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Pengujian 15 Kali Pengujian	15 Kali Pengujian	700,000,000	770,000,000		
			Pertanahan									
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Program Administrasi Tata Guna Tanah dan Fasilitas umum		Terlaksananya pelayanan tata guna tanah dan fasilitas umum di wilayah kabupaten tanah laut	0 Dokumen						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Kegiatan Toponomi/Penamaan rupa unsur administrasi pemerintahan	Kabupaten			Jumlah dokumen toponimi 1 Dokumen	1 Dokumen	51,287,500	-		
			Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum	Kabupaten			Jumlah dokumen inventarisasi tanah 5 Dokumen Inventarisasi	5 Dokumen Inventarisasi	59,081,000	-		
			Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik	Kabupaten			Jumlah dokumen penyelesaian konflik 3 Konflik/Sengketa Tanah	3 Konflik/Sengketa Tanah	53,125,600	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pertanahan								
			Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kabupaten			Jumlah dokumen pemanfaatan tanah 5 Dokumen	5 Dokumen	74,954,000	-	
Kependudukan dan Catatan Sipil											
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Pembinaan, pengembangan dan pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan		Cakupan pengelolaan dan pengembangan SIAK; Dokumen profil Kependudukan; Inovasi pelayanan administrasi kependudukan; Kerjasama pemanfaatan data yang ditindak lanjuti	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengembangan kerjasama dan inovasi pelayanan	Kabupaten			Jumlah PKS, Jenis 1 PKS Data	1 PKS Data	25,000,000	129,000,000	
			Pengembangan, pengolahan dan penyajian data kependudukan	Kabupaten			Jumlah 2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	16,000,000	
			Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	SKPD, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bumi Makmur			15 Tower 15 Tower/2 Repeater	15 Tower/2 Repeater	190,000,000	287,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program pendataan dan pelayanan pendaftaran penduduk		Cakupan penerbitan KTP elektronik; Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk; Cakupan pelayanan administrasi migrasi; Cakupan penduduk rentan administrasi kependudukan; Desa sadar administrasi kependudukan	100 %; 1 ; 100 %; 100 %					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah kegiatan 3 kegiatan	3 kegiatan	100	100	
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan pendataan penduduk	Kabupaten			Jumlah 1.500 penduduk rentan, desa binaan	1.500 penduduk rentan, desa binaan	95,538,350	145,000,000	
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan identitas dan pendaftaran penduduk	Kabupaten			Jumlah penerbitan dok kependudukan 240.500 KK, KTP, KIA	240.500 KK, KTP, KIA	242,500,000	374,500,000	
			Program pendataan dan pelayanan pencatatan sipil		Cakupan penerbitan akta kelahiran; Rasio bayi berakta kelahiran; Rasio pasangan berakta nikah	100 %; 0,94 ; 0,09					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan perkawinan dan perceraian	Kabupaten			Jumlah pencatatan perkawinan 35 pasang	35 pasang	20,000,000	35,000,000	
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan pencatatan kelahiran	Kabupaten			Jumlah penerbitan dok pencatatan sipil 16.500 Akta kelahiran	16.500 Akta kelahiran	50,000,000	145,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	SKPD			Jumlah penerbitan dok pencatatan sipil 1.600 Akta kematian	1.600 Akta kematian	10,000,000	87,000,000	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Cakupan pembinaan kelompok PKK	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kabupaten			Jumlah PKK Aktif 147 PKK Aktif	147 PKK Aktif	1,048,800,000	712,800,000	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100 skor					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	SKPD			Bimtek penguatan pemahaman bagi unsur pelaksana KLA 100 orang	100 orang	136,160,000	149,776,194	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup & perlindungan Perempuan dan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81.427.600 skor					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pendampingan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	SKPD			Jumlah kasus yng tertangani/yang melapor 55 kasus	55 kasus	181,740,810	199,914,891	
			Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi perempuan dan Kesejahteraan Gender	SKPD			Jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, organisasi kesetaraan gender 5 kali	5 kali	130,011,000	130,011,081	
			Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	507.463.555 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	SKPD			Jumlah Advokasi pelayanan komunikasi, informasi dan edukatif melalui media 4 media	4 media	144,127,500	158,540,250	
			Pengelolaan Sistem Informasi manajemen Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA	SKPD			Jumlah dokumen rancangan induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek 1 dokumen	1 dokumen	191,372,650	210,510,337	
			Monev dan Pendataan Keluarga	SKPD			Jumlah peserta orientasi pembekalan pendataan keluarga di 11 kecamatan 195 orang	195 orang	94,347,100	164,006,935	
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon	SKPD			Jumlah pelayanan kontrasepsi kepada peserta KB dan Jumlah pembinaan program KB di Kecamatan 617 aks	617 aks	431,424,000	474,566,439	
			Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	SKPD			Jumlah peserta KB yang terlayani alat kontrasepsi 56 orang	56 orang	31,035,350	34,139,160	
			Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	SKPD			Jumlah pelaksanaan lomba UPPKS dan orientasi UPPKS, Jumlah pembinaan program pemberdayaan keluarga di kecamatan 1 kegiatan	1 kegiatan	105,727,850	105,727,895	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	SKPD			Jumlah pelaksanaan lomba PKB, keluarga hebat, PPKBD dan kelompok BKB dan Jumlah pembinaan program ketahanan keluarga di kecamatan 3 kegiatan	3 kegiatan	1,503,197,900	337,066,439		
			Sosial									
	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial		Persentase PMKS Penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	100 persen					Dinas Sosial	
			Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Kabupaten			Persentase warga terdampak bencana alam dan sosial ,orang terlantar dan eks napi yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial 100 persen	100 persen	298,233,000	350,000,000		
			Penunjang Program Keluarga Harapan	Kabupaten			cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat syarat 0 persen	0 persen	315,574,000	400,000,000		
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang menjadi mandiri	100 persen					Dinas Sosial	
			Kegiatan Pembinaan Pendampingan, Bantuan Stimulant dan Penataan Lingkungan	Kabupaten			cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 25 persen	25 persen	725,075,000	930,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Penunjang Program Rutilahu dan Sarling	Kabupaten			JUmlah PMKS penerima bantuan rutilahu dan sarling 330 unit	330 unit	197,521,000	450,000,000	
			Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Kabupaten			ketersediaan basis data terpadu dan data kemiskinan 100 persen	100 persen	512,949,500	650,000,000	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasisosial yang tertangani	65 orang					Dinas Sosial
			Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan	Kabupaten			jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan dan pelatihan 30 anak	30 anak	67,070,000	80,000,000	
			Pembinaan korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Kabupaten			jumlah korban tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mendapat pelayanan 35 anak	35 anak	86,680,000	80,000,000	
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan	134 orang					Dinas Sosial
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	Kabupaten			jumlah penyandang cacat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 130 orang	130 orang	199,145,000	300,000,000	
			Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kabupaten			jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pendidikan dan keterampilan 10 orang	10 orang	114,042,000	100,000,000	
			Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		Jumlah lanjut usia yang mendapat pembinaan dalam panti dan luar panti	252 orang					Dinas Sosial
			Pemenuhan kebutuhan dasar	Kabupaten			jumlah lut yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya 294 orang	294 orang	833,300,00	500,000,00	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lanjut usia terlantar						0	0	
			Pelayanan dan Pembinaan Jompo/Lansia Terlantar diluar Panti	Kabupaten			jumlah jompo/lansia terlantar di luar panti yang mendapat pelayanan dan pembinaan 50 orang	50 orang	51,190,000	150,000,000	
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelayanan sosial	40 orang					Dinas Sosial
			Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten			jumlah tuna sosial dan eks napi yang telah diberikan pendidikan dan keterampilan 60 orang	60 orang	17,661,000	160,000,000	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	3 lembaga					Dinas Sosial
			Kegiatan Pembinaan, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial	Kabupaten			Cakupan peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial 100 persen	100 persen	154,107,000	698,910,000	
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kabupaten			jumlah TKSK,PSM,Penyuluh Sosial dan relawan sosial lainnya yang meningkatkan kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial 155 orang	155 orang	327,041,300	429,000,000	
			Pelestarian Nilai - Nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Luar Daerah, Kabupaten			cakupan kegiatan sarasehan tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan serta taman makam pahlawan dan situs perjuangan 100 persen	100 persen	185,514,800	250,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ketenagakerjaan								
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		presentase peserta latih yang berkompeten	50 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 500 orang	500 orang	480,000,000	500,000,000	
			Peningkatan Produktivitas kerja dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah orang 60 orang	60 orang	84,999,950	100,000,000	
			Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 70 orang jumlah dokumen 1 dokumen	70 orang 1 dokumen	174,999,850	190,000,000	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja		tingkat kesempatan kerja	3 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pelayanan ketenagakerjaan, penyusunan database tenaga kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 2.500 orang jumlah dokumen 12 dokumen	2.500 orang 12 dokumen	149,999,800	180,000,000	
			Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 120 orang	120 orang	149,999,800	170,000,000	
			Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan		cakupan sengketa perusahaan pekerja yang diselesaikan	22,5 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Industrial									
			Fasilitasi dan Pelayanan Kelembagaan serta Penyelesaian Peneitian Hubungan Industrial	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah kasus 9 kasus	9 kasus	130,000,000	89,400,000		
			Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Tenaga Kerja	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 800 orang	800 orang	70,000,000	62,500,000		
			Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 15.500 orang	15.500 orang	40,000,000	32,500,000		
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
			Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi dan UMK		koperasi aktif	90 Unit					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
			Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik)	Kabupaten, SKPD			Jumlah pelatihan 4 Pelatihan	4 Pelatihan	1	-		
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (DAK Non Fisik)	Kabupaten, SKPD			Jumlah pendampingan 10 Bulan 0	10 Bulan 0	1	-		
			Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UKM	Kabupaten, SKPD			Jumlah pelatihan 2 Kali Jumlah sosialisasi 5 Kali	2 Kali 5 Kali	224,278,850	325,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan, Pengawasan dan manajemen pengelolaan koperasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah pelatihan 1 Kali	1 Kali	140,200,000	175,000,000		
			Penanaman Modal									
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis non usaha		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	SKPD			Jumlah rapat koordinasi 10 kali	10 kali	10,000,000	10,000,000		
			penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	SKPD			Jumlah izin 434 izin	434 izin	40,000,000	40,000,000		
				program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis usaha		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	SKPD			Jumlah rapat koordinasi 10 kali	10 kali	10,000,000	10,000,000	
				penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	SKPD			Jumlah Izin 2.626 izin	2.626 izin	40,000,000	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			jasa usaha									
			program pengembangan investasi daerah		Jumlah Realisasi Investasi	845.192.000 Rupiah					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Jumlah Dokumen 5 Kecamatan	5 Kecamatan	40,000,000	85,000,000		
			Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	269,000,000	180,000,000		
			penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	SKPD			Jumlah Kesepakatan 6 buah Jumlah izin dan non perizinan penanaman modal 210 Izin	6 buah 210 Izin	41,000,000	40,000,000		
			Kebudayaan									
	Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Program Pengembangan Pelestarian Adat Dan Kebudayaan Daerah		% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pembinaan pengembangan pelestarian kesenian daerah	SKPD			Jumlah lomba 10 lomba	10 lomba	900,000,000	930,000,000		
			Pembinaan pengembangan pelestarian sejarah dan tradisi budaya daerah	SKPD			Jumlah kegiatan 1 Kegiatan penelitian sejarah tanah laut 1 kegiatan	1 Kegiatan 1 kegiatan	200,000,000	120,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan pengembangan pelestarian cagar budaya daerah	SKPD			jumlah kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	120,000,000		
			Kepemudaan dan Olahraga									
			Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga		jumlah cabang olahraga dan atlet berprestasi	0 jumlah 30 cabang olahraga dan 68 atlet berprestasi					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Prestasi	SKPD			jumlah cabor 30 cabor jumlah atlet 68 atlet	30 cabor 68 atlet	1,800,000,000	1,854,380,000		
			Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan kemitraan Olah Raga	SKPD			jumlah unit 7 unit	7 unit	250,000,000	250,000,000		
			Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Rekreasi	SKPD			jumlah cabor 8 cabor	8 cabor	391,321,500	391,321,500		
			Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan		jumlah organisasi pemuda aktif	0 jumlah 5 OKP dan 5 Wirausaha					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	SKPD			jumlah orang 35 orang	35 orang	1,239,143,300	1,239,143,300		
			Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	SKPD			jumlah okp 5 okp jumlah orang 20 org jenis wirausaha 5 wirausaha	5 okp 20 org 5 wirausaha	647,157,779	747,630,000		
			Pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	SKPD			jumlah unit 1 unit	1 unit	200,000,000	200,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		FALSE	FALSE					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (DAK)	Kabupaten			Pembangunan baru prasarana Gedung Olahraga (GOR) tipe B dan penyediaan sarannya 1 paket	1 paket	-	-	
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	program pencegahan dan Penanggulangan Bencana		Indeks Resiko Bencana	0 kejadian					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pencegahan dan Pengendalian Risiko Bencana	Kabupaten			0 Jumlah bencana 245 kali	0 245 kali	207,129,750	330,000,000	
			Pengendalian dan Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten			Jumlah penanganan bencana 11 kecamatan	11 kecamatan	157,074,650	220,000,000	
			Pebinaan di Wilayah Pasca Bencana	Kabupaten			Jumlah desa 3 Desa	3 Desa	84,355,450	110,000,000	
			Program Pembinaan, Kesiapsiagaan dan kedaruratan Pemadaman Kebakaran		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100 %					Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran
			Deteksi Dini, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran	Kabupaten, SKPD			Jumlah deteksi dini, pencegahan kebakaran yang dilaksanakan 40 Kali Jumlah peralatan pemadam kebakaran yang terbeli 5 Jenis	40 Kali 5 Jenis	190,000,000	210,000,000	
			Tanggap Darurat dan Pengendalian Kebakaran	Kabupaten, SKPD			Jumlah lap. kebakaran pemukiman yang ditangani 39 Laporan	39 Laporan	140,660,000	165,726,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi		Cakupan Fasilitasi Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP(%), Jumlah Lembaga Keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktifitas umat (lembaga), jumlah konflik intern dan antar umat beragama (kasus), jumlah desa peduli toleransi	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM	SKPD			Terlaksananya penerapan peraturan perundang - undangan keormasan dan LSM 2 kegiatan(200 org peserta)	2 kegiatan(200 org peserta)	71,333,700	-	
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan agama	SKPD			Terlaksananya penyuluhan pembinaan dan pengembangan ketahanan agama dan terlaksananya pembinaan desa peduli toleransi 4 kegiatan 360 orang, 4 keg. 120 org	4 kegiatan 360 orang, 4 keg. 120 org	209,110,200	-	
			Penghimpunan data, fakta, keterangan dan informasi tentang ketahanan ekonomi masyarakat	SKPD			Terlaksananya penyuluhan ttg ketahanan ekonomi masyarakat dan tersedianya data, fakta,keterangan dan informasi ttg ketahanan ekonomi masyarakat 3 kali (240 org peserta) dan 3 Dokumen	3 kali (240 org peserta) dan 3 Dokumen	74,986,750	-	
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan seni budaya	SKPD			Jumlah laporan 9 laporan	9 laporan	157,994,200	-	
		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda		Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100 %					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda/Perkada	Kabupaten, SKPD			Jumlah binwaslulh peraturan perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah 185 Kali	185 Kali	90,999,000	104,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyelidikan, penyidikan Perda, pelayanan dan pembinaan PPNS	Kabupaten, SKPD			Jumlah Pelanggaran Perda dan kebijakan kepala daerah yang ditangani 185 Pelanggaran	185 Pelanggaran	130,000,000	154,000,000	
			Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat		Rasio PolPP per 10.000 penduduk	127 Orang					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pembinaan Satlinmas	Kabupaten			Jumlah Orang 60 Orang	60 Orang	66,000,000	293,000,000	
			Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	Kabupaten, SKPD			Jumlah Orang 143 Orang	143 Orang	192,990,000	220,000,000	
			Program pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah 144 Kali	144 Kali	864,129,000	1,135,000,000	
			Pembinaan, Pengendalian dan penindakan Kamtrantibmas	Kabupaten			Jumlah Pengendalian dan Penindakan Kamtrantibmas 73 Kali	73 Kali	286,250,000	352,000,000	
			Program Pembinaan dan Penyuluhan Pendidikan Politik Kabupaten dan Masyarakat		Tingkat Fasilitasi dan Tertib Administrasi Partai Politik (%), Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu & Pemilukada (%) dan Jumlah Desa Sadar Politik	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan	SKPD			Jumlah laporan, Sosialisasi, Rapat dan Dokumen 3 Laporan, 3 kali sosialisasi, 3 kali rapat dan 1 dokumen verifikasi	3 Laporan, 3 kali sosialisasi, 3 kali rapat dan 1 dokumen verifikasi	132,999,950	-	
			Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi politik	SKPD			Jumlah laporan, Sosialisasi dan Dokumen serta meningkatnya kesadaran politik di desa Bajuin 12 Laporan, 12 kali Sosialisasi dan 1 desa	12 Laporan, 12 kali Sosialisasi dan 1 desa	357,000,000	-	
			Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan	SKPD			Terlaksananya Penyuluhan Wawasan Kebangsaan, Penguatan Karakter dan Rakor Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 16 Kegiatan (11 kali penyuluhan, 1 kali penguatan karakter dan 4 kali rakor PPWK)	16 Kegiatan (11 kali penyuluhan, 1 kali penguatan karakter dan 4 kali rakor PPWK)	245,000,000	-	
			Pembinaan dan pengembangan ideologi negara	SKPD			Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pengembangan Ideologi Negara, Pemantapan Bela Negara dan Rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Desa Multi Etnis 15 Keg. (2kl sosialisasi, 1 hr bela negara, 3 kl Apel, 8 kl Rakor dan 1 kl penyuluhan)	15 Keg. (2kl sosialisasi, 1 hr bela negara, 3 kl Apel, 8 kl Rakor dan 1 kl penyuluhan)	170,000,000	-	
			Program pengembangan kewaspadaan nasional		Tercapainya Program Pengembangan Kewaspadaan Nasional	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penanganan/menghimpun, mengarahkan penyelesaian konflik	SKPD			Terlaksananya tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Desa sadar penanganan konflik 1 Tahun, 1 Desa	1 Tahun, 1 Desa	85,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyelenggaraan kewaspadaan dini pemerintah daerah	SKPD			Terlaksananya kegiatan kerjasama dengan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan laut dan pesisir 1 Tahun	1 Tahun	272,999,900	-		
			Pembinaan pengendalian dan pengawasan orang asing dan lembaga	SKPD			Terlaksananya pembinaan pengendalian orang asing dan lembaga asing 1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	-		
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan HUT RI dan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten tanah Laut	2 Kali					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten, SKPD			Pelaksanaan Rapat Persiapan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tala 10 kali	10 kali	217,949,700	230,000,000		
			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	3 Nilai					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 15 Jenis	15 Jenis	365,361,415	385,397,557		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 77 Jenis	77 Jenis	687,522,708	756,274,979		
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Gedung 1 Gedung	1 Gedung	200,000,000	220,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Gedung 1 Gedung	1 Gedung	190,000,000	209,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah Diklat 30 Kali Diklat	30 Kali Diklat	200,000,000	220,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Orang 150 Orang	150 Orang	45,000,000	49,500,000	
			Program Mutasi, Data dan Informasi		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	0 Orang; 0 Orang; 0 Orang					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pembinaan, Penanganan Disiplin, dan Penghargaan ASN	SKPD			Jumlah Dokumen 120 Dokumen Jumlah Orang 40 Orang	120 Dokumen 40 Orang	561,869,000	561,970,710	
			Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN	SKPD			Jumlah Orang 2.000 Orang	2.000 Orang	524,444,000	524,446,000	
			Pembangunan, Pengembangan, dan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	366,499,500	369,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Formasi Aparatur		Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan; Persentase ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal; Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	0 Jam; 0 %; 0 %						Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Orang 327 Orang	327 Orang	3,926,145,700	1,501,000,000		
			Pembinaan, Pengembangan Formasi, dan Pengadaan ASN	SKPD			Jumlah Orang 250 Orang	250 Orang	376,954,300	376,954,300		
			Pembinaan, Penjurangan Karier, dan Fasilitasi Profesi Aparatur	SKPD			Jumlah Orang 63 Orang	63 Orang	540,000,250	540,000,250		
			Kegiatan Assessment	SKPD			Jumlah Orang 44 Orang	44 Orang	339,974,700	339,974,700		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Baik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Gedung 7 Buah Gedung	7 Buah Gedung	21,600,000	21,600,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	46,000,000	20,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	190,125,000	300,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 17 Jenis	17 Jenis	225,000,000	226,741,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Unit 1 Unit	1 Unit	137,955,200	225,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah Orang 50 orang	50 orang	150,000,000	200,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Baju 50 lembar	50 lembar	30,000,000	35,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	78,28					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 5 jenis	5 jenis	235,401,392	111,500,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 9 jenis	9 jenis	181,367,000	240,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah buah 1 paket	1 paket	91,000,000	250,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dan perlengkapannya 26 stell	26 stell	30,804,000	26,500,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perhubungan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah sarana prasarana 6 unit	6 unit	103,014,230	102,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah pemeliharaan sarpras 60 unit	60 unit	288,980,000	86,450,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			jumlah rehab gedung 1 unit	1 unit	23,310,000	25,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			jumlah ASN Diklat 10 orang	10 orang	78,000,000	70,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			jumlah personel Dishub 67 orang	67 orang	74,120,000	58,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 10 Jenis	10 Jenis	420,876,000	200,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah unit 4 Unit	4 Unit	300,000,000	330,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah orang 200 Orang	200 Orang	150,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 Nilai					Inspektorat Kabupaten
			Peningkatan kemampuan teknis aparat pengawasan	SKPD			Jumlah orang 25 orang	25 orang	400,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah item 20 item	20 item	271,250,000	-	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah unit 1 unit	1 unit	150,000,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah orang 50 orang	50 orang	27,000,000	-	
			Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (GG)		Nilai Sakip	1 Nilai					Inspektorat Kabupaten
			Evaluasi Reformasi Birokrasi	SKPD			Nilai 65 baik	65 baik	175,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan Pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (Zi-WBK)	SKPD			Jumlah SKPD 7 SKPD	7 SKPD	149,422,800	-	
			Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)	SKPD			Nilai SPIP 3,1 SPIP	3,1 SPIP	75,000,000	-	
			Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP)	SKPD			% SKPD dengan minimal SAKIP 85 %	85%	65,000,000	-	
			Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	SKPD			Jumlah laporan 10 laporan	10 laporan	499,996,000	-	
			Saber Pungli	SKPD			Jumlah laporan 10 Laporan	10 Laporan	462,931,500	-	
			Evaluasi Kapabilitas APIP	SKPD			Level 3 %	3%	12,000,000	-	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Nilai Sakip	1 Nilai					Inspektorat Kabupaten
			Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	SKPD			Jumlah laporan 120 Laporan	120 Laporan	931,000,000	-	
			Inventarisasi temuan pengawasan	SKPD			Jumlah laporan 5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	-	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	SKPD			Jumlah laporan 12 Laporan	12 Laporan	249,871,500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	SKPD			Jumlah laporan 1 Laporan	1 Laporan	42,475,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis kendaraan roda 4 yang dipelihara 2 buah Jumlah jenis kendaraan roda 2 yang dipelihara 9 buah Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 3 Jenis Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara 16 Jenis	2 buah 9 buah 3 Jenis 16 Jenis	120,000,00 0	177,000,00 0	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah orang yang mengikuti bintek 3 orang	3 orang	15,000,000	25,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah perlengkapan Pakaian Dinas 23 set	23 set	13,800,000	-	
			Program peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan/revisi standar operasional prosedur	SKPD			jumlah penyusunan dokumen SOP perizinan dan non perizinan 1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	
			Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan	SKPD			Jumlah data pelaporan perizinan dan non perizinan 1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perijinan dan non perijinan								
			Penyebarluasan informasi pelayanan publik	SKPD			Jumlah jenis media penyebarluasan informasi 4 Jenis	4 Jenis	89,000,000	90,000,000	
			Survey kepuasan masyarakat	SKPD			Jumlah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	17,500,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Jumlah Unit	1					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah unit 2 Paket	2 Paket	35,000,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pembelian Pangkat pakaian Dinas 15 orang	15 orang	9,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	0 Baik					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 13 Jenis	13 Jenis	812,790,000	341,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 6 Jenis	6 Jenis	150,000,000	165,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Jenis	2 Jenis	100,000,000	50,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek 40 Aparatur	40 Aparatur	320,000,000	330,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah PSH 38 Stel	38 Stel	22,800,000	35,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana perkantoran 11 unit	11 unit	20,858,500	55,620,616	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah saranan dan prasarana perkantoran yang terpelihara 12 unit	12 unit	94,175,000	88,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung kantor sedang/berat yang direhabilitasi 1 unit	1 unit	25,000,000	100,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas beserta perlelengkapannya yang dibeli 29 stel	29 stel	15,000,000	16,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 2 jenis	2 jenis	99,045,000	50,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah orang 50 orang	50 orang	30,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase kepuasan pelanggan pada rumah sakit	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran 9 jenis	9 jenis	998,400,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 2 jenis	2 jenis	977,400,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten, Pelaihari, Angsau			Jumlah jenis pengadaan tanda pangkat dan jabatan 35 Buah	35 Buah	21,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Nilai					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis (Kendaraan) 1 Unit Jumlah Jenis (Peralatan Kantor) 4 Item	1 Unit 4 Item	319,900,000	25,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten, SKPD			Jumlah Jenis (Gedung) 3 Bangunan Jumlah Jenis (Kendaraan) 27 Unit	3 Bangunan 27 Unit	595,100,000	650,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kabupaten, Luar Daerah			Jumlah Peserta 2 Orang	2 Orang	10,529,080	21,500,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Orang 188 Paket	188 Paket	285,000,000	-	
			Program Pengelolaan Informasi, Humas, Keprotokolan dan Perlengkapan DPRD		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0 75					Sekretariat DPRD
			Pelayanan Informasi, Kehumasan dan Publikasi kegiatan DPRD	SKPD			Jumlah Event 2 Event	2 Event	378,080,300	393,205,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 75					Sekretariat DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Unit 0 Unit	0 Unit	-	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 4 Jenis	4 Jenis	823,000,000	867,360,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Unit 4 Unit	4 Unit	320,000,000	332,800,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah Orang 15 Orang	15 Orang	170,800,000	109,002,400	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Orang 105 Orang	105 Orang	586,500,000	650,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0.75					Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Rapat-Rapat Kegiatan DPRD	SKPD			Jumlah Rapat 255 Rapat	255 Rapat	892,622,450	928,327,000	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	SKPD			Jumlah Raperda 20 Raperda	20 Raperda	4,398,759,900	4,574,710,000	
			Kegiatan Reses dan Penyusunan Pokir	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	808,962,550	841,325,000	
			Pelaksanaan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	SKPD			Jumlah Dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen	166,772,000	173,445,000	
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	SKPD			Jumlah SPPD 300 SPPD	300 SPPD	175,840,000	182,875,000	
			Peningkatan kapasitas pimpinan	SKPD			Jumlah SPPD 1.313 SPPD	1.313 SPPD	19,515,502,	22,068,262,	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan anggota DPRD						000	000	
			Fasilitas Bimbingan Teknis DPRD	SKPD			Jumlah Orang 280 Orang	280 Orang	4,196,106,000	4,363,950,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 10 Jenis	10 Jenis	185,075,000	206,260,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 8 Jenis	8 Jenis	182,765,000	220,070,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Buah	1 Buah	41,825,000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek 4 Kali	4 Kali	36,000,000	37,800,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah stel pakaian dinas 22 Stel	22 Stel	13,200,000	8,800,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 15 unit	15 unit	95,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah orang 3 orang	3 orang	15,000,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pakaian Dinas Harian bagi PNS yang di adakan 34 set	34 set	20,400,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (Kendaraan operasional, peralatan gedung kantor) 48 jenis	48 jenis	300,000,000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian 863 berkas	863 berkas	85,050,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten, SKPD			Jumlah kelengkapan pakaian dinas 600 buah	600 buah	240,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Panyipatan			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 10 jenis	10 jenis	174,600,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Panyipatan			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 22 jenis	22 jenis	57,500,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Jenis					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Panyipatan			Jumlah Jenis pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran 5 Jenis	5 Jenis	110,215,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Panyipatan			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 25 Jenis	25 Jenis	36,096,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Takisung			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 3 jenis	3 jenis	24,229,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Takisung			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 4 jenis	4 jenis	12,131,800	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kurau			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 7 jenis	7 jenis	21,990,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kurau			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 10 jenis	10 jenis	37,330,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentasi pemenuhan peningkatan sarana /prasarana kerja dan kualitas sumber daya	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kurau			jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 7 jenis	7 jenis	54,408,000	60,068,400	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kurau			jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 17 jenis	17 jenis	38,635,000	40,566,750	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati Bati
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bati-Bati			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 10 jenis	10 jenis	75,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bati-Bati			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 12 jenis	12 jenis	12,500,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait Kait

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bati-Bati			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 7 jenis	7 jenis	5,900,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tambang Ulang			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 4 jenis	4 jenis	76,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tambang Ulang			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 4 jenis	4 jenis	65,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 4 Jenis	4 Jenis	50,740,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 4 Jenis	4 Jenis	12,650,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Puskesmas yang mengadakan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5 Jenis	5 Jenis	27,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 22 Jenis	22 Jenis	45,680,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bajuin			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 5 jenis	5 jenis	10,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bajuin			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 7 jenis	7 jenis	37,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bajuin			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 15 jenis	15 jenis	3,486,450	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bajuin			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 25 jenis	25 jenis	63,833,550	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase pemenuhan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Batu Ampar			Jumlah puskesmas yang mengadakan sarana dan prasarana perkantoran 6 paket	6 paket	56,050,000	59,640,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Batu Ampar			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 8 jenis	8 jenis	45,182,000	47,442,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong			Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran 6 Paket	6 Paket	29,200,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong			Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Jenis	3 Jenis	54,207,500	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 19 jenis	19 jenis	27,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 19 jenis	19 jenis	26,250,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 5 JENIS	5 JENIS	48,200,000	55,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantora 2 JENIS	2 JENIS	51,500,000	56,650,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 5 jenis	5 jenis	18,976,200	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 6 jenis	6 jenis	49,590,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 19 jenis	19 jenis	10,200,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 17 jenis	17 jenis	6,200,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kesehatan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten			Jumlah Pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (Kendaraan operasional, peralatan/perengkapan gedung kantor) 5 jenis	5 jenis	6,795,000	7,474,500	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Pemenuhan Peningkatan Sarana /prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya manusia	0 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD, Pelaihari, Angsau			Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran 3 unit	3 unit	29,240,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah gedung 2 gedung jumlah mebeluer 40 buah jumlah roda 4 1 buah	2 gedung 40 buah 1 buah	550,000,00 0	141,800,00 0	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah gedung dicat 4 gedung	4 gedung	200,000,00 0	-	
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD			jumlah ruang terbangun 1 WC Jumlah ruang terbangun 1 gedung arsip Jumlah ruang terbangun 1 POS satpam	1 WC 1 gedung arsip 1 POS satpam	300,000,00 0	400,000,00 0	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah Peserta Pelatihan 60 orang	60 orang	300,000,00 0	400,000,00 0	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD			Jumlah kelengkapan komputer terbeli 4 Jenis/Buah Jumlah Spanduk/dekorasi/baliho terbeli 3 Jenis/Buah Jumlah alat kantor 4 Jenis/Buah Jumlah Alat rumah tangga 6 Jenis/Buah Jumlah penyediaan Komputer 4 Jenis/Buah Jumlah Personal Komputer 2 Jenis/Buah Jumlah Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3 Jenis/Buah	4 Jenis/Buah 3 Jenis/Buah 4 Jenis/Buah 6 Jenis/Buah 4 Jenis/Buah 2 Jenis/Buah 3 Jenis/Buah	199,850,00 0	250,000,00 0	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten, SKPD			Jumlah bahan baku pemeliharaan gedung kantor yang dibeli 8 Jenis/Buah/Unit Jumlah upah tukang yang dibayar 98 OH Jumlah mobil dinas/opreasional yang dirawat 6 Jenis/Buah/Unit Jumlah peralatan dan mesin yang dirawat 6 Jenis/Buah/Unit	8 Jenis/Buah/Unit 98 OH 6 Jenis/Buah/Unit 6 Jenis/Buah/Unit	117,785,00 0	105,000,00 0	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten, SKPD			Jumlah Sekat Ruangan terbangun 4 Buah Jumlah Kanopi terbangun 1 Paket Jumlah terbangun teras/kanopi 1 Paket	4 Buah 1 Paket 1 Paket	191,840,000	-	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten, SKPD			Jumlah rehab ruang pertemuan dan gedung kantor 2 (Paket/Tahun) Jumlah rehab gedung kantor Puskesmas Panyipatan 3 (Paket/Tahun) Jumlah rehabilitasi jaringan listrik RPPH 1 (Paket/Tahun)	2 (Paket/Tahun) 3 (Paket/Tahun) 1 (Paket/Tahun)	207,677,000	150,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah ASN 6 (Orang)	6 (Orang)	24,000,000	12,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten, SKPD			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 74 Steel/orang Jumlah Pengadaan Kelengkapan Pakaian Dinas 47 Orang	74 Steel/orang 47 Orang	65,700,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai; 0 Nilai					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksana 12 Bulan	12 Bulan	340,686,600	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah kontribusi kepesertaan/bimbingan teknis sosialisasi peraturan perundang-undangan tersedia 12 bulan	12 bulan	57,000,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedia 110 orang/ stel pakaian dinas	110 orang/ stel pakaian dinas	139,150,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Fasilitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum		Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah/ lainnya/ bantuan hukum dan HAM, publikasi produk hukum daerah	100 %						Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			Fasilitas Produk Hukum Daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah Dokumen 562 Dokumen	562 Dokumen	252,330,000	277,563,000		
			Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Fasilitas Bantuan Hukum 4 Fasilitas Penanganan	4 Fasilitas Penanganan	359,559,000	395,514,900		
			Fasilitas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kabupaten, SKPD			Jumlah Dokumen 450 Dokumen	450 Dokumen	439,339,600	483,273,560		
			Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitas Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan		Nilai IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	0 Baik						Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Pengembangan hubungan masyarakat	Kabupaten			Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti 5 Aduan	5 Aduan	321,817,600	337,908,480		
			Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	Kabupaten			Jumlah terlaksananya kegiatan pameran pembangunan 9 Kali	9 Kali	125,000,000	131,250,000		
			Fasilitas dan pelayanan protokoler pemerintah daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Cakupan kegiatan keprotokolan KDH/ WKDH/ Kepala SKPD/ Tamu Daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran 100 %	100%	380,072,400	399,076,020		
			Program Kerjasama Informasi dan Mass Media		Media Informasi	0 4 Media						Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dan Protokol
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten			Jumlah pemberitaan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang terekspos ke media 2.160 Berita	2.160 Berita	2,603,640,000	2,733,822,000	
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat		Nilai IKM	0 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Sosial dan Kebudayaan	Kabupaten, SKPD			Jumlah Organisasi 50 Organisasi	50 Organisasi	250,000,000	275,000,000	
			Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Kabupaten, SKPD			3.090 Orang	3.090 Orang	18,535,600,000	20,128,000,000	
			Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan agama	Kabupaten, SKPD			7 Event	7 Event	3,782,000,000	3,950,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Peningkatan kualitas aparatur dan pemeliharaan sarpras kantor	0 persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Pemeliharaan 3 unit mobil dinas 3 unit Pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas 1 unit Pemeliharaan 15 unit alat berat 15 unit	3 unit 1 unit 15 unit	317,979,000	349,776,900	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten, SKPD			Peningkatan Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran, rehab gedung 1 Buah	1 Buah	50,000,000	100,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kabupaten, SKPD			Terlaksananya Diklat Teknis Alat Berat 22 OK	22 OK	181,592,000	181,592,000	
			Program Fasilitas Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH		IKM	1 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Penyediaan pelengkapan dan jasa bagi KDH/WKDH	Kabupaten			Jenis 6 Jenis	6 Jenis	75,000,000	150,000,000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi KDH/WKDH	Kabupaten			Jumlah SPPD 100 %	100%	2,798,000,000	3,180,292,000	
			Penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan	Kabupaten			Jumlah Orang 26.020 ok	26.020 ok	1,137,680,000	1,320,000,000	
			Pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Kabupaten			Jumlah Orang 2 ok	2 ok	200,000,000	280,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah	Kabupaten			Jumlah Gedung 2 Buah	2 Buah	383,645,000	660,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jabatan/Dinas						0	0	
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten			Jumlah Orang 70.102 ok	70.102 ok	2,076,898,000	2,287,089,262	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Kabupaten			Jumlah Gedung 2 Buah	2 Buah	444,720,000	275,000,000	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kabupaten			Jumlah Gedung 2 Buah	2 Buah	539,800,000	500,000,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten			Jenis 9 Jenis	9 Jenis	426,930,000	2,700,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten			Jenis 5 Jenis	5 Jenis	3,527,958,140	2,900,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten			Jumlah Gedung 1 Gedung	1 Gedung	500,000,000	330,000,000	
			Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan		Peningkatan Nilai LPPD	3,06 Persentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Kabupaten			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	118,421,700	143,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	Kabupaten, SKPD			Jumlah Rapat 50 kali	50 kali	171,095,000	200,000,000	
			Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Kabupaten, Luar Daerah			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	877,355,500	1,200,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 pelaporan					Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Saranan dan Prasarana 5 Jenis	5 Jenis	12,000,000	13,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stell Pakaian Dinas lapangan beserta perlengkapannya 10 Stell	10 Stell	3,000,000	-	
			Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan		INDEKS NILAI REFORMASI BIROKRASI`	1 NILAI REFORMASI BIROKRASI					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen	130,000,000	150,000,000	
			Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	SKPD			Jumlah Dokumen 30 Dokumen	30 Dokumen	275,000,000	305,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	SKPD			Jumlah Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen	75,000,000	100,000,000	
			Pembuatan ID Card Pegawai	SKPD			Jumlah ID Card 4.500 Buah	4.500 Buah	130,000,000	50,000,000	
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	170,000,000	190,000,000	
			Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	155,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 4 jenis	4 jenis	18,500,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 3 jenis	3 jenis	18,204,480	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratoriu

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											m Dinas Pekerjaan Umum
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan	12 bulan	26,400,000	31,680,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor laboratorium 250 m2	250 m2	120,000,000	144,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah bimbingan teknis tenaga laboratorium pengujian ke PU 8 orang	8 orang	50,760,000	60,912,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Jenis	1 Jenis	200,000,000	250,800,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis Sarpras 40 Jenis	40 Jenis	70,000,000	80,000,000	
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Unit Gedung 1 Unit	1 Unit	500,000,000	500,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Unit Gedung 1 Unit	1 Unit	100,000,000	150,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stell 22 Stell	22 Stell	8,800,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten			Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana 8 jenis	8 jenis	158,430,495	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 40 unit	40 unit	86,792,911	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah kepesertaan 10 orang	10 orang	50,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	0 nilai					Dinas Sosial
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah jenis 3 jenis	3 jenis	27,000,000	17,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah jenis 3 jenis	3 jenis	151,120,000	36,500,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			jumlah unit 1 unit	1 unit	-	7,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Luar Daerah, SKPD			jumlah ASN 3 ASN	3 ASN	9,000,000	14,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			jumlah stel 40 stel	40 stel	15,000,000	20,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	50,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 5 Jenis	5 Jenis	61,000,000	-	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah unit yang di pelihara 2 Unit	2 Unit	-	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Orang 37 Orang	37 Orang	49,950,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		indeks kepuasan masyarakat	0 huruf					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran 5 jenis	5 jenis	393,500,772	650,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah jenis sarana dan prasarana kantor 16 jenis	16 jenis	114,000,000	270,000,000	
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD			jumlah gedung kantor 1 gedung	1 gedung	332,000,00	750,000,00	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			jumlah gedung kantor 1 gedung	1 gedung	78,000,000	250,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah orang 16 orang	16 orang	80,000,000	40,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			jumlah stel 65 stel pakaian	65 stel pakaian	65,400,000	70,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	SKPD			jumlah unit 1 unit	1 unit	40,000,000	40,000,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah jenis 3 jenis	3 jenis	353,310,000	150,000,000	
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD			jumlah unit 2 unit	2 unit	-	100,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			jumlah unit 2 unit	2 unit	-	100,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			jumlah orang 30 orang	30 orang	255,923,200	300,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			jumlah stel 30 stel	30 stel	12,000,000	21,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB		Pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	0 %						Badan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten			Jumlah pelaporan hasil rekonsiliasi penerimaan dari BPHTB 4 Dokumen Jumlah penerimaan penagihan PBB-P2 4.250.000.000 Rupiah Jumlah penerimaan penagihan BPHTB 3.650.000.000 Rupiah	4 Dokumen 4.250.000.000 Rupiah 3.650.000.000 Rupiah	330,300,000 0	380,400,000 0		
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten, SKPD			Jumlah perhitungan BPHTB 600 SSPD Jumlah perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB 140.000 SPPT	600 SSPD 140.000 SPPT	820,000,000 0	970,000,000 0		
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, pendaftaran dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten, SKPD			Jumlah pemutakhiran data PBB-P2 dan BPHTB 19.500 WP	19.500 WP	750,000,000 0	850,000,000 0		
			program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan lain-lain; Persentasi pertumbuhan retribusi daerah	0 %; 0 %						Badan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain, dan perencanaan pendapatan daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah 2 Dokumen Jumlah penerimaan pendapatan lain-lain, dari Instansi terkait 1.388.000.000.000 Rupiah	2 Dokumen 1.388.000.000.000 0 Rupiah	85,000,000	102,250,000 0		
			Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Kabupaten			Jumlah penerimaan dari retribusi daerah 6.968.105.000 Rupiah	6.968.105.000 Rupiah	211,410,000 0	231,200,000 0		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan administrasi dan pembinaan penatausahaan pendapatan daerah	SKPD			Jumlah pelaporan administrasi pendapatan daerah 6 Dokumen	6 Dokumen	100,000,000	120,000,000	
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah		Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	0 %					Badan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan pajak daerah	Kabupaten			Jumlah penerimaan penagihan pajak daerah 21.260.000.000 Rupiah	21.260.000.000 Rupiah	300,000,000	325,000,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, pendaftaran dan keberatan pajak daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah termutakhirnya data pajak daerah 9 Jenis	9 Jenis	248,790,000	314,740,000	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah perhitungan dan penetapan pajak daerah 3.200 Ketetapan	3.200 Ketetapan	90,000,000	100,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah
			Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara 4 Unit	4 Unit	57,000,000	58,750,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 10 Unit	10 Unit	147,440,000	137,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah ASN yang mengikuti bimtek Per Undang-Undang 22 Orang	22 Orang	115,500,000	126,500,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 45 Stell Jumlah atribut PNS 31 Set	45 Stell 31 Set	41,100,000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	SKPD			Jumlah dokumen 15 Dokumen	15 Dokumen	499,070,000	500,000,000	
			Peningkatan administrasi Pembiayaan Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	515,000,000	515,000,000	
			Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen	188,300,000	201,000,000	
			Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan asset daerah	SKPD			Jumlah dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	132,310,000	161,500,000	
			penyusunan tabulasi data asset tetap	SKPD			Jumlah dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen	465,400,000	488,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah
			perencanaan dan pengadaan asset daerah	SKPD			Jumlah dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	177,607,000	240,000,000	
			Pengelolaan pemanfaatan asset daerah	SKPD			Jumlah dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	288,038,000	301,500,000	
			peningkatan manajemen asset/barang daerah	SKPD			Jumlah dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	1,204,605,000	850,000,000	
			program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	24,600,000	25,800,000	
			pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	238,150,000	250,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD			Jumlah dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen	218,640,000	229,500,000	
			pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	SKPD			Jumlah dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	195,300,000	205,000,000	
			pengelolaan akuntansi belanja dan beban	SKPD			Jumlah dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	248,400,000	266,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 Nilai					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 36 Jenis	36 Jenis	200,000,000	210,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 8 Jenis	8 Jenis	200,000,000	210,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Unit 1 Unit	1 Unit	92,930,000	540,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah ASN 5 ASN	5 ASN	25,000,000	75,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stel 50 Stel	50 Stel	56,250,000	25,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	20 %						Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan
			Pembinaan, fasilitasi dan pengembangan potensi perekonomian daerah	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD, Batu Ampar, Tambang Ulang, Bati-Bati, Takisung, Pelaihari, Panyipatan, Bajuin, Kurau, Kintap, Jorong, Bumi Makmur			Jumlah Dokumen 2 Dokumen Promosi Produk Unggulan Daerah yang di Fasilitasi 4 Event/Expo	2 Dokumen 4 Event/Expo	244,896,200	269,385,820		
			Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah BUMD yang dikembangkan 2 Buah Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Buah 2 Dokumen	262,191,600	288,410,760		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan perekonomian pembangunan	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Bajuin, Takisung, Bati-Bati, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Pabahanan, Pelaihari, Angsau, Sarang Halang, Karang Taruna			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	271,572,200	298,729,420	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Jumlah ASN	0 Orang					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Peningkatan Kemampuan Teknis	Luar Daerah,			Jumlah belanja kepesertaan 1 tahun	1 tahun	75,000,000	82,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Aparatur	SKPD							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pakaian Dinas 255 stel	255 stel	213,350,000	145,035,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Pelaporan					Dinas Pariwisata
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah sarana dan prasarana perkantoran 9 jenis	9 jenis	50,000,000	72,500,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Sarana Prasarana yang terpelihara 6 Sarpras	6 Sarpras	95,000,000	95,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/diklat 6 orang	6 orang	30,000,000	30,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stel pakaian Dinas beserta perlengkapan 25 stel	25 stel	25,000,000	27,500,000	
			Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa		Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %					Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Pembinaan, Pengelolaan dan layanan pengadaan secara elektronik	Kabupaten, SKPD			Jumlah fasilitas layanan LPSE 150 Paket	150 Paket	265,000,000	265,000,000	
			Pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Kabupaten, SKPD			Jumlah Paket Tender 150 Paket	150 Paket	506,093,500	506,093,500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan kompetensi dan evaluasi pelaporan	Kabupaten, SKPD			Jumlah orang 25 Orang	25 Orang	493,185,000	493,185,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 4 jenis	4 jenis	1,000,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 4 Jenis	4 Jenis	440,680,020	-	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Kurau
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kurau			Jumlah Orang 93 orang	93 orang	10,000,000	10,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kurau			Jumlah Orang 36 Orang	36 Orang	36,250,000	40,000,000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 Nilai					Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Kurau			Jumlah Dokumen 11 Dokumen	11 Dokumen	16,583,200	16,583,200	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kurau			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	10,290,060	10,290,060	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Kurau
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Jumlah Unit 10 Unit	10 Unit	103,390,240	121,982,480	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur				Jumlah Orang 10 Orang	10 Orang	10,000,000	10,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah orang 25 Orang	25 Orang	7,500,000	7,500,000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Kurau			Jumlah Orang 409 Orang	409 Orang	300,000,000	300,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di	Kurau			Jumlah Orang 30 Orang	30 Orang	3,000,000	3,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kecamatan								
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Kurau			Jumlah Orang 526 Orang	526 Orang	38,233,500	38,233,500	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Kurau			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	5,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	3 nilai					Bajuin
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bajuin			jumlah jenis 2	2	17,100,000	17,100,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				jumlah jenis 8 unit	8 unit	198,910,000	50,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				jumlah orang 22 orang	22 orang	15,000,000	-	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		ikm	3 nilai					Bajuin

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bajuin			jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	25,000,000	25,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	22,730,000	27,500,000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 nilai					Bajuin
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Bajuin			jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	40,000,000	45,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Bajuin			jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	9,430,000	14,890,000	
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga				jumlah peserta 50 orang	50 orang	92,370,000	255,000,000	
			Pembinaan organisasi perempuan	Bajuin			jumlah pembinaan 9 desa	9 desa	9,500,000	13,000,000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		ikm	3 nilai					Bajuin
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	16,290,000	21,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		ikm	3 nilai					Bajuin
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Bajuin			jumlah dokumen 1 dok	1 dok	6,140,000	15,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Jorong
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong			Jumlah jenis 8 unit	8 unit	40,100,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jorong			Jumlah orang 22 stel	22 stel	9,900,000	-	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 Nilai					Jorong
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	20,000,000	-	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Jorong
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	25,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	25,000,000	-	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong
			Pembinaan organisasi perempuan	Jorong			Jumlah pembinaan 11 desa	11 desa	9,500,000	-	
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Jorong			Jumlah peserta 50 orang	50 orang	1,140,000,000	-	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	9,430,000	-	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	40,000,000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Jorong			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	7,000,000	-	
			Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	8,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Fasilitas dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 3						Batu Ampar
			Peningkatan Silaturahmi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)	Batu Ampar			jumlah kegiatan safari ramadhan 1 kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	40,000,000		
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Batu Ampar			Jumlah kegiatan STQ/MTQ, senam dan jalan sehat 3 kegiatan	3 kegiatan	130,000,000	145,000,000		
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Batu Ampar			Jumlah kegiatan sosial keagamaan 2 kegiatan	2 kegiatan	20,000,000	25,000,000		
			Program Koordinasi dan fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai						Batu Ampar
			Pembinaan dan pelatihan/sosialisasi Administrasi Desa	Batu Ampar			Jumlah kegiatan sosialisasi 1 kegiatan	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000		
			pendidikan dan pelatihan kepemudaan	Batu Ampar			Jumlah pelatihan paskibra 10 latihan	10 latihan	82,000,000	82,000,000		
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 nilai						Batu Ampar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Batu Ampar			jumlah desa yang dibina 14 desa	14 desa	26,250,000	26,250,000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Batu Ampar			Jumlah kegiatan Musrenbang 1 kegiatan	1 kegiatan	7,719,850	7,719,850	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Batu Ampar
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Batu Ampar			jumlah pengadaan 3 jenis	3 jenis	38,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Batu Ampar			jumlah pemeliharaan 45 unit	45 unit	86,400,000	95,000,000	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Batu Ampar			jumlah ukuran rehab gedung kantor 35 m2	35 m2	12,250,000	10,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Batu Ampar			jumlah jenis pengadaan 24 pasang/stell	24 pasang/stell	8,400,000	8,400,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Batu Ampar
			Sosialisasi Pelayanan bagi Aparat Desa	Batu Ampar			Jumlah kegiatan sosialisasi 1 sosialisasi	1 sosialisasi	10,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai						Panyipatan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Panyipatan			jumlah unit yang dipelihara 12 unit	12 unit	110,000,000	158,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Panyipatan			Jumlah set tanda pangkat dan jabatan 13 stel	13 stel	7,800,000	11,000,000		
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai						Panyipatan
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Panyipatan			Jumlah orang 40 orang	40 orang	53,600,000	23,600,000		
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai						Panyipatan
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Panyipatan			Jumlah RAPBDesa terevaluasi 10 RAPBDesa	10 RAPBDesa	11,610,000	5,270,000		
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Panyipatan			Jumlah musrenbang kecamatan 1 kali	1 kali	11,000,000	13,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Fasilitas dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai						Panyipatan
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Panyipatan			Jumlah jenis kegiatan keagamaan, seni, sosial/ budaya, dan olahraga 4 jenis	4 jenis	129,217,800	100,720,000		
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Panyipatan			Jumlah kegiatan safari ramadhan 1 kali	1 kali	27,525,000	50,000,000		
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai						Panyipatan
			Peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan	Panyipatan			Jumlah orang 50 orang	50 orang	6,000,000	5,000,000		
			Program Fasilitas dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai						Pelaihari
			Koordinasi dan Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Pelaihari			Jumlah koordinasi dan fasilitas penanggulangan kemiskinan 60 orang	60 orang	30,000,000	30,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Pelaihari			Jumlah buka bersama/safari ramadhan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan Masyarakat 1 kali	1 kali	70,000,000	70,000,000	
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Pelaihari			1. Jumlah terkirimnya kafilah dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut 60 orang 2. Jumlah lomba olahraga cabang Sepak Bola 1 kali 3. Jumlah lomba olahraga cabang Bulutangkis 1 kali 4. Jumlah peringatan Isra Mi-raj 1 kali 5. Jumlah lomba Adzan 1 kali 6. Jumlah lomba Balogo 1 kali 7. Jumlah lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak (TK) 1 kali	60 orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	473,000,000	473,000,000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Pelaihari			Jumlah terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dan pra musrenbang tingkat kecamatan 2 kali	2 kali	17,000,000	17,000,000	
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Pelaihari			Jumlah termonitoringnya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa 15 desa	15 desa	8,000,000	8,000,000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaihari			Jumlah pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pemerintah desa 20 desa/kelurahan	20 desa/kelurahan	35,000,000	35,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Pelaihari			Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum 1 kali	1 kali	35,000,000	35,000,000	
			Program Penuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			1. Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM mobil jabatan 2 unit 2. Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM kendaraan dinas operasional roda 2 7 unit 3. Jumlah pemeliharaan gedung kantor 21 unit	2 unit 7 unit 21 unit	38,200,000	38,200,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pelaihari			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 27 stel Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 27 stel	27 stel 27 stel	11,800,000	11,800,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa; Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa; Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka); Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa	0 dokumen; 0 kali kegiatan; 0 jumlah orang; 0 dokumen					Tambang Ulang
			pendidikan dan pelatihan kepemudaan	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemudaan 30 orang	30 orang	53,000,000	45,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tambang Ulang			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa 9 dokumen	9 dokumen	24,000,000	22,000,000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Terlaksananya kegiatan pentas seni,budaya ,festival ,lomba cipta dan kompetisi olahraga; Terlaksananya kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dikecamatan	0 orang; 0 orang; 0 orang					Tambang Ulang
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan pentas seni,budaya,festival,lomba cipta dan kompetisi olahraga 5.000 orang	5.000 orang	380,000,000	418,630,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Tambang Ulang			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dikecamatan 24 orang	24 orang	5,000,000	6,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Tambang Ulang			Terlaksananya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 570 orang	570 orang	25,000,000	26,000,000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Terlaksananya kegiatan perencanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa; Terselenggaranya kegiatan penyenggaraan musrenbang kecamatan	0 dokumen; 0 dokumen					Tambang Ulang
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan perencanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa 9 dokumen	9 dokumen	5,000,000	6,000,000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tambang Ulang			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 9 dokumen	9 dokumen	10,000,000	10,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; Terlaksananya pembangunan gedung kantor; Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatur; Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 Unit; 0 jenis; 0 unit; 0 unit; 0 orang; 0 orang					Tambang Ulang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tambang Ulang			Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana 5 jenis	5 jenis	25,000,000	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tambang Ulang			Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 12 unit	12 unit	80,000,000	80,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tambang Ulang			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24 orang	24 orang	24,000,000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan masyarakat	0 dokumen					Tambang Ulang
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	12,150,000	13,000,000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Bati-Bati
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bati-Bati			jumlah orang 32 orang	32 orang	54,000,000	55,620,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bati-Bati			jumlah dokumen 14 dokumen	14 dokumen	25,000,000	25,500,000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Bati-Bati			jumlah orang 6.270 orang	6.270 orang	337,300,000	347,419,000	
			Peningkatan Silaturahmi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)	Bati-Bati			jumlah orang 600 orang	600 orang	32,500,000	33,000,000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 Nilai					Bati-Bati
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Bati-Bati			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	21,000,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Bati-Bati
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bati-Bati			Jumlah Unit 2 Unit	2 Unit	20,000,000	21,684,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bati-Bati			Jumlah Unit/Kali 45 Unit	45 Unit	74,890,000	77,136,700	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bati-Bati			Jumlah Orang/Stel 30 Stel	30 Stel	15,000,000	15,500,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati
			Penyelenggaraan Pelayanan	Bati-Bati			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	15,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat								
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Bumi Makmur			jumlah dokumen 11 dokumen	11 dokumen	4,000,000	2,500,000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Bumi Makmur			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	18,500,000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bumi Makmur			jumlah dokumen 33 dokumen	33 dokumen	70,120,000	75,750,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bumi Makmur			jumlah orang 83 orang	83 orang	78,000,000	78,500,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bumi Makmur			JUMLAH UNIT 1 UNIT	1 UNIT	22,000,000	23,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bumi Makmur			JUMLAH PEMELIHARAAN 15 UNIT	15 UNIT	10,000,000	6,000,000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Bumi Makmur			JUMLAH ORANG 1 ORANG	1 ORANG	4,500,000	6,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				JUMLAH ORANG 20 ORANG	20 ORANG	19,800,000	7,000,000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN DI MASYARAKAT		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga				jumlah orang 4.750	4.750	257,200,000	270,000,000	
			Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan	Bumi Makmur			jumlah orang 10 orang 0	10 orang 0	4,000,000	6,000,000	
			Fasilitasi peningkatan peranan wanita, kepemudaan, dan masyarakat	Bumi Makmur			jumlah orang 55 orang	55 orang	30,000,000	35,500,000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Bumi Makmur			jumlah orang 400 orang	400 orang	25,000,000	26,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Bumi Makmur			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	20,071,000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		jumlah dokumen	0 nilai					Kintap
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kintap			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	-	
			Program Fasilitas dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Kintap			jumlah orang 0 orang	0 orang	90,000,000	-	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Kintap			jumlah orang 20 orang	20 orang	90,450,000	-	
			Program Koordinasi dan fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	1 nilai					Kintap
			Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kintap			jumlah orang 45 orang	45 orang	85,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Umum								
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kintap			jumlah orang 93 orang	93 orang	13,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 nilai					Kintap
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			jumlah unit 3 unit 0	3 unit 0	20,000,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap			jumlah pemeliharaan 10 unit	10 unit	50,000,000	-	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kintap			jumlah gedung 1 gedung	1 gedung	10,000,000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Kintap			jumlah aplikasi 1 aplikasi	1 aplikasi	10,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Takisung			Jumlah Unit Kendaraan yang diPelihara 6 Unit	6 Unit	32,500,000	33,475,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Takisung			Jumlah PNS dan PTT yang terpenuhi Pakaian Dinas dan Atributnya 25 Stel	25 Stel	12,500,000	-	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Takisung			Jumlah Dokumen hasil Musrenbang 1 Dokumen	1 Dokumen	16,120,000	16,926,000	
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Takisung			Jumlah Dokumen Hasil Musdes 12 Dokumen	12 Dokumen	4,301,000	4,455,000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Indek Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Takisung
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Takisung			Jumlah Dokumen Administrasi desa yang difasilitasi 12 Dokumen	12 Dokumen	20,849,700	21,266,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Takisung			Jumlah peserta paskibra dan peserta Rapat Korrdinasi 85 Orang	85 Orang	73,000,000	75,190,000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			masyarakat								
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Takisung			Jumlah Peserta Safari Ramadhan 580 Orang	580 Orang	20,675,000	21,295,000	
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Takisung			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga 4.250 Orang	4.250 Orang	347,944,100	351,365,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Takisung			Jumlah Peserta Pelatihan 24 Orang	24 Orang	2,396,250	2,468,000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Takisung			Jumlah Dokumen IKM 1 Dokumen	1 Dokumen	20,502,300	21,117,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 nilai					Angsau
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Angsau			jumlah terehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 1 unit	1 unit	30,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Angsau			jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 10 unit	10 unit	6,900,000	1,000,000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Angsau			jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 5 jenis	5 jenis	22,000,000	22,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Angsau			jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13 stel	13 stel	12,800,000	5,000,000	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	1 nilai					Angsau
			Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Angsau			jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 kali	12 kali	84,000,000	84,000,000	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	1 nilai					Angsau
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Angsau			jumlah pengembangan sarana promosi dan hasil produksi 1 kali	1 kali	15,000,000	16,000,000	
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Angsau			jumlah peserta musyawarah pembangunan desa/ kelurahan 70 orang	70 orang	12,000,000	12,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Angsau			jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di kelurahan dan lomba kebersihan 12 kali	12 kali	12,000,000	12,000,000	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 nilai					Angsau
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Angsau			kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 3 kegiatan	3 kegiatan	295,680,000	325,220,000	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Angsau			jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan/bimtek masyarakat 10 kegiatan	10 kegiatan	126,720,000	139,380,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Karang Taruna			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana 10 Unit	10 Unit	7,000,000	-	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Karang Taruna			Jumlah terehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit	1 Unit	50,000,000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Karang Taruna			Jumlah peningkatan kemampuan teknis aparatur 5 Orang	5 Orang	12,500,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Karang Taruna			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 Orang	12 Orang	13,200,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perlengkapannya								
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Karang Taruna			Jumlah Pelaksanaan kegiatan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 12 Kali	12 Kali	190,650,000	-	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Karang Taruna			Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan 3 Kegiatan	3 Kegiatan	295,680,000	-	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karang Taruna			Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan/bimtek di masyarakat 10 Kegiatan	10 Kegiatan	126,720,000	-	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Karang Taruna			Jumlah pengembangan saran promosi dan hasil produksi 1 Kali	1 Kali	15,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Karang Taruna			Jumlah peserta Musyawarah pembangunan desa/kelurahan 55 Orang	55 Orang	8,870,000	-	
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Karang Taruna			Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di kelurahan dan lomba kebersihan 20 RT	20 RT	7,000,000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Pabahanan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pabahanan			jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 3 jenis	3 jenis	50,240,000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pabahanan			Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 10 Unit	10 Unit	10,000,000	10,000,000	
			Pembangunan Gedung Kantor	Pabahanan			Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket	1 Paket	50,000,000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Pabahanan			jumlah peningkatan kemampuan teknis aparatur 5 orang	5 orang	25,000,000	25,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pabahanan			jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10 stel	10 stel	7,000,000	4,000,000	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Pabahanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pabahan			jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 10 kali	10 kali	70,660,000	96,400,000	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	826.636.428 Nilai					Pabahan
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Pabahan			jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan/bimtek masyarakat 10 Kegiatan	10 Kegiatan	126,720,000	139,380,000	
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Pabahan			Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan 3 kegiatan	3 kegiatan	295,680,000	325,220,000	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	0 Nilai					Pabahan
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pabahan			jumlah pengembangan sarana promosi dan hasil produksi 1 kali	1 kali	15,000,000	17,000,000	
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Pabahan			Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa/kelurahan 50 orang	50 orang	8,500,000	8,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pabahanan			jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong dikelurahan 12 kali	12 kali	8,500,000	9,500,000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 1 jenis	1 jenis	10,000,000	15,000,000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan 10 unit	10 unit	7,000,000	7,000,000	
			Pembangunan Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah pembangunan gedung kantor 1 unit	1 unit	50,000,000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Pelaihari			Jumlah orang 5 orang	5 orang	25,000,000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pelaihari			Jumlah pakaian 10 stel	10 stel	10,000,000	-	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Pelaihari			Jumlah kegiatan 3 kegiatan	3 kegiatan	295,680,000	325,220,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan 10 kegiatan	10 kegiatan	126,720,000	139,380,000	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pelaihari			Jumlah kegiatan 12 kali	12 kali	118,000,000	156,050,000	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pelaihari			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	15,000,000	17,000,000	
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Pelaihari			Jumlah orang 55 orang	55 orang	8,870,000	9,000,000	
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan 12 kali	12 kali	6,000,000	9,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 NILAI						Sarang Halang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarang Halang			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 40.000.000	40.000.000	40,000,000	30,000,000		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarang Halang			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana 11.200.000 10 unit	11.200.000 10 unit	11,200,000	11,200,000		
			Pembangunan Gedung Kantor	Sarang Halang			Jumlah pembangunan gedung kantor 40.000.000 1 garasi	40.000.000 1 garasi	40,000,000	-		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sarang Halang			Jumlah terehabilitasi sedang/berat gedung kantor 199.000.000 1 gudang	199.000.000 1 gudang	199,000,000	-		
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Sarang Halang			Jumlah peningkatan kemampuan teknis aparatur 20.000.000 6 orang	20.000.000 6 orang	20,000,000	30,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sarang Halang			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.100.000 10 stel	13.100.000 10 stel	13,100,000	-		
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	0 NILAI						Sarang Halang
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Sarang Halang			Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan 231.400.000 4 Kegiatan	231.400.000 4 Kegiatan	231,400,000	325,220,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sarang Halang			Jumlah Pelaksanaan sosialisasi/pelatihan/bintek Masyarakat 80.000.000 5 kegiatan	80.000.000 5 kegiatan	80,000,000	139,380,000	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	0 BAIK					Sarang Halang
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Sarang Halang			Jumlah pengembangan saran promosi dan hasil produksi 17.000.000 1 kali	17.000.000 1 kali	17,000,000	20,000,000	
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Sarang Halang			Jumlah peserta Musyawarah pembangunan desa/kelurahan 15.000.000 50 orang	15.000.000 50 orang	15,000,000	16,000,000	
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sarang Halang			Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di kelurahan dan lomba kebersihan 15.000.000 17 kali	15.000.000 17 kali	15,000,000	30,580,000	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 NILAI					Sarang Halang
			Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Sarang Halang			Jumlah Pelaksanaan kegiatan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 50.000.000 15 kali	50.000.000 15 kali	50,000,000	141,000,000	
		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang	Program Koordinasi dan Fasilitas ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		ikm	3 nilai					Bajuin

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kondusif									
			Pendidikan dan pelatihan kepemudaan				jumlah peserta 34 peserta	34 peserta	16,000,000	30,000,000	
			Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong
			Pendidikan dan pelatihan kepemudaan	Jorong			Jumlah peserta 34 peserta	34 peserta	30,000,000	-	
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan ketertiban umum Msarakat	Jorong			Jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	10,000,000	-	
			Pembinaan perlindungan masyarakat	Jorong			Jumlah pembinaan 1 kali	1 kali	10,000,000	-	
			Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan ketertiban umum Msarakat	Panyipatan			Jumlah jenis kegiatan 2 jenis	2 jenis	25,600,000	15,600,000	
			Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan ketertiban umum Masyarakat	Kintap			jumlah orang 90 orang	90 orang	15,000,000	-		
			Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung	
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan ketertiban umum Masyarakat	Takisung			Jumlah Koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat 12 Kali	12 Kali	3,500,000	3,570,000		
			Pembinaan perlindungan masyarakat	Takisung			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 36 Orang	36 Orang	6,925,750	7,133,000		
			Ketahanan Pangan									
	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan Prodoksi Tanaman Pangan		Produksi padi; Produksi kedelai; Produksi jagung	0 Ton; 0 Ton; 0 Ton					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman pangan	Kabupaten			jumlah luas lahan pengendalian opt 96.000 Ha	96.000 Ha	274,989,400	302,500,000		
			Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman pangan	Kabupaten			jumlah luas lahan penangkar 110 Ha	110 Ha	149,420,000	165,000,000		
			Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman pangan	Kabupaten			Jumlah luas taman 96.000 Ha	96.000 Ha	400,000,000	440,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan	Kabupaten			Jumlah komoditas 3 Komoditas	3 Komoditas	600,000,000	692,500,000	
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		Produksi kelapa sawit; Produksi karet	0 Ton; 0 Ton					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Kabupaten			jumlah luas lahan pengendalian opt 27.000 Ha	27.000 Ha	156,988,000	172,687,020	
			Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan	Kabupaten			Jumlah lahan penangkaran 10 Ha	10 Ha	99,419,400	110,000,000	
			Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Kabupaten			Jumlah tanam 27.000 Ha	27.000 Ha	115,470,800	127,017,990	
			Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Kabupaten			Jumlah produk 3 Produk	3 Produk	160,000,000	180,300,000	
			Program Ketersediaan dan distribusi pangan		Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat	0 persentase					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Distribusi dan Cadangan Pangan	SKPD			Jumlah Kecamatan 11 Kecamatan	11 Kecamatan	119,999,966	-	
			Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten			Jumlah Desa Afilitas 23 Desa Jumlah Penerima Lumbung 1 Kelompok	23 Desa 1 Kelompok	520,000,000	-	
			Program Konsumsi dan Keamanan Pangan		meningkatnya Skor PPH	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Perikanan
			Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan	Kabupaten			Jumlah Responden 330 Responden Jumlah Kecamatan 11 Kecamatan	330 Responden 11 Kecamatan	264,415,000	-	
			Peningkatan mutu konsumsi dan keamanan pangan	Kabupaten			Jumlah Kecamatan 11 Kecamatan	11 Kecamatan	137,575,000	-	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan kinerja program aksi membangun bersama masyarakat	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten			jumlah desa yang dibina 130 RPJM dan RKP Desa 26 Desa (Manunggal Tuntung Pandang) 3 Kecamatan (KPMD) 3 Kecamatan (LPMD) 11 Desa (BBGRM)	130 RPJM dan RKP Desa 26 Desa (Manunggal Tuntung Pandang) 3 Kecamatan (KPMD) 3 Kecamatan (LPMD) 11 Desa (BBGRM)	1,112,900,000	1,000,000,000	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten			Jumlah Posyantek Kecamatan dan Desa 11 posyantek kecamatan / Antar Desa 10 Posyantek Desa	11 posyantek kecamatan / Antar Desa 10 Posyantek Desa	300,000,000	330,000,000	
			Koordinasi Pembinaan Desa Yang Berciri Khas	Kabupaten			jumlah desa berciri khas yang dibina 5 desa	5 desa	25,000,000	27,500,000	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha dan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten			Jumlah Bumdes yang Berkembang 5 Bumdes Berkembang	5 Bumdes Berkembang	500,000,000	540,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pembinaan, Pendataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan		Cakupan ketersediaan data terkini profile dan potensi desa	0 %						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	Kabupaten			Jumlah Desa IPL Eks Transmigrasi 2 Desa Eks Transmigrasi (Terinventarisasi Kepemilikan Lahan Eks. Transmigrasi)Jumlah BUMDesa Bersama 2 Kecamatan (Sosialisasi BUMDesa Bersama)Terbentuknya Kawasan 0 Kawasan	2 Desa Eks Transmigrasi (Terinventarisasi Kepemilikan Lahan Eks. Transmigrasi)2 Kecamatan (Sosialisasi BUMDesa Bersama)0 Kawasan	174,349,950	197,000,000		
			Pembinaan, pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya	Kabupaten			jumlah lembaga adat yang dibina 5 lembaga adat	5 lembaga adat	174,998,000	188,000,000		
			Pembinaan, pengelolaan data dan profil desa	Kabupaten			jumlah dokumen updating data profile desa 130 dokumen	130 dokumen	674,999,900	693,000,000		
			Program Pembinaan, Pemberdayaan, Tata Kelola Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan		Cakupan kinerja Bina Pemerintahan Desa	0 %						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kabupaten			Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Bimtek/Pemagangan/Pelatihan/In House Training 786 orang	786 orang	780,230,100	670,000,000		
			Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Kabupaten			tingkat perkembangan desa 11 desa 1 kelurahan	11 desa 1 kelurahan	89,769,300	200,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten			Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dibina, Tim Evaluasi Raperdes Tentang APBDes Kecamatan 1.560 orang	1.560 orang	469,999,500	490,000,000	
			Pembinaan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten			Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Dibina 975 orang Jumlah Desa yang Ditetapkan dan Ditegaskan Batas Desa 11 desa Jumlah Desa yang Ditata 30 perdes Terpilih dan Dilantiknya Kepala Desa 52 kepala desa	975 orang 11 desa 30 perdes 52 kepala desa	1,137,213,000	4,090,000,000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Kurau			Jumlah Orang 70 Orang	70 Orang	22,000,000	22,000,000	
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Kurau			Jumlah Pameran 1 Pameran	1 Pameran	16,000,000	16,000,000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		ikm	3 nilai					Bajuin
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi				jumlah UKM 5 Orang	5 Orang	20,000,000	38,250,000	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa				jumlah desa 9 desa	9 desa	20,310,000	27,000,000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Jorong			Jumlah orang 44 orang	44 orang	13,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Jorong			Jumlah UKM 5 UKM	5 UKM	37,000,000	-	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jorong			Jumlah desa 11 desa	11 desa	25,000,000	-	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Batu Ampar
			Pembinaan dan pelatihan/sosialisasi Keuangan Desa	Batu Ampar			Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan 2 pembinaan dan sosialisasi	2 pembinaan dan sosialisasi	33,000,000	40,000,000	
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Batu Ampar			Jumlah kegiatan Pameran 1 kegiatan	1 kegiatan	14,998,300	14,998,300	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Panyipatan			Jumlah desa yang mengikuti lomba desa 10 desa	10 desa	5,207,200	5,000,000	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Panyipatan			Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan 110 orang	110 orang	44,410,000	16,000,000	
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi				Jumlah pameran/ expo yang terikuti 1 kali	1 kali	20,000,000	18,000,000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Pelaihari			Jumlah pembinaan dan pelatihan masyarakat desa 60 orang	60 orang	60,000,000	60,000,000	
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Pelaihari			Jumlah terlaksananya pameran pembangunan hasil produksi masyarakat 1 kali	1 kali	40,000,000	40,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai						Pelaihari
			Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Pelaihari			Jumlah dokumen pengelolaan survei kepuasan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	15,000,000		
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi; Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa; Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	0 kegiatan; 0 desa; 0 kegiatan						Tambang Ulang
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan stimulan pembangunan desa 9 desa	9 desa	28,000,000	28,000,000		
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	Tambang Ulang			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender 6 kegiatan	6 kegiatan	30,000,000	25,000,000		
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi 1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	20,000,000		
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai						Bati-Bati
			Pembinaan dan pelatihan/sosialisasi Keuangan Desa	Bati-Bati			jumlah kali 13 kali	13 kali	23,500,000	23,970,000		
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Bati-Bati			jumlah orang 200 orang	200 orang	25,930,000	26,700,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Bati-Bati			jumlah kepesertaan pameran 1 kali	1 kali	18,000,000	18,540,000		
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Bumi Makmur			jumlah orang 288	288	30,000,000	37,241,000		
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Bumi Makmur			jumlah pameran 2 0	2 0	24,000,000	34,155,000		
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap	
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Kintap			jumlah pameran 1 pameran	1 pameran	15,000,000	-		
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Takisung			Jumlah peserta kegiatan pemberian stimulan 300 Orang	300 Orang	23,000,000	23,694,000		
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Takisung			Jumlah Pameran 1 kali	1 kali	19,486,000	20,070,000		
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa				Jumlah Peserta Pelatihan 120 Orang	120 Orang	28,143,000	28,987,000		
			Kearsipan									
			Program Pengembangan dan Tata Kelola Kearsipan		Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	0 Persen					Dinas Perpustakaan dan kearsipan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen laporan arsip daerah 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	72,590,000	73,590,000		
			Pembinaan dan tata kelola layanan informasi arsip	Kabupaten, SKPD			Pengelolaan arsip secara baku ditingkat SKPD 25 Persen	25 Persen	85,180,000	90,060,000		
			Tata Kelola dan Pemeliharaan Arsip	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen/berkas arsip 2.000 Dokumen/Berkas	2.000 Dokumen/Berkas	60,000,000	65,000,000		
			Komunikasi dan Informatika									
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Fasilitas persandian dan pengamanan informasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah layanan persandian/pengamanan informasi 150 layanan	150 layanan	27,041,600	-		
			Program Pengelolaan Komunikasi Publik		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kabupaten, SKPD			Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat 3 kelompok	3 kelompok	501,158,963	-		
			Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	62,075,000	-		
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase SKPD yang menerapkan e-government	8,9 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah layanan internet dan layanan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 0 bulan Jumlah SKPD yang menerapkan e-government 4 SKPD	0 bulan 4 SKPD	964,906,275	-	
			Kegiatan penyusunan aplikasi sistem informasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah Aplikasi Penunjang E Government yang dikembangkan 2 aplikasi	2 aplikasi	116,396,118	-	
Perpustakaan											
	Peningkatan Kualitas sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Layanan Perpustakaan		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Kabupaten, SKPD			Jumlah unit perpustakaan 56 Unit perpustakaan	56 Unit perpustakaan	137,145,000	144,500,000	
			Pengembangan dan Tata Kelola Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan	Kabupaten, SKPD			Jumlah orang 7.200 Orang	7.200 Orang	124,620,000	130,930,000	
			Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan	SKPD			Jumlah Eksemplar 1.000 Eksemplar	1.000 Eksemplar	179,109,000	191,600,000	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	1 nilai					Angsau
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Angsau			jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan 60 orang	60 orang	9,000,000	12,000,000	
			Sosialisasi Pertanahan	Angsau			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pertanahan 50 orang	50 orang	7,500,000	12,000,000	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Angsau			jumlah dokumen data statistik kelurahan (profil kelurahan) 1 dokumen	1 dokumen	34,000,000	38,000,000	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Karang Taruna			Jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan 45 Orang	45 Orang	7,000,000	-	
			Sosialisasi Pertanahan	Karang Taruna			Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi pertanahan 45 Orang	45 Orang	4,500,000	-	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Karang Taruna			Jumlah dokumen data statistik kelurahan (Profil Kelurahan) 1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	0 Nilai					Pabahanan
			Sosialisasi Pertanahan	Pabahanan			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pertanahan 45 orang	45 orang	7,500,000	8,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Pabahan			jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan 1 kali	1 kali	10,000,000	10,000,000	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Pabahan			Jumlah Dokumen Data Statistik kelurahan (Profil Kelurahan) 2 dokumen	2 dokumen	32,500,000	25,000,000	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	1 nilai					Pelaihari
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Pelaihari			Jumlah orang 45 orang	45 orang	7,500,000	8,000,000	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Pelaihari			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	15,000,000	
			Sosialisasi Pertanahan	Pelaihari			Jumlah orang 45 orang	45 orang	7,500,000	8,500,000	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	0 NILAI					Sarang Halang
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Sarang Halang			Jumlah dokumen data statistik kelurahan (Profil Kelurahan) 20.000.000 1 dokumen	20.000.000 1 dokumen	20,000,000	20,000,000	
			Sosialisasi Pertanahan	Sarang Halang			Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi pertanahan 7.500.000 45 orang	7.500.000 45 orang	7,500,000	7,500,000	
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Sarang Halang			Jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan 5.000.000 45 orang	5.000.000 45 orang	5,000,000	7,500,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 Nilai						Kurau
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Kurau			Jumlah Orang 159 Orang	159 Orang	15,000,000	15,000,000		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kurau			Jumlah Orang 35 orang	35 orang	3,000,000	5,000,000		
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 Nilai						Batu Ampar
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Batu Ampar			Jumlah sosialisasi 1 sosialisasi	1 sosialisasi	10,000,000	-		
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai						Pelaihari
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Pelaihari			Jumlah pembinaan dan perlindungan masyarakat 60 orang	60 orang	35,000,000	35,000,000		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan	Pelaihari			Jumlah kerjasama antar aparat keamanan kecamatan Pelaihari untuk pencegahan kejahatan 1 kali	1 kali	40,000,000	40,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ketertiban Umum Masyarakat								
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; Terlaksananya kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat	0 kali; 0 orang					Tambang Ulang
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan perlindungan masyarakat 40 orang	40 orang	13,500,000	15,000,000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 9 Kali	9 Kali	36,500,000	30,000,000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Bati-Bati			Jumlah koordinasi 12 kali	12 kali	18,000,000	18,360,000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 NLAJ					Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Bumi Makmur			jumlah orang 33	33	10,000,000	11,000,000		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat	Bumi Makmur			jumlah orang 35	35	10,000,000	11,000,000		
			Pertanian									
	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		Produksi Cabai; Produksi bawang merah	0 Kwintal; 0 Kwintal					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah tanam 1.200 Ha	1.200 Ha	261,699,700	287,869,846		
			Pengembangan pembenihan dan pembibitan tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah luas lahan penangkar 5 Ha	5 Ha	625,000,000	687,500,000		
			perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura	Kabupaten			jumlah luas lahan pengendalian opt 1.200 Ha	1.200 Ha	193,496,150	212,845,765		
			pembinaan dan pengembangan desa produksi tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah desa 1 Desa	1 Desa	289,999,660	337,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah produk 2 Produk	2 Produk	254,999,917	225,500,000	
			Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian		Cakupan penyediaan prasarana dan sarana pertanian	0 Persen					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Fasilitasi pembangunan / rehabilitasi infrastruktur pertanian	Kabupaten			Jumlah JUT, JP, Embung dan Pembangunan Jembatan 35 Unit	35 Unit	6,808,239,850	6,149,134,000	
			Fasilitasi sarana pertanian	Kabupaten			Jumlah pertemuan dan demonstrasi teknologi pertanian 15 Kali	15 Kali	183,495,000	201,844,500	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian		Peningkatan SDM Penyuluh	0 Orang					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kabupaten			Jumlah penyuluh 150 Orang	150 Orang	242,538,000	325,781,900	
			Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kabupaten			Jumlah kelembagaan tani 1.200 Kelompok	1.200 Kelompok	203,143,000	217,976,550	
			Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian//Perkebunan Tepat guna	Kabupaten			Jumlah demplot 6 Kecamatan	6 Kecamatan	47,392,100	52,074,660	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan	1 Produk					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Terlaksananya bimtek penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan 2 Kali/50 Orang	2 Kali/50 Orang	40,000,000	50,000,000	
			Program Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan		peningkatan populasi ternak sapi potong; peningkatan populasi ternak sapi perah; peningkatan populasi ternak kerbau; peningkatan populasi ternak kambing; peningkatan populasi ternak ayam buras; peningkatan populasi ternak ayam ras petelur; peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging; peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging; peningkatan populasi ternak itik	87.000 ekor; 30 ekor; 3.787 ekor; 22.079 ekor; 2.663.279 ekor; 7.269.441 ekor; 54.447.528 ekor; 54.447.528 ekor; 198.103 ekor					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pendistribusian bibit ternak Kepada masyarakat	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			Jumlah Pendistribusian Obat-Obatan 1 Paket Jumlah Pendistribusian Ternak Sapi APBD Provinsi 20 ekor Jumlah Pendistribusian Ternak Sapi APBD Kabupaten 12 ekor Jumlah Aset ternak daerah yang telah terverifikasi (Penyelesaian investasi non permanen dan piutang ternak jantan) 750 ekor dari 1181 ekor Jumlah kelompok penerima hibah yang termonitor 24 kelompok	1 Paket 20 ekor 12 ekor 750 ekor dari 1181 ekor 24 kelompok	348,379,000	750,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penelitian, Pengolahan dan pengembangan pakan ternak	Kabupaten, SKPD			Jumlah pemeliharaan demplot pakan 1 Unit Jumlah sampel pakan ternak yang layak 8 Sampel	1 Unit 8 Sampel	40,000,000	40,000,000	
			Pendistribusian semen bibit ternak unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	Kabupaten, SKPD			Jumlah intensifikasi IB 17.000 Dosis Jumlah angka kelahiran ternak sapi potong 10.000 Ekor Jumlah angka kebuntingan pada ternak yang di Inseminasi Buatan 11.000 Ekor	17.000 Dosis 10.000 Ekor 11.000 Ekor	80,000,000	60,000,000	
			Pembinaan dan pengembangan desa produksi ternak	Kabupaten, SKPD			Jumlah pembinaan dan pengembangan desa unggulan 1 Desa Jumlah pembinaan dan pengembangan desa produksiternak 11 Kecamatan	1 Desa 11 Kecamatan	50,000,000	60,000,000	
			Program Kelembagaan Usaha Prasarana dan Sarana		Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain; Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya ; Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan	0 %; 0 %; 0 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengembangan data dan Informasi	Kabupaten, SKPD			Jumlah Data dan Informasi Peternakan Yang Terkelola Dengan Baik 1 Dokumen	1 Dokumen	29,999,900	30,000,000	
			Usaha agribisnis dan Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah Petani yang mengikuti asuransi ternak sapi atau kerbau (AUTS/K) 75 Ekor Jumlah Pelaku usaha yang bermitra dengan pihak lain 4 Orang/kelompok/BUMD Jumlah Produksi peternakan yang dapat dipasarkan 5 Produk Jumlah kontes ternak di Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 1 Kali Jenis informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses 12 Informasi	75 Ekor 4 Orang/kelompok/BUMD 5 Produk 1 Kali 12 Informasi	320,645,000	100,000,000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan SDM dan Kemampuan Lembaga Petani Ternak	Kabupaten, SKPD			Jumlah Kelompok Tani Terlatih (Poktan) 90 Orang Jumlah Penilaian Kelompok Tani berprestasi 11 Kecamatan	90 Orang 11 Kecamatan	90,000,000	95,000,000	
			Penyediaan Prasarana dan sarana Peternakan	Luar Daerah, Kabupaten, SKPD			terlaksananya CPCL untuk hibah dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna pada kelompok tani 11 Kecamatan terdistribusinya peralatan dan mesin pengolahan pasca panen 1 Unit/Paket Jumlah jenis vaksinasi dan obat-obatan 22 Jenis Jumlah jenis alat-alat peternakan 20 Jenis Terpenuhinya kebutuhan semen bibit sapi unggul dan inseminasi buatan 10.000 Dosis	11 Kecamatan 1 Unit/Paket 22 Jenis 20 Jenis 10.000 Dosis	760,000,000	500,000,000	
			Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam buras; Persentase Penurunan Angka kematian ternak kambing; Persentase Penurunan Angka kematian ternak sapi potong; Persentase Penurunan Angka kematian ternak sapi potong perah; Persentase Penurunan Angka kematian ternak kerbau; Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam petelur; Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam ras pedaging; Persentase Penurunan Angka kematian ternak itik; Persentase produk hasil ternak yang sehat; Persentase pelayanan kesehatan hewan	3 %; 3 %; 1 %; 0 %; 5 %; 3 %; 5 %; 7 %; 100 %; 65 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	Kabupaten, SKPD			Jumlah vaksinasi ternak sapi & Ungas 1 Tahun Jumlah Pengobatan Ternak Sapi 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	20,725,000	45,000,000		
			Penyidikan dan Pemeriksaan Penyakit Ternak	Kabupaten, SKPD			Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel ulas darah 200 sampel Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel feses 400 sampel Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel organ 7 sampel Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel serum 400 sampel Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan 1 Dok Terlaksananya Pemetaan Penyakit Hewan di Kab. Tanah Laut 1 Dok	200 sampel 400 sampel 7 sampel 400 sampel 1 Dok	17,755,000	30,000,000		
			Pengendalian Penyakit Zoonosa dan Pengawasan Produksi asal Hewan	Kabupaten, SKPD			Jumlah Vaksinasi Rabies 1.200 Dosis/Ekor Pengawasan hewan Qurban 11 Kecamatan Pengambilan sampel produk pangan asal hewan 100 Sampel surveilans dan monitoring penyakit zoonosa 11 Kecamatan	1.200 Dosis/Ekor 11 Kecamatan 100 Sampel 11 Kecamatan	32,545,000	40,000,000		
			Pariwisata									
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah Wisatawan	280.000 Orang					Dinas Pariwisata	
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	SKPD			Jumlah sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun 14 Sarpras	14 Sarpras	2,232,000,000	2,250,000,000		
			Pengembangan daerah tujuan wisata	SKPD			Jumlah dokumen Pengembangan Daerah Tujuan Wisata baru yang kompetitif 1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	SKPD			Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun 0 Sarpras	0 Sarpras	-	-		
			Program Pengembangan Kemitraan		Jumlah Wisatawan	280.000 Orang					Dinas Pariwisata	
			Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Kepariwisataaan	SKPD			Jumlah pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang dibina 60 Orang	60 Orang	54,995,800	55,000,000		
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	SKPD			Jumlah orang (Pokdarwis) di Kabupaten Tanah Laut yang dibina 75 Orang	75 Orang	44,998,900	45,000,000		
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Kerjasama Promosi Pariwisata		Jumlah Wisatawan	0 Orang					Dinas Pariwisata	
			Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	SKPD			Jumlah Pameran dalam Rangka Promosi Pariwisata 4 Kali Pameran	4 Kali Pameran	149,999,500	150,000,000		
			Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	SKPD			Jumlah event 5 Event	5 Event	1,043,530,000	1,201,390,000		
			Penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata	SKPD			Jumlah Jenis Media Informasi 9 (2 pos tala menghadang & 7 jenis media informasi)	9 (2 pos tala menghadang & 7 jenis media informasi)	99,870,000	110,000,000		
			Kelautan dan Perikanan									
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Produksi perikanan tangkap	0 ton					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi peningkatan kompetensi dan Pemberdayaan nelayan perikanan tangkap	Kabupaten			Jumlah Orang 15 Orang	15 Orang	141,566,000	-	
			Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Kabupaten			Jumlah Kali 6 Kali	6 Kali	101,681,000	-	
			Fasilitasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Kabupaten			Jumlah Jenis 10 Paket	10 Paket	535,525,000	-	
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Produksi perikanan budidaya	0 Ton					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi perikanan Budidaya				Jumlah Orang 120 Orang Jumlah Data 1 Dokumen Jumlah Desa 1 Desa	120 Orang 1 Dokumen 1 Desa	265,800,000	-	
			Sarana Prasarana Budidaya Perikanan	SKPD			Jumlah Kelompok 3 Pokdakan Jumlah Kecamatan 11 Kecamatan	3 Pokdakan 11 Kecamatan	250,000,000	-	
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Persentase olahan hasil produksi kelautan dan perikanan	0 persentase					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Pembinaan/ peningkatan mutu diverifikasi produk kelautan dan perikanan	Kabupaten			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	60,000,000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pelaksanaan promosi hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat	Kabupaten			Jumlah Kali 1 Kali	1 Kali	90,000,000	-		
			Perdagangan									
			Program pengelolaan pasar daerah		Pengelolaan pasar rakyat	11 Kecamatan					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
			Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kabupaten, SKPD			Jumlah titik 12 titik	12 titik	64,491,500	78,419,950		
			Penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah	Kabupaten			Jumlah sarpras 2 buah	2 buah	775,000,000	42,883,958		
			Intensifikasi pendataan, penagihan, dan pelaporan pendapatan pasar	Kabupaten			Jumlah pasar 21 Pasar	21 Pasar	85,299,000	184,270,145		
			Pembinaan kebersihan ketertiban dan keamanan pasar daerah	Kabupaten, SKPD			Jumlah pasar 12 Pasar	12 Pasar	91,200,000	110,613,947		
			Peningkatan Perdagangan, Pelaksanan dan Pengawasan Kemetrolgian		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembangunan/revitalisasi pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Kabupaten, SKPD			Jumlah revitalisasi 3 Pasar	3 Pasar	1	-		
			Pembangunan/revitalisasi pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten, SKPD			Jumlah pasar 30 pasar	30 pasar	108,000,000	182,000,000		
			Pameran Promosi produk unggulan daerah	Kabupaten, Luar Daerah, SKPD			Jumlah pameran 2 kali	2 kali	292,846,000	242,282,000		
			Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan Kemetrolgian	Kabupaten, SKPD			Jumlah UTTP 350 UTTP	350 UTTP	83,000,000	200,000,000		
			Industri									
			Program Pembangunan Sumberdaya Industri		presentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreatifitas industri	0 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Industri	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah orang 219 orang	219 orang	500,000,000	520,000,000		
			Pengembangan Sistem Produksi, Inovasi dan Teknologi Industri	Kabupaten, Luar Daerah			jumlah IKM 30 IKM	30 IKM	175,000,000	200,000,000		
			Pengembangan Kreativitas, Desain dan Jasa Industri	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah IKM 10 IKM	10 IKM	60,000,000	80,000,000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2021 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah		Presentase IKM unggulan	0 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Peningkatan kerjasama ,Promosi dan investasi Industri	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah pameran 10 pameran	10 pameran	630,000,000	220,000,000	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri		cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukan industri	0 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah klaster industri 2 klaster industri	2 klaster industri	474,953,800	300,000,000	
			Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standarisasi Industri	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah IKM 3.300 IKM	3.300 IKM	199,992,400	225,000,000	
TOTAL									640,110,405,192	354,769,491,554	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan bagi suatu tahun perencanaan. Hal ini ditunjukkan menunjukkan pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terdiri dari indikator makro serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan memberikan gambaran pencapaian kinerja tahunan.

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TARGET
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,50
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,4
3.	Angka Harapan Hidup	69,10
4.	Indeks kepuasan masyarakat	75 (Kurang Baik)
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,48
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00
7.	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100,00
8.	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00
9.	Jumlah Atlet yang berprestasi	68
10.	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00
11.	Jumlah penghargaan inovasi public	1 penghargaan
12.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2 inovasi
13.	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	10 Unit Usaha
14.	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	10 Unit Usaha
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	6,1 (Baik)
16.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	B
17.	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
18.	Indeks keterbukaan informasi public	69,0
19.	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	40
20.	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100
21.	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0
22.	Jumlah konflik sosial (kasus)	0

NO	INDIKATOR	TARGET
24.	Angka Kemiskinan (%)	4,38
25.	Pertumbuhan Ekonomi	4
26.	Indeks Gini (skor)	0,256
27.	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,50
28.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,0
29.	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	135 (Sedang)
30.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00
31.	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	15,0
32.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,75
33.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	84
34.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	70,00
35.	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	5,03
36.	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,51
37.	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,67
38.	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	285.000
39.	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00
40.	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
41.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75,00
42.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	78,00
43.	Indeks Desa Membangun (skor)	0,730 (Maju)
44.	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00
45.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	10,00
46.	Luasan RTH publik kota (Ha)	110,50

Secara umum indikator yang akan dicapai untuk memenuhi arah perpendagri terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.2 Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TARGET
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	4
	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	4
	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00
	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	33,07
	Indeks Gini (skor)	0,26
	Penduduk miskin (orang)	14.853
	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,38
	Indeks Pembangunan Manusia (skor)	68,50

NO	INDIKATOR	TARGET
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	
	Angka melek huruf (%)	99,80
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,4
	Harapan lama sekolah (tahun)	13,12
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	78,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	88,56
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	64,00
	Angka harapan hidup (tahun)	69,10
	Persentase balita gizi buruk (%)	1,00
	Persentase balita gizi kurang (%)	5,00
	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,30
	Rasio penduduk yang bekerja (%)	66,73
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	5,00
	Indeks kepuasan masyarakat	75 (Kurang Baik)
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	11,00
	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00
	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	89,78
	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00
	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00
	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00
	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00
	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,00
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,00
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	
	Jumlah grup kesenian	9
	Jumlah gedung kesenian	1
	Jumlah gedung olahraga	2
2	ASPEK PELAYANAN UMUM	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
2.1	Pendidikan	
	Angka melek huruf (%)	99,80

NO	INDIKATOR	TARGET
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,99
	Harapan lama sekolah (tahun)	13,12
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (%)	57,00
	Rasio Murid-Guru PAUD (rasio)	1 : 8
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	78,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	88,56
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	64,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	99,80
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	94,00
	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	0,45
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	0,10
	Angka Kelulusan UN (AL) SD/MI (%)	100,00
	Angka Kelulusan UN (AL) SMP/MTs (%)	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,55
	Cakupan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	85,00
	Cakupan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	75,00
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 100
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (rasio)	1 : 20
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1 : 20
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100,00
	Cakupan siswa SD yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00
	Cakupan siswa SMP yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	72,50
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (%)	55,00
	Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup yang meningkat keterampilannya (%)	100,00
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100,00
	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SD (skor)	62,00
	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP (skor)	67,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses listrik (%)	100,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses internet untuk tujuan pengajaran (%)	10,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran (%)	30,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses air minum layak	40,00
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitasi dasar per jenis kelamin (%)	40,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas cuci tangan (%)	100,00
	Capaian Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (%)	90
	Jumlah Desa yang memiliki PKBM aktif (desa)	5
	Rata-rata nilai ujian SD/MI	60,89
	Rata-rata nilai ujian SD/Mts	56,07
2.2	Kesehatan	
	Angka harapan hidup (tahun)	69,10
	Persentase balita gizi buruk (%)	100,00
	Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan (%)	1,00
	Cakupan <i>buffer stock</i> obat Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Persentase Instalasi farmasi kabupaten yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (%)	100,00
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	100,00
	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki puskesmas (%)	60,00
	Cakupan puskesmas terakreditasi (%)	100,00
	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (tema)	70,00
	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,00
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (%)	16,00
	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (%)	6,00
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	3,00
	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi (%)	1,00
	Cakupan gizi buruk dan gizi kurang yang dapat ditangani (%)	100,00
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100,00
	Angka kematian akibat keracunan (kasus)	10
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (%)	100,00
	Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk (kasus)	5
	Tingkat kematian akibat malaria (kasus)	1
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	45
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	100,00
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	30
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100,00
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100,00
	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	45

NO	INDIKATOR	TARGET
	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis (%)	100,00
	Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati	100,00
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1
	Penderita diare yang ditangani (%)	100,00
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0,30
	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	1
	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	70,00
	Jumlah Lembaga Mitra Pembangunan Kesehatan (lembaga)	5
	Persentase penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00
	Persentase penyalahgunaan narkotika yang menyelesaikan program rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00
	Persentase penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	100,00
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	1,00
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	0,10
	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan (%)	4,50
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100,00
	Bidan yang Kompeten PPIA (%)	100,00
	Cakupan perawatan balita gizi buruk (%)	100,00
	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (%)	100,00
	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	2,00
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	23
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta (%)	2,00
	Prevalensi Malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita (%)	2,00
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%)	100,00
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	5,00
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	9,8
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	14,00
	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	50,00
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100,00
	Cakupan penanganan kesehatan bayi (%)	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)	100,00
	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	987,50
	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5
	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	100,00
	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	30,00
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100,00
	Cakupan pelayanan nifas (%)	100,00
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100,00
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100,00
	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)	10,00
	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100,00
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	550
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00
	Cakupan Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga sesuai standar (%)	100,00
	Cakupan SDM kesehatan yang terakreditasi (%)	100,00
	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	1 : 4000
	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	1 : 50.000
	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1 : 1.000
	Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	1 : 100
	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan (%)	100,00
	Cakupan masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa (%)	100,00
	Angka kematian dari percobaan bunuh diri (kasus)	5
	Cakupan Rumah sakit yang sudah terakreditasi (%)	100,00
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun (%)	15,00
	Indeks Kinerja Pelayanan RSUD dan Pelayanan Puskesmas (kategori)	Kategori: Baik
	Nilai Capaian SPM Kesehatan (%)	100,00
	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00
	Jumlah desa yang memiliki kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	10
	Cakupan Kelurahan/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	97,00
	Persentase desa yang memiliki rumah tangga berPHBS (%)	100,00
	Persentase desa ODF	25,00
	Persentase desa STBM	44,00
	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kesehatan	1
	Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinis)	100,00
	Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	100,00
	Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	100,00
	Indeks pengendalian mutu (area klinis)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Indeks keuangan (area managerial)	100,00
	Indeks utilisasi (area managerial)	100,00
	Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	100,00
	Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	100,00
	Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	100,00
	Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	100,00
	Indeks sumber daya manusia (area managerial)	100,00
	Indeks pendidikan (area managerial)	100,00
	Indeks sarana dan prasarana (area managerial)	100,00
	Cakupan penyediaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00
	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00
	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	100,00
	Indeks capaian indikator medik (area klinis)	100,00
	Indeks level IT	100,00
	Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di rumah sakit	1
	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100,00
	Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100,00
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	43
	Persentase terhubungnya antar wilayah kecamatan melalui transportasi darat (%)	100,00
	Panjang jalan kabupaten yang dibangun (km)	10
	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatnya kualitasnya (%)	10,00
	Persentase jalan yang dipelihara (%)	100,00
	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik (%)	100,00
	Panjang jalan di Kota Pelaihari yang dilebarkan (km)	2,50
	Cakupan pengerasan dan pengaspalan Jalan Swarangan (%)	100,00
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)	30,00
	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat kabupaten	100,00
	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	40,00
	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	60,00
	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	70,00
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan (%)	90,00
	Cakupan pembangunan Kantor Bupati (%)	40,00
	Cakupan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	100,00
	Tersedianya standar satuan harga jasa konstruksi	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan (%)	100,00
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	87,00
	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten yang direhabilitasi (%)	10,00
	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai standar (%)	100,00
	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	1,00
	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani (%)	100,00
	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun (kebijakan)	1
	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki RDTR (%)	50,00
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60,00
	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten	60,00
	Persentase pengawasan dalam pembangunan jalan desa (%)	100,00
	Persentase pembangunan jalan desa yang dibangun sesuai standar konstruksi (%)	100,00
	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1
	Persentase teknologi konstruksi terbaru yang diaplikasikan dalam pembangunan (%)	20,00
	Cakupan pemeliharaan alat-alat konstruksi yang dimiliki (%)	100,00
2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun (rumah)	10
	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	10
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	60
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	10
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	6
	Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	100,00
	Jumlah kawasan pengembangan rumah komersil yang dibangun (kawasan)	2
	Luasan RTH publik kota (Ha)	110,5
	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	25,00
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (skor)	71,5 (sedang)
	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0
	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	20 lembaga

NO	INDIKATOR	TARGET
	Jumlah konflik sosial (kasus)	0
	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten (%)	100,00
	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah (%)	10,00
	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB (%)	100,00
	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait (%)	100,00
	Tingkat fasilitasi Forkopimda (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan seni budaya daerah bagi remaja usia sekolah (%)	10,00
	Cakupan fasilitasi pengelolaan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat miskin (%)	7,00
	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik (%)	100,00
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (%)	-
	Jumlah Desa sadar politik (desa)	5
	Jumlah Desa Peduli Toleransi	5
	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100
	Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	100
	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	100,00
	Cakupan penanganan penyakit masyarakat (%)	100,00
	Jumlah tindak pidana (kasus)	100
	Cakupan patroli petugas Satpol PP di lokasi prioritas (%)	100,00
	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1:4000
	Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	1:80
	Rasio Poskamling per jumlah desa/kelurahan	1:5
	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	100,00
	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100,00
	Desa Bebas Penyakit Masyarakat (desa)	15
2.6	Sosial	
	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	15
	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	100,00
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100,00
	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100,00
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT (%)	100,00
	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100,00
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif yang Aktif	6
	Cakupan peningkatan SDM kesejahteraan sosial (%)	100,00
	Cakupan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial (%)	100,00
	Cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat syarat	100,00
	Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	100,00
	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	100,00
	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	135 (Sedang)
	Cakupan fasilitasi Forum PRB tingkat kabupaten (%)	100,00
	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana (%)	45,00
	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana (%)	100,00
	Ketersediaan rencana kontigensi bencana daerah (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	100,00
	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penanganan pasca bencana (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana (%)	100,00
	Desa tangguh bencana (desa)	6
	Angka Kemiskinan (%)	4,38
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2.7	Tenaga Kerja	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,30
	Rasio penduduk yang bekerja (%)	66,73
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00
	Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja	100,00
	Tingkat Pengangguran (%)	3,40
	Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	100,00
	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100,00
	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	27
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	44,00
	Penetapan UMK (Ada/Tidak)	Ada
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Persentase tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan setelah mendapatkan pelatihan (%)	100,00
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih keterampilan di BLK	500
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
	Indeks Pemberdayaan Gender (skor)	135 (Sedang)
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Laut (%)	30,00
	Proporsi kursi perempuan yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kalimantan Selatan	30,00
	Persentase perempuan di yang menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah (Kepala SKPD dan Kepala Bidang) di Kabupaten Tanah Laut (%)	42,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,76
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	100,00
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	100,00
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	100,00
	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	100,00
	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	100,00
	Jumlah kelompok usaha mandiri perempuan (unit)	4
	Kabupaten Layak Anak (kategori)	Madya
	Ketersediaan pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Ada/Tidak)	Ada
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	5,00
	Cakupan perlindungan tenaga kerja anak (%)	100,00
	Rasio KDRT (rasio)	01:01.0
	Desa peduli perempuan dan anak (desa)	2
2.9	Pangan	
	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00
	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	89,78
	Cakupan ketersediaan data harga pangan (%)	100,00
	Cakupan pengawasan mutu dan keamanan pangan (%)	100,00
	Cakupan pemantauan distribusi pangan di pintu masuk utama kabupaten (%)	100,00
	Persentase Desa Rentan Pangan (%)	0

NO	INDIKATOR	TARGET
	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
	Meningkatnya Ketersediaan pangan masyarakat	134.377
2.10	Pertanahan	
	Cakupan penyelesaian konflik tanah	100,00
	Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100,00
	Persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Laut	70,00
2.11	Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75,00
	Indeks Kualitas Udara (skor)	85,00
	Indeks Kualitas Air (skor)	75,00
	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	100,00
	Cakupan pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Persentase sungai yang dipantau baku mutunya (%)	100,00
	Rasio kualitas udara yang dipantau pada titik pengamatan (%)	100,00
	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	100,00
	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL (%)	100,00
	Cakupan Pengembangan SDM Bidang lingkungan hidup (%)	100,00
	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100,00
	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100,00
	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	100,00
	Cakupan penyediaan alat-alat laboratorium prioritas (%)	100,00
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00
	Cakupan pelayanan pendataan dan pendaftaran penduduk (%)	100,00
	Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	100,00
	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan pelaporan dan data kependudukan (%)	100,00
	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	100,00
	Rasio pasangan berakte nikah (%)	100,00
	Persentase kepemilikan KK (%)	100,00
	Cakupan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Dokumen profil kependudukan kabupaten (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan kerjasama administrasi kependudukan yang ditindaklanjuti	100,00
	Desa sadar administrasi kependudukan (desa)	10
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Indeks Desa Membangun (skor)	0,730 (Maju)
	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	100,00
	Cakupan pendampingan penyusunan RPJM Desa (%)	100,00
	Cakupan pendampingan evaluasi kinerja RPJM Desa (%)	100,00
	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya	5
	Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	4
	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (%)	100,00
	Persentase LPM berprestasi (%)	5,00
	Cakupan pembinaan kelompok PKK (%)	100,00
	Persentase PKK aktif (%)	50,00
	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	100,00
	Cakupan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (%)	100,00
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100,00
	Cakupan desa yang tertib administrasi pemerintahan (%)	100,00
	Cakupan desa yang tertib administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (%)	100,00
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,48
	Ketersediaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (Ada/Tidak)	Ada
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4
	Ketersediaan regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	Ada
	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,00
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (%)	5,00
	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (%)	82,36
	Peserta anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti KB (%)	55,00
	Persentase anggota Bina Keluarga (BKR) Berstatus Ber-KB (%)	70,00
	Persentase anggota keluarga UPPKS yang Ber-KB (%)	75,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Persentase PUS yang mendapat KIE (%)	40,00
	Unmeet need KB pada pasangan usia subur (%)	5,00
	Desa sadar KB (desa)	5
2.15	Perhubungan	
	Jumlah kasus kecelakaan (kasus)	20
	Cakupan revitalisasi terminal yang dikelola kabupaten (%)	20,00
	Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum (Rp Juta)	16,77
	Penerimaan retribusi pengelolaan terminal (Rp Juta)	131,69
	Persentase angkutan umum yang layak digunakan di terminal (%)	100,00
	Cakupan pemasangan rambu-rambu yang memadai di ruas prioritas jalan kabupaten (%)	100,00
	Cakupan pemasangan petunjuk jalan di ruas jalan kabupaten (%)	100,00
	Persentase aksesibilitas antar wilayah kecamatan yang terhubung sarana transportasi umum (%)	100,00
	Cakupan penegakan pelanggaran lalu lintas (%)	100,00
	Cakupan kesiapsiagaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam acara prioritas (%)	100,00
	Pertumbuhan arus penumpang angkutan darat (%)	2,00
	Pertumbuhan barang yang terangkut angkutan darat (%)	5,00
	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan darat (%)	5,00
	Cakupan monitoring sarana pehubungan laut, sungai, dan penyeberangan (%)	100,00
	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut (%)	1,00
	Pertumbuhan barang yang melalui dermaga pelabuhan	10,00
	Cakupan ketersediaan sarana navigasi angkutan laut, sungai, dan penyeberangan	100,00
	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan laut (%)	6,00
	Cakupan ketersediaan alat untuk pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00
	Persentase pelayanan tepat waktu dalam pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00
	Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rp Juta)	502,24
2.16	Komunikasi dan Informatika	
	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00
	Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (%)	100,00
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	65,00
	Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	50,00
	Cakupan fasilitasi pembangunan BTS di Kabupaten Tanah Laut	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan ketersediaan sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi (%)	100,00
	Cakupan pengembangan sistem aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	90,00
	Persentase SKPD yang mempublikasikan kinerjanya dalam sistem informasi pembangunan daerah (%)	100,00
	Persentase SKPD di Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan dan terhubung sistem e-Government (%)	100,00
	Persentase SKPD yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (%)	100,00
	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat syarat	100,00
	Cakupan desa yang dapat mengakses layanan telekomunikasi (%)	65,00
2.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	Jumlah UMKM yang berkembang (unit)	2
	Jumlah UMKM baru yang terbentuk (unit)	5
	Cakupan pembinaan UMKM dalam manajemen usaha dan pemasaran	20,00
	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah (%)	100,00
	Cakupan penerbitan izin UKM yang tepat syarat dan tepat waktu (%)	100,00
	Jumlah koperasi baru yang terbentuk (unit)	4
	Persentase koperasi aktif (%)	70,00
	Persentase koperasi maju (%)	2,00
	Cakupan pembinaan koperasi terkait manajemen dan pengembangan usaha koperasi (%)	20,00
	Desa koperasi (desa)	2
	Desa tematik UKM (desa)	1
	Koperasi Aktif	95
2.18	Penanaman Modal	
	Capaian realisasi kesepakatan pelaku investasi (kesepakatan)	6
	Realisasi Investasi (Rp miliar)	887.452
	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	5,00
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	2
	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN (%)	2,00
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp miliar)	665.589
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - (Rp miliar)	221.863
	Ketersediaan dokumen regulasi pada sektor penanaman modal (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan pemantauan kinerja realisasi penanaman modal (%)	100,00
	Ketersediaan SOP dalam pengurusan izin investasi (Ada/Tidak)	Ada
	Persentase permohonan perizinan jasa usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat(%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Persentase permohonan perizinan non usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (%)	100,00
	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data investasi, perizinan, dan non perizinan (%)	100,00
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Persentase Wirausaha Muda (%)	60,00
	Organisasi pemuda aktif (%)	93,00
	Jumlah kelompok pemuda yang berprestasi (kelompok)	2
	Cakupan pembinaan organisasi pemuda (%)	100,00
	Cakupan pemberian kepada pemuda berprestasi Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Jumlah pemuda berprestasi yang menerapkan teknologi tepat guna (pemuda)	2
	Cakupan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang (%)	100,00
	Persentase sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi dengan baik (%)	70,00
	Persentase cabang olahraga yang dibina (%)	40,00
	Persentase masyarakat yang rutin berolahraga rekreasi dan tradisional	12,50
	Cakupan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	1
	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	100,00
2.20	Statistik	
	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten (%)	100,00
	Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (Ada/Tidak)	Ada
	Ketersediaan Buku Statistik Daerah (Ada/Tidak)	Ada
	Persentase data SKPD yang dimuat dalam database satu data (%)	100,00
	Ketersediaan data kinerja sektoral dalam SIPD (%)	100,00
2.21	Kebudayaan	
	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan pelestarian dan pengembangan cagar budaya daerah (%)	100,00
	Cakupan pelestarian dan pengembangan sejarah dan tradisi daerah (%)	100,00
	Cakupan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (%)	100,00
	Jumlah even budaya tingkat kabupaten yang diselenggarakan (kali)	2
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1
	Cakupan pembinaan organisasi budaya daerah (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi sanggar seni dalam festival budaya di tingkat provinsi dan nasional (%)	100,00
	Jumlah Desa Peduli Kesenian Daerah (desa)	2
2.22	Perpustakaan	
	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan (%)	5,00
	Cakupan desa yang dikunjungi perpustakaan keliling (%)	20,00
	Cakupan pembinaan perpustakaan sekolah (%)	100,00
	Cakupan pemenuhan kebutuhan pustakawan (%)	100,00
	Desa Gemar Membaca (desa)	2
2.23	Kearsipan	
	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	100,00
	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat SKPD (%)	25,00
	Cakupan pemenuhan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip	100,00
	Cakupan pemeliharaan arsip daerah (%)	100,00
	Cakupan pemenuhan kebutuhan arsiparis (%)	100,00
	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi (%)	10,00
	Urusan Pilihan	
2.24	Kelautan dan Perikanan	
	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00
	Produksi perikanan budidaya (ton)	1.070
	Nilai tukar pembudidaya ikan (skor)	105,60
	Cakupan pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina (%)	20,00
	Jumlah sentra produksi perikanan budidaya yang dikembangkan	1
	Produksi perikanan tangkap (ton)	55.325
	Nilai tukar nelayan (skor)	103,02
	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	100,00
	Cakupan pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina (%)	20,00
	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	1.313,90
	Konsumsi ikan (kg/kapita/orang/tahun)	46,36
	Cakupan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang dibina (%)	20,00
	Jumlah sentra produksi olahan produk ikan yang dikembangkan	2

NO	INDIKATOR	TARGET
2.25	Pariwisata	
	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	285.000
	PAD sektor pariwisata (Rp Juta)	612,93
	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru) (%)	100,00
	Cakupan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah (%)	100,00
	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (%)	20,00
	Kelompok sadar wisata yang berkembang (unit)	2
	Cakupan pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan (%)	100,00
	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (kali)	2
	Cakupan ketersediaan informasi pariwisata dalam situs pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	100,00
2.26	Pertanian	
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00
	Produksi padi (ton)	245.055
	Produksi jagung (ton)	197.520
	Produksi kedelai (ton)	999
	Produksi kacang tanah (ton)	2.129
	Produksi kacang hijau (ton)	181
	Produksi ubi kayu (ton)	20.137
	Produksi ubi jalar (ton)	3.000
	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas tanaman pangan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman pangan (%)	100,00
	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman pangan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	NTP Tanaman Pangan (skor)	104,04
	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00
	Produksi cabai (kuintal)	13.699
	Produksi tomat (ton)	5.857
	Produksi bawang merah (ton)	4.797
	Produksi buah naga (ton)	373
	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas hortikultura unggulan daerah (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman hortikultura (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman hortikultura secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	NTP Hortikultura (skor)	106,09
	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00
	Produksi karet (ton)	8.567
	Produksi kelapa sawit (ton)	19.373
	Cakupan fasilitasi pengembangan dan peremajaan komoditas perkebunan unggulan daerah (%)	100,00
	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman perkebunan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman perkebunan (%)	100,00
	NTP Tanaman Perkebunan	107,12
	Cakupan petani yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00
	Gapoktan yang memiliki lembaga keuangan mikro (unit)	4
	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi produksi pertanian terbaru (unit)	4
	Penerapan Demplot teknologi pertanian (lokasi)	9
	Jumlah kelompok tani baru (pemula) (unit)	95
	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Pemula - Lanjut (unit)	105
	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Lanjut - Madya (unit)	6
	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Madya - Utama (unit)	1
	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok tani (kali per tahun)	21.250
	Cakupan pengadaan sarana dan alat mesin pertanian sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan pemberian saran dan alat mesin pertanian kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	Fasilitasi pengembangan perعتakan sawah/perluasan area tanam (Ha)	2.705
	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan usaha tani (km)	15
	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan produksi (km)	20
	Fasilitasi pengembangan/pembuatan embung (unit)	3
	Fasilitasi pengembangan jaringan irigasi (ha)	500
	Fasilitasi optimalisasi pengelolaan lahan (Ha)	350
	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00
	Cakupan peternak yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00
	Persentase kelompok peternak yang dapat mengembangkan usahanya	16,00
	Cakupan ketersediaan data profil dan potensi pengembangan peternakan (%)	100,00
	Persentase pelaku usaha peternakan binaan yang bermitra dengan pihak lain	12,50

NO	INDIKATOR	TARGET
	Realisasi investasi sektor peternakan (Rp miliar)	10,00
	Cakupan pengadaan sarana dan prasarana peternak sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan pemberian sarana dan prasarana peternakan kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
	Produksi daging sapi (kg)	279.475
	Produksi daging kerbau (kg)	51.725
	Produksi daging kambing (kg)	12.990
	Produksi daging domba (kg)	420
	Produksi daging ayam ras petelur (kg)	1.319.025
	Produksi daging ayam ras pedaging (kg)	7.715.462
	Produksi daging ayam ras buras (kg)	539.293
	Produksi daging itik (kg)	75.301
	Produksi telur ayam ras (kg)	76.031.252
	Produksi telur ayam buras (kg)	2.169.901
	Produksi telur itik (kg)	1.399.578
	Cakupan fasilitasi pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat tepat syarat (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pengembangan pakan ternak unggul bagi peternak	100,00
	Cakupan fasilitasi pendistribusian semen bibit ternak unggul (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pelaksanaan inseminasi buatan (%)	100,00
	Jumlah Desa Lumbung Ternak (desa)	5
	Cakupan fasilitasi pencegahan penyakit ternak (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pemeriksaan penyakit ternak (%)	100,00
	Cakupan pengawasan produk asal hewan di wilayah prioritas (%)	100,00
	Persentase jaminan pangan asal hewan yang ASUH (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan (%)	100,00
	Cakupan pembinaan kelompok pengolah hasil peternakan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pemasaran produk pasca panen hasil peternakan	100,00
	NTP Peternakan (skor)	108,16
2.27	Perdagangan	
	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,00
	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Persentase penyelesaian keluhan konsumen yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan monitoring ketersediaan stok dan harga barang (%)	100,00
	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi peningkatan pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten (%)	100,00
	Cakupan pengembangan BPPMB (%)	100,00
	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah (%)	100,00
	Cakupan pelayanan kemetrolagian daerah (%)	100,00
	Cakupan standarisasi UTTP bidang perdagangan (%)	100,00
	Cakupan pembinaan bagi pedagang kakilima dan asongan (%)	100,00
	Cakupan pembinaan ketertiban dan keindahan pasar daerah (%)	100,00
	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00
	Penerimaan retribusi pelayanan pasar (Rp)	1.181.136.708
	Cakupan ketersediaan data profil pasar daerah (%)	100,00
2.28	Perindustrian	
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,00
	Pertumbuhan jumlah IKM	2,00
	Jumlah IKM berkembang	5
	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	2
	Jumlah sentra industri rakyat	1
	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	10,00
	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK (%)	100,00
	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	10 Unit Usaha
	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha
	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	5 Unit Usaha
	Cakupan fasilitasi rencana pengembangan Kawasan Industri Jorong	100,00
	Jumlah IKM	50
	Jumlah IKM Unggulan	20
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
	Cakupan penyepakatan batas antar kelurahan (%)	50,00
	Cakupan penyepakatan batas wilayah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00
	Peringkat LPPD (skor)	3,0750 (sangat tinggi)
	Skor EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Tanah laut (kategori)	Sangat Tinggi
	Cakupan penyepakatan kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (%)	100

NO	INDIKATOR	TARGET
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ dan LPPD	Tepat Waktu
	Cakupan Fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (kecamatan)	8
	Cakupan pemenuhan IKK (%)	100,00
	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN (%)	100,00
	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD (%)	100,00
	Persentase produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang harmonis, menjamin kepastian hukum dan mengayomi kepentingan daerah dan masyarakat	100,00
	Persentase produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri dan Gubernur (%)	0
	Cakupan penanganan masalah hukum non litigasi (%)	100,00
	Persentase pelayanan bantuan hukum/konsultasi/advokasi hukum bagi aparatur, masyarakat dan pemerintah desa (%)	100,00
	Persentase pelayanan advokasi hukum bidang tindak pidana bagi masyarakat melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100,00
	Persentase terpublikasikannya produk hukum daerah (%)	100,00
	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum (%)	100,00
	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda (%)	100,00
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (74,00)
	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	6,1(Baik)
	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	75 (Kurang Baik)
	Penghargaan inovasi publik (jumlah)	1 penghargaan
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2
	Indeks keterbukaan informasi publik (skor)	69,00
	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD) (%)	10 SKPD
	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan (%)	100,00
	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur (%)	100,00
	Cakupan SKPD Kabupaten Tanah laut yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan (%)	100,00
	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan Pembinaan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) (%)	100,00
	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Manajemen BUMD (Jumlah BUMD yang memenuhi kewajiban minimalnya (%)	100,00
	Cakupan Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi yang terlaksana	100,00
	Persentase Rekomendasi dari TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00
	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan (%)	100,00
	BUMD yang berkembang dan menghasilkan keuntungan (%)	100,00
	Cakupan monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan (%)	100,00
	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE (%)	100,00
	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik (E- Procurement) sesuai standar (%)	100,00
	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa (%)	0
	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa (dokumen)	1
	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai (%)	100,00
	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	100,00
	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syariah Keagamaan (%)	100,00
	Persentase Permohonan Bantuan Hibah yang terlaksana secara tepat syarat (%)	100,00
	Jumlah Guru TPA, Madin, Ponpes dan PAH yang aktif (orang)	3.072
	Cakupan ketersediaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat (%)	100,00
	Cakupan pemberitaan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang terekspos ke media	100,00
	Cakupan kegiatan keprotokolkan KDH/ WKDH/ Kepada SKPD /tamu Daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran (%)	100,00
	Cakupan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti (%)	100,00
	Cakupan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa perkantoran (makanan dan minuman, komunikasi, air, listrik, kendaraan dinas/operasional, dan perlengkapan) untuk kantor dan rumah jabatan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan (%)	100,00
	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan (%)	100,00
	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana /aset milik Sekretariat Daerah yang terkelola dengan baik (%)	100,00
	Cakupan BMD yang telah diappraisal (%)	100,00
	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah (kategori)	Baik
	Persentase SKPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang (%)	100,00
	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada
	Tersedianya Kodifikasi Barang Milik Daerah se-Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET
	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Ada/Tidak)	Ada
	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, penunjang SKPD, dan administrasi keuangan (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00
	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	1 dokumen
	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen
	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	B
	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP
	Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik
	Cakupan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib (%)	100,00
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan (%)	100,00
	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD (%)	100,00
	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai Prolegda (%)	100,00
	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan (%)	100,00
	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi rapat-rapat kegiatan DPRD (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi kegiatan reses dan penyusunan pokok pikiran DPRD (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100,00
	Cakupan informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD	100,00
	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	100,00
	Cakupan penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan umum di kecamatan (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan (%)	100,00
	Cakupan perwakilan desa yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan di kecamatan (%)	100,00
	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (%)	100,00
	Cakupan monitoring dan evaluasi hasil Musrenbang Desa (%)	100,00
	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	11 Kecamatan
	Cakupan pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan SOP (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan profil yang berisi data potensi pengembangan kelurahan (%)	100,00
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kelurahan (%)	100,00
	Cakupan RW yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi di lingkup kelurahan (%)	100,00
	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (%)	100,00
	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lingkup kelurahan (%)	100,00
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan	
	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (kategori)	Baik
	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
	Indeks kinerja TKPKD Kabupaten Tanah Laut (kategori)	Baik
	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00
	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100,00
	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET
	dengan Perda (Ada/Tidak)	
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (ada/Tidak)	Ada
	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100,00
	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100,00
	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra SKPD (%)	100,00
	Cakupan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (%)	100,00
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	
	Cakupan kajian kelitbangan yang disusun menjadi rekomendasi kebijakan daerah (%)	60,00
	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin (%)	10,00
	Cakupan pemanfaatan hasil kajian kelitbangan (%)	100,00
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	
	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (%)	100,00
	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis	100,00
	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (%)	100,00
	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	0
	Persentase peserta ujian dinas yang lulus (%)	100,00
	Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian (%)	100,00
	Cakupan pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural secara tepat syarat (%)	100,00
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas (orang)	50
	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan sistem administrasi kepegawaian secara online	70,00
	Cakupan ketersediaan data aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
	Cakupan ketersediaan pembinaan dan pengembangan karir PNS (%)	100,00
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	11,00
	Pertumbuhan PAD (%)	12,76
	Persentase pelanggaran wajib pajak daerah (%)	5,00
	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah (%)	20,00
	Cakupan ketersediaan sistem informasi pajak daerah (%)	100,00
	Ketersediaan data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak daerah	100,00
	Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB (%)	7,00
	Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (%)	19,83

NO	INDIKATOR	TARGET
	Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi daerah (%)	100,00
	Ketersediaan data potensi penerimaan retribusi daerah (%)	100,00
	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
	Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Berlaku (%)	100,00
	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	100,00
	Persentase SILPA terhadap Belanja APBD (%)	15,00
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	15,00
	Persentase belanja pendidikan 20%	20,09
	Persentase belanja kesehatan 10%	11
	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	55:45
	Persentase SKPD yang menerapkan Laporan Keuangan yang berbasis Akrual (%)	100,00
	Persentase BMD yang sudah dilengkapi persyaratan untuk dipelihara dan dimanfaatkan (%)	89,00
	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat (%)	100,00
	Cakupan penertiban BMD (%)	100,00
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
	Tingkat Maturitas Penerapan SPIP (skor)	3,3 (Berkembang)
	ASPEK DAYA SAING	
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	
	Pengeluaran per kapita penduduk per tahun (Rp)	11.593,70
	Persentase pengeluaran konsumsi makanan (%)	53,21
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
	NTP Tanaman Pangan (skor)	104,04
	NTP Hortikultura (skor)	106,09
	NTP Tanaman Perkebunan	107,12
	NTP Peternakan (skor)	108,16
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	1 : 240
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	60,00
	Kawasan industri yang dikembangkan (kawasan)	1
	Jumlah hotel (unit)	2
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	65,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Fokus Iklim Berinvestasi	
	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100,00
	Jumlah demo	2
	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2 (25)
	Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha (%)	100,00
	Fokus Sumber Daya Manusia	
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	37,50
	Rasio ketergantungan (%)	47,50

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2020 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan

kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Selain itu, RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Juni 2019

BUPATI TANAH LAUT,

H.SUKAMTA